



**Dinas Kesehatan
Provinsi Riau**

Profil Kesehatan Provinsi Riau 2020



www.dinkes.riau.go.id



dinaskesehatan@riau.go.id



Jl. Cut Nyak Dien III



(0761) 23810 - 26032

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau)

KETUA

Elly Hayatinur, SP, M.Kes (Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau)

EDITOR

Achmad Jajuli, SKM, MKM (Kepala Sub Bagian Perencanaan Program)

ANGGOTA

Dwi Sri Rahayu, SKM
Rina Susanti, Amd
Ali Napia, S.Kom
Saryan, Amd
Julhelman, S.Kom
Septian Widiyanto

KONTRIBUTOR

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- Seksi Surveillance dan Imunisasi

Bidang Kesehatan Masyarakat

- Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Bidang Pelayanan Kesehatan

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Kesehatan Tradisional
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

- Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sub Bagian Perencanaan Program

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

Rumah Sakit se Provinsi Riau

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 ini dapat selesai sesuai dengan yang di harapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya, Amiin.



Dalam penyusunan Profil Kesehatan ini tentunya hambatan selalu mengiringi, namun atas bantuan dan kerja sama segenap pengelola program baik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta bimbingan dari pimpinan akhirnya semua hambatan dalam penyusunan profil ini dapat teratasi, untuk itu kami ucapkan banyak terimakasih atasnya.

Dinas Provinsi Riau telah melakukan banyak upaya agar data dan informasi yang disajikan pada Profil Kesehatan Provinsi Riau dapat hadir lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat berharap dengan hadirnya Profil Kesehatan Provinsi Riau 2020 ini, kebutuhan terhadap data dan informasi kesehatan di semua lini, baik institusi Pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan berikutnya.

Semoga profil ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya untuk para pembaca dan tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyusunan profil ini terdapat banyak kesalahan baik dalam kata ataupun isi secara keseluruhan. Kami sadar bahwa dalam profil ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan penyusunan profil kedepan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU



Daftar Isi

Halaman

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	vii
BAB 1 DEMOGRAFI.....	1
A. Kondisi Geografi dan Administrasi.....	1
1. Luas Wilayah.....	2
2. Jumlah Desa/Kelurahan	2
B. Kependudukan	3
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.	3
2. Kepadatan Penduduk/ Km ²	3
3. Rasio Beban Tanggungan.....	5
4. Rasio Jenis Kelamin.....	6
5. Pendidikan	7
BAB II SARANA KESEHATAN	10
A. Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan/ Pengelola.....	10
1. Rumah Sakit.....	10
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).....	16
B. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	23
1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan	23
2. Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan	23
3. Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit.....	24
4. Indikator Kinerja Pelayanan di Rumah Sakit	26
5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin.....	29
C. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.....	30
1. Posyandu	30
2. Posyandu PTM (Penyakit Tidak Menular)	35

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	36
A. Jumlah dan Rasio Tenaga Medis.....	38
1. Rasio Dokter Spesialis	38
2. Rasio Dokter Umum	40
3. Rasio Dokter Gigi	41
B. Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan	43
1. Rasio Tenaga Perawat	43
2. Rasio Tenaga Bidan	44
C. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi	46
1. Tenaga Kesehatan Masyarakat.....	46
2. Tenaga Kesehatan Lingkungan.....	48
3. Tenaga Gizi	49
D. Jumlah dan Rasio Tenaga Keterampilan Fisik , Keteknisan Medik dan Teknik Biomedik	51
1. Tenaga Keterampilan Fisik.....	51
2. Tenaga Keteknisan Medik	52
E. Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian	54
1. Apoteker	54
2. Tenaga Teknis Kefarmasian.....	55
F. Jumlah dan Rasio Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan	57
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN	59
A. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	59
B. Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan	61
C. Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten/ Kota	62
D. Anggaran Kesehatan Perkapita	65
BAB V KESEHATAN KELUARGA	67
A. Kesehatan Ibu.....	67
1. Jumlah dan Angka Kematian Ibu	68
2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil	71
3. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	73
4. Cakupan Pelayanan Nifas	75
5. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	76



6. Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur	77
7. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah	79
8. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan.....	81
9. Peserta Aktif KB.....	82
10. Peserta KB Pasca Persalinan.....	84
B. Kesehatan Anak.....	87
1. Kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	88
2. Kematian Bayi dan Balita per-1.000 Kelahiran Hidup.....	89
3. Penanganan Komplikasi Pada Neonatal	92
4. Cakupan Kunjungan Neonatal.....	93
5. Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini.....	96
6. Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif.....	98
7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	100
8. Persentase Desa/Kelurahan UCI.....	101
9. Anak Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	102
10. Imunisasi BCG Pada Bayi	104
11. Memberikan Vitamin A Pada Bayi dan Anak Balita	105
12. Pelayanan Kesehatan Balita.....	108
13. Balita Ditimbang.....	110
C. Status Gizi Pada Balita	105
1. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U (Berat Badan Sangat Kurang dan Underweight)	112
2. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Sangat pendek dan Berat Badan Pendek – (Stunting).....	114
3. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Gizi Buruk dan Gizi Kurang –(Wasting).....	115
4. Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI, 7 SMP/Mts dan Kelas 10 SMA/MA	118
D. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut.....	119
1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	119
2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.....	121
BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT	122
A. Penyakit Menular Langsung.....	122
1. Tuberkulosis	122

2. HIV dan AIDS	130
3. Pneumonia.....	133
4. Diare	134
5. Kusta/ Lepra	136
6. Kejadian Luar Biasa (KLB).....	140
7. Hepatitis (HbsAg).....	140
B. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	143
1. Campak Mesles Rubella (MR).....	143
2. Acute Flaccid Paralysis (AFP)	144
C. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	145
1. Demam Berdarah Dengue (DBD).....	145
2. Malaria.....	146
3. Filariasis.....	147
4. Rabies (Anjing Gila).....	149
D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular.....	152
1. Hipertensi.....	152
2. Diabetes Militus	154
3. Tumor/ Kanker	154
4. ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)	155
E. Pelayanan Kesehatan Haji.....	156
F. Penyakit Covid	158
BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN	160
A. Air Minum.....	161
B. Jamban Sehat.....	163
C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).....	166
D. Tempat – Tempat Umum	167
E. Tempat Pengelolaan Makanan	169
F. Program Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat	171
G. Program Pengawasan Limbah Fasyankes.....	173



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten /Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 3 : Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Ijazah Tertinggi Yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 4 : Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 5 : Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 6 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 7 : Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit di Provinsi Riau 2020
- Tabel 8 : Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 9 : Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Esensial menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 10 : Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM* menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 11 : Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 12 : Jumlah Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 13 : Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 14 : Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik, Dan Keteknisan Medik di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 15 : Jumlah Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020

- 
- Tabel 16 : Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 17 : Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 18: Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 19 : Anggaran Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 20 : Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 21 : Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 22 : Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 23 : Cakupan Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tahun 24 : Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tahun 25 : Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tahun 26 : Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil Dan Tidak Hamil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 27 : Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Ttd) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 28 : Peserta Kb Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 29 : Cakupan Dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 30 : Jumlah Dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan Dan Komplikasi Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 31 : Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020

- 
- Tabel 32 : Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita Menurut Penyebab Utama di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 33 : Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2020
- Tabel 34 : Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 35 : Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi < 6 Bulan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 36 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 37 : Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 38 : Cakupan Imunisasi Hepatitis B0 (0 -7 Hari) dan BCG pada Bayi menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 39 : Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib 3, Polio 4*, Campak/MR, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 40 : Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib 4 Dan Campak/MR2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (BADUTA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 41 : Cakupan Pemberian Vitamin A Pada Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 42 : Cakupan Pelayanan Anak Balita Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 43 : Jumlah Balita Ditimbang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 44 : Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, Dan BB/TB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 45 : Cakupan Pelayanan Kesehatan (Penjaringan) Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 46 : Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.

- 
- Tabel 47 : Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Pada Anak SD dan setingkat menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 48 : Pelayanan Kesehatan Usia Produktif menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 49 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 50 : Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keluarga menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 51 : Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, Case Notification Rate (CNR) Per 100.000 Penduduk Dan Case Detection Rate (CDR) menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 52 : Angka Kesembuhan Dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 53 : Penemuan Kasus Pneumonia Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 54 : Jumlah Kasus HIV Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.
- Tabel 55 : Jumlah Kasus Dan Kematian Akibat Aids Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 56 : Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 57 : Kasus Baru Kusta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 58 : Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Cacat Tingkat 2, Penderita Kusta Anak<15 Tahun, Penderita Kusta Anak<15 Tahun Dengan Cacat Tingkat 2 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 59 : Jumlah Kasus Terdaftar Dan Angka Prevalensi Penyakit Kusta Menurut Tipe/Jenis di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 60 : Penderita Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RFT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 61 : Jumlah Kasus AFP (Non Polio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 62 : Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

- 
- Tabel 63 : Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 64 : Jumlah Penderita Dan Kematian Pada KLB Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 65 : Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 66 : Kesakitan Dan Kematian Akibat Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 67 : Penderita Kronis Filariasis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 68 : Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 69 : Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 70 : Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (SADANIS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 71 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 72 : Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 73 : Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 74 : Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 75 : Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
- Tabel 76 : Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

Demografi



BAB 1

DEMOGRAFI

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI

Provinsi Riau secara geografis terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional. Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km². Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur-105°05'00" Bujur Timur.

Batas-batas daerah Riau adalah:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

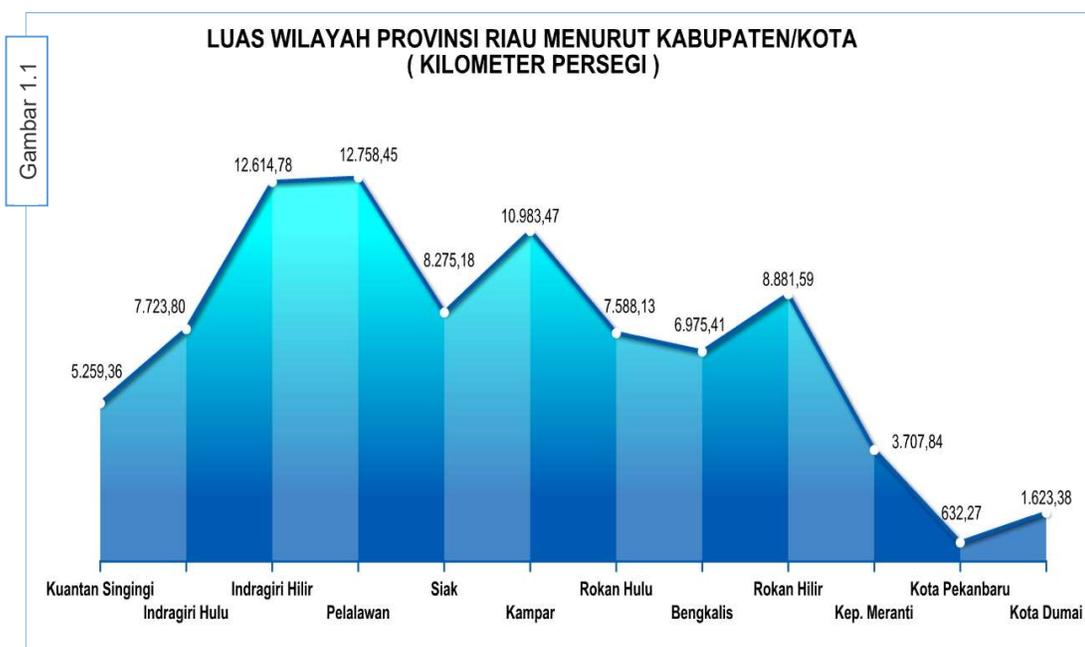


Dari posisi ini kelihatan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi lainnya, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan

memberikan keuntungan bagi Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

1. Luas Wilayah

Provinsi Riau merupakan daerah kepulauan yang dengan luas wilayah 87.023,7 km², dan merupakan Provinsi yang memiliki luas wilayah ke dua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang terluas 12.758,4 km² diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir seluas 12.614,8 km² dan Kabupaten Kampar 10.983,5. Dan Kabupaten/Kota yang luas wilayahnya terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,27 km² dikuti Kota Dumai 1.623,38 km² dan Kabupaten Kepulauan Meranti 3.707,84 km². Gambaran luas wilayah Provinsi Riau berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



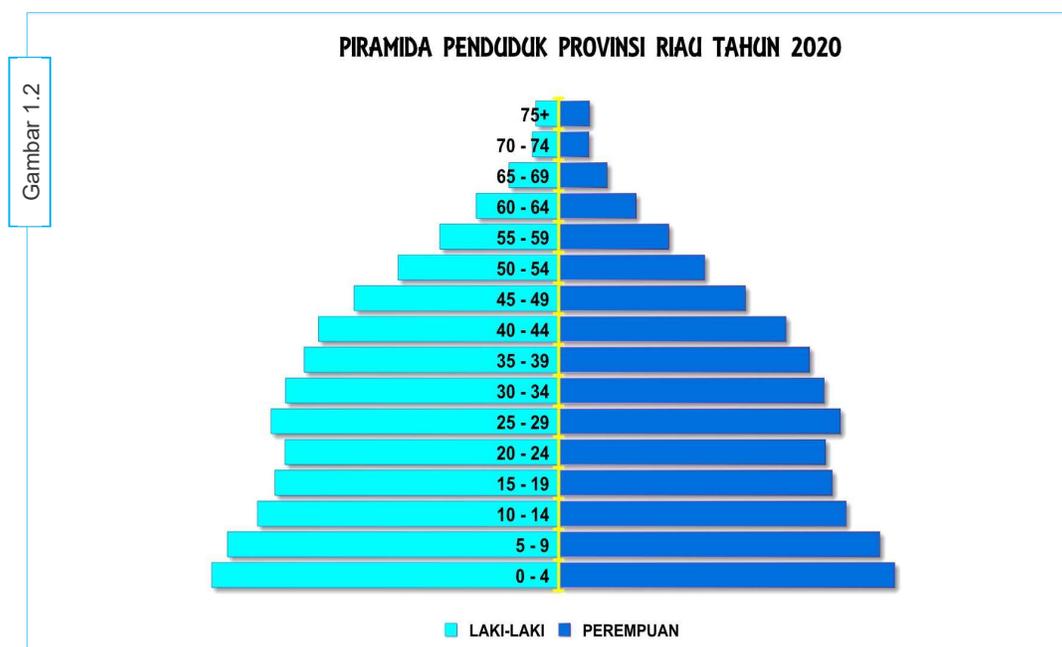
2. Jumlah Desa/Kelurahan

Secara administratif Provinsi Riau terbagi menjadi 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan Kecamatan 169 Kecamatan meliputi Desa / Kelurahan 1.876 Desa/Kelurahan dimana Kabupaten Kampar dengan kecamatan terbanyak (21 kecamatan) dan Kabupaten Kampar dengan Kelurahan / Desa terbanyak (250 kelurahan/Desa). Sedangkan Kota Dumai dengan kecamatan paling sedikit (7 kecamatan) dengan Kelurahan/Desa (33 kelurahan), 1609 desa, 267 kelurahan.

B. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Hasil proyeksi penduduk tahun 2020 juga memperlihatkan perbedaan komposisi penduduk berdasarkan gender yaitu terdiri dari 3.653.963 laki-laki dan 3.474.42 perempuan. Berdasarkan Gambar dibawah ini dapat dilihat bentuk piramida penduduk Provinsi Riau tahun 2020 masih bertipe ekspansif, di mana penduduk muda menunjukkan proporsi yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi (bagian tengah cembung). Sedangkan badan piramida yang besar, menunjukkan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif yang besar.



2. Kepadatan Penduduk/km2

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu wilayah, tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi suatu beban bagi wilayah itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan berbagai masalah yang dapat menghambat pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah-masalah terutama yang menyangkut tentang penyediaan berbagai kebutuhan, termasuk juga di dalamnya pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan objek juga merupakan subjek pembangunan. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan proyeksi BPS tahun 2020 adalah 7.128.305 jiwa, Bila dibandingkan dengan sensus maupun survei penduduk sebelumnya, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu 20 tahun yaitu dari tahun 2000 hingga 2020.

Wilayah Provinsi Riau semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 kepadatan penduduk Provinsi Riau sebesar 43 jiwa per kilometer persegi dan angka ini meningkat terus hingga mencapai 82 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020.

Sedangkan Penyebaran penduduk di Provinsi Riau tidak merata, sebagian besar penduduk Provinsi Riau bertempat tinggal di kota Pekanbaru 1.849 jiwa/km² mengingat Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, kota ke dua yang memiliki penduduk yang padat adalah Kota Dumai 194 jiwa/km² sebagai kota pelabuhan dan penghasil minyak bumi dan selanjut kabupaten Rokan Hulu 95 jiwa/km² yang berbatasan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan daerah yang penduduknya sangat jarang adalah Kabupaten Pelalawan 40 jiwa/km² dan Kabupaten Kep. Meranti 50 jiwa/km² dan Kabupaten Indragiri Hulu 58 jiwa/km². Untuk melihat gambaran kepadatan penduduk di Provinsi lihat dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

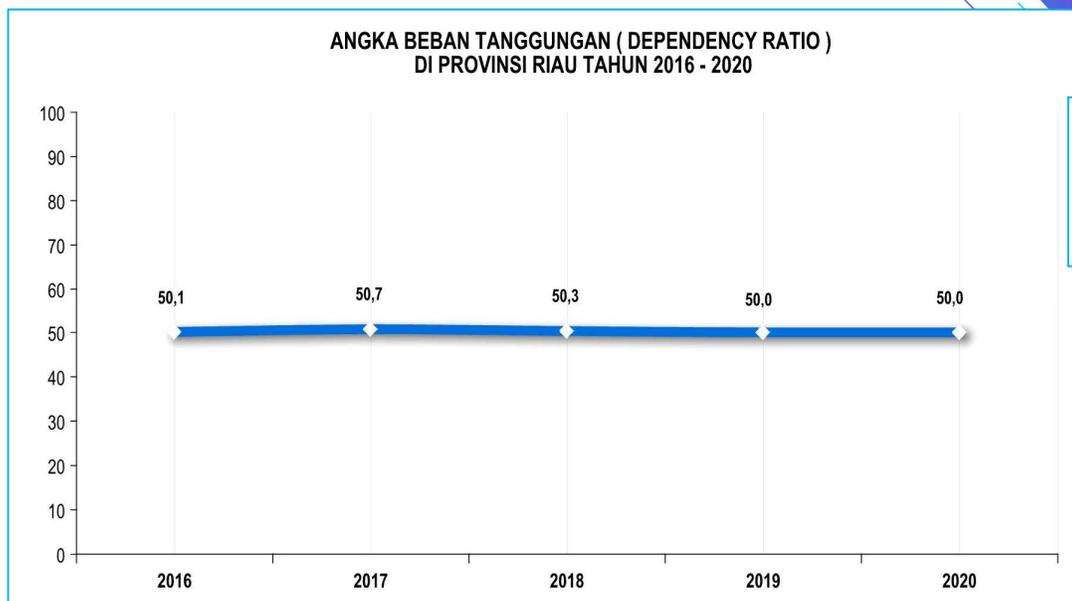


Masalah kependudukan lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh berbagai hal antara lain letak geografis, iklim/cuaca, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan penduduk dan faktor sosial budaya atau adat istiadat wilayah setempat. Tidak meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai masalah seperti meningkatnya jumlah pengangguran, munculnya permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai serta masalah-masalah sosial lainnya.

3. Rasio Beban Tanggungan

Pengelompokan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan. Usia produktif itu sendiri adalah penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga penduduk usia kerja) yang dapat masuk ke pasar kerja dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan penduduk usia kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tingginya persentase penduduk usia produktif merupakan potensi sumber daya manusia bagi Provinsi Riau. Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif ini menunjukkan rasio beban tanggungan.

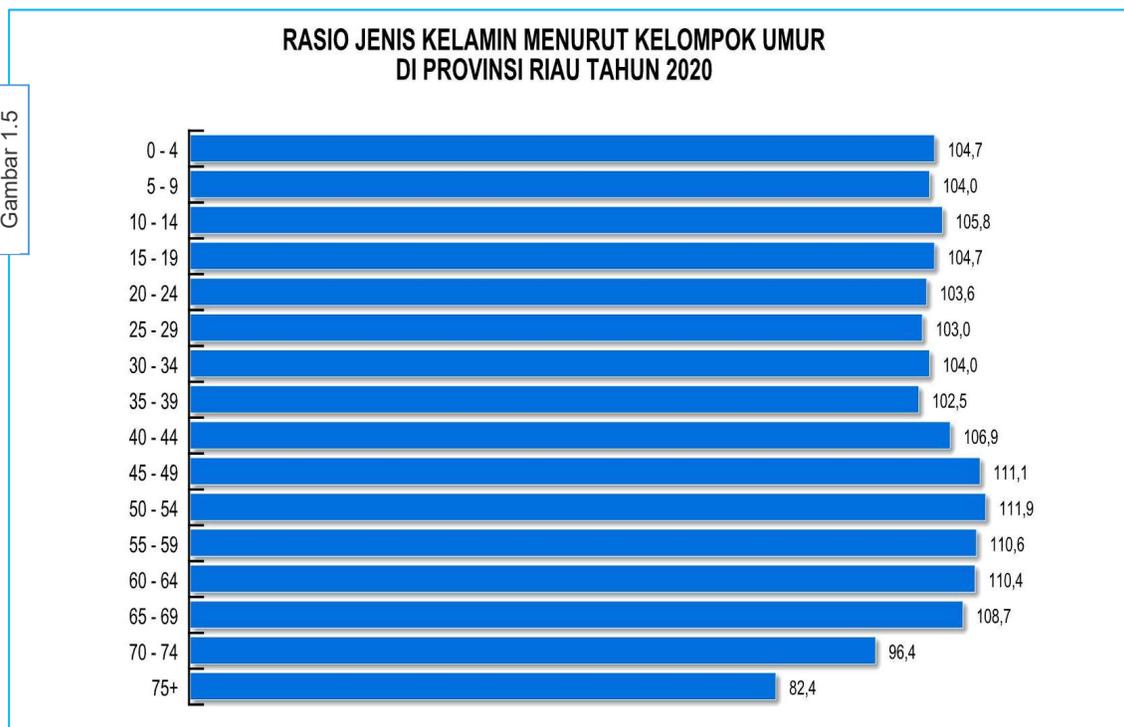
Struktur umur penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk usia produktif dan Struktur penduduk tersebut mempengaruhi angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) Provinsi Riau. Pada periode 2016-2020, angka beban tanggungan (*dependency ratio*) di Provinsi Riau terus mengalami penurunan dimana tahun 2016 (50,1) turun menjadi 2020 (50,00). ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 50 penduduk usia tidak produktif. Hal ini menunjukkan Provinsi Riau belum mengalami era bonus demografi. Bonus demografi terjadi pada keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia nonproduktif atau angka beban ketergantungan di bawah 50.



Gambar 1.4

4. Rasio Jenis Kelamin

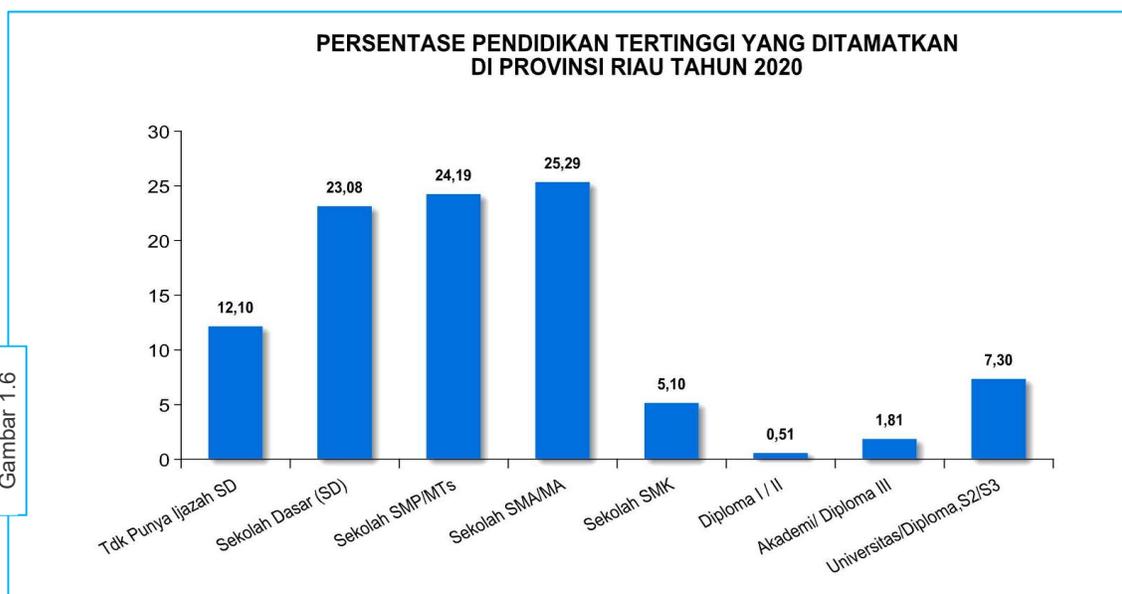
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas penduduk laki-laki dan perempuan disebut rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 105,17. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 105 penduduk laki-laki atau dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah gambaran rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur di tahun 2020



Gambar 1.5

5. Pendidikan

Pada tahun 2020 ini penduduk Provinsi Riau memiliki ijazah tertinggi pada tingkat SMA/MA sebesar 25,92. Sedangkan pada tahun 2020 penduduk yang memiliki ijazah tertinggi adalah tamat Sekolah Dasar sebesar 12,10. Ini artinya penduduk Provinsi Riau yang berpendidikan Sekolah dasar semakin tahun berkurang dan hal sangat baik untuk pembangunan Provinsi Riau. Sedangkan penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Diploma atau lulusan Universitas tahun 2020 sebesar 9,62 Sedangkan untuk persentase tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Riau bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

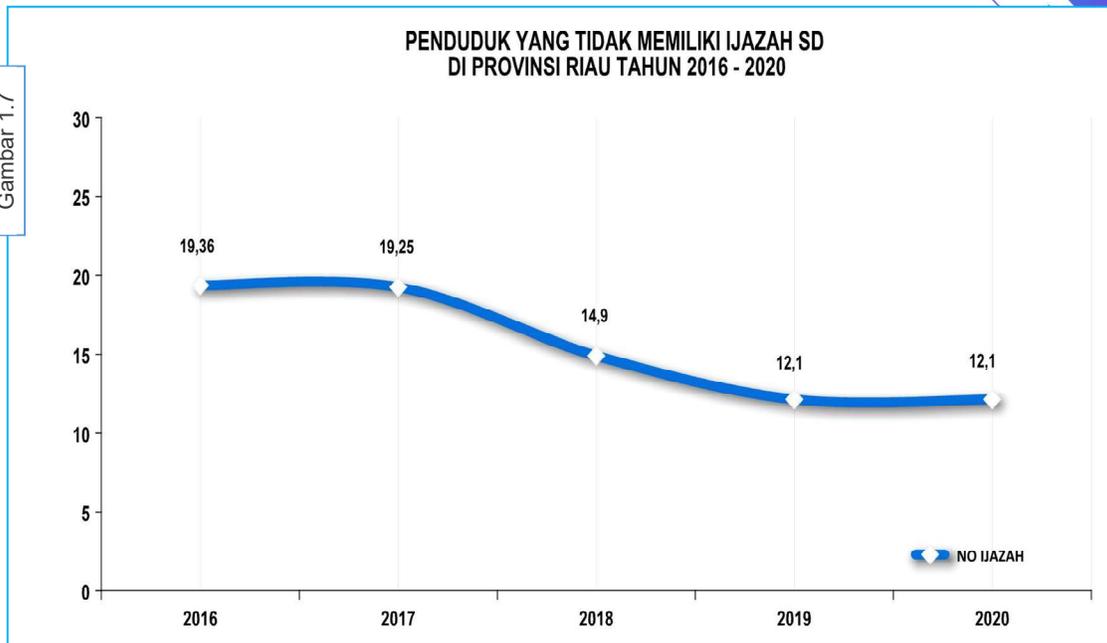


Gambar 1.6

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expexted Years of Schooling - EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Riau berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yaitu 13,20 tahun dan rata-rata lama sekolah 9,03. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Ini artinya anak-anak sekolah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

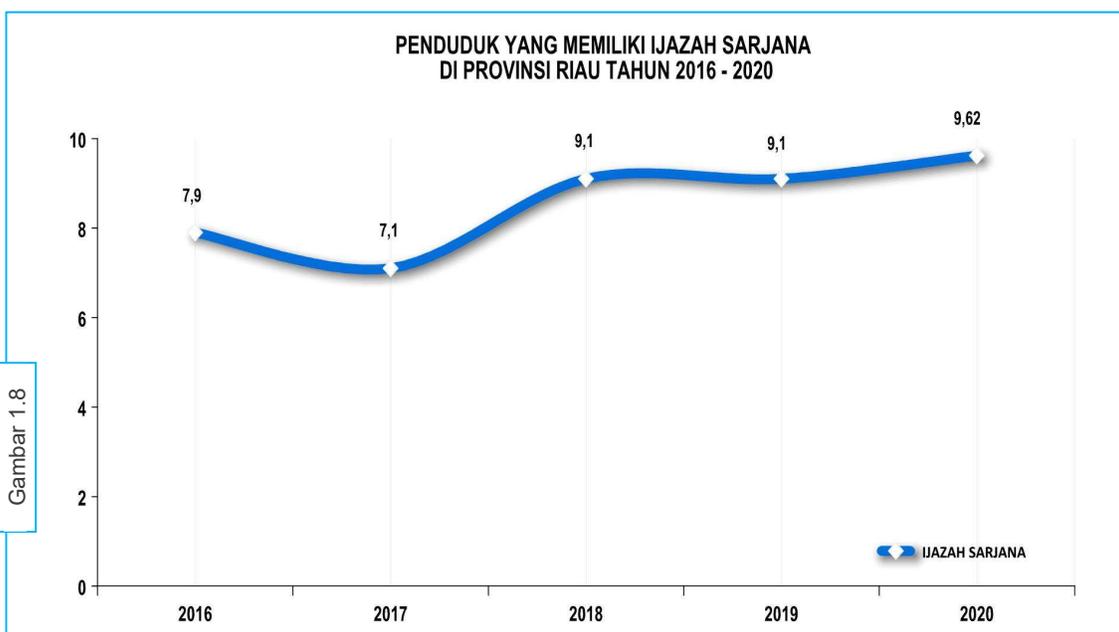
Akan tetapi, masih ada sebagian penduduk yang belum merasakan lamanya sekolah sesuai angka Harapan Lama Sekolah tersebut yang ditandai dengan tidak memiliki ijazah SD sebanyak 12.10 % penduduk. Untuk jelasnya gambaran penduduk Riau dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

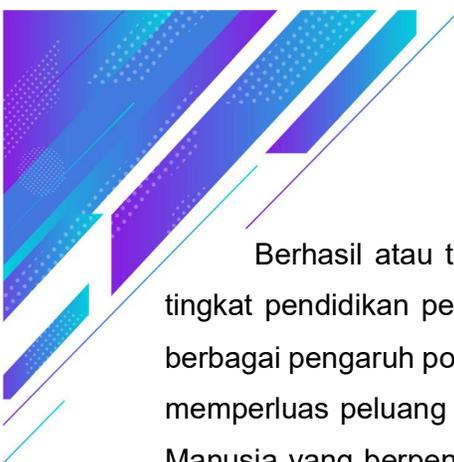
Gambar 1.7



Sedangkan untuk penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 9,62. Penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 7,9 dan pada tahun 2020 sebesar 9,62. Ini artinya penduduk Provinsi Riau sudah memahami bahwa pendidikan itu penting, ditandai dengan adanya peningkatan penduduk yang telah menamatkan Pendidikan Universitas. Gambaran penduduk yang memiliki ijazah sarjana selama 5 (lima) tahun 2016 - 2020 di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.8





Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar bisa hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

*

Sarana Kesehatan



BAB 2

SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari: Puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

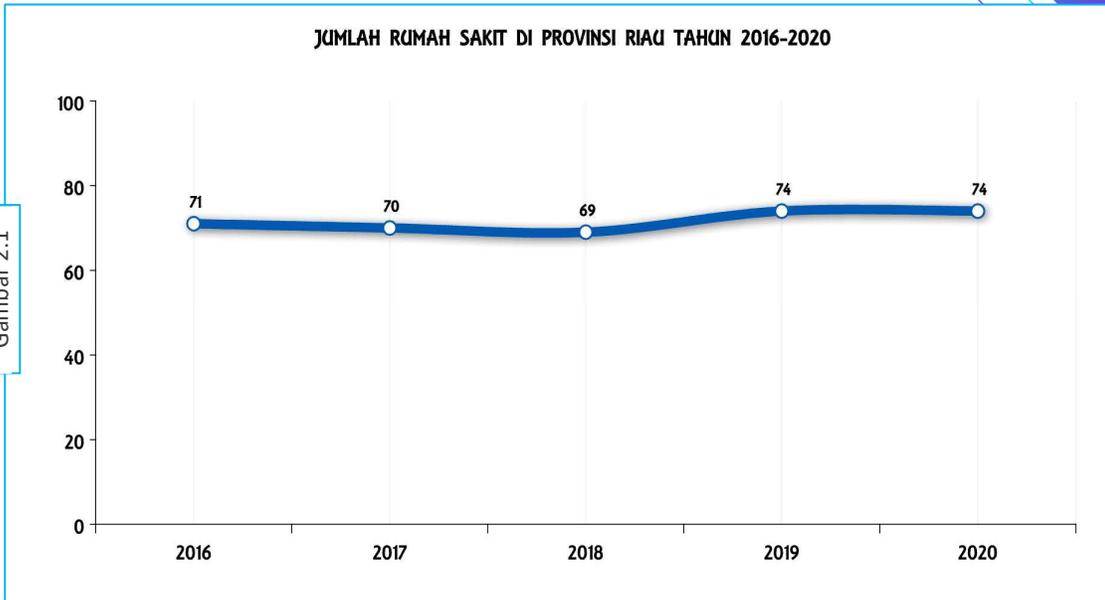
A. SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN / PENGELOLA

1. Rumah Sakit

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotive dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitative. Rumah Sakit (RS) merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang utamanya menyelenggarakan upaya kuratif dan rehabilitative. Rumah Sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan paripurna, diklat, dapat juga melakukan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

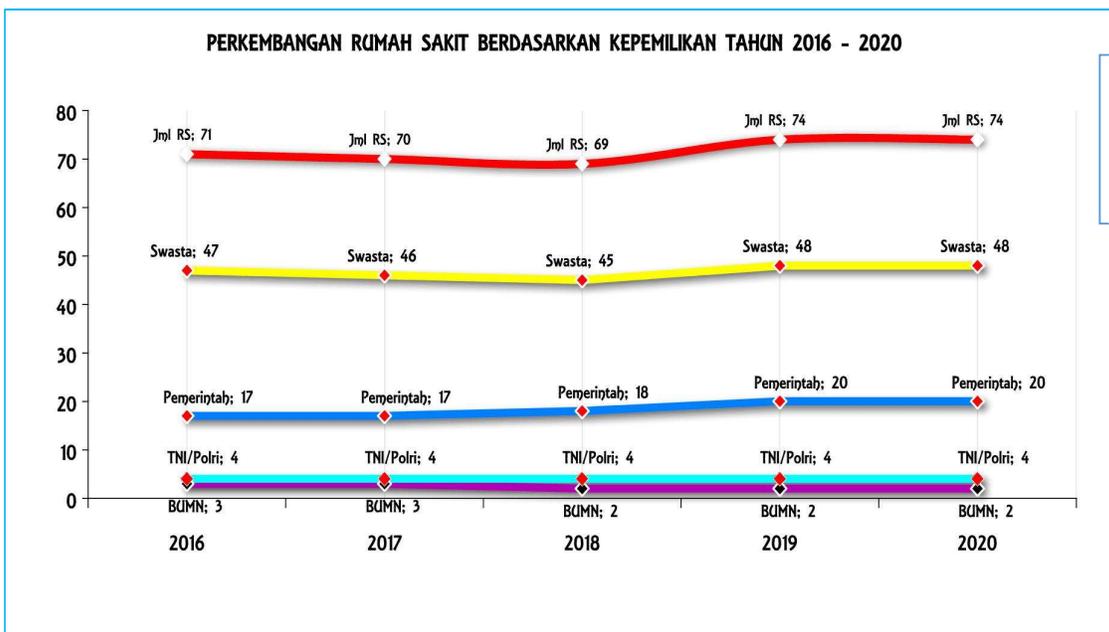
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020) jumlah Rumah Sakit baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 terdapat 71 Rumah Sakit bertambah menjadi 74 Rumah Sakit pada tahun 2020. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2016 -2020) cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2017 dan tahun 2018 yang mengalami pengurangan 1 Rumah Sakit Swasta dibandingkan tahun 2016. Untuk Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau terus mengalami perkembangan terutama Kota Pekanbaru, hal ini seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru. Jumlah Rumah Sakit di Kota Pekanbaru sangat jauh perbandingannya dengan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

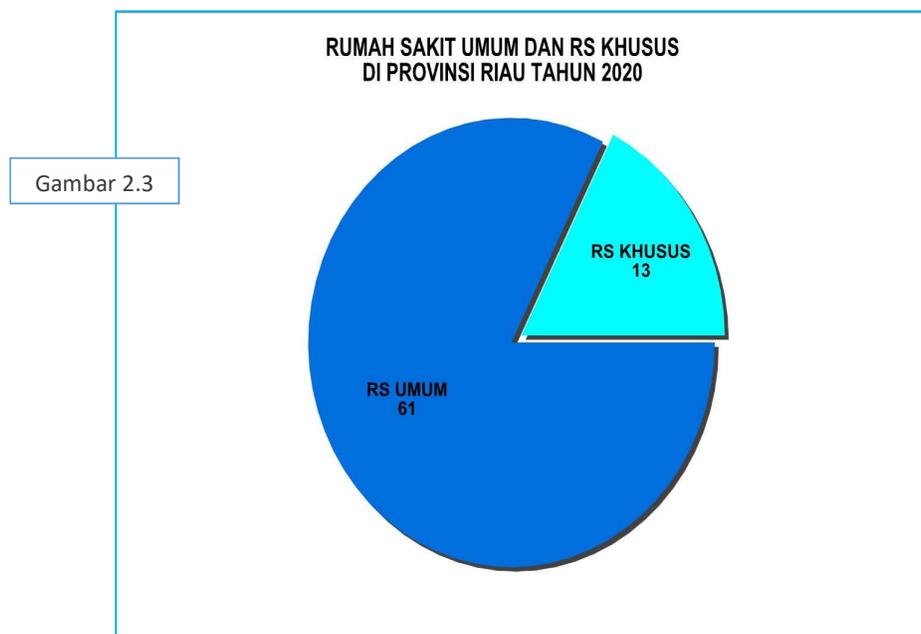


Rumah Sakit Publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah Rumah Sakit Publik di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sebanyak 24 unit. Berbeda dengan Rumah Sakit publik, Rumah Sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2020 terdapat 50 unit Rumah Sakit privat di Provinsi Riau. Rumah Sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, namun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.2

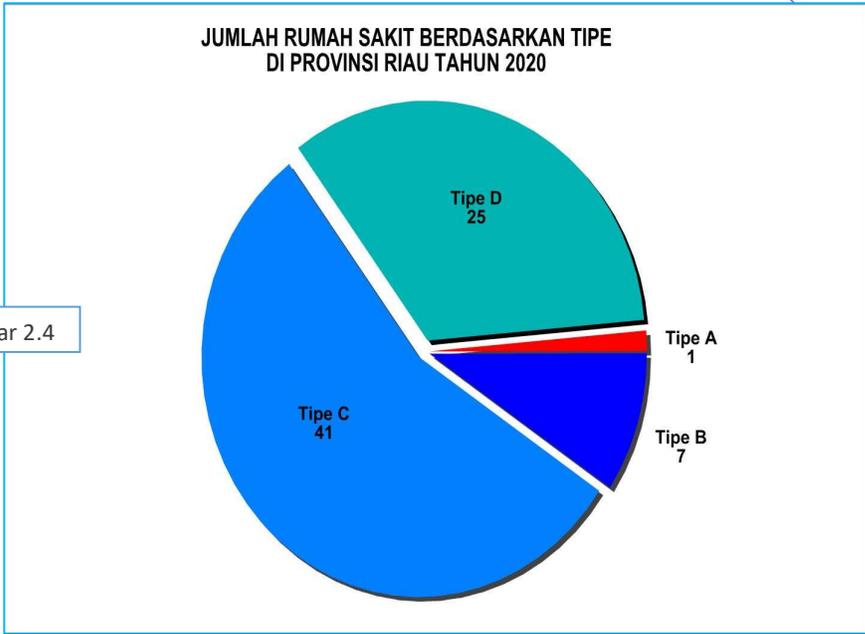


Bila Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan dua kategori maka di tahun 2020 Rumah Sakit umum ada sebanyak 82% (61) sedangkan untuk Rumah Sakit khusus sebanyak 18% (13) yang tersebar diseluruh Provinsi Riau. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Perbandingan antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat dalam diagram dibawah ini :



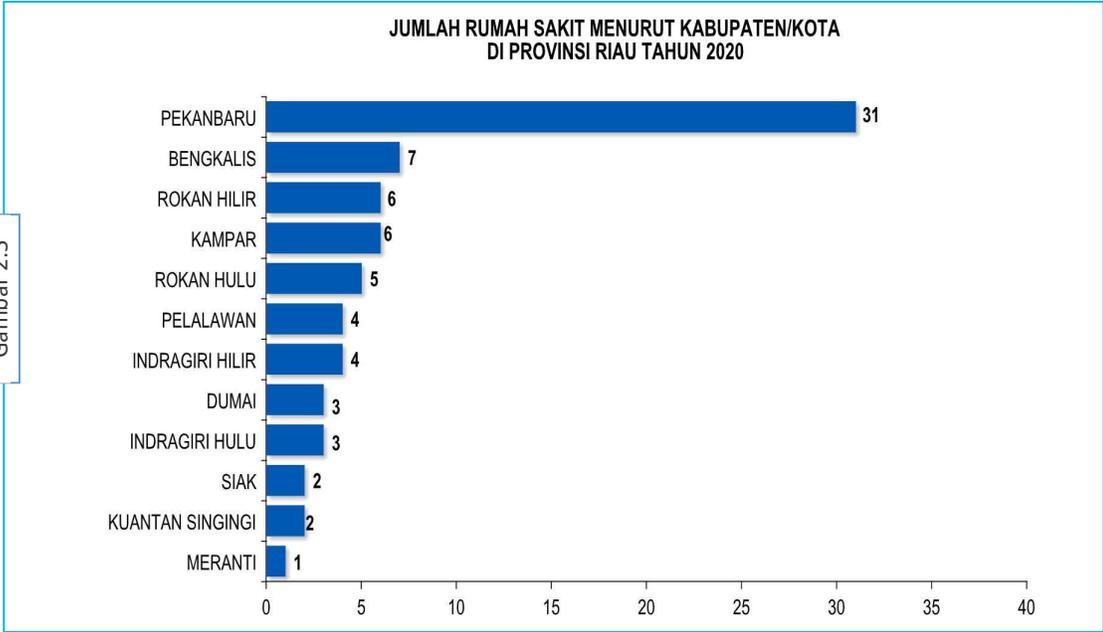
Kemudian bila dilihat Rumah sakit berdasarkan tipe, Diagram dibawah ini menyajikan tentang tipe Rumah Sakit berdasarkan fasilitas kesehatan dan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membuat rumah sakit terbagi menjadi 4 tipe yakni tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Tahun 2020 dari seluruh jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah 74 rumah sakit, terdapat 25 Rumah Sakit tipe D, 41 Rumah Sakit tipe C, 7 Rumah Sakit tipe B dan 1 Rumah Sakit tipe A.

Gambar 2.4



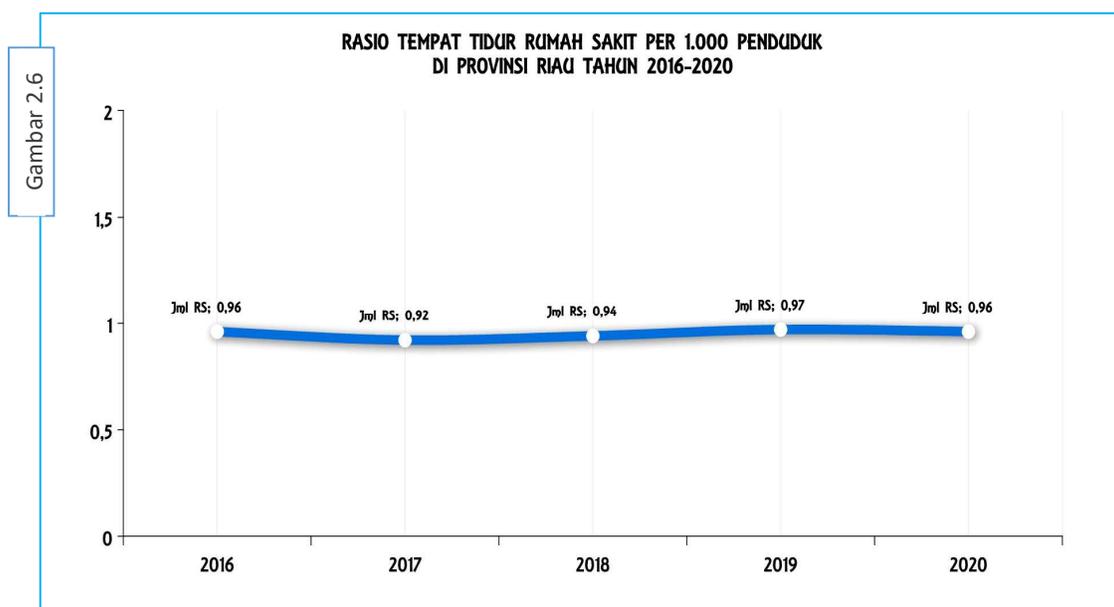
Penyebaran Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2020 terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 31 unit kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 7 Rumah Sakit dan kabupaten Rokan Hilir sebanyak 6 Rumah Sakit sedangkan Kabupaten yang paling sedikit Rumah Sakitnya adalah Kabupaten Siak, Kuantan Singingi masing-masing 2 Rumah Sakit, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling sedikit memiliki masing 1 Rumah Sakit. Penyebaran Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.5

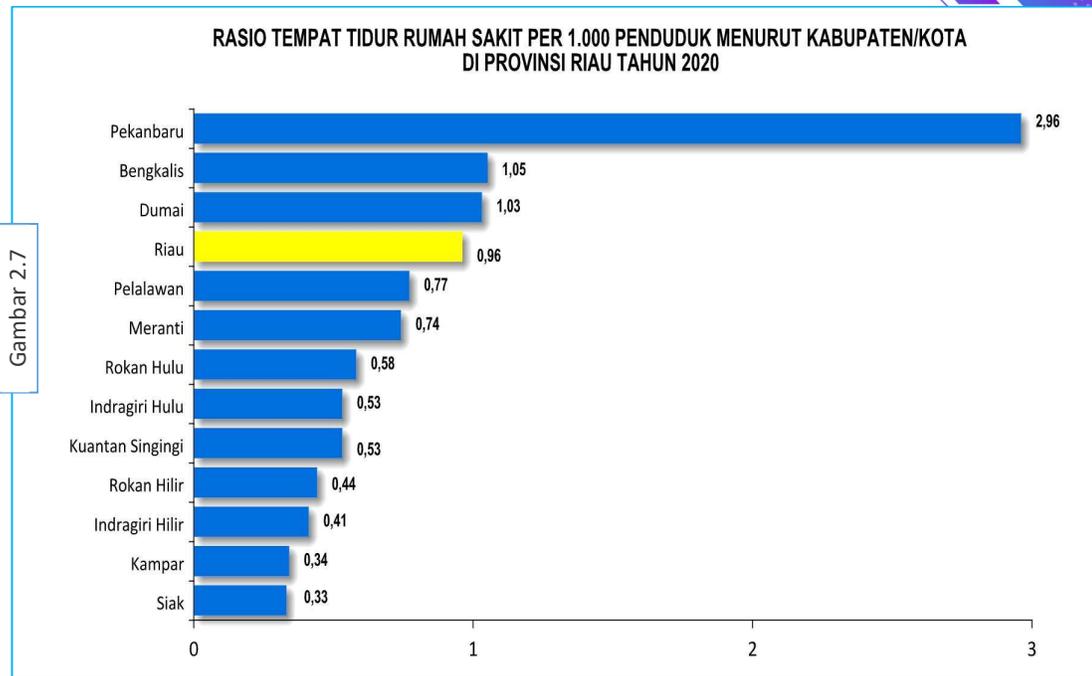


Sedangkan untuk jumlah dan rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk dapat menggambarkan kemampuan Rumah Sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.

Gambaran Rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2020 sebesar 0,96 per 1.000 penduduk mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya tahun 2019 sebesar 0,97 per 1.000 penduduk. Grafik dibawah ini menyajikan rasio tempat tidur per 1.000 penduduk di Rumah Sakit Provinsi Riau kurun waktu lima tahun yakni pada tahun 2016 - 2020.



Meskipun rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2020 sebesar 0,96 per 1.000 penduduk mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hanya 3 kabupaten/kota yang rasio tempat tidurnya mencapai 1 yakni Kota pekanbaru 2, 96, Kabupaten Bengkalis 1,05 dan Kota Dumai 1,03. Tingginya rasio di Kota pekanbaru disebabkan jumlah Rumah Sakit yang sebagian besar berada di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya gambaran rasio tempat tidur di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.7

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (*Cardio–Pulmonary–Cebra–Resucitation*) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support/BLS*) dan Bantuan Hidup Lanjut (*ALS*).

Sarana kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah bersalin, puskesmas, dan Rumah Sakit baik Rumah Sakit umum, jiwa maupun khusus. Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Untuk Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2020 telah mencapai 100% baik Rumah Sakit khusus maupun Rumah Sakit umum.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

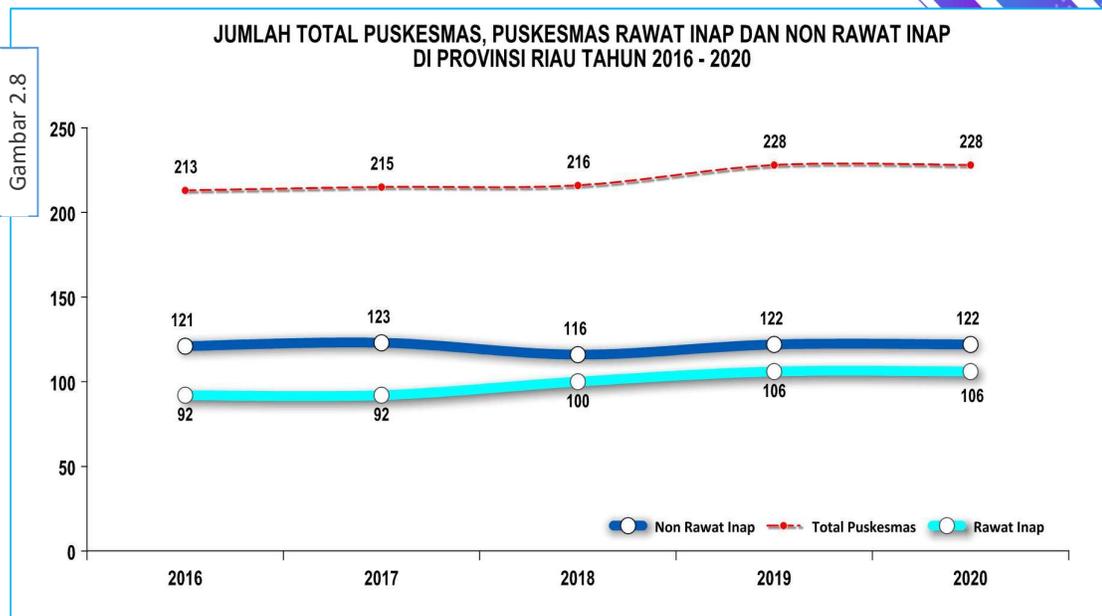
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain melaksanakan tugas tersebut, puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

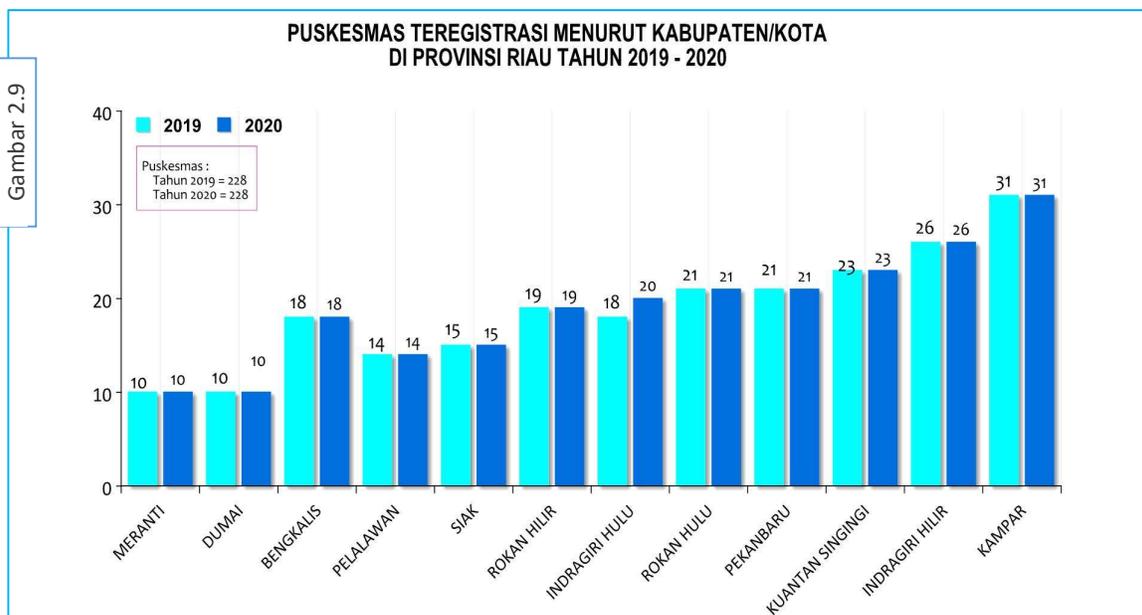
Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib terdiri dari : (1) Upaya promosi kesehatan; (2) Upaya kesehatan lingkungan; (3) Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana; (4) Upaya perbaikan gizi; (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) Upaya pengobatan.

Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau sampai dengan Bulan Desember 2020 sebanyak 228 unit yang sudah teregistrasi. Jumlah tersebut terdiri dari 106 unit puskesmas rawat inap dan 122 unit puskesmas non rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut .



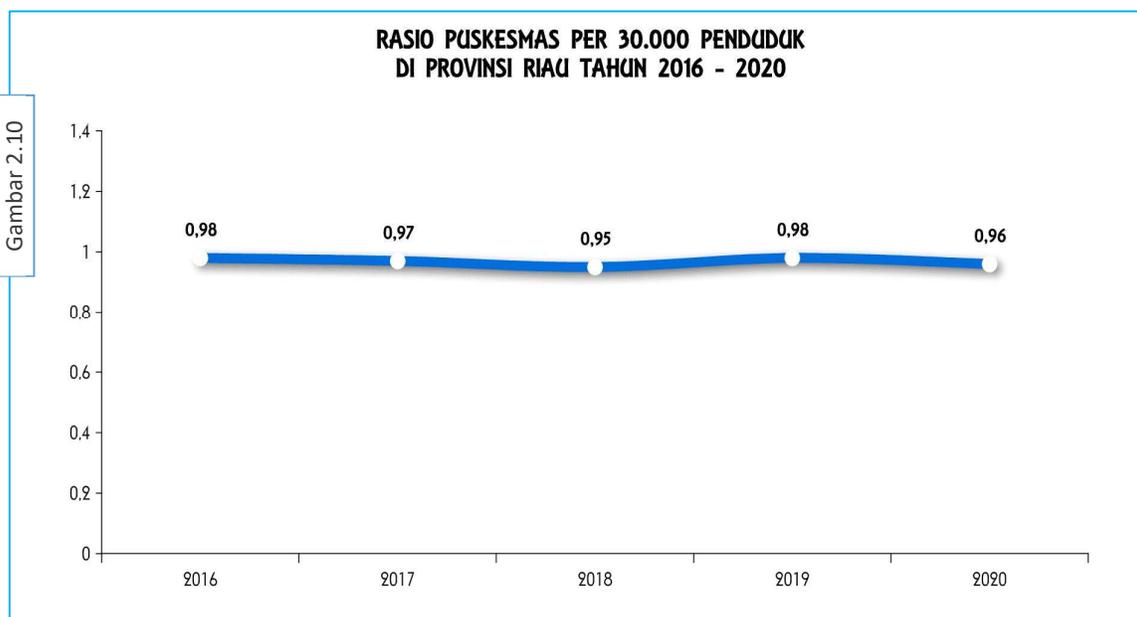
Gambar grafik diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jumlah Puskesmas di Provinsi Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, walaupun peningkatan yang terjadi hanya sedikit. Peningkatan jumlah Puskesmas ini tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan Puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Perkembangan Puskesmas di Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 – 2020 memperlihatkan bahwa jumlah Puskesmas non rawat inap lebih besar dari jumlah Puskesmas rawat inap.



Bila dilihat dari gambar diatas, untuk penyebaran Puskesmas di kabupaten/kota Provinsi Riau pada tahun 2020 maka Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang memiliki jumlah paling banyak Puskesmasnya sebanyak 31 unit, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 26 unit dan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 23 unit. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah paling sedikit Puskesmasnya adalah Kabupaten Kep. Meranti dan kota Dumai masing-masing memiliki 10 unit. Jumlah Puskesmas di Provinsi Riau tahun 2019 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tidak adanya penambahan Puskesmas pada tahun 2020 .

Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar kemampuan Puskesmas dalam mencukupkan kebutuhan pelayanan kesehatan primer terhadap masyarakat adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Bila diperhatikan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2020 masih kurang dari 1 dan angka ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana dari 0,96 di tahun 2019 menjadi 0,98

Penurunan rasio Puskesmas ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan pertumbuhan penduduk ini belum seiring sejalan dengan jumlah pembangunan Puskesmas yang baru. Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.10

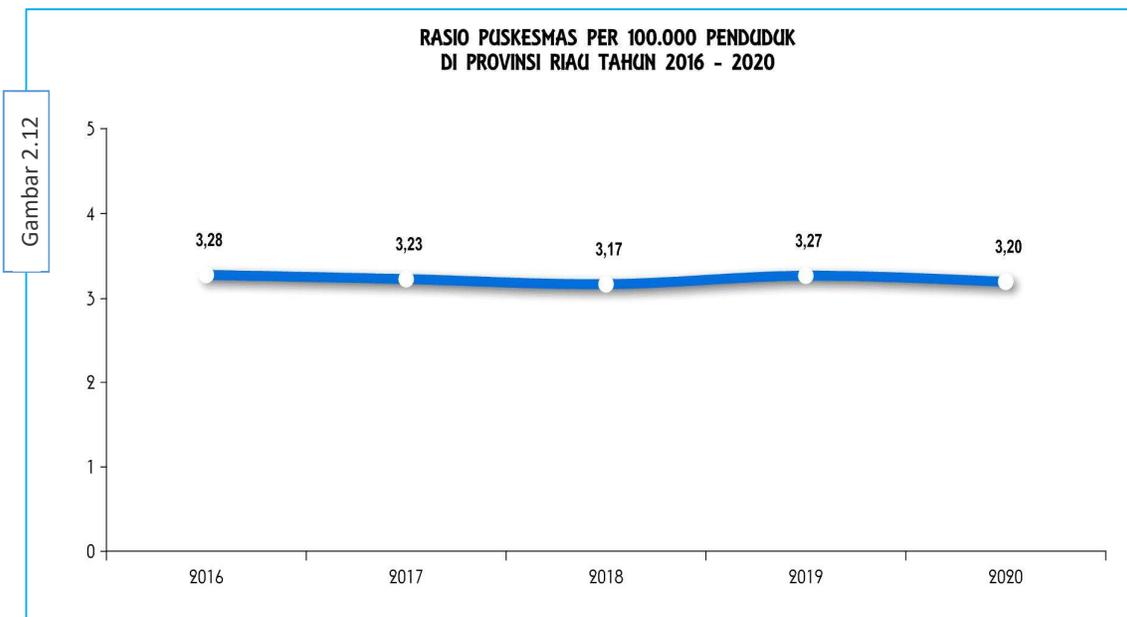
Meskipun rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Riau belum mencapai 1, namun untuk melihat rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dalam grafik dapat terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memiliki angka rasio Puskesmas tertinggi terletak di kabupaten Kuantan Singingi sebesar 2,09 per 30.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti 1,61 per 30.000 penduduk dan Kabupaten Indragiri Hulu 1,33 per 30.000 penduduk. Sedangkan Kota Pekanbaru memiliki rasio terendah sebesar 0,54 per 30.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir 0,78 per 30.000 penduduk dan Kabupaten Pelalawan 0,83 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk ini masih belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas.

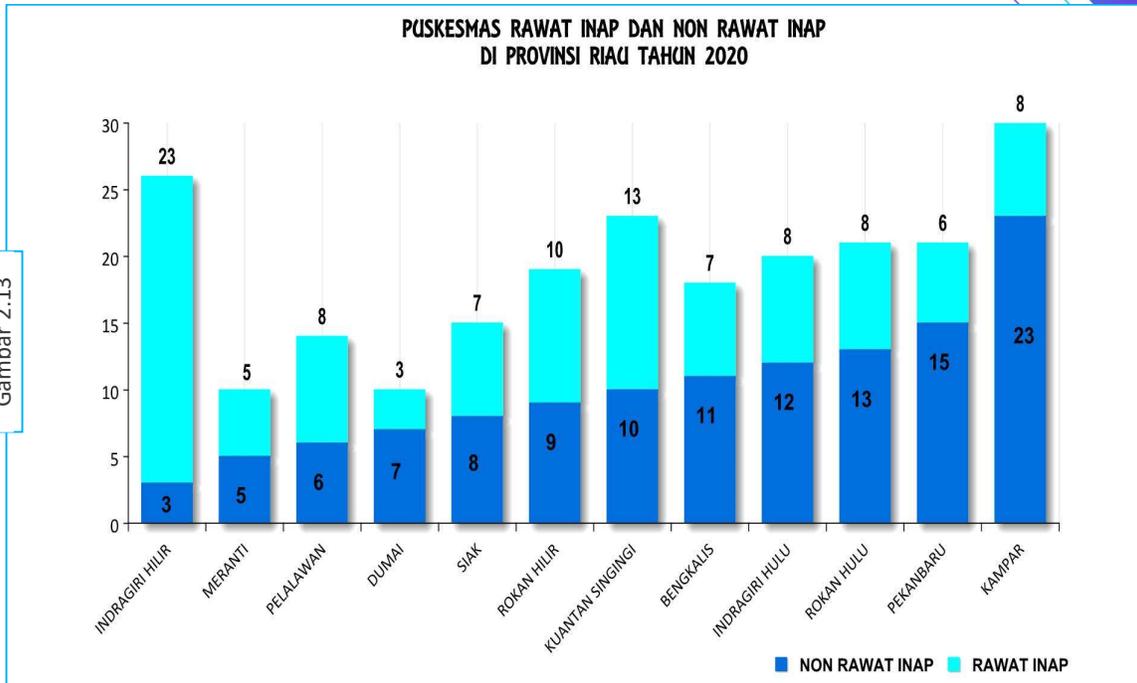
Angka rasio pada grafik diatas menunjukkan bahwa satu Puskesmas rata-rata memberikan pelayanan kesehatan kepada 30.000 penduduk. Dan saat ini masih ada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang melayani lebih dari 30.000 penduduk karena rasio Puskesmasnya masih kurang dari 1. Untuk mengatasi hal tersebut dimungkinkan untuk diadakan penambahan Puskesmas, meskipun di tujuh Kabupaten/Kota tersebut banyak fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, namun yang perlu mendapat perhatian adalah fungsi Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sedangkan untuk rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau maka rasio Puskesmas di Provinsi Riau ini adalah sebesar 3,20. Ini artinya untuk 100.000 penduduk di Provinsi Riau dilayani sekitar 3 puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau terus mengalami penurunan selama 5 tahun dimana sejak tahun 2016 (3,28 per 100.000 penduduk) sampai tahun 2020 (3,20 per 100.000 penduduk) mengalami penurunan. Walaupun rasio Puskesmas secara Provinsi Riau terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir namun rasio tersebut sudah mencapai rasio yang ideal tetapi rasio ini tidak memberikan gambaran untuk rasio Puskesmas di Kabupaten/Kota.



Dalam meningkatkan upaya mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, sudah ada beberapa Puskesmas yang telah ditingkatkan statusnya dimana awalnya Puskesmas tersebut non perawatan menjadi Puskesmas perawatan. Peningkatan jumlah Puskesmas perawatan tidak hanya mengutamakan upaya kuratif tetapi juga tetap menyelenggarakan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif yang telah terbukti mempunyai daya ungkit yang lebih besar terhadap derajat kesehatan masyarakat, bila diselenggarakan secara baik, melibatkan secara aktif masyarakat, konsisten, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah Puskesmas perawatan dan non perawatan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2020 dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13



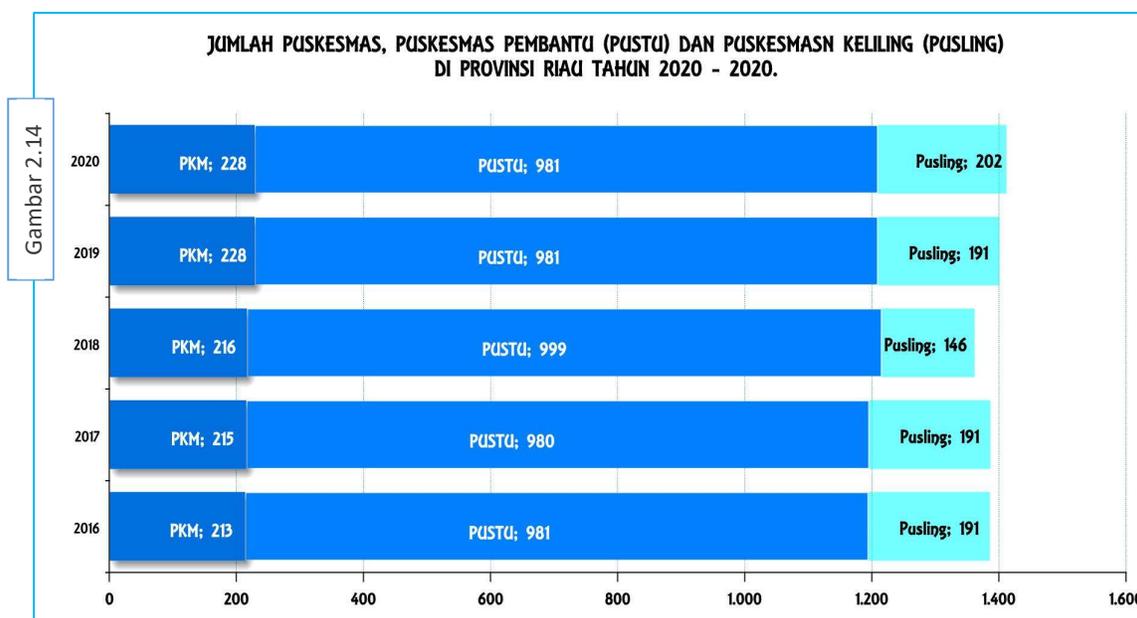
Pada grafik diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah terbanyak Puskesmas Rawat Inap tahun 2020 ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 23 unit Puskesmas dan jumlah terendah di Kota Dumai sebanyak 3 unit Puskesmas. Sedangkan Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah terbanyak Puskesmas Non Rawat Inap tahun 2020 ada di Kabupaten Kampar sebanyak 23 unit Puskesmas dan jumlah terendahnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 3 unit Puskesmas.

Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan secara merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Untuk itu Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas juga dibantu oleh satu atau beberapa Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Jenis dan kualitas upaya pelayanan kesehatan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia di Pustu.

Puskesmas keliling adalah Puskesmas yang melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yang tidak dapat mengunjungi puskesmas induk atau puskesmas pembantu. Kegiatan puskesmas keliling bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif. Selain itu puskesmas keliling juga bertujuan untuk melakukan monitoring pelayanan petugas puskesmas pembantu sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Adapun agenda kegiatan saat pelaksanaan puskesmas keliling antara lain Penyuluhan-penyuluhan, pelatihan kader posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia, Kemitraan bidan dan dukun, Kelas ibu hamil, UKS, desa Siaga dan kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan kampung yang akan dikunjungi. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling sangat berperan penting dalam meningkatkan akses peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, seperti pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi: pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*). Perkembangan jumlah Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Riau pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan jumlah

Puskesmas keliling yang mengalami penurunan, dimana Puskesmas keliling tahun 2019 berjumlah 191 unit meningkat menjadi 202 unit pada tahun 2020.

B. Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan & Rawat Inap Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Cakupan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat jalan ini meliputi kunjungan rawat jalan di Puskesmas, kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit. Cakupan kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 60,2% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 85,3% dan tahun 2018 (99,8%) .

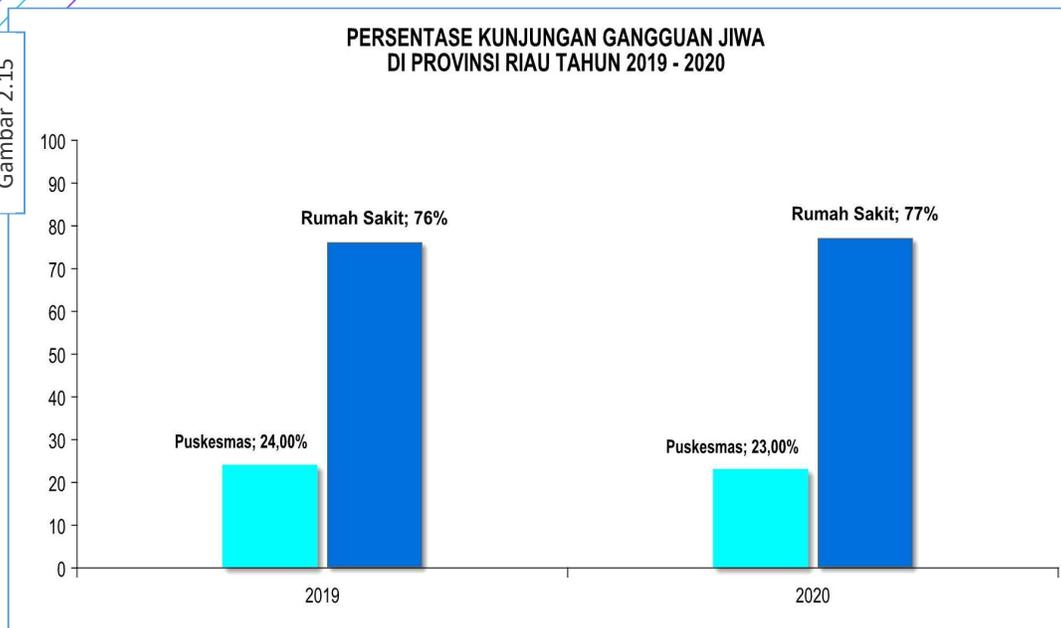
Sedangkan Cakupan rawat inap adalah cakupan kunjungan rawat inap baru di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan rawat inap ini meliputi kunjungan rawat inap di Puskesmas, kunjungan rawat inap di Rumah Sakit, dan kunjungan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan lain. Cakupan rawat inap di sarana kesehatan di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 6,3% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,5% dan tahun 2018 sebesar 4,2%.

2. Kunjungan Gangguan Jiwa Di Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelayanan gangguan jiwa adalah pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. Data yang masuk untuk pelayanan kesehatan jiwa di RS berasal dari Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum yang mempunyai klinik jiwa. Permasalahan yang ada saat ini adalah tidak semua Rumah Sakit Umum mempunyai pelayanan klinik jiwa karena belum tersedia tenaga medis jiwa dan tidak banyak kasus jiwa di masyarakat yang berobat di sarana pelayanan kesehatan.

Dari permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pembinaan program kesehatan jiwa di sarana kesehatan Pemerintah dan swasta, pelatihan/refreshing bagi dokter dan paramedis Puskesmas terutama upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program kesehatan jiwa.

Gambar 2.15



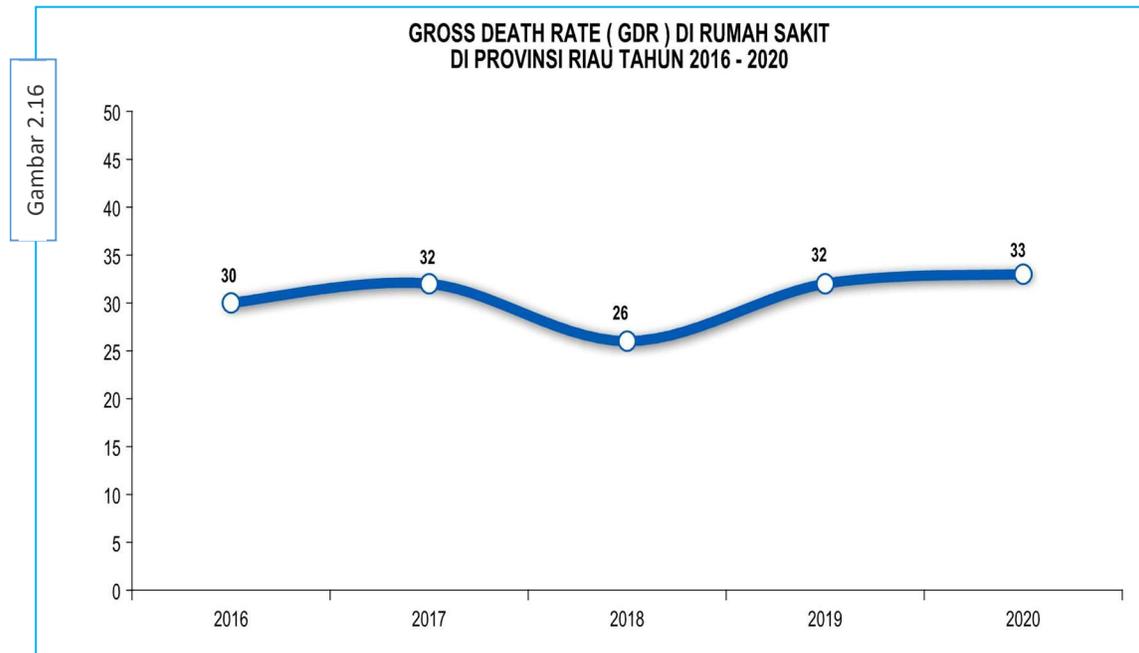
Jumlah kunjungan gangguan jiwa di Provinsi Riau baik pada tahun 2018 dan tahun 2019, tahun 2020 terbanyak pada kunjungan di Rumah Sakit dibandingkan dengan Puskesmas. Kunjungan gangguan jiwa tahun 2020 di Rumah Sakit 77% dan Puskesmas 23%. Demikian juga tahun 2019 di Rumah Sakit 76% dan Puskesmas 24%. Kunjungan di Rumah Sakit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Angka Kematian Pasien Di Rumah Sakit

Angka kematian adalah indikator hasil kinerja dari sebuah proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana ada kematian di bawah 48 jam dan kematian di atas 48 jam. *Gross Death Rate* (GDR) yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Pada GDR, tidak dilihat berapa lama pasien berada di Rumah Sakit dari masuk sampai meninggal. Nilai GDR yang baik yaitu tidak lebih dari 45 per 1.000 penderita keluar. Untuk Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2019, *Gross Death Rate* (GDR) adalah sebesar 32 per 1.000 penderita. GDR ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 *Gross Death Rate* (GDR) adalah sebesar 26 per 1.000 penderita.

Dalam 5 (lima) tahun angka GDR Rumah Sakit di Provinsi Riau masih berada pada kisaran nilai yang dianggap baik yaitu kurang dari 45 per 1.000 penderita keluar, GDR terendah di Provinsi Riau berada pada tahun 2018 sebesar 26 per 1.000 penderita dan GDR tahun 2020 sebesar 33 per 1.000 penderita meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 32 per 1.000 penderita. Dan gambaran *Gross*

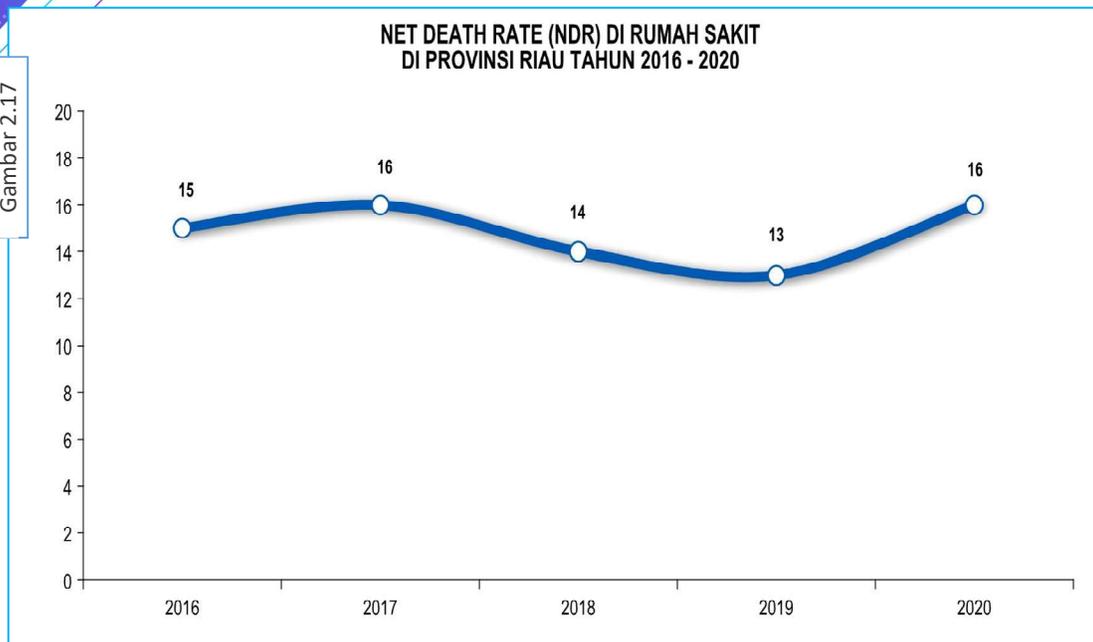
Death Rate (GDR) Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Angka Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Angka NDR ini dapat dijadikan sebagai indikator dalam memberikan gambaran mutu pelayanan di Rumah Sakit. Asumsinya jika pasien meninggal setelah mendapat perawatan 48 jam berarti ada faktor pelayanan rumah sakit yang terlibat dengan kondisi meninggalnya pasien, namun jika pasien meninggal kurang dari 48 jam masa perawatan, dianggap faktor keterlambatan pasien datang ke Rumah Sakit yang menjadi penyebab utama pasien meninggal. Nilai NDR yang masih dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.

Untuk Provinsi Riau angka NDR Rumah Sakit tahun 2020 pada angka 15,8 per 1000 penderita meningkat dibandingkan tahun 2019 (13,3 per 1000 penderita), angka ini masih dinilai dan dianggap baik karena kurang dari 25 per 1000 penderita keluar. Gambaran NDR Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.17



4. Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit

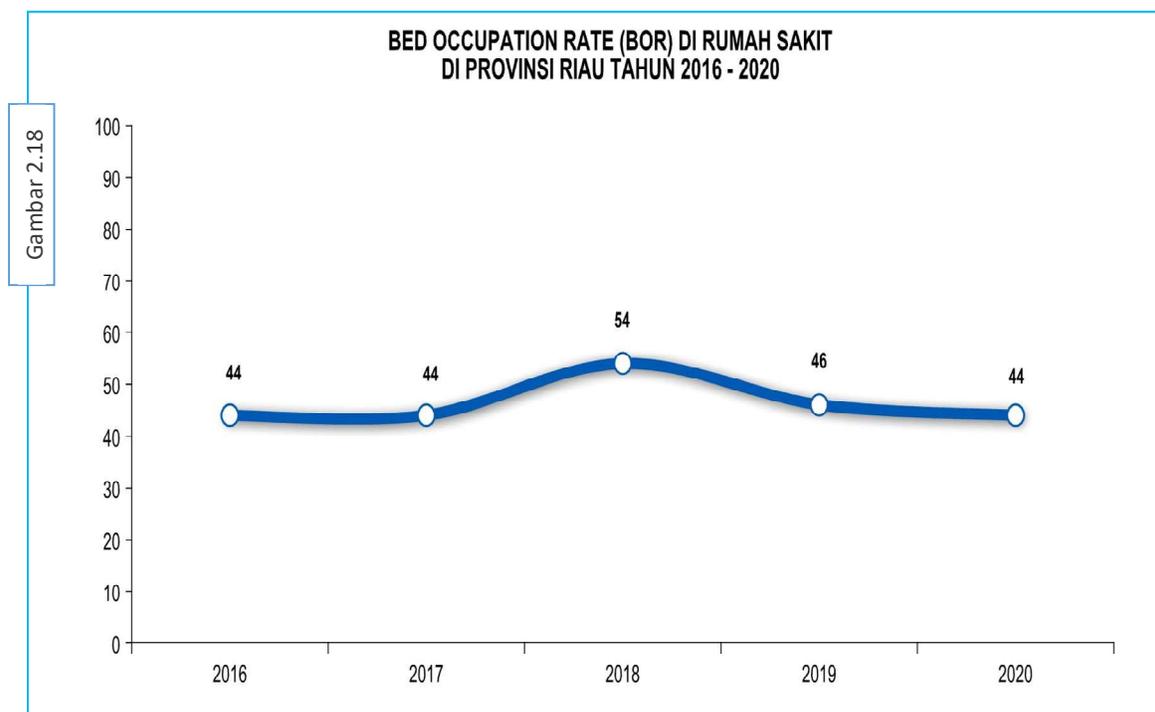
Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit biasanya dilihat dari berbagai segi seperti pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur (*Bed Occupation Rate /BOR*), rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/*Average Length of Stay (ALOS)*, rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati/*Turn Of Interval (TOI)*.

a. Pemanfaatan Tempat Tidur (*Bed Occupation Rate /BOR*)

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit pada suatu waktu tertentu. Indikator ini dipergunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit dengan melihat persentase pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit atau *Bed Occupation Rate (BOR)*.

BOR yang ideal untuk suatu Rumah Sakit adalah antara 60% sampai dengan 80%. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan Rumah Sakit oleh masyarakat, sedangkan bila angka BOR >85% berarti Rumah sakit perlu melakukan pengembangan untuk penambahan tempat tidur di Rumah sakit.

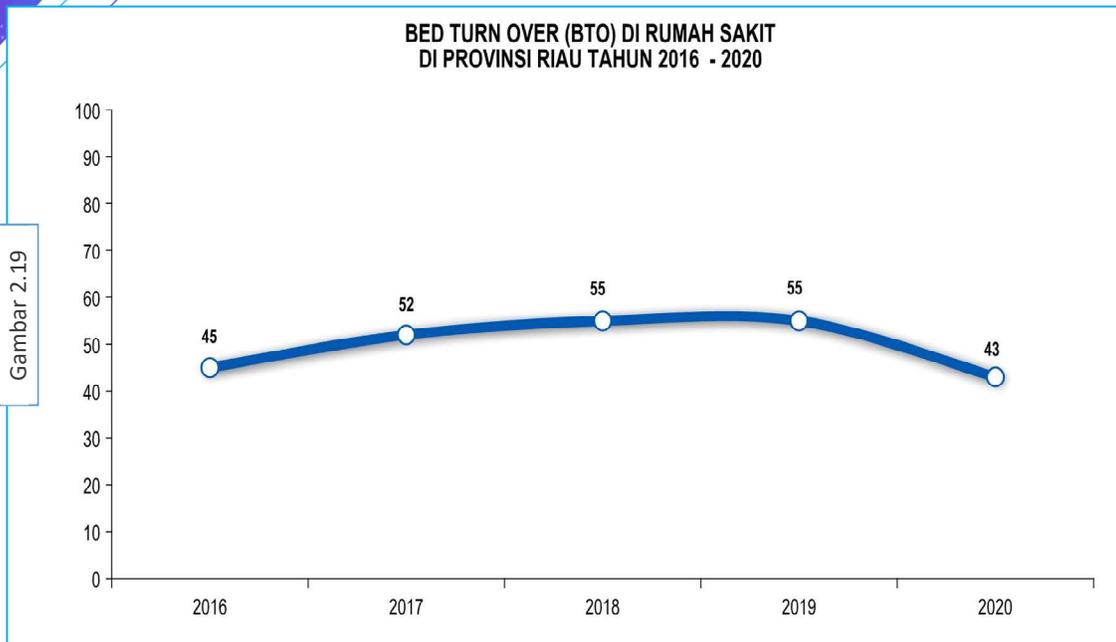
Besarnya BOR di Provinsi Riau sejak tahun 2016 – 2020 angka berkisar 44 % - 45% bila dibandingkan dengan ketentuan BOR yang ideal maka BOR Provinsi Riau yang kurang dari 60%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit oleh masyarakat di Provinsi Riau masih kurang. Untuk BOR Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



b. Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over/BTO)

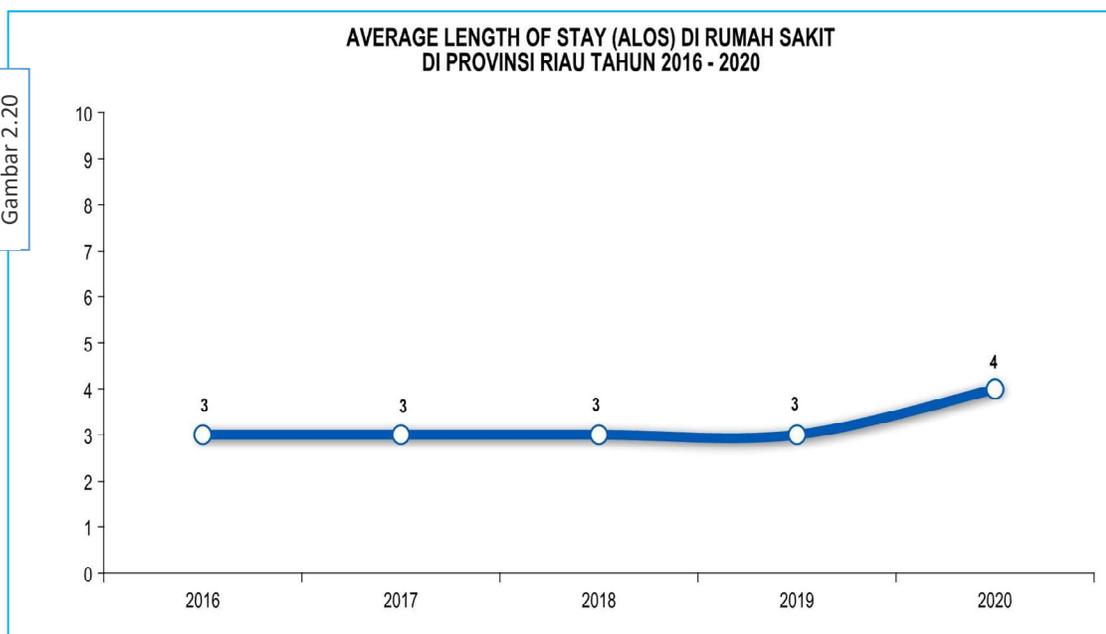
BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, beberapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Persentase BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau tahun 2016-2019 terus meningkat per tahunnya dimulai dari angka 42 di tahun 2016 sampai menjadi angka 55 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 sudah mencapai angka rata-rata idealnya 40-50 kali. Untuk BTO Rumah Sakit di Provinsi Riau sejak tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 2.19



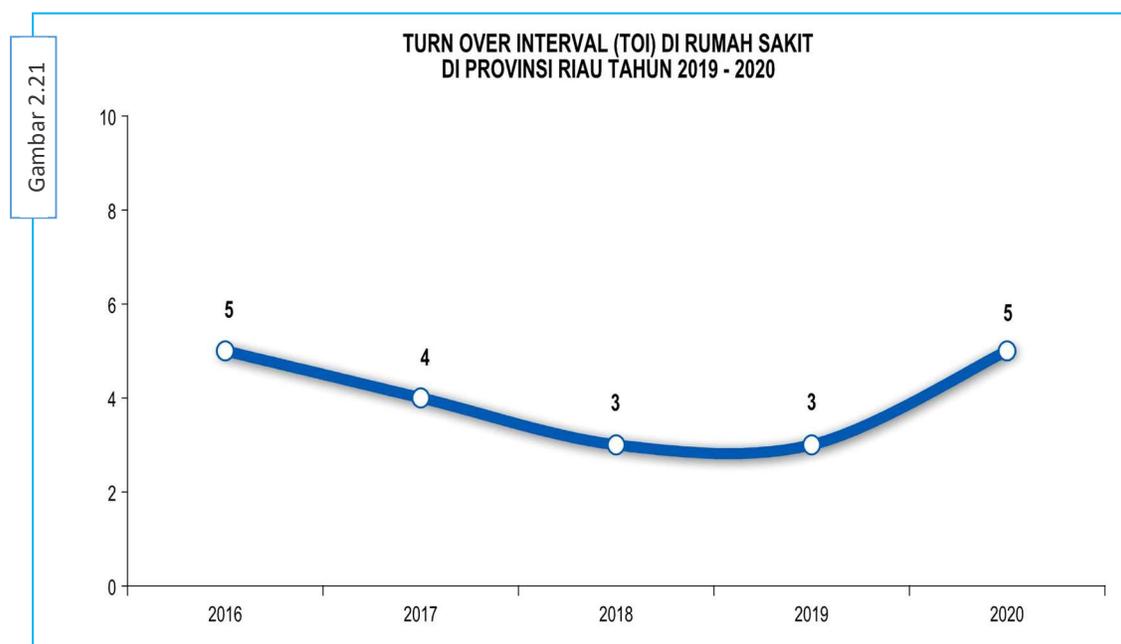
Indikator ALOS mencerminkan rata-rata lama hari perawatan yang diperoleh dari perbandingan jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. Rata-rata lama rawat seorang pasien yang secara umum/*Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal adalah antara 6–9 hari. Rata-rata lama rawat pasien di RS Provinsi Riau di tahun 2016 - 2020 adalah 3 hari dan angka ini lebih rendah dari ALOS ideal.

Gambar 2.20



Rata-rata selang waktu untuk pemakaian tempat tidur di rumah sakit diukur melalui indikator TOI. TOI digunakan untuk menentukan lamanya rata-rata tempat tidur

kosong atau rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tertentu yang tidak terisi antara pasien keluar atau mati dengan pasien masuk. Semakin besar TOI maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Angka ideal untuk TOI adalah 1 – 3 hari. Rata-rata TOI di Provinsi Riau dari tahun 2016-2019 mengalami penurunan berada diangka yang ideal 1-3 hari. tetapi untuk rata-rata TOI di tahun 2020 TOI mengalami peningkatan sekitar 4,6 yang artinya hal ini menggambarkan bahwa interval pemakaian tempat tidur di Provinsi Riau sudah melampaui angka ideal yakni 1 – 3 hari.



5. Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Vaksin



Keberhasilan program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta obat pelayanan kesehatan dasar tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Dari 228 Puskesmas yang ada di Provinsi Riau, 219 Puskesmas (96,1%) memiliki ketersediaan obat vaksin > 80%. Dan 9 Puskesmas (3,9%) memiliki ketersediaan obat dan vaksin < 80% seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas.

C . UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Dalam mewujudkan masyarakat sehat, diperlukan kesadaran setiap anggota masyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untuk hidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan, seperti adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

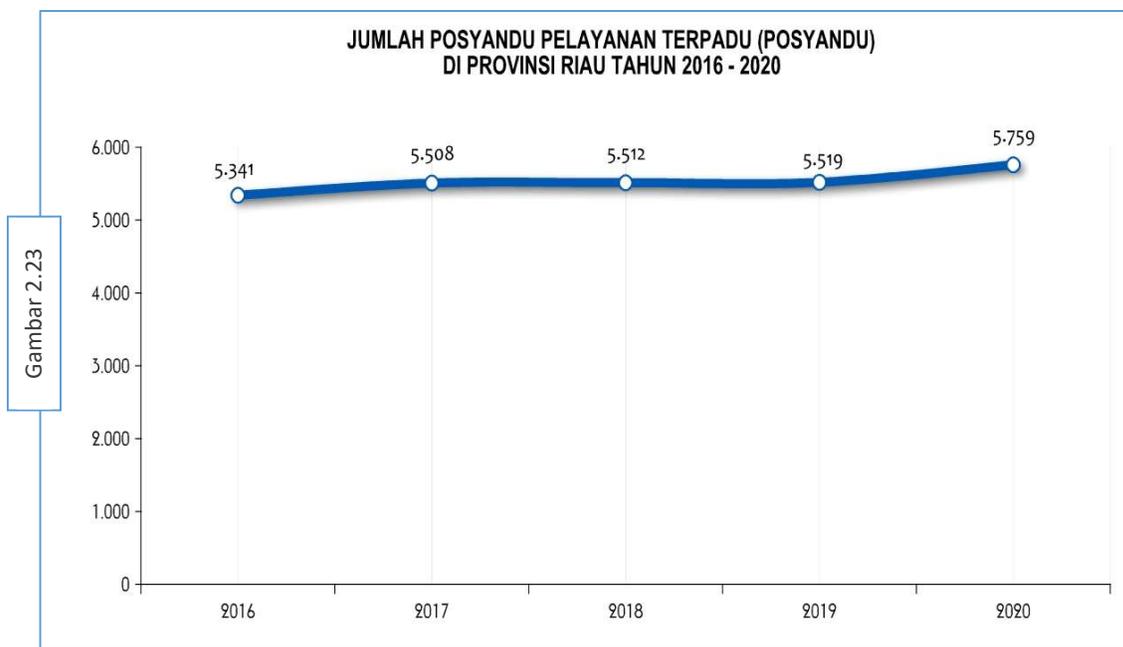
UKBM yang ada di desa dan kelurahan menjadi ciri khas bahwa desa dan kelurahan tersebut telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dinyatakan demikian karena penduduk di desa dan kelurahan tersebut dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan *surveillance* berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

1. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Dalam menjalankan fungsinya, Posyandu diharapkan dapat melaksanakan 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Berdasarkan laporan Kabupaten/Kota, jumlah Posyandu dalam 5 (lima) tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah posyandu sebanyak 5.341 unit meningkat menjadi 5.759 unit pada tahun 2020. Peningkatan jumlah posyandu ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah balita

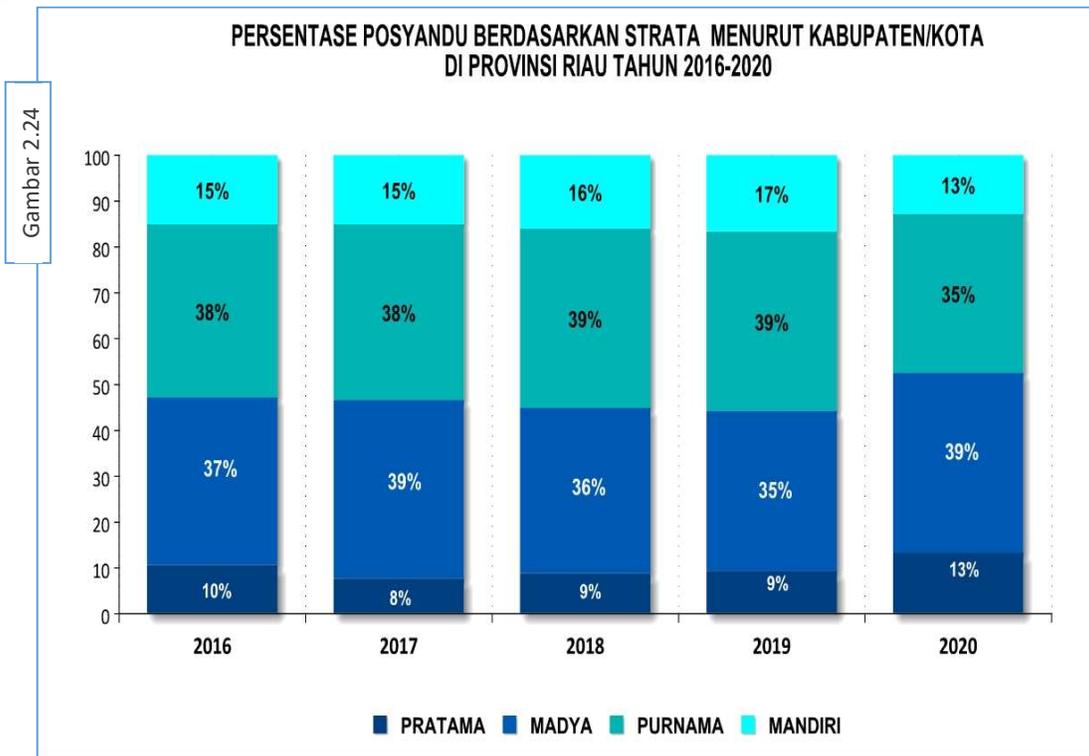
yang ada sehingga dibutuhkan penambahan posyandu, diharapkan nantinya semua balita mendapat pelayanan kesehatan. Berikut gambaran jumlah Posyandu dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat di bawah ini.



a. Cakupan Posyandu Menurut Strata

Jumlah seluruh Posyandu di Provinsi Riau untuk tahun 2020 ada sebanyak 5.759 unit, dari seluruh jumlah Posyandu tersebut terbagi atas 4 jenis Posyandu yakni Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau persentase Posyandu Pratama dan Madya untuk tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase, sedangkan Posyandu Purnama dan Mandiri mengalami peningkatan persentase.

Tahun 2016 persentase posyandu Pratama mencapai 10% meningkat menjadi 13% di tahun 2020, begitu juga yang terjadi pada posyandu madya dimana tahun 2016 mencapai 37% dan menurun tahun 2020 menjadi 35%. Untuk persentase posyandu Purnama tahun 2016 mencapai 38% dan meningkat di tahun 2020 menjadi 39%, sementara capaian posyandu mandiri tahun 2016 mencapai 15% dan menurun menjadi 13% di tahun 2020. Dengan menurunnya strata posyandu purnama dan posyandu mandiri, ini artinya terjadi penurunan peran serta masyarakat hal ini terjadi karena terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia sampai saat ini. Jumlah persentase posyandu berdasarkan strata di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2016-2020 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

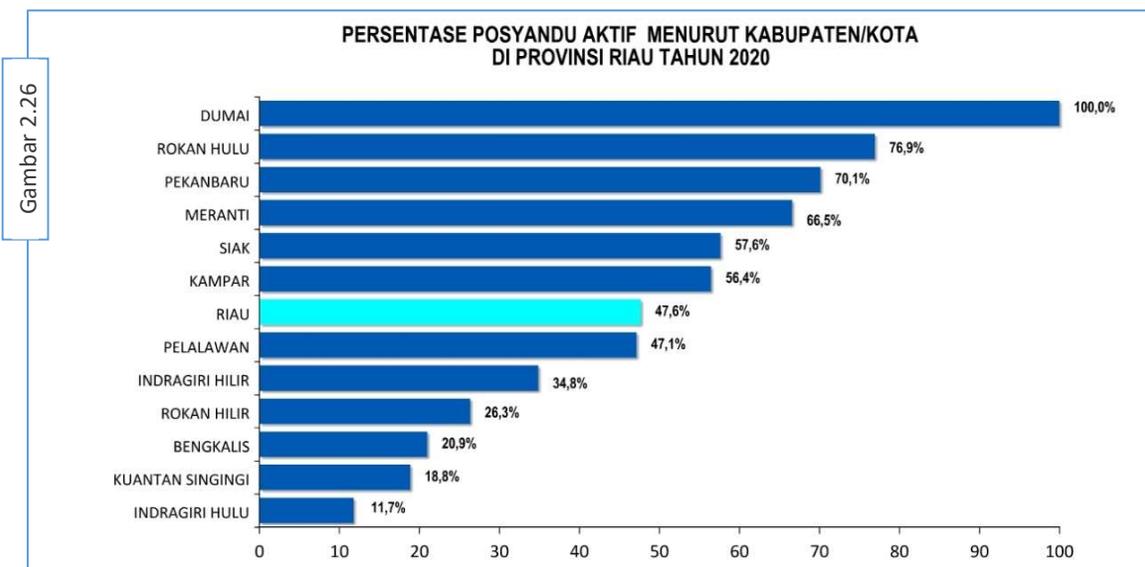


Pada grafik di atas juga dapat dilihat diketahui bahwa proporsi terbesar ada di posyandu madya diikuti oleh Posyandu purnama, dan proporsi terendah adalah posyandu pratama dan mandiri. Dengan demikian diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. Namun bila Posyandu tersebut dilihat dari segi kualitatif (strata purnama dan strata mandiri) maka yang dikatakan dengan Posyandu purnama merupakan Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.

Untuk menilai keaktifan posyandu yang ada pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah posyandu purnama dan mandiri yang ada di wilayah tersebut. Gambaran Posyandu aktif yang dimiliki oleh Provinsi Riau selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2016- 2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

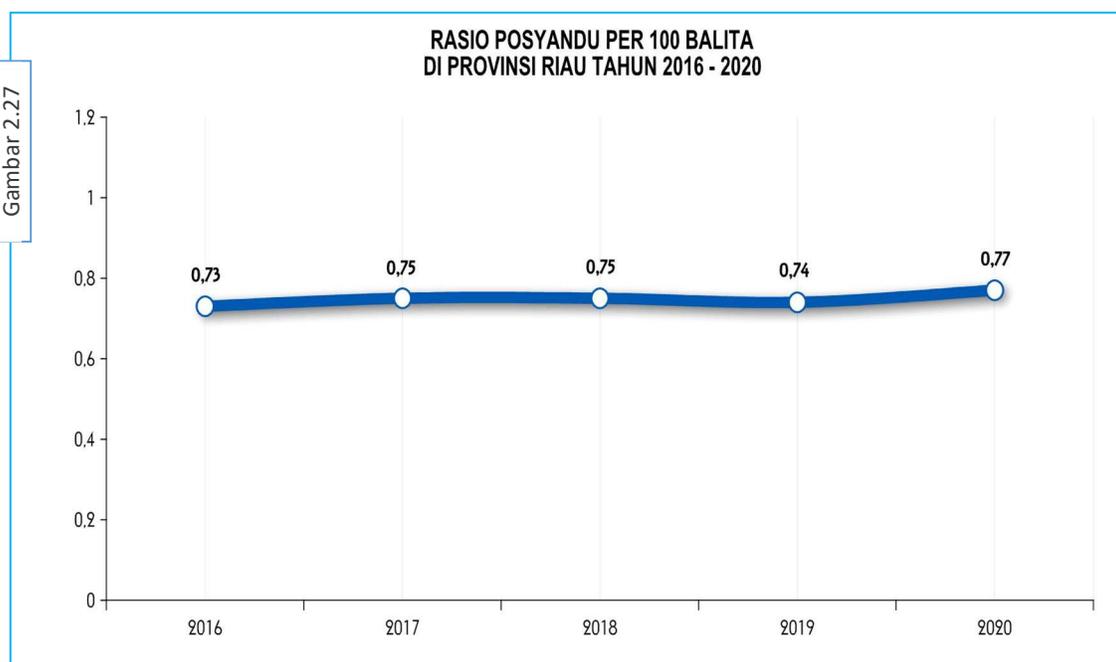


Posyandu aktif di Provinsi Riau selama 5 (Lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan posyandu aktifnya. Peningkatan terjadi dimulai tahun 2016-2019, dimana tahun 2016 persentase Posyandu aktif mencapai 53,02% dan tahun 2019 mencapai 55,99%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan posyandu aktif menjadi 47,6%. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 ini karena adanya wabah covid-19. Meskipun demikian revitalisasi posyandu tetap mendapat perhatian dari semua sektor/pihak terkait, termasuk didalamnya adalah dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu maupun Pokjanal Posyandu yang sudah terbentuk baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan serta Pokja Posyandu ditingkat Desa/Kelurahan. Hal ini sejalan dengan kegiatan revitalisasi Posyandu yang terus dilaksanakan oleh semua sektor terkait.



Sedangkan untuk posyandu aktif di Kabupaten/Kota maka posyandu di Kota Dumai merupakan satu-satunya daerah yang memiliki posyandu aktif dengan capaian 100%. Dan selanjutnya Kabupaten Rokan Hulu 77% dan Kota Pekanbaru 70,1% posyandu aktif. Sedangkan Posyandu aktif yang paling sedikit berada di Kabupaten Indragiri Hulu (11,7%) diikuti Kabupaten Kuantan Singingi 18,8% dan Kabupaten Bengkalis 20,9%. Gambaran persentase Posyandu aktif di Provinsi Riau pada tahun 2020 bisa dilihat dari gambar di atas. Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki posyandu aktifnya masih sangat rendah maka perlu adanya upaya menggerakkan pemberdayaan masyarakat agar menyadari penting perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Rasio Posyandu Per 100 Balita



Dalam menjalankan fungsi posyandu, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Rasio posyandu per100 balita di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rasio posyandu di Provinsi Riau masih mencapai 0,77 dan dibawah 1 (satu). Artinya 1 posyandu melayani untuk 100 orang balita, dengan demikian kegiatan Posyandu dapat lebih optimal kepada masyarakat. Untuk melihat gambaran rasio posyandu per 100 balita selama 5 (lima) tahun terakhir 2016 – 2020 dapat dilihat dari gambar di atas.

2. Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)

Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Tujuan utama kegiatan Posbindu PTM adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM. Oleh karena itu sasaran Posbindu PTM cukup luas mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus PTM. Posbindu PTM bertujuan untuk :

- Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang beresiko terkena penyakit PTM Bagi masyarakat beresiko
- Mengenali faktor resiko PTM yang ada dan upaya mengurangi jumlah maupun intensitas faktor resiko tersebut agar tidak menjadi penyakit PTM.
- Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke Puskesmas.

Dengan adanya Posbindu warga dapat mengetahui dan menanggulangi agar tidak menjadi parah. Pelaksanaan Posbindu di Provinsi Riau tahun 2020 berjumlah 1.026 unit yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Posbindu yang terbanyak adalah di Kabupaten Kampar 172 unit, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu 166 unit dan Kabupaten Rokan Hulu 145 unit. Sedangkan Kabupaten Bengkalis merupakan posbindu yang paling sedikit 27 unit, diikuti Kota Dumai 30 unit dan Kabupaten Rokan Hilir 37 unit.





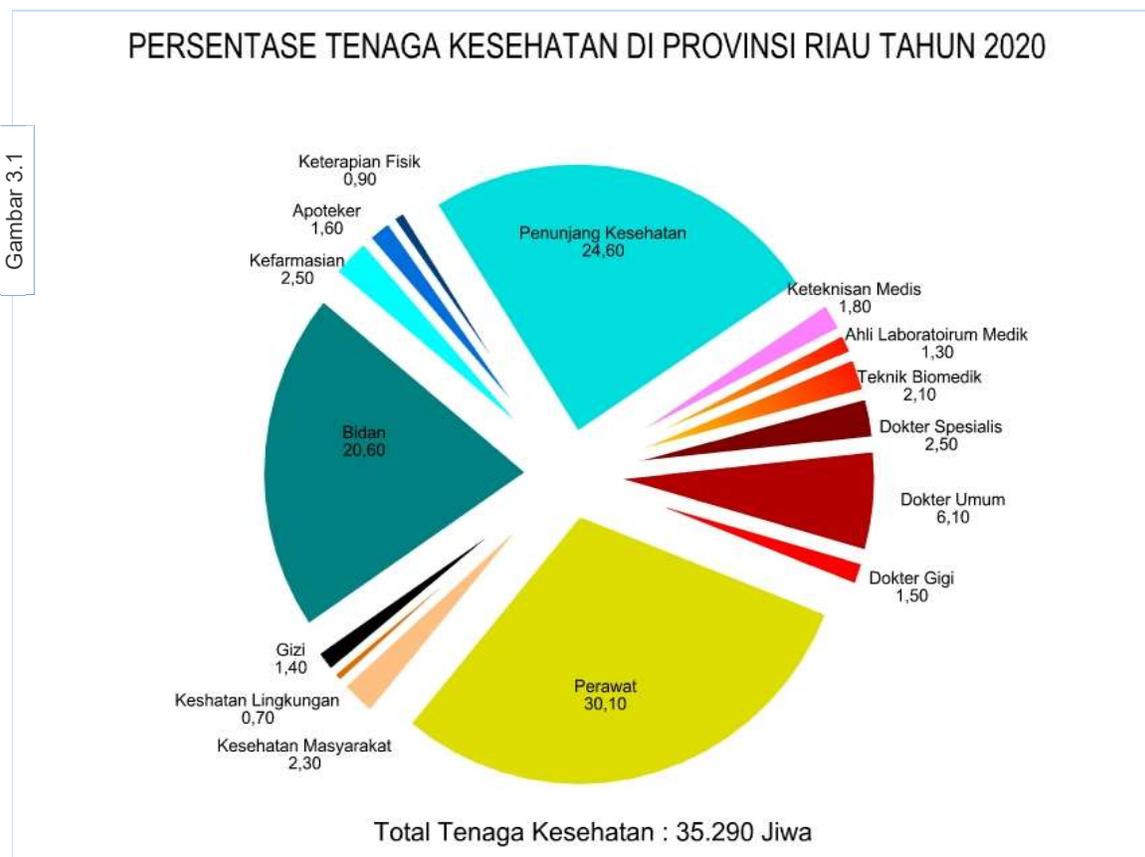
Sumber Daya Kesehatan

BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu ketersediaan sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pada bab ini sumber daya kesehatan menyajikan gambaran keadaan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit wilayah Provinsi Riau.

Gambar 3.1



Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang disajikan pada bab ini lebih diutamakan pada kelompok tenaga kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisian medis.

Data jumlah tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui ketersediaan dan kekurangan tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan di Provinsi Riau tahun 35.290 orang, tahun 2019 berjumlah 31.628 orang, jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 23.491 orang. Sebahagain besar tenaga kesehatan di Provinsi Riau adalah tenaga keperawatan sebanyak 30,10. Tenaga penunjang 24,60 dan selanjutnya tenaga bidan sebanyak 20,60. Sedangkan untuk tenaga medis yang terdiri dokter spesialis 2,50, dokter umum 6,10, dokter gigi sebesar 1,50. Tenaga Kefarmasian sebanyak 2,50, tenaga apoteker 1,60. Tenaga Kesehatan Masyarakat 2,30. Tenaga gizi sebesar 1,40, tenaga kesehatan lingkungan 0,70. Tenaga teknik Biomedika sebanyak 2,10. Ahli laboratorium medik 1,30 dan keteknisian medis 1,80 serta keterampilan fisik 0,90.

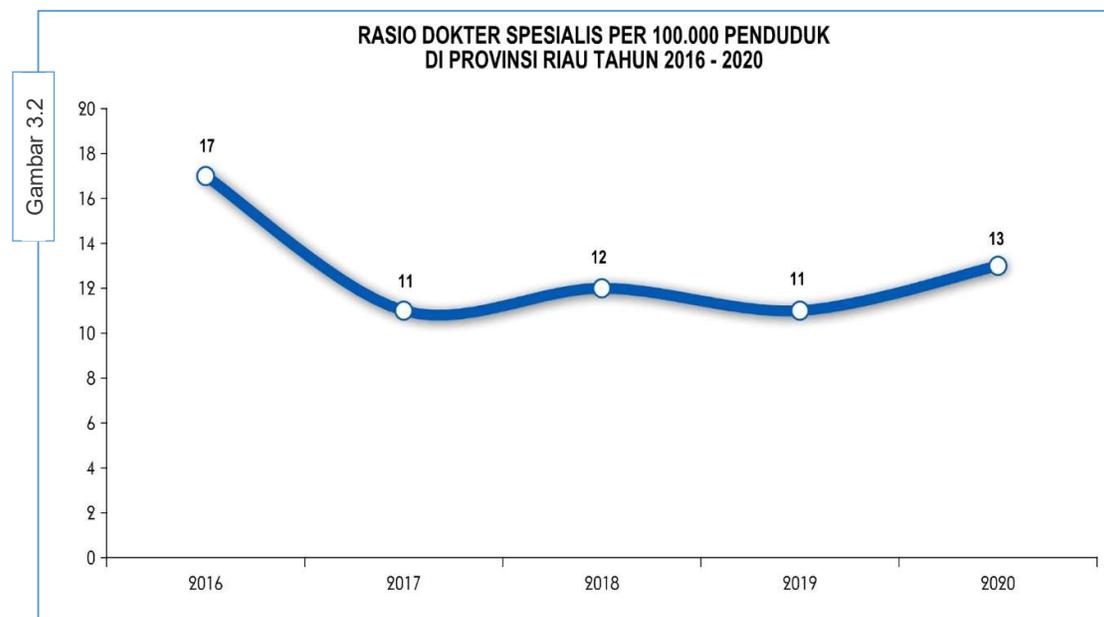
Berdasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan estimasi jumlah penduduk, dapat disusun rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau. Jumlah tenaga kesehatan yang digunakan adalah jumlah tenaga kesehatan yang bekerja sesuai dengan fungsinya.

Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan guna mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Untuk target rasio tenaga kesehatan di Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.

A. Jumlah Dan Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum, Spesialis, Dokter Gigi) Di Sarana Kesehatan

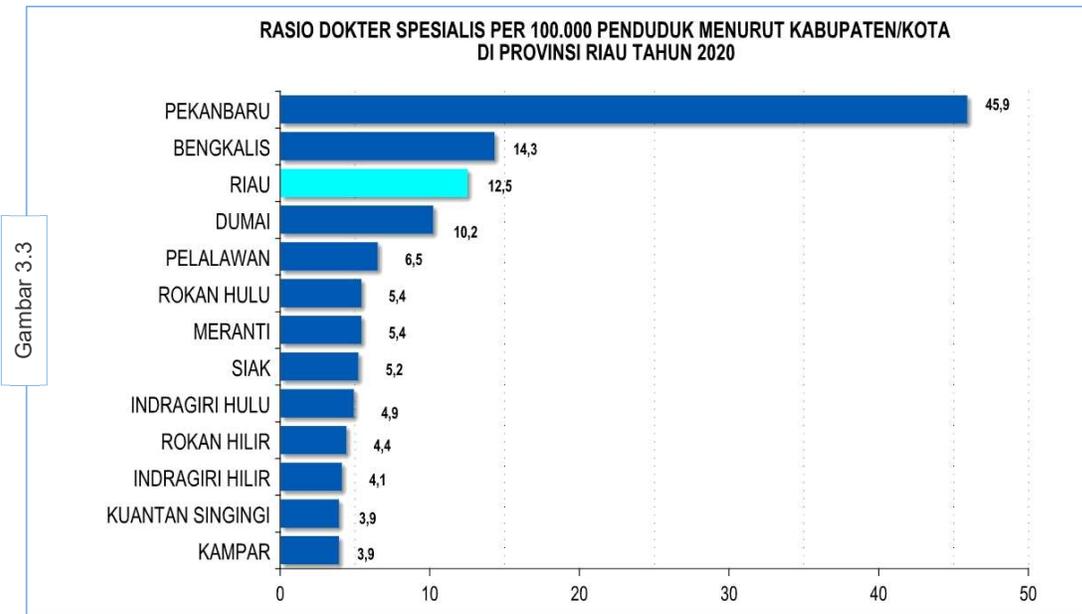
1. Rasio Dokter Spesialis

Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 12,50 per 100.000 penduduk artinya pada tahun 2020 ini di Provinsi Riau untuk 100.000 penduduk dilayani oleh 13 orang dokter spesialis. Rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 (12,58). Rasio ini sudah mencapai target ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Riau (11 per 100.000 penduduk). Untuk melihat gambaran rasio dokter spesialis di Provinsi Riau tahun dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sedangkan pada tahun 2020 ini di Provinsi Riau sudah ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target rasio dokter spesialis tahun 2020 (11 per 100.000 penduduk) yakni Kota Pekanbaru (45,90 per100.000 penduduk), Kabupaten

Bengkalis (14,3 per100.000 penduduk), Kota Dumai (10,2 per100.000 penduduk).
Gambaran tersebut dapat dilihat berdasarkan gambar grafik dibawah ini.



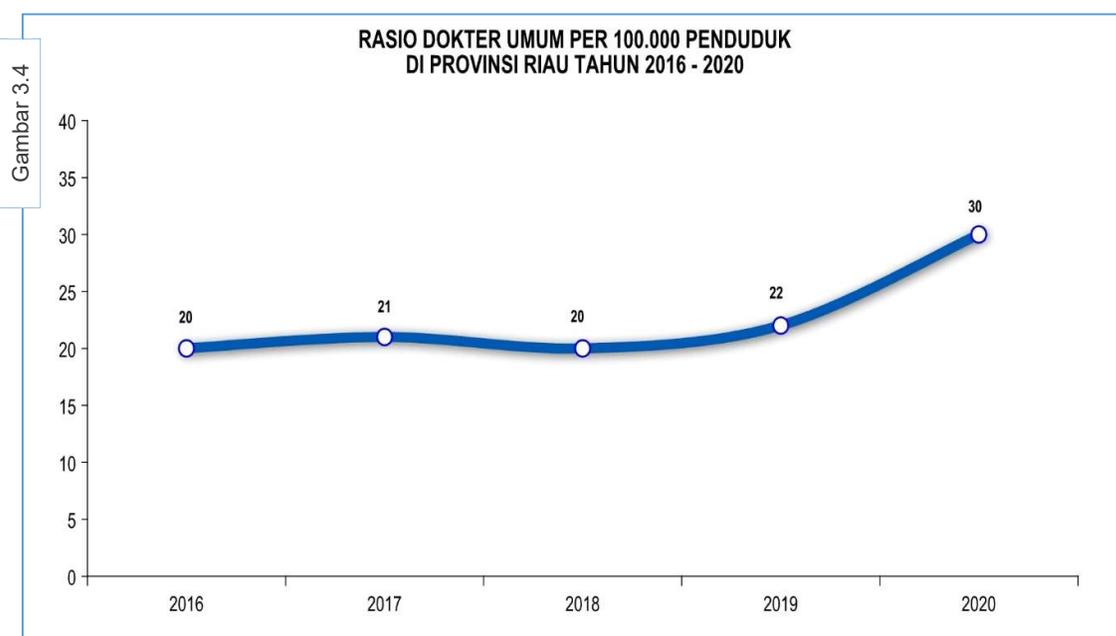
Meskipun rasio dokter spesialis ini secara Provinsi telah melampaui target, namun penyebarannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau belum merata. Penempatan dokter spesialis masih terfokus di ibu Kota Provinsi saja yakni di Kota Pekanbaru dengan rasio yang sangat tinggi sebesar 45,9 per100.000 penduduk meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 41,98 per 100.000 penduduk, rasionya dokter spesialis di Kota Pekanbaru ini sudah sangat jauh dibandingkan dengan rasio dokter spesialis di Kabupaten lainnya. Diikuti dengan Kabupaten Bengkalis sebesar 14,3 per100.000 penduduk dan Kota Dumai sebesar 10,2 per100.000 penduduk. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya memiliki rasio yang sangat rendah, seperti Kabupaten Kampar dan kabupaten Kuantan Singingi dengan rasio dokter spesialis masing-masing 3,9 diikuti dengan rasio dokter spesialis Kabupaten Indragiri Hilir dengan rasio 4,10.

Dengan penempatan yang tidak merata ini maka untuk masa yang akan datang perlu pemerataan penempatan dan penambahan dokter spesialis khususnya untuk penanganan kedaruratan dan perluasan pemerataan pelayanan kesehatan, mengingat lokasi dan geografis Provinsi Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah sulit.

2. Rasio Dokter umum

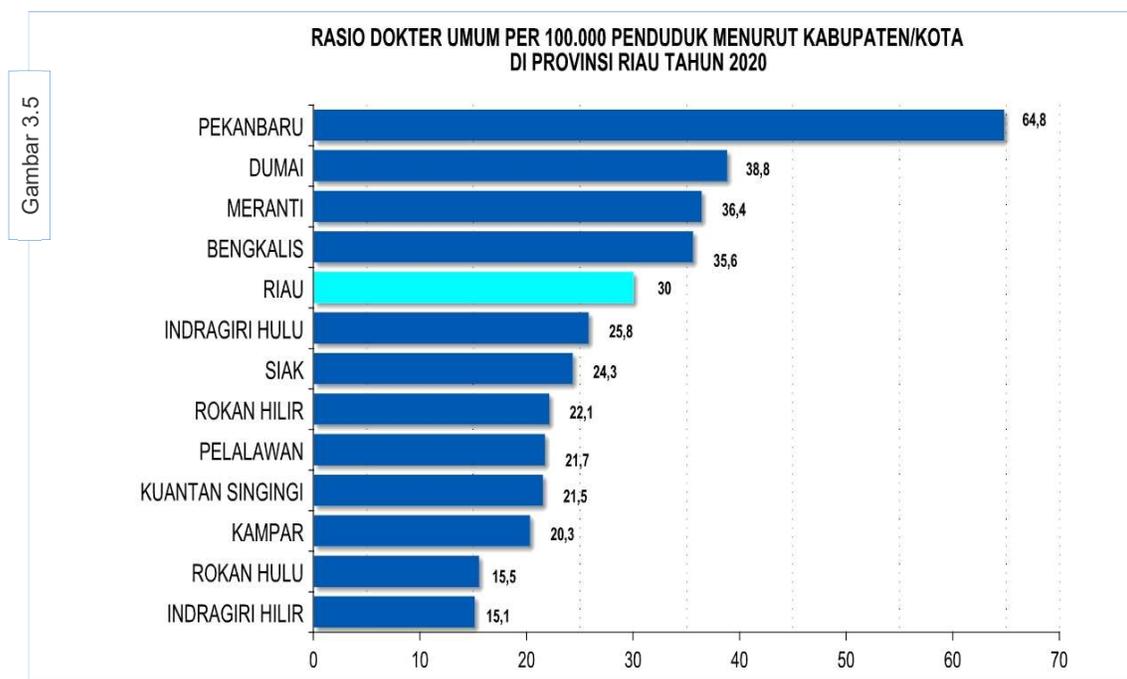
Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Rasio dokter umum di Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun terakhir (2016 - 2020) rasio dokter umum terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 ini rasio dokter umum per 100.000 penduduk sebesar 30 terjadi penurunan sedikit dibandingkan tahun 2019 rasio dokter umum per 100.000 penduduk sebesar 21,86 per100.000 penduduk. Rasio dokter umum Provinsi Riau pada tahun 2020 ini masih sangat jauh dari target tahun 2020 sebesar 45 per100.000 penduduk. Masih rendahnya rasio dokter umum ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Gambaran ketersediaan dokter umum di Provinsi Riau pada tahun 2020 dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (untuk 100.000 penduduk) dilayani sekitar 30 orang tenaga dokter umum. Namun bila dilihat dari penempatan dokter umum di Kabupaten/Kota maka diketahui bahwa belum ada 1 (satu) Kabupaten/Kota yang telah mencapai target rasio dokter umum tahun 2020 (45 per100.000 penduduk). Gambaran lebih jelasnya rasio dokter umum di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



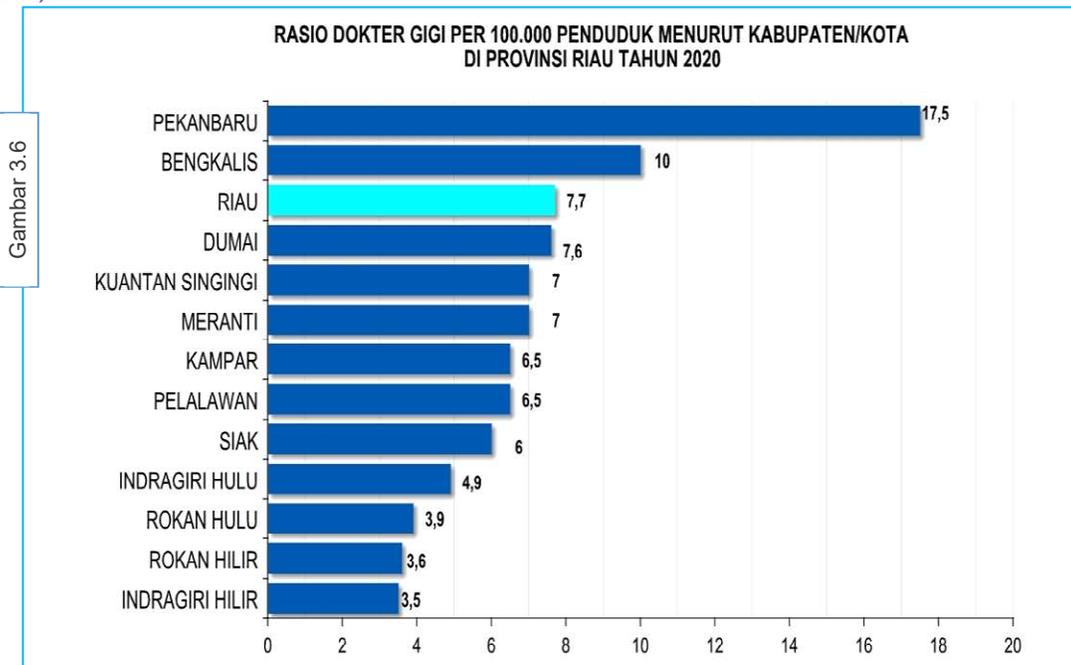
Meskipun ketersediaan dokter belum umum memenuhi target, namun rasio tertinggi ada pada Kota Pekanbaru dengan rasio 64,8 per100.000 penduduk yang

diikuti dengan Kota Dumai 38,8 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rasio 36,4 per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter umum terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 15,1 per100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Rokan Hulu dengan rasio doktr umum 15,5 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kampar dengan rasio 20,3 per 100.000 penduduk. Kondisi ketersediaan dokter umum harus menjadi perhatian dari Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah karena sangat jauh dari target yang direncanakan. Karena nanti kondisi ini terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gambaran dapat dilihat seperti dibawah ini.



3. Rasio Dokter Gigi

Provinsi Riau pada tahun 2020 rasio dokter gigi sebesar 7,7 per100.000 penduduk, artinya untuk tahun 2020 ini dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi masyarakat diberikan oleh 8 dokter gigi kepada 100.000 penduduk. Rasio ini mengalami peningkatan ,bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun bila diperhatikan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rasio dokter gigi masih sangat jauh dari rasio yang ditargetkan pada tahun 2020 dimana rasio dokter gigi sebesar 13 per100.000 penduduk. Ini artinya kekurangan tenaga dokter gigi ini sekitar 54% yang harus dipenuhi. Gambaran rasio dokter gigi per 100.000 penduduk di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



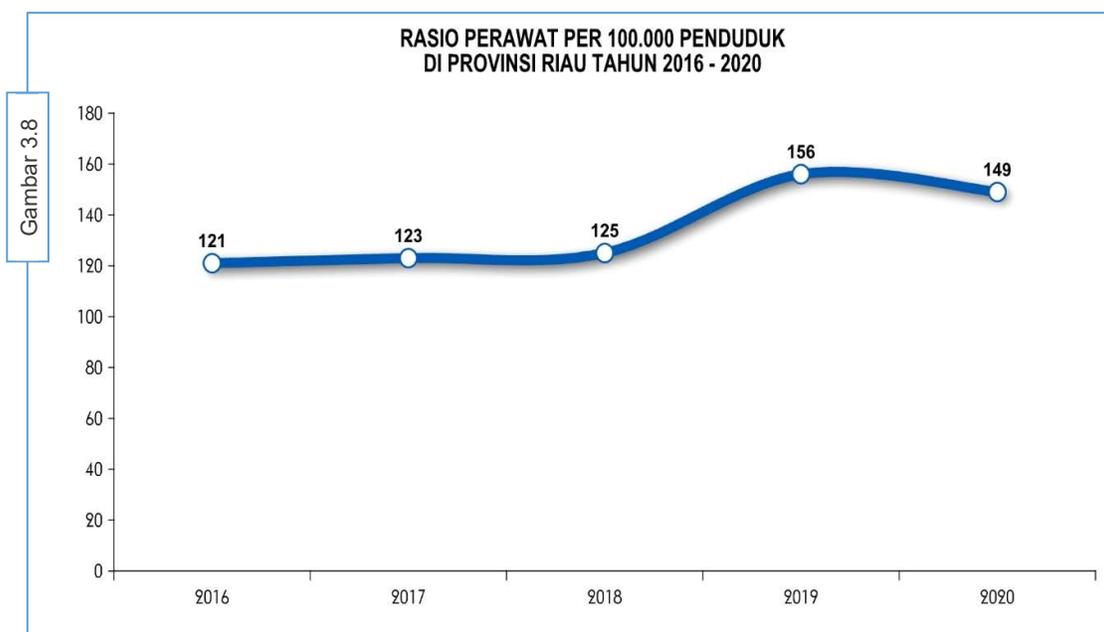
Rasio dokter gigi di Provinsi Riau sebesar 7.7 per 100.000 penduduk, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan target kebutuhan tenaga dokter gigi pada tahun 2020 yakni 13 orang per 100.000 penduduk. Secara penempatan tenaga dokter gigi di Provinsi Riau tahun 2020 ini pun belum merata, hal ini dapat dilihat rasio dokter gigi di Kabupaten/Kota, untuk rasio tertinggi dari Kota Pekanbaru 17,5 per 100.000 penduduk, diikuti Kabupaten Bengkalis dengan rasio sebesar 10 per100.000 penduduk dan Kota Dumai dengan rasio sebesar 7,6 per100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter gigi terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,5 per100.000 penduduk diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir sebesar 3,6 per100.000 penduduk dan Kabupaten Rokan Hulu 3,9 per100.000 penduduk.

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota hanya ada Kota Pekanbaru yang telah mencapai target rasio tenaga dokter gigi tahun 2020 sebesar 17,5 per100.000 penduduk. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah mengingat kekurangan tenaga dokter gigi di Kabupaten/Kota. Hal ini terkait dengan pelayanan kesehatan gigi pada masyarakat. Untuk rasio dokter gigi terhadap per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 terlihat pada gambar dibawah ini.

B. Jumlah Dan Rasio Tenaga Keperawatan (Bidan Dan Perawat) Di Sarana Kesehatan

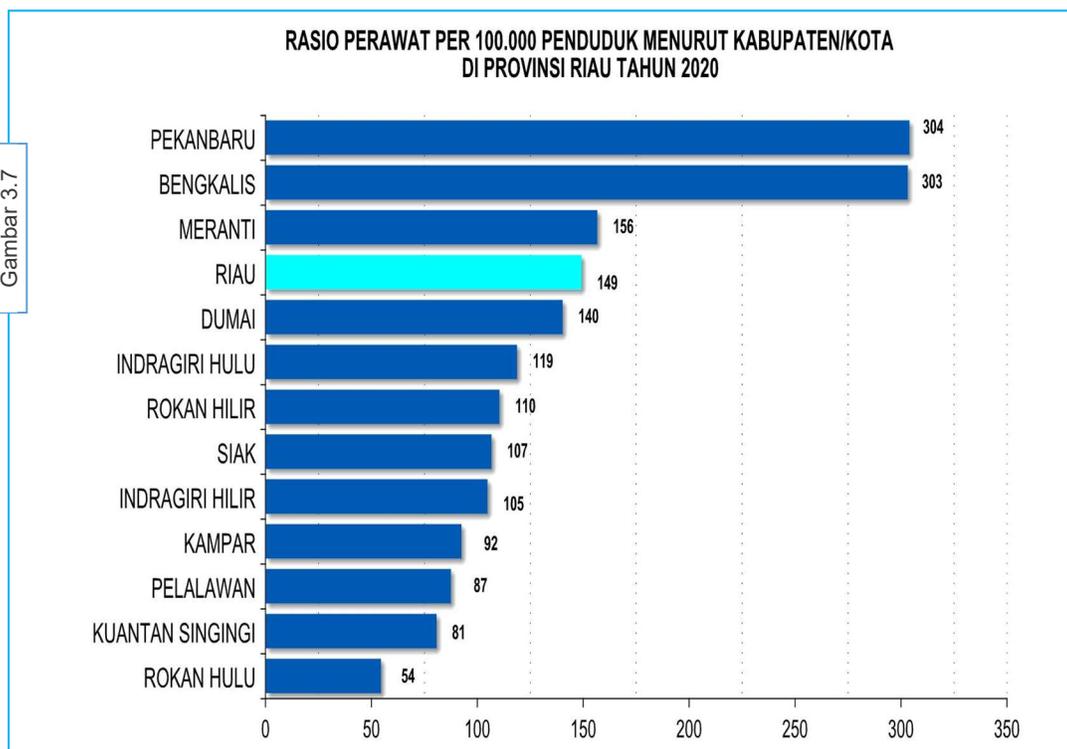
1. Rasio Tenaga Perawat

Ketersediaan tenaga perawat di Provinsi Riau dapat dilihat dari rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk. Dan rasio tenaga perawat di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 149 per 100.000 penduduk dan rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2019 saja yakni sebesar 155 per 100.000 penduduk. Rasio perawat di Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 121 per100.000 penduduk dan tahun 2020 sebesar 149 per100.000 penduduk. Meskipun dalam Lima tahun terakhir ini rasio tenaga perawat cenderung mengalami peningkatan, namun rasio tenaga perawat ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga perawat pada tahun 2020 (180 per 100.000 penduduk). Untuk melihat gambaran rasio perawat 100.000 penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2016-2020 dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Untuk melihat penyebaran tenaga perawat di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dapat diketahui dari rasio perawat per 100.000 penduduk. Rasio tenaga perawat tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan rasio sebesar 304 per 100.000 penduduk. Rasio perawat di Kota pekanbaru ini satu-satunya rasio perawat yang sudah mencapai bahkan melebihi target rasio tenaga perawat pada tahun 2019 yakni sebesar 180 per 100.000 penduduk. Selanjutnya rasio perawat di Kabupaten

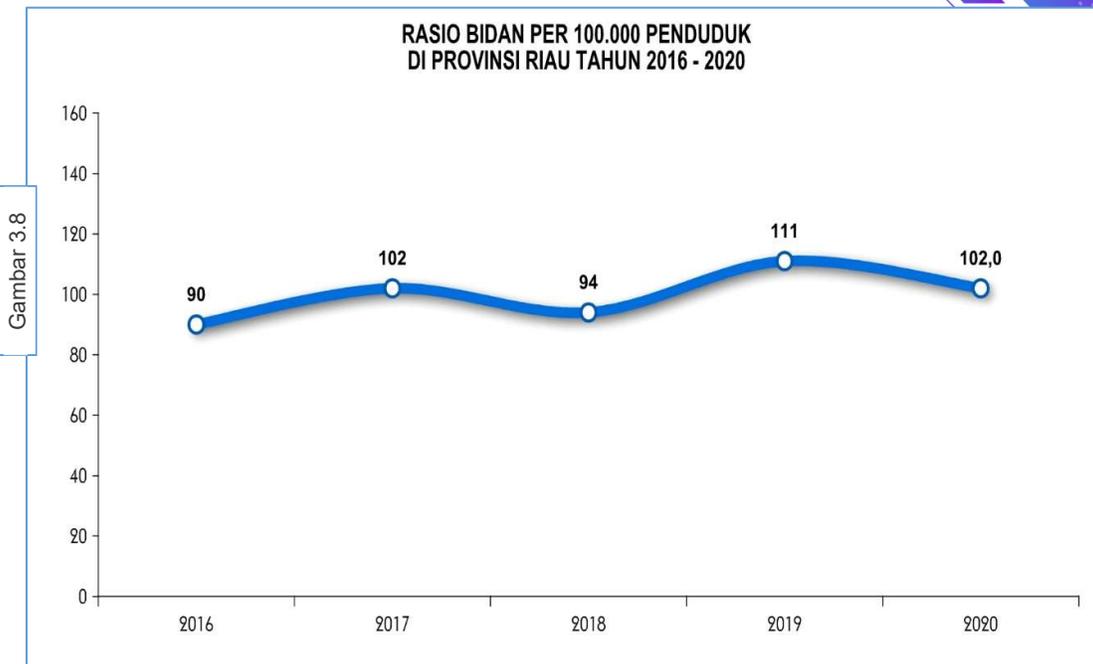
Bengkalis sebesar 303 per 100.000 penduduk dan rasio perawat di Kabupaten Kep. Meranti 156 per 100.000 penduduk.



Sedangkan rasio perawat terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 54 per100.000 penduduk, diikuti oleh Kabupaten Kuantan Sengingi 70 per100.000 penduduk dan Kabupaten Kampar 77 per100.000 penduduk. Hal ini harus menjadi fokus perhatian dari Pemerintah baik pusat maupun daerah guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di daerah. Untuk penyebaran tenaga perawat di Provinsi Riau tahun 2020 dapat di dilihat pada gambar diatas.

2. Rasio Tenaga Bidan

Ketersediaan tenaga bidan di Provinsi Riau dapat dilihat dari rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk. Rasio tenaga Bidan per 100.000 penduduk tahun 2020 sebesar 102 per 100.000 penduduk, rasio ini meningkat dibandingkan dengan rasio bidan pada tahun 2019 (111 per 100.000 penduduk).

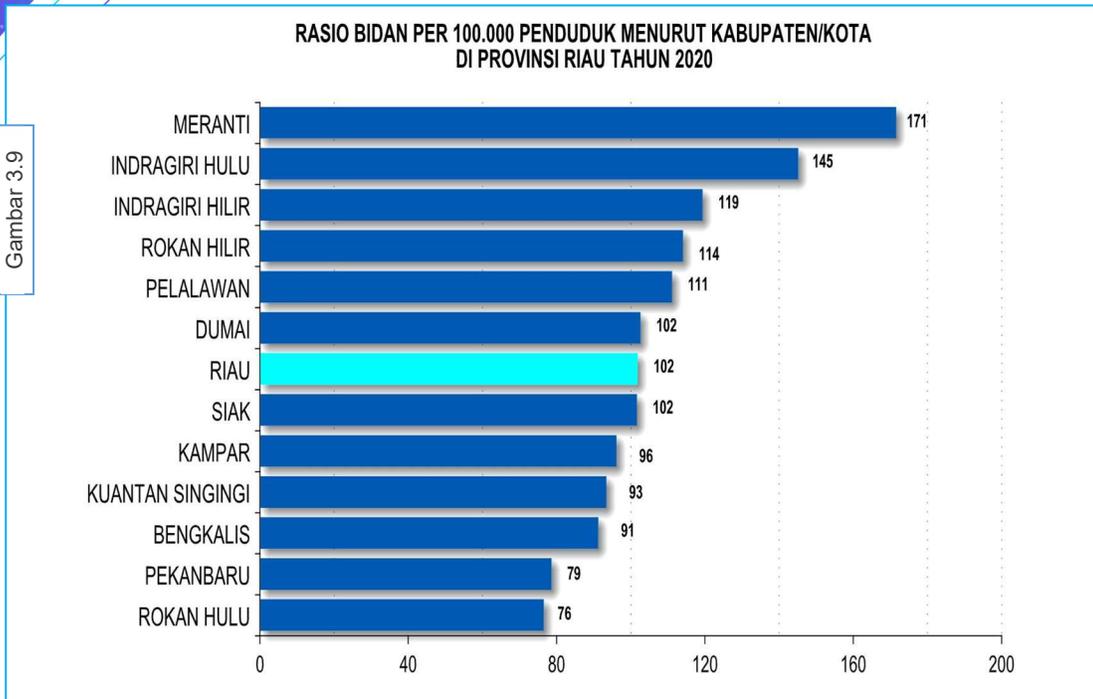


Seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas, rasio bidan di Provinsi Riau per100.000 penduduk tahun 2020 ini masih jauh dari target yang akan dicapai pada tahun 2020 yakni sebesar 120 per100.000 penduduk. Hal ini menjadi kendala dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) khususnya terkait dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk penyebaran tenaga bidan di Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar dibawah ini, dimana untuk Kabupaten/Kota yang rasio bidan tertinggi adalah Kabupaten Kep. Meranti (171 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu (145 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Indragiri Hilir (119 per100.000 penduduk), sedangkan rasio bidan yang terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu (76 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kota Pekanbaru (79 per 100.000 penduduk) dan kabupaten Bengkalis (91 per 100.000 penduduk).

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya ada 2 (dua) Kabupaten yang telah mencapai target rasio tenaga bidan tahun 2020 sebesar 120 per 100.000 penduduk, yakni Kabupaten Kep. Meranti dan Kabupaten Indragiri Hulu . Lebih jelasnya bagaimana penempatan tenaga bidan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.9

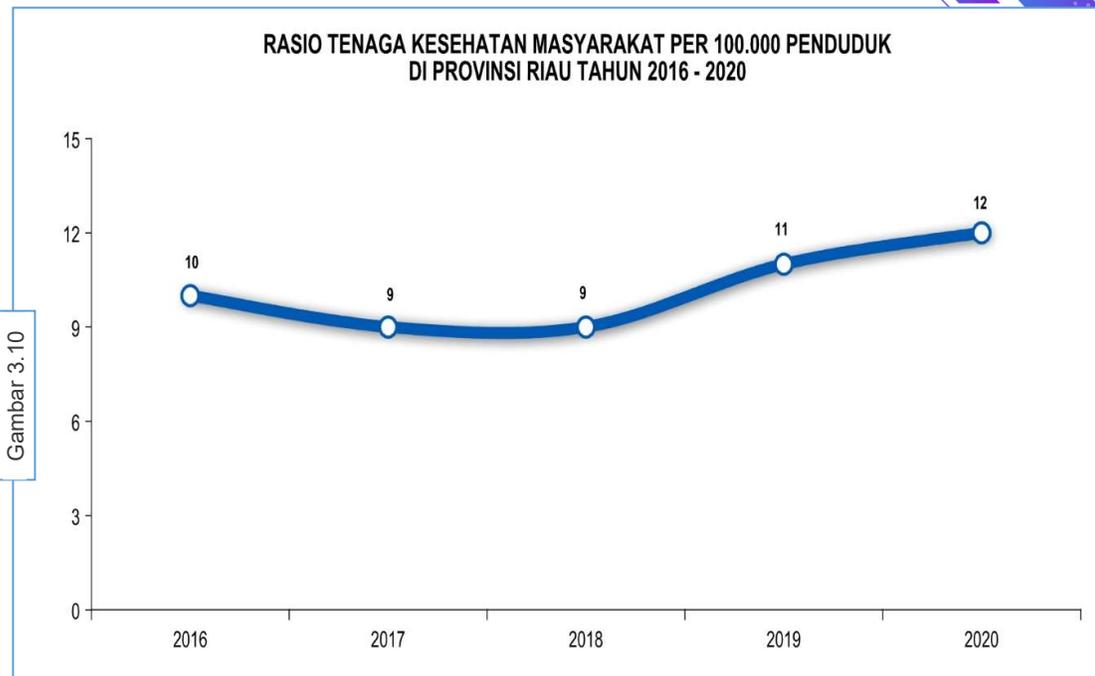


C. Jumlah Dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Dan Gizi Di Sarana Kesehatan

1. Tenaga Kesehatan Masyarakat

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 820 orang dengan rasio tenaga kesehatan masyarakat sebesar 12 per100.000 penduduk, rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio tahun 2019 sebesar 11 per 100.000 penduduk.

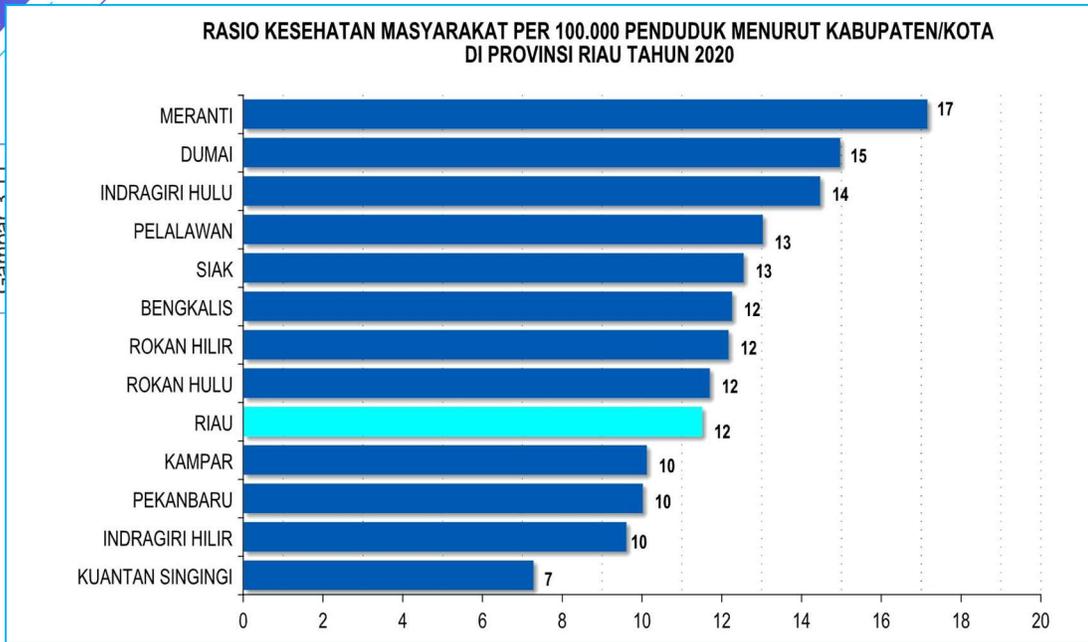
Untuk Provinsi Riau selama ini belum ada yang mencapai target rasio tenaga masyarakat yakni 15 per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Rasio tenaga kesehatan masyarakat yang masih jauh dari target ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan kepada masyarakat, karena ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Untuk melihat gambaran rasio tenaga kesehatan masyarakat selama 5 tahun (2016 - 2020) dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 3.10

Bila dilihat dari penyebaran tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota maka rasio tertinggi adalah Kabupaten Kep. Meranti (17 per 100.000 penduduk), diikuti dengan Kota Dumai sebesar 15 per 100.000 penduduk dan Kabuapten Indragiri Hulu sebesar 14 per 100.000 penduduk). Sedangkan rasio terendah tenaga kesehatan masyarakat adalah Kabupaten Kuantan Sengingi (7 per 100.000 penduduk), selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru masing-masing (10 per 100.000 penduduk). Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya Kabupaten Kep. Meranti dan Kota Dumai yang telah terpenuhi rasio tenaga kesehatan masyarakat bahkan telah mencapai target rasio tenaga kesehatan masyarakat tahun 2019 sebesar 15 per 100.000 penduduk. Kondisi ketersediaan tenaga kesehatan masyarakat menuntut komitmen dari Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Dan rasio tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.11



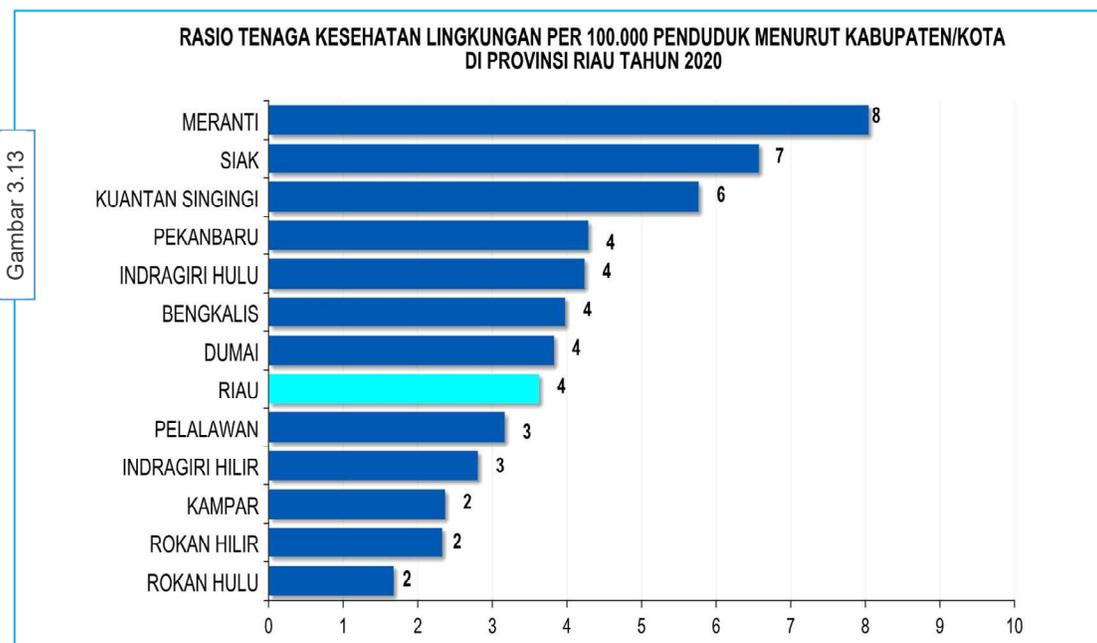
2. Tenaga Kesehatan Lingkungan

Gambar 3.12



Diatas merupakan gambaran rasio tenaga sanitasi tahun 2016-2019 per 100.000 penduduk. Tenaga sanitasi di Provinsi Riau tahun 2020 adalah 258 orang dengan rasio sebesar 4 per100.000 penduduk, rasio ini meningkat dibandingkan dengan rasio pada tahun 2019 (3,44 per 100.000 penduduk). Rasio pada tenaga sanitasi tahun 2020 ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga sanitasi tahun 2019 sebesar 18 per 100.000 penduduk.

Kemudian bila melihat penyebaran tenaga sanitasi di Kabupaten/Kota maka rasio tertinggi adalah Kabupaten Kep. Meranti (8 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Siak (7 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Kuantan Sengingi (6 per 100.000 penduduk). Sedangkan yang terendah Kabupaten Rokan Hilir (2 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar masing-masing (2,6 per 100.000 penduduk). Untuk rasio tenaga sanitasi di Provinsi Riau pada tahun 2020 ini tidak ada ada satu pun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mencapai target rasio tenaga sanitasi. Dan rasio saat ini masih sangat jauh dari target rasio tenaga sanitasi tahun 2020 yakni sebesar 18 per 100.000 penduduk.

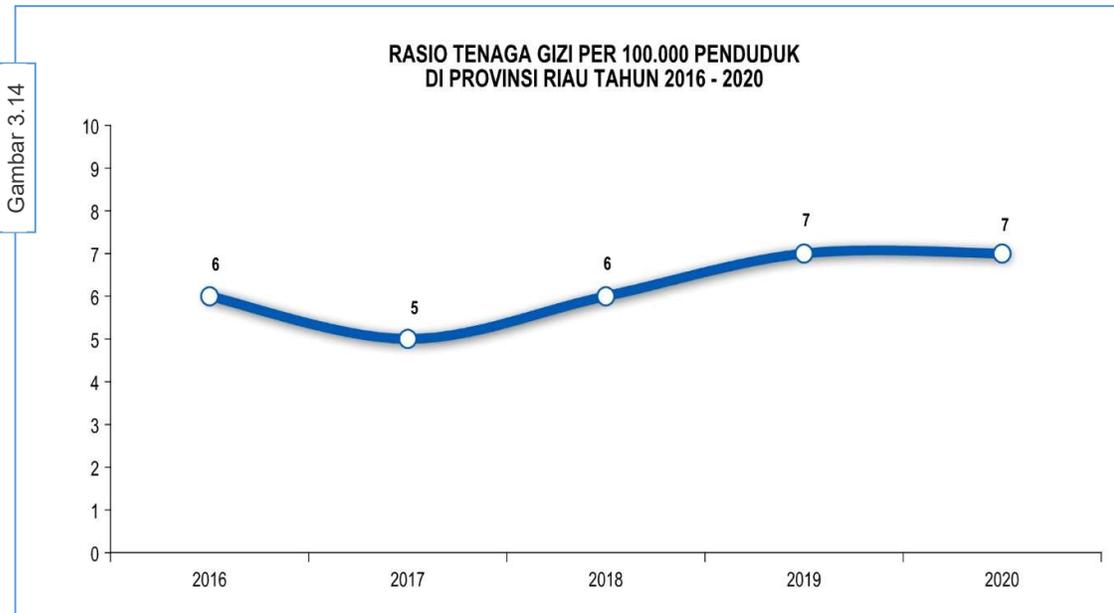


Gambar diatas menjelaskan Penyebaran rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk. Rendahnya penempatan tenaga sanitasi di daerah harus menjadi perhatian Pemerintah guna menekan angka kesakitan pada masyarakat yang disebabkan oleh lingkungan, dimana penyebab masalah kesehatan terbesar adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat.

3. Tenaga Gizi

Tenaga gizi terdiri dari Tenaga Nutrisionis dan Dietisien. Jumlah tenaga gizi di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah 469 orang, dengan rasio 7 per100.000 penduduk dan rasio ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 (7,3 per 100.000 penduduk). Dalam 5 (lima) tahun (2016 – 2020) rasio tenaga gizi terhadap per 100.000 masih sangat jauh dari target tenaga gizi 2020 (14 per 100.000

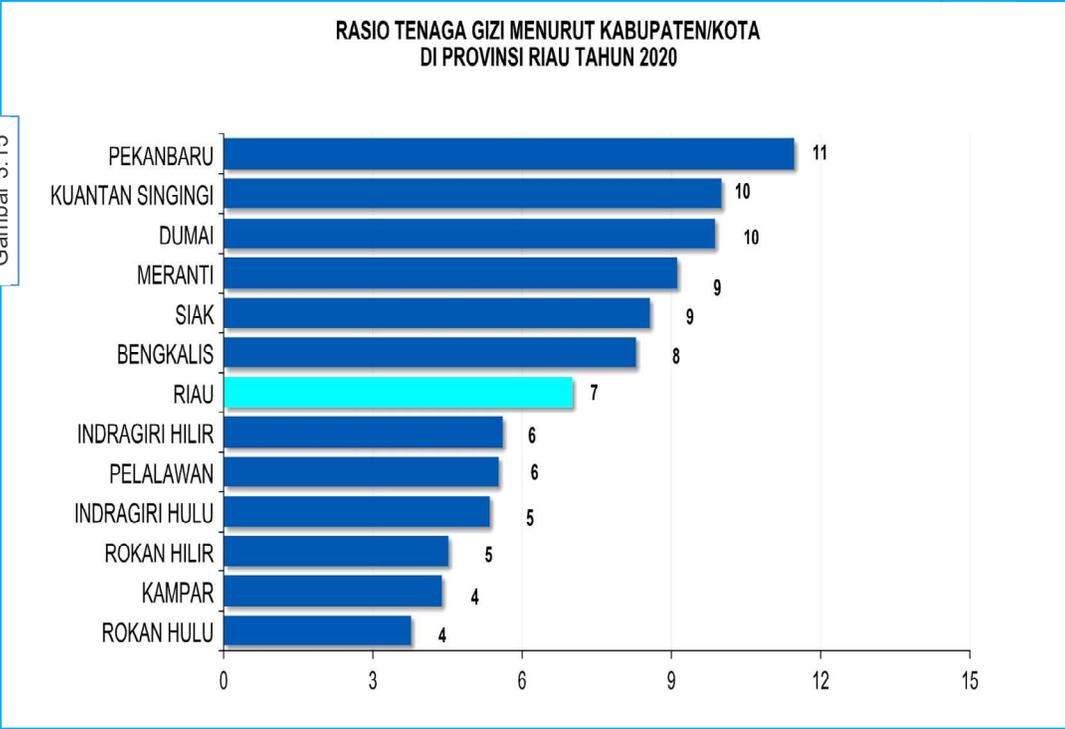
penduduk). Kekurangan tenaga gizi ini sangat menghambat pencapaian pembangunan kesehatan, khususnya program gizi karena keberhasilan program gizi di masyarakat sangat ditentukan oleh tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi. Apalagi saat ini program Pemerintah penanggulangan stunting merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan kesehatan. Dan gambaran ketersediaan tenaga gizi di Provinsi Riau 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari dilihat dari gambar berikut ini.



Untuk penyebaran tenaga gizi di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru yang memiliki rasio tertinggi (11 per100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Kuantan Seningi dan Kota Dumai masing-masing (10 per 100.000 penduduk).

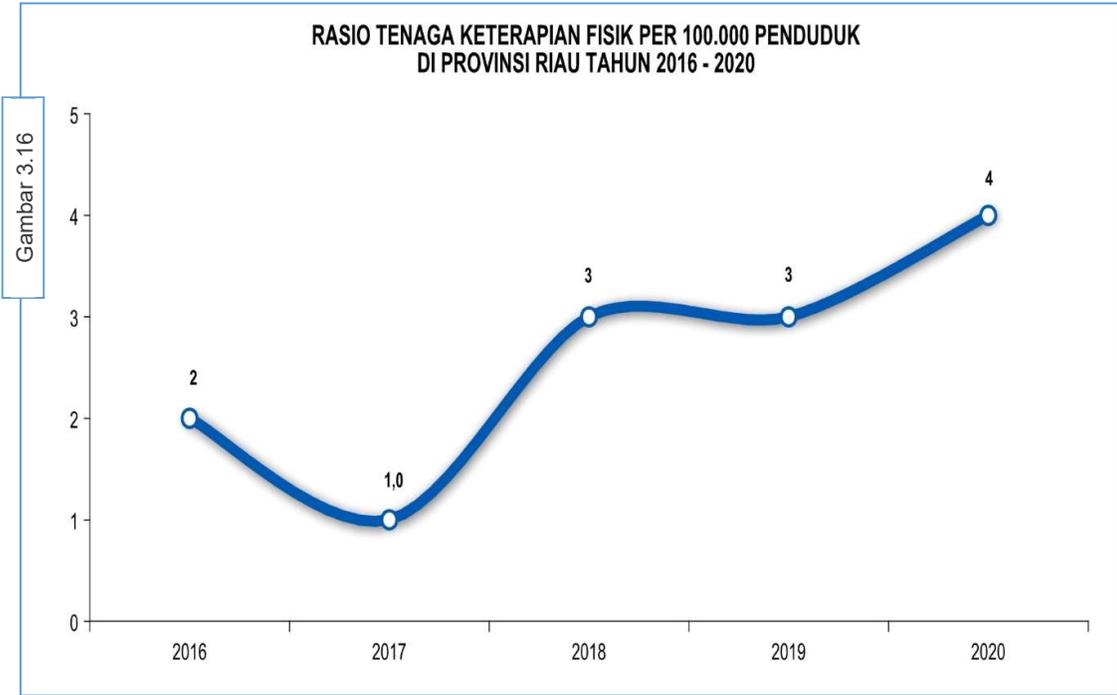
Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu diikuti Kabupaten Kampar masing-masing (4 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Rokan Hilir (5 per 100.000 penduduk). Ketersediaan tenaga gizi sangat dibutuhkan sekali di daerah, mengingat pentingnya keberadaan tenaga gizi dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu ketersediaan tenaga gizi harus menjadi perhatian Pemerintah baik Pusat maupun daerah guna perbaikan gizi masyarakat. Untuk mengetahui gambaran rasio tenaga gizi di Provinsi Riau tahun 2020 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.15



D. Jumlah Dan Rasio Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik, Dan Keteknisan Medik Di Sarana Kesehatan

1. Tenaga Keterampilan Fisik

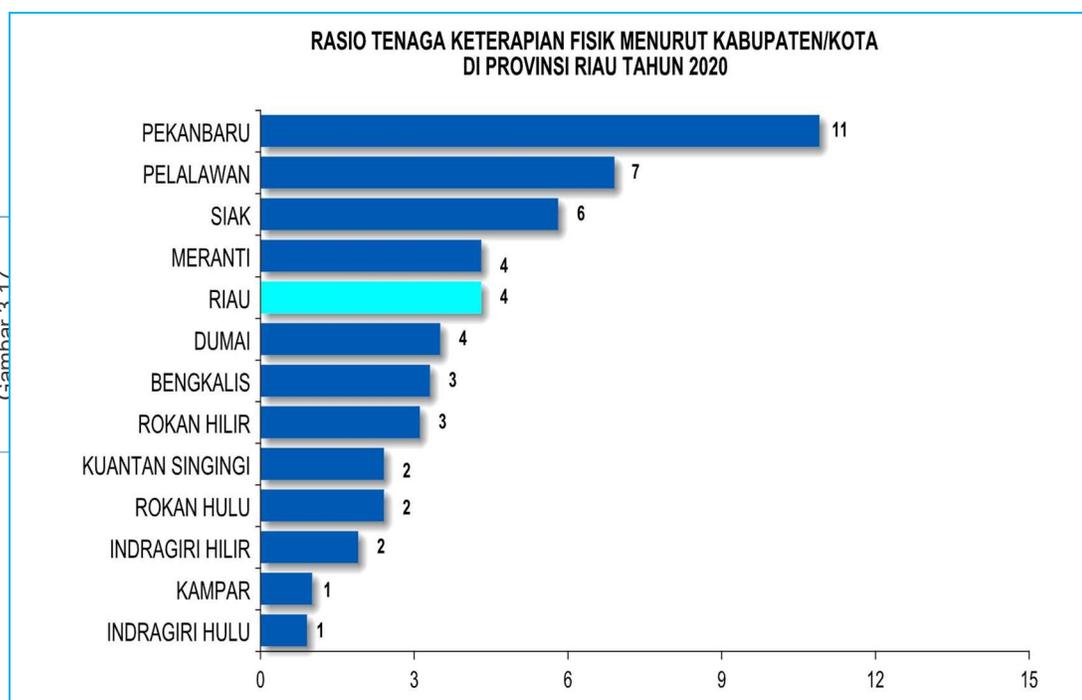


Gambar 3.16

Tenaga Keterampilan Fisik terdiri dari Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapi Wicara dan Akupuntur. Tenaga keterampilan fisik di Provinsi Riau tahun 2020 dengan rasio 4 per100.000 penduduk, rasio tenaga keterampilan fisik ini meningkat bila dibandingkan dengan rasio pada tahun 2019 (3 per100.000 penduduk).

Pada tahun 2020 ini rasio tenaga keterampilan fisik di Kabupaten/Kota tertinggi pada Kota Pekanbaru (11 per100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Pelalawan (7 per 100.000 penduduk) dan Kabupaten Siak (6 per100.000). Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar masing-masing (1 per 100.000 penduduk), dan Kabupaten Indragiri Hilir (2 per100.000 penduduk) .

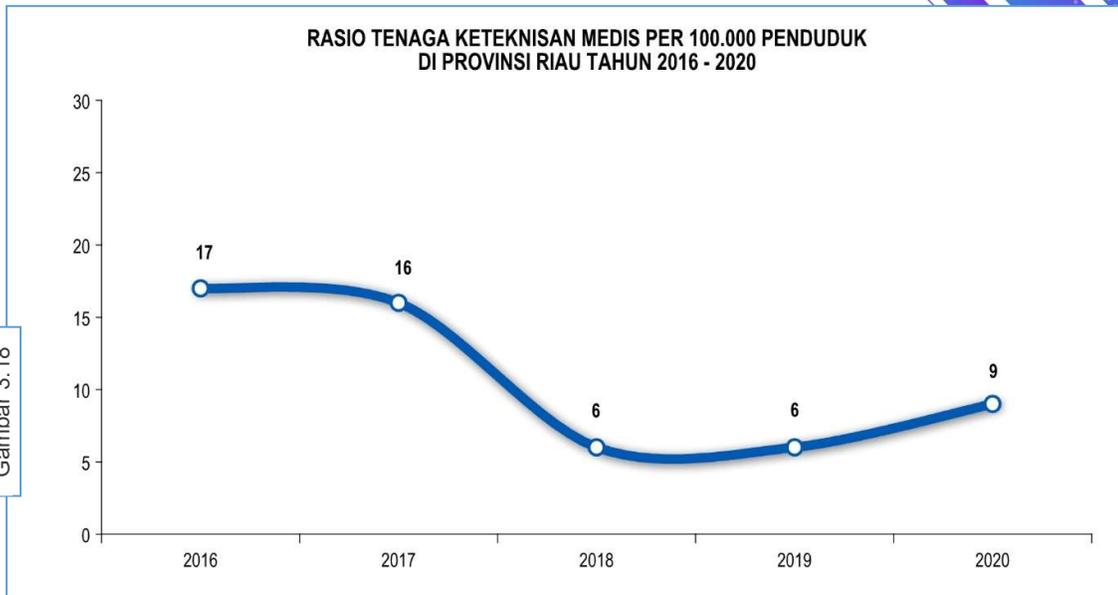
Untuk melihat lebih jelas gambaran rasio tenaga keterampilan fisik dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



2. Tenaga Keteknisan Medik

Tenaga teknisi medis terdiri dari Radiografer, Radioterapis, Teknis Elektromedis, Teknis Gigi, Analisis Kesehatan, Refraksionis Optisein, Ortetik Prostetik, Rekam medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Tranfusi Darah, Teknisi Kardiovaskuler. Tenaga teknisi medis di Provinsi Riau tahun 2020 memiliki rasio sebesar 9 per 100.000 penduduk, rasio ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 (6 per 100.000pendudk). Untuk mengetahui lebih jelas gambaran ketersediaan tenaga keteknisan medis dalam 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.18



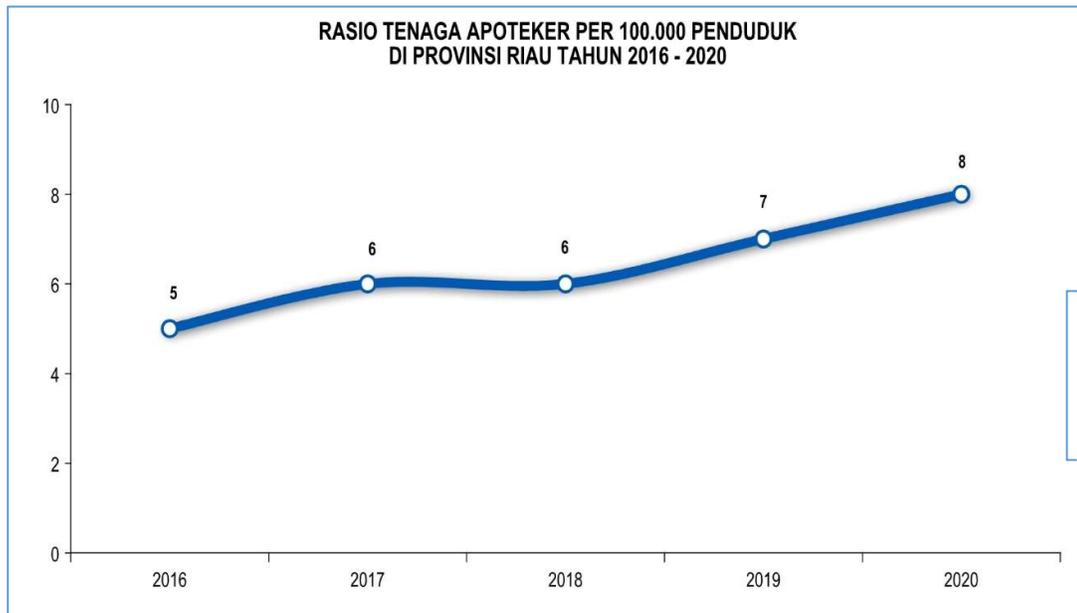
Jika dilihat dari penempatan tenaga keteknisan medis di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru (20 per 100.000 penduduk) seperti gambar di bawah ini, Selanjutnya Kota Dumai (20 per 100.000 penduduk) dan diikuti Kabupaten Kep. Meranti (16 per 100.000 penduduk). Ketersediaan tenaga keteknisan medis yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir masing-masing (4 per 100.000 penduduk) Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga keteknisan medis per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020.

Gambar 3.19



E. Jumlah Dan Rasio Tenaga Kefarmasian (Tenaga Teknis Kefarmasian Dan Apoteker) Di Sarana Kesehatan

1. Apoteker

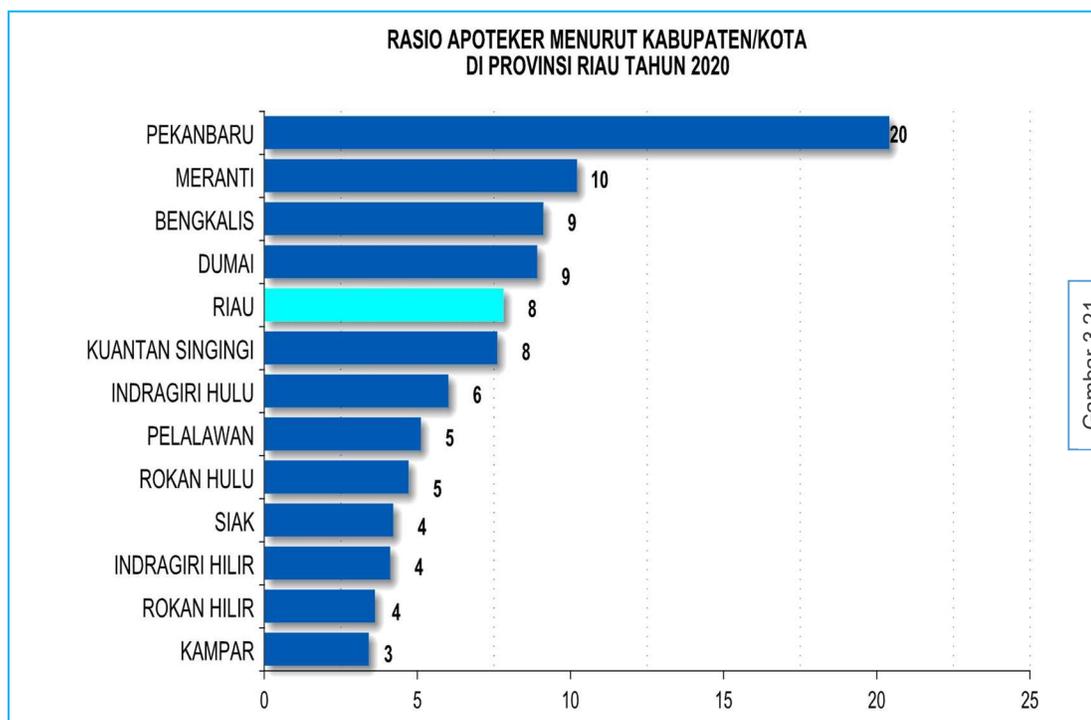


Untuk tenaga apoteker di Provinsi Riau tahun 2020 berjumlah 558 orang dengan rasio tenaga apoteker sebesar 8 per 100.000 seperti yang digambarkan pada gambar tren di atas. Rasio ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 dengan rasio 5 per 100.000 penduduk. Meskipun ketersediaan tenaga apoteker terus mengalami peningkatan namun dalam 5 (Lima) tahun terakhir belum ada yang mencapai target rasio tenaga apoteker pada tahun 2020 (11 per 100.000 penduduk). Kondisi ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standard kepada masyarakat, dan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bagaimana memenuhi ketersediaan tenaga apoteker agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Jika dilihat dari penempatan tenaga apoteker di Kabupaten/Kota masih dominannya berada di daerah Kota seperti Kota Pekanbaru (20 per 100.000 penduduk) seperti gambar di bawah di atas, Untuk Kota Pekanbaru rasio tenaga apoteker ini telah melampaui rasio tenaga apoteker tahun 2020 yang menjadi target sebesar 11 apoteker per 100.000 penduduk.

Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Meranti (10 per 100.000 penduduk) dan diikuti Kabupaten Bengkalis (9 per 100.000 penduduk).

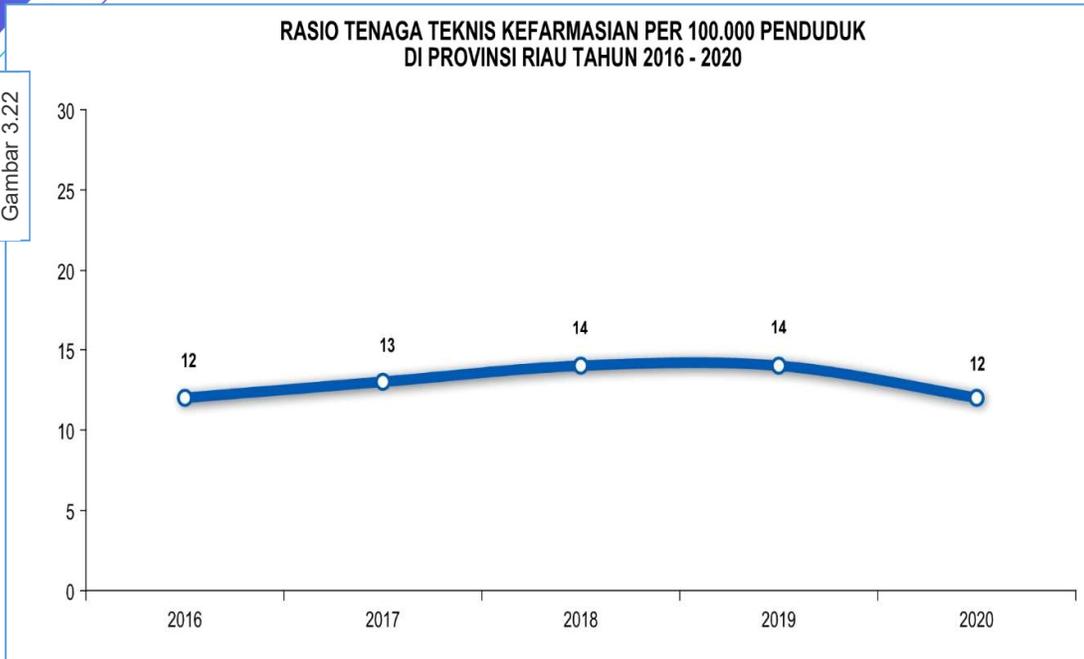
Ketersediaan tenaga apoteker yang terendah adalah Kabupaten Kampar (3 per 100.000 penduduk) diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir (4 per 100.000 penduduk). Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bagaimana rasio tenaga apoteker per 100.000 penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2020.



2. Tenaga Teknis Kefarmasian

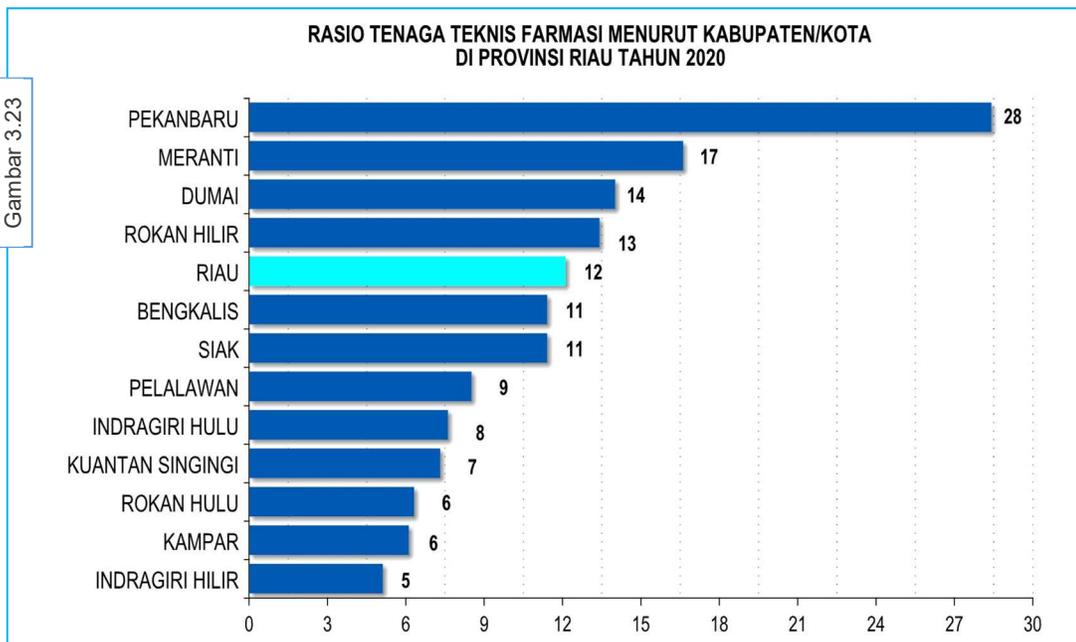
Untuk tenaga teknis kefarmasian terdiri dari S-1 Farmasi, D-III Farmasi, dan Asisten Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian di Provinsi Riau pada tahun 2020 ini berjumlah 866, dengan rasio 12 per 100.000 penduduk. Dan rasio ini menurun dibandingkan dengan rasio tenaga teknis kefarmasian tahun 2019 (14 per 100.000 penduduk) dan 2018 memiliki rasio 14 per 100.000 penduduk. Untuk lebih jelas dapat dilihat gambar rasio tenaga kefarmasian 5 tahun terakhir (2016-2020) dibawah ini.

Gambar 3.22



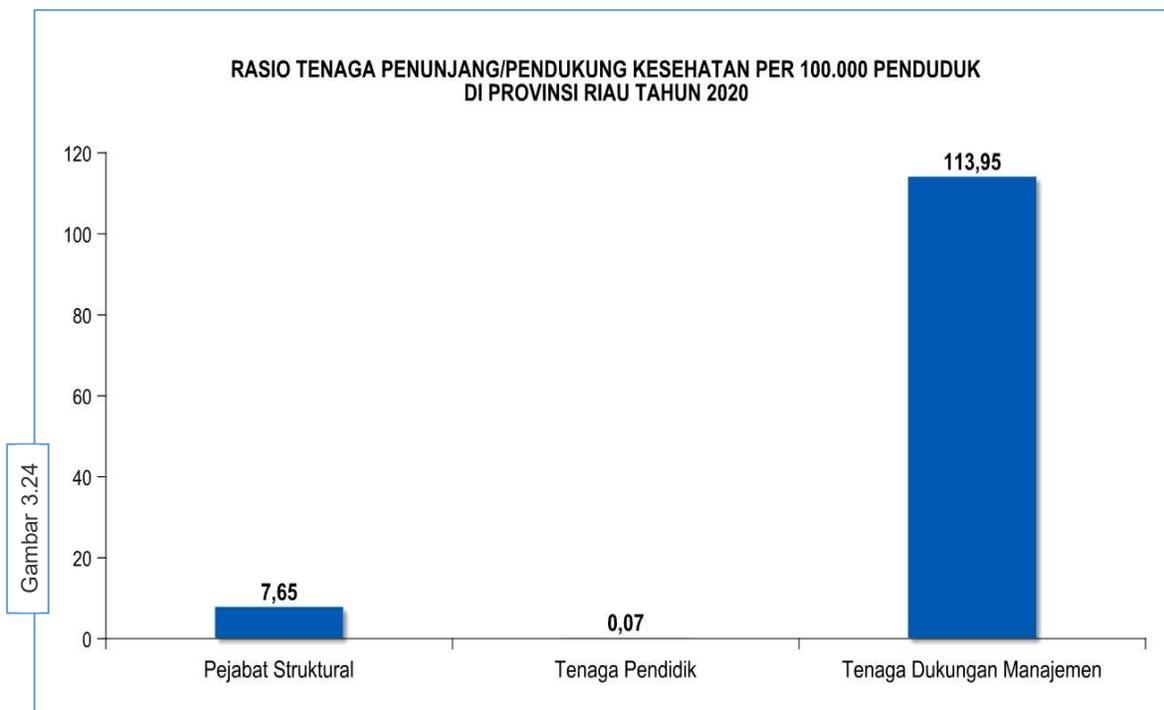
Sedangkan bila dilihat rasio tenaga teknis kefarmasian berdasarkan Kabupaten / Kota maka rasio tenaga teknis kefarmasian yang tertinggi ada pada Kota Pekanbaru (28 per 100.000 penduduk) diikuti Kabupaten Kep. Meranti (17 per 100.000 penduduk) dan Kota Dumai (14 per 100.000 penduduk), kemudian rasio tenaga teknis kefarmasian rasio terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (5 per 100.000 penduduk) diikuti Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu masing-masing 6 per 100.000 penduduk.

Gambar 3.23



F. Jumlah Dan Rasio Tenaga Penunjang/ Pendukung Kesehatan

Tenaga Penunjang/Pendukung kesehatan terdiri dari pejabat struktural, staf penunjang administrasi, staf penunjang teknologi, staf penunjang perencanaan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu juga ketersediaan tenaga non kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerja sarana kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan lainnya dan penunjang kesehatan di Provinsi Riau pada tahun 2020 berjumlah 8.673 orang dengan rasio 122 per 100.000 penduduk. Adapun rincian tenaga penunjang ini adalah seperti gambar dibawah ini.



Jika dilihat dari ketersediaan tenaga Penunjang Kesehatan yang tersebar di kabupaten/kota sebagian besar tersebar di Kota Pekanbaru, diikuti Kabupaten Kep. Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Dan Kabupaten Kuantan Sengingi merupakan daerah yang paling sedikit tenaga penunjangnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari graik dibawah ini.

Gambar 3.25



Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Riau masih belum ter cukupi, namun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) telah berusaha mencukupi kebutuhannya melalui pengangkatan tenaga baru seperti CPNS, PTT dan kontrak, yang terpenting saat ini keberadaan tenaga kesehatan tersebut belum merata sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota, masih ditemui penempatan tenaga pada satu daerah sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum semua terjangkau.

Mobilitas tenaga atau distribusi tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah pelayanan kesehatan diupayakan dengan peningkatan sarana-sarana kesehatan yang ada, seperti peningkatan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan pemberian insentif. Guna mengatasi masalah ketenagaan maka salah satu langkah awal kedepan adalah pemetaan tenaga kesehatan disertai dengan analisis kebutuhan berdasarkan problema spesifik dan kewilayahan.



Pembiayaan Kesehatan

BAB 4

PEMBIAYAAN KESEHATAN

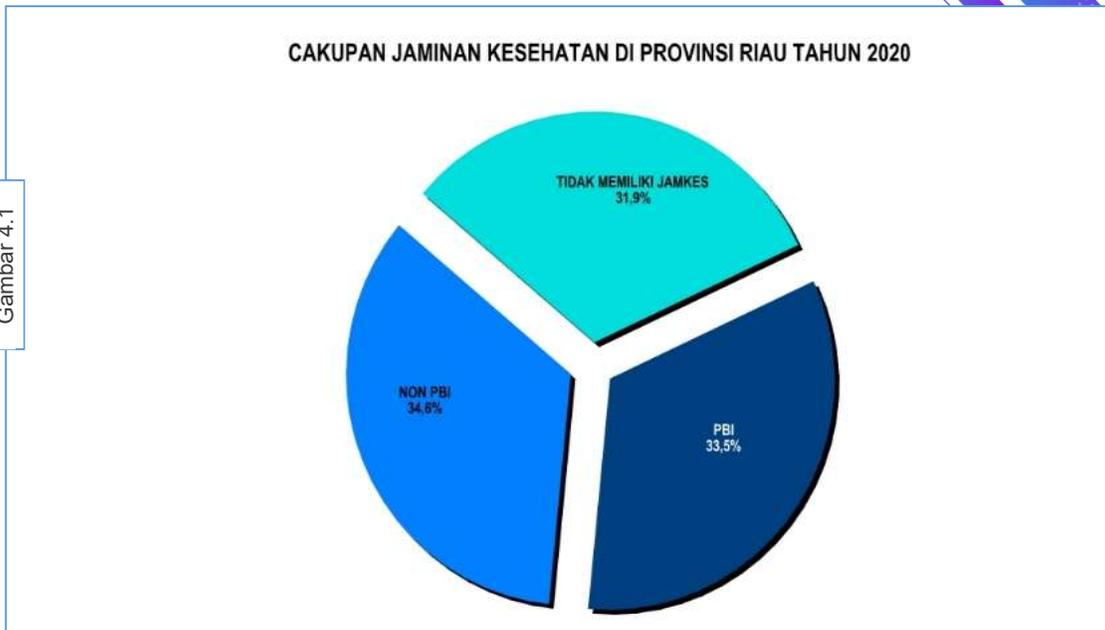
A. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana tujuan pembangun kesehatan, maka Pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2014 telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyatnya secara bertahap. Melalui penerapan Jaminan Kesehatan Nasional ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang tidak berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan di kala sakit karena tidak memiliki biaya.

Pada tahun 2020, peserta jaminan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 4.853.222 jiwa terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dengan rincian sebagai berikut :

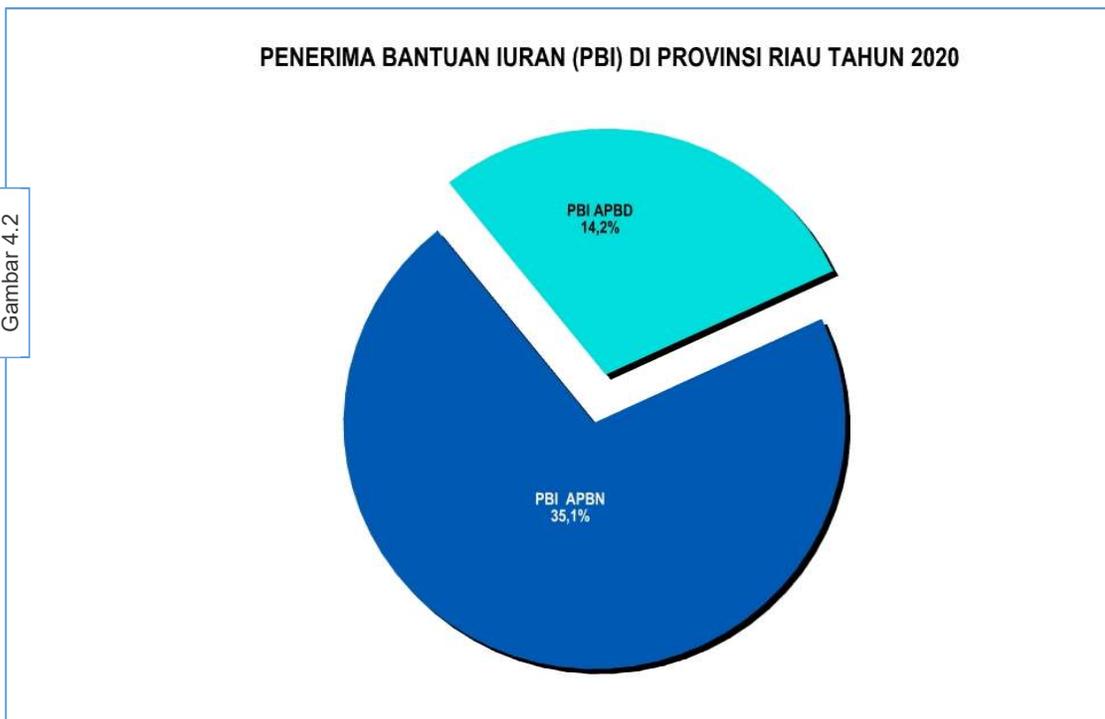
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah melalui APBN sebanyak 1.703.048 jiwa.
2. PBI APBD adalah peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah daerah melalui APBD sebanyak 686.931 jiwa.
3. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, pegawai Pemerintah non PNS, dan pegawai swasta sebanyak 1.539.522 jiwa.
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri adalah jaminan kesehatan dengan peserta yang berasal dari pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan sebanyak 857.695 jiwa.
5. Bukan Pekerja (BP) adalah peserta jaminan kesehatan yang terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan sebanyak 66.026 jiwa.

Gambar 4.1

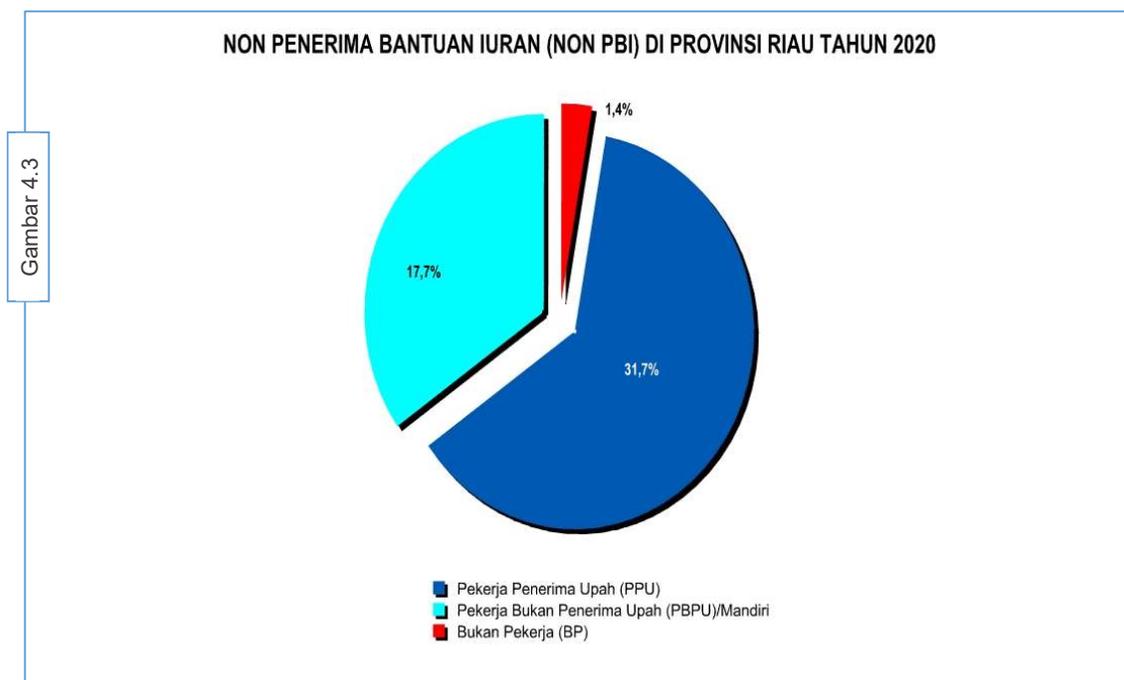


Gambar di atas merupakan gambaran Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2020. Dimana pada di tahun 2020 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Provinsi Riau ini adalah sebesar 68% atau sekitar 4.853.222 jiwa. Ini artinya ada sekitar 32% penduduk Provinsi Riau itu belum memiliki Jaminan Kesehatan. Dari 68% penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 34% dan Non Penerima bantuan Iuran (Non PBI) 35%.

Gambar 4.2



Pada gambar di atas, dijelaskan bahwa Kepesertaan jaminan kesehatan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebesar 49,3% yang terbesar bersumber dari Anggaran APBN(35,1%) dan APBD (14,2%).



Sedangkan untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Non PBI sebesar 50,8% dan yang kepesertaan yang terbanyak dari PPU (31,7%), PBPU/mandiri (17,7%) dan Bukan Pekerja sebesar 1,4% sekaligus paling sedikit kepesertaannya.

Karena saat ini masyarakat kita masih ada yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan sekitar 32%, maka perlu adanya pergerakan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam melindungi kesehatannya dan keluarga dengan menjadi peserta jaminan kesehatan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.

B. Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk pemanfaatan dana desa/keluarahan, maka untuk Provinsi Riau 12 Kabupaten/Kota telah memanfaatkan dana desa. Sedangkan jumlah desa yang memnfaatkan dana desa untuk kesehatan sebanyak 1.756 desa dari 1.710 desa yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota atau 97,4%. Untuk mengetahui secara jelas persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan dana Desa bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

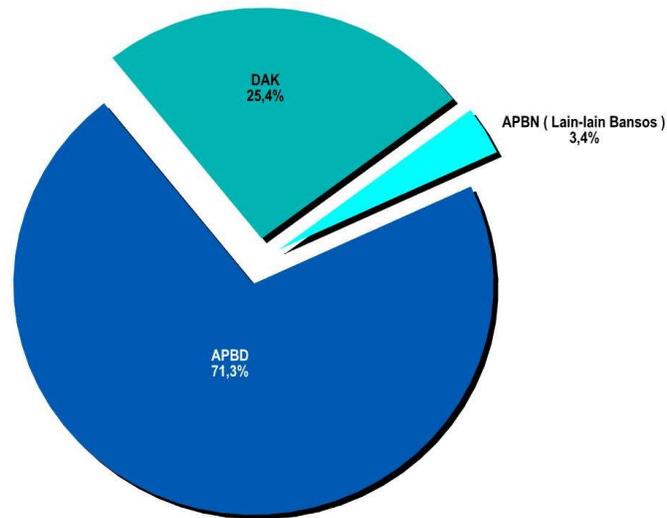


C. Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kabupaten / Kota

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SUMBERNYA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020

Gambar 4.5



Gambar di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2020 jumlah total anggaran kesehatan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah sebesar Rp. **2.060.797.142.837** sumber anggaran kesehatan terbesar di Kabupaten / Kota berasal dari APBD Kabupaten / Kota sebesar 71,26%, sumber dari DAK 25,35%. Dan yang terkecil bersumber APBN (lain-lain, mis bansos) sebesar 3,39% Dari gambar dibawah ini terlihat gambaran sumber anggaran kesehatan di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2020.

Anggaran kesehatan Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran APBD Kabupaten/Kota, APBN, APBD Provinsi dan Pemerintah lain (pinjaman/hibah luar negeri). Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah baik di Provinsi serta Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

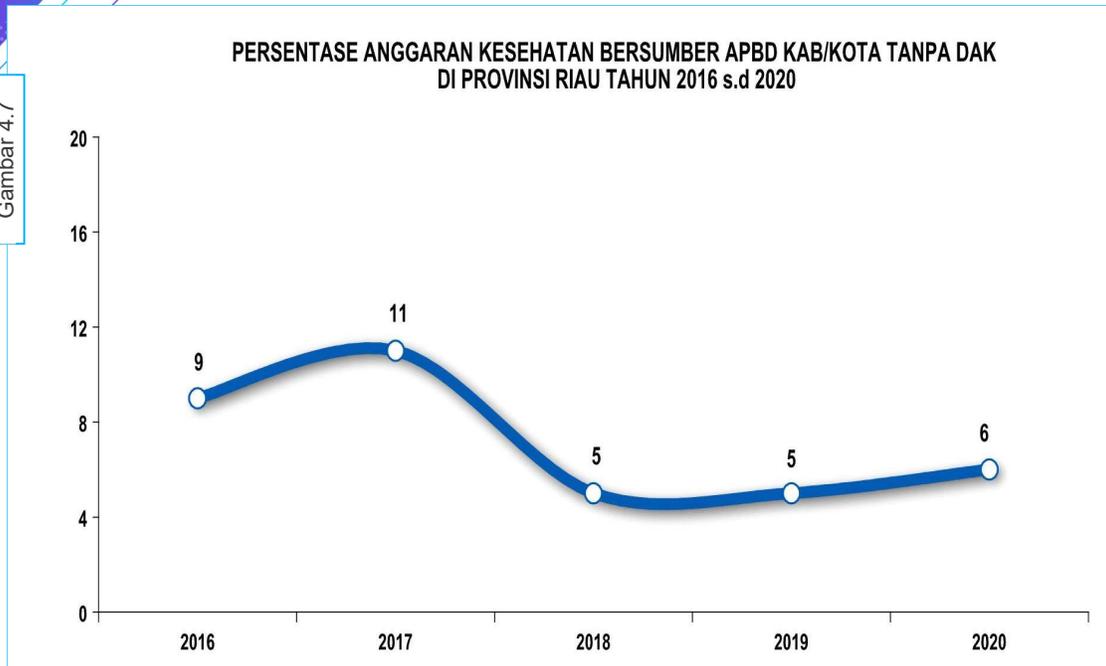
Persentase alokasi anggaran kesehatan merupakan gambaran sejauh mana respon Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.



Dari gambaran grafik di atas, untuk persentase anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten/Kota terhadap APBD Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang mempunyai persentase terbesar (12,78%), diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebesar 12,78% dan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru masing-masing 7,49%. Sedangkan persentase total anggaran kesehatan terhadap total anggaran APBD nya terkecil yaitu Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,09% diikuti oleh sebesar Kabupaten Kep. Meranti 3,42% dan Kabupaten Kampar sebesar 3,53%.

Di Provinsi Riau Tahun 2020 baru 2 Kabupaten/Kota (Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak) yang sudah menjalankan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa besar anggaran kesehatan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Berikut ini gambaran persentase anggaran kesehatan terhadap total APBD Kabupaten/kota 5 tahun terakhir.

Gambar 4.7

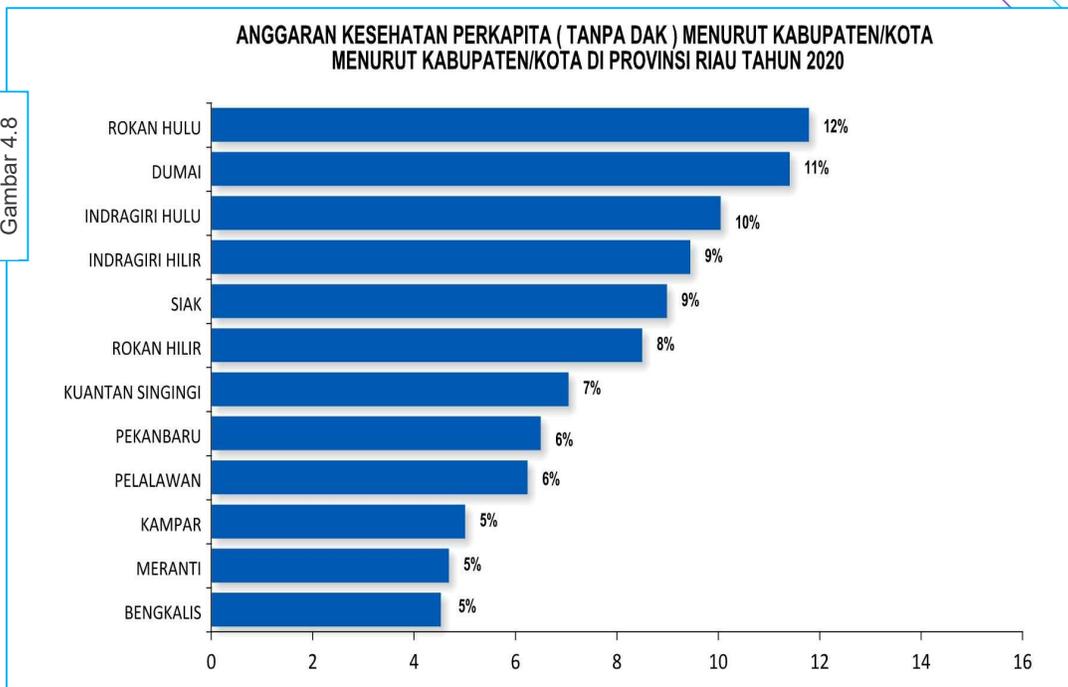


Besarnya alokasi anggaran kesehatan tersebut sangat penting karena ini merupakan komitmen Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan kesehatan di daerahnya. Hal ini mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Semakin besar belanja kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah diharapkan semakin baik pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Dan saat ini setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban pencapaian Standar Pelayanan Minimal 100%.

D. Anggaran Kesehatan Perkapita

Namun dalam melakukan penganggaran tidak hanya memperhatikan berapa besarnya persentase anggaran tersebut untuk kesehatan, juga harus melihat penduduk dari daerah tersebut. Untuk Alokasi Anggaran kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2019 ini yang dihubungkan dengan besarnya penduduknya atau anggaran kesehatan perkapita seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.8



Untuk anggaran kesehatan perkapita terbesar adalah Kabupaten Siak (580.197), dan selanjutnya adalah Kabupaten Pelalawan (386.761) dan Kabupaten Bengkalis (258.074). Sedangkan Anggaran kesehatan perkapita terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir (2.601), diikuti Kabupaten Rokan Hulu (91.419) dan Kabupaten Kampar (109.646).



Kesehatan Keluarga

BAB 5

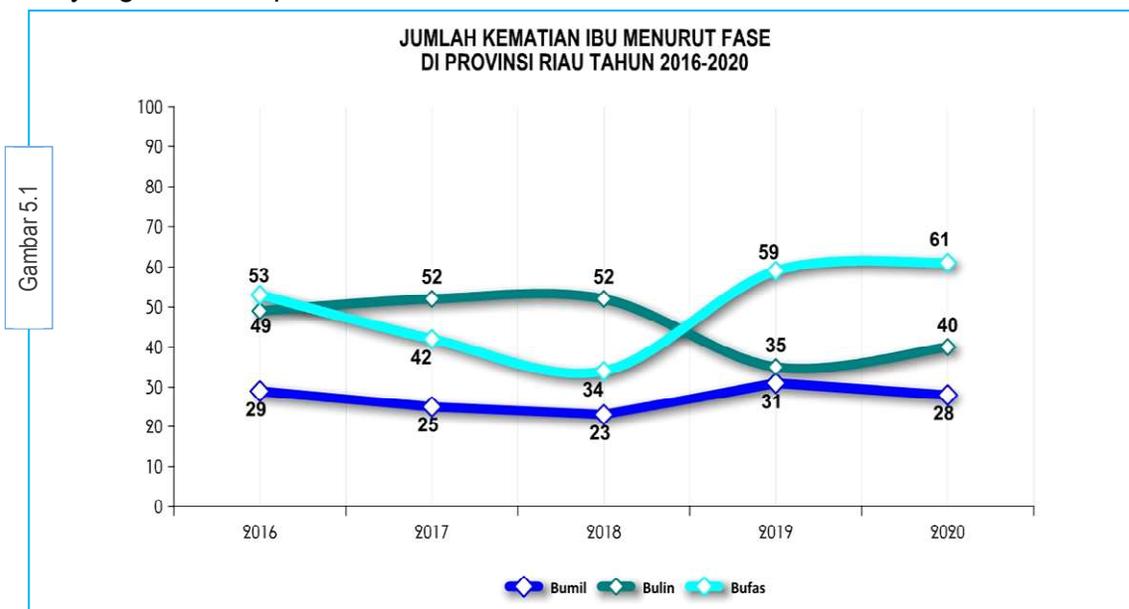
KESEHATAN KELUARGA

A. KESEHATAN IBU

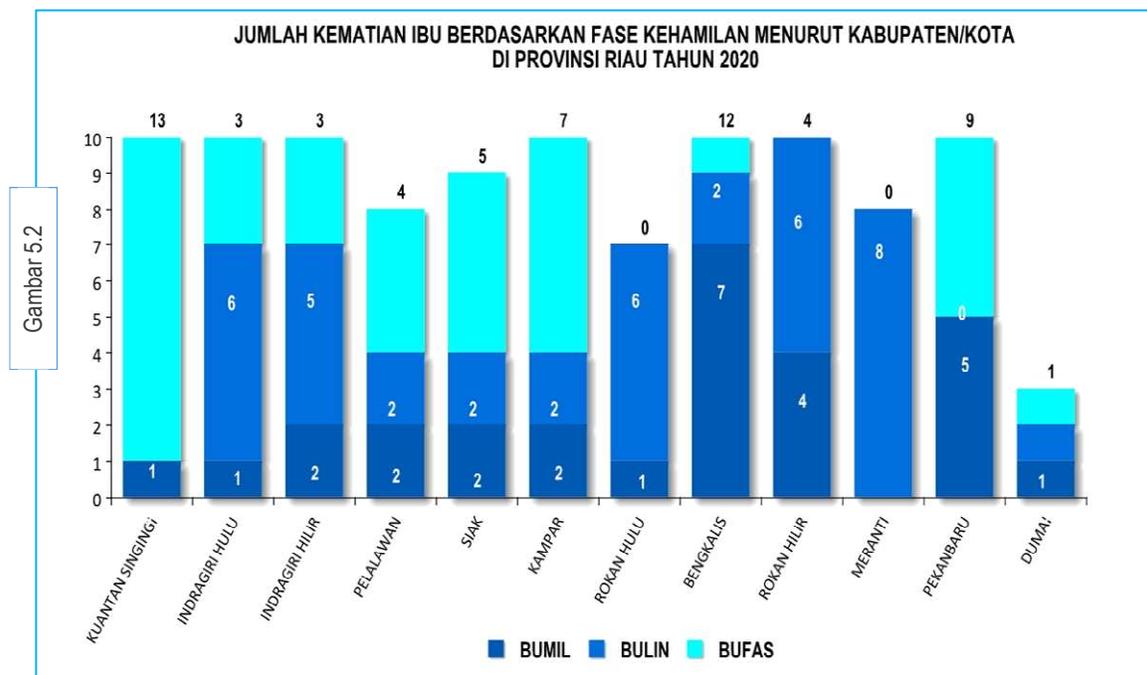
1. Jumlah Dan Angka Kematian Ibu (Dilaporkan)

Setiap hari, 830 ibu di dunia (di Indonesia 38 ibu, berdasarkan AKI 305) meninggal akibat penyakit/komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan, artinya, bila AKI tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Kematian ibu dapat disebabkan karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, sekitar 15% kehamilan/persalinan mengalami komplikasi.

Jumlah kematian ibu adalah jumlah kematian ibu yang terjadi pada saat ibu hamil, ibu bersalin atau pada saat ibu nifas (sampai dengan 42 hari pasca persalinan) diluar kejadian karena kecelakaan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 mencapai 129 orang, dimana jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kasus kematian tahun 2019 yaitu 125 orang. Hal ini bisa saja disebabkan oleh factor mulai terlaksananya pelaporan kematian ibu secara online melalui aplikasi Maternal Death Notification (MDN), sehingga tidak ada lagi kematian ibu yang tidak dilaporkan.



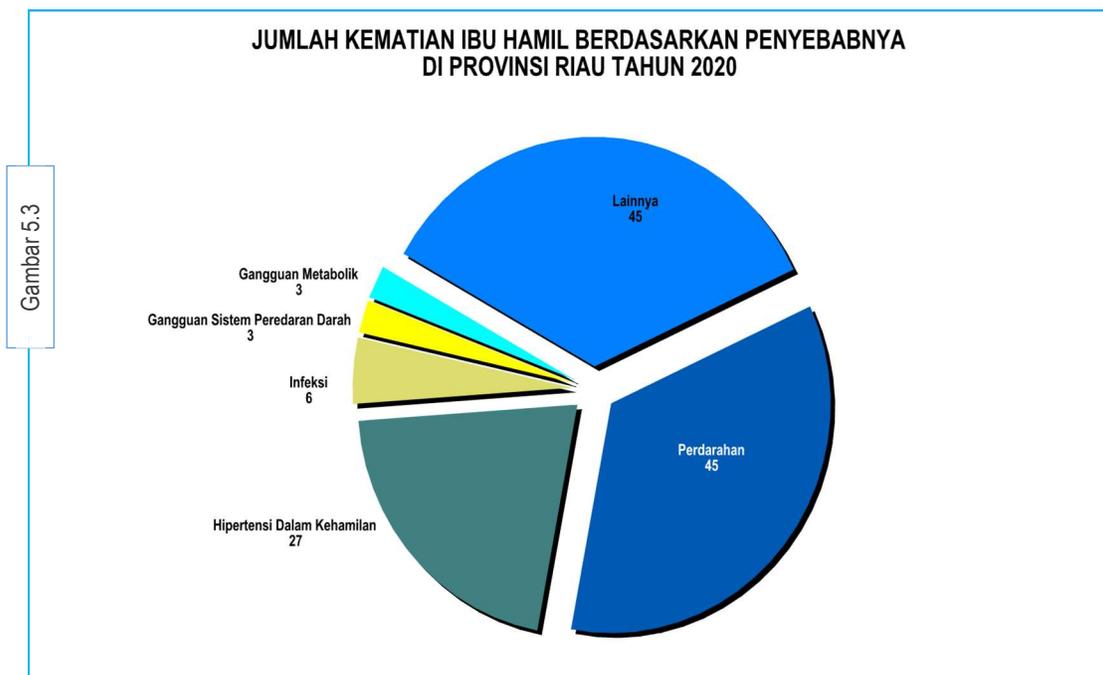
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu tahun 2020 ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 129 kematian ibu, dengan rincian kematian ibu hamil sebanyak 28 orang, kematian ibu bersalin 40 orang dan kematian ibu di masa nifas 61 orang. Untuk jumlah kematian ibu, fase nifas dalam 3 tahun ini terus mengalami peningkatan. Untuk itu harus lebih di cari apa yang menjadi penyebab utama sehingga fase nifas ini terus mengalami peningkatan. Sehingga kematian ibu dapat ditekan dari fase nifas. Dari seluruh jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan masa nifas ini dapat dirincikan jumlah kematiannya per kabupaten/kota seperti grafik di bawah ini :



Gambar 5.2

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu hamil tertinggi berada di kabupaten Bengkalis sebanyak 7 orang dan kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada memiliki jumlah kematian ibu hamil. Untuk jumlah kematian ibu melahirkan terbanyak di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 8 orang dan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Sengingi tidak ada. Sedangkan jumlah kematian ibu masa nifas tertinggi ada di kabupaten Kuantan Sengingi sebanyak 13 orang dan ada 2 Kabupaten yang tidak ada kasus kematiannya yakni Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

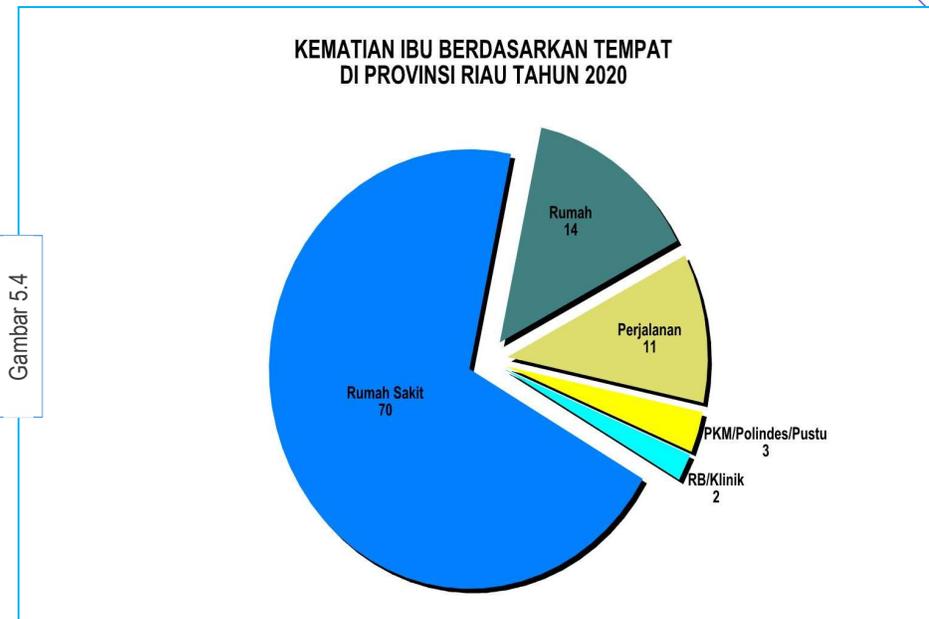
Penyebab kematian ibu sebanyak 129 orang tahun 2020 di Provinsi Riau, dapat dirinci sebagai berikut :



Pada diagram dapat dilihat bahwa persentase penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan dan penyebab lainnya masing-masing 35 % diikuti dengan Hipertensi dalam Kehamilan sebanyak 21% dan Infeksi 5%. Sedangkan gangguan sistem peredaran darah dan gangguan metabolik masing-masing 2%.

Sekitar 15% dari kehamilan/persalinan mengalami komplikasi yang keselamatannya tergantung pada ketepatan waktu dan kesiapan pelayanan kesehatan. Kesiapan Pelayanan berkualitas setiap saat atau 24 jam 7 hari (24/7) perlu dioptimalkan agar semua ibu hamil/melahirkan yang mengalami komplikasi setiap saat mempunyai akses ke pelayanan darurat berkualitas dalam waktu cepat karena sebagian komplikasi memerlukan pelayanan kegawat daruratan dalam hitungan jam.

Berikut adalah diagram tempat kematian ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2020.



Gambar 5.4

Dari diagram diatas terlihat tempat-tempat terjadinya kasus kematian ibu di Provinsi Riau, yaitu dari 129 kasus kematian ibu, maka kematian ibu paling banyak terjadi di Rumah Sakit sebanyak 70%, diikuti di rumah sebanyak 14% dan perjalanan 11%, Polindes 3%, dan klinik 2%. Bila di lihat dari distribusi data diatas, dapat terlihat terjadinya pergeseran paradigma tempat terjadinya kematian ibu, yang dahulunya banyak kasus kematian ibu terjadi di rumah namun saat ini kasus kematian ibu banyak terjadi di Rumah Sakit. Hal ini bisa disebabkan oleh karena faktor 3 (tiga) terlambat, yaitu terlambat di rujuk, terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan dan terlambat mendapat penanganan.

2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil (Cakupan Kunjungan K-1 Dan K-4)

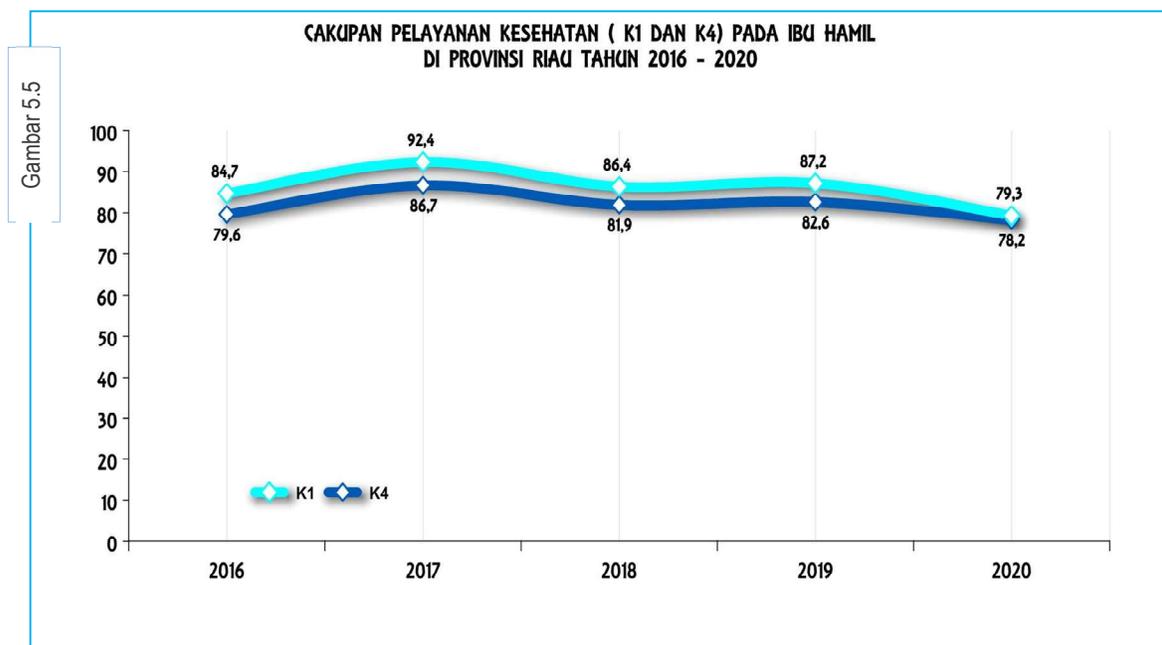
Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kontak ibu hamil dengan pemberi perawatan/asuhan dalam hal mengkaji kesehatan dan kesejahteraan bayi serta kesempatan untuk memperoleh informasi dan memberi informasi bagi ibu dari petugas kesehatan. Dalam Kunjungan Antenatal care ini dilakukan Pemeriksaan pada ibu hamil secara fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan, Nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.

Tujuan Utama dari Pemeriksaan Kehamilan (ANC) adalah memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan membina hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan kesehatan.

Kunjungan Antenatal Care minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut :

1. Trimester I : satu kali kunjungan (sebelum usia kehamilan 14 minggu) = K1
2. Trimester II : satu kali kunjungan (usia kehamilan antara 14-28 minggu) = K2
3. Trimester III : dua kali kunjungan (usia kehamilan antara 28-36 minggu dan sesudah kehamilan 36 minggu) = K3 dan K4

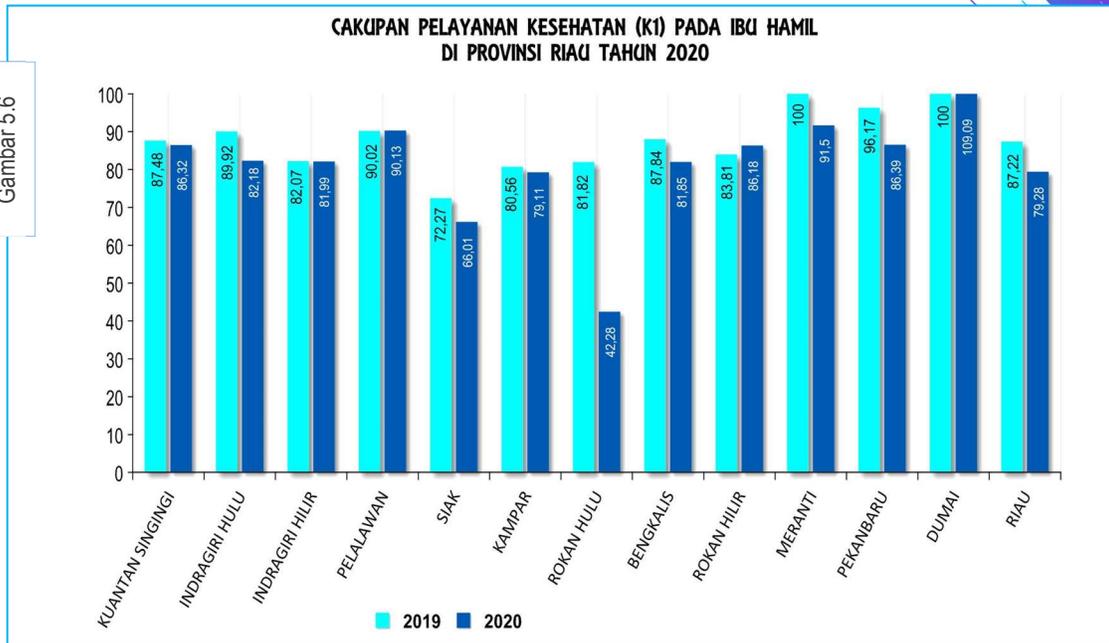
Grafik berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan (K1 dan K4) di Provinsi riau dari tahun 2015 sampai tahun 2019.



Dari grafik diatas terlihat cakupan pelayanan kesehatan (K1 dan K4) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terlihat fluktuatif. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan kehamilannya dan masih perlunya optimalisasi promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya.

Untuk melihat upaya pencapaian cakupan Pelayanan Kesehatan (K1) pada ibu hamil kabupaten/Kota Provinsi Riau di tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

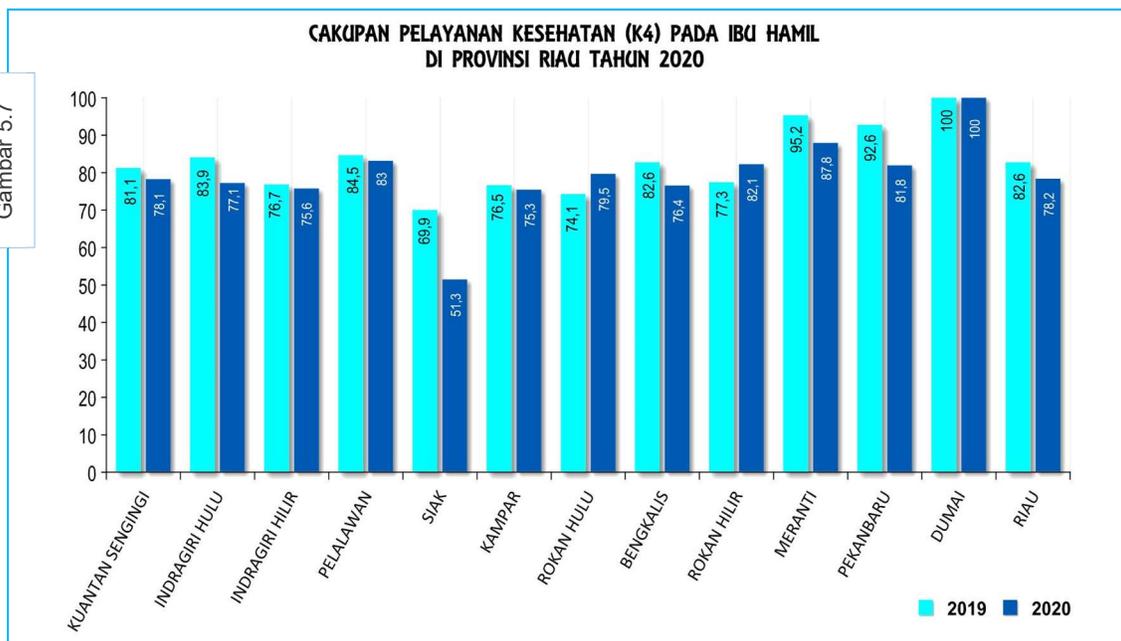
Gambar 5.6



Dalam grafik terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil di kabupaten/kota Provinsi Riau sebagian besar mengalami penurunan. Cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang telah mencapai 100 % ada di kota Dumai, sedangkan cakupan pelayanan kesehatan K1 pada ibu hamil yang paling rendah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 42,3 %.

Sedangkan untuk capaian cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil dari Kabupaten/Kota dapat kita lihat dari grafik berikut ini :

Gambar 5.7

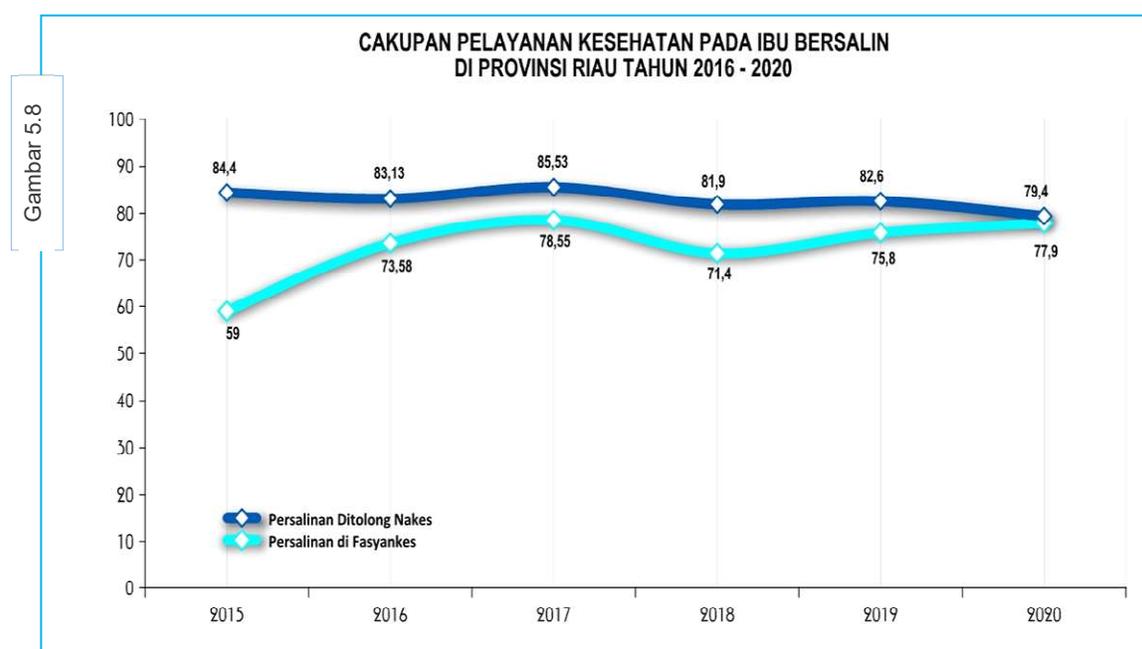


Pada Grafik diatas dapat terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil di kabupaten/kota Provinsi Riau sebagian besar juga mengalami penurunan. Cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil yang telah mencapai 100 % hanya ada di kota Dumai, sedangkan cakupan pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil yang paling rendah di kabupaten Siak sebesar 51,3 %.

3. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)

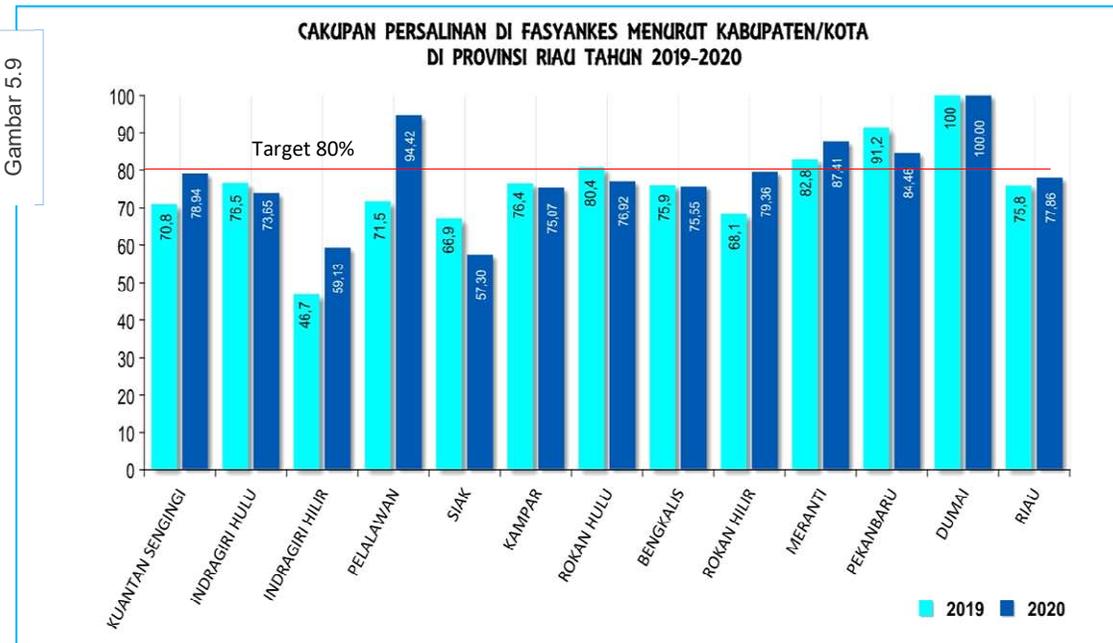
Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga profesional (Dokter, dan Bidan) di fasilitas Pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Rumah Bersalin, BPM/BPS).

Dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan di fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi. Berikut adalah Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang ditolong Nakes dan Fasyankes di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020.



Dari grafik ini dapat terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu mendapat perhatian karena peningkatan cakupan tahun ini kecil dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 capaian mencapai 77,9% dan meningkat dibandingkan tahun 2019 menjadi 75,8%. Pertolongan Persalinan yang dilaksanakan di Fasyankes menjadi factor penentu bagi Keselamatan persalinan.

Sementara untuk pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan juga mengalami sedikit penurunan, dimana persalinan tenaga kesehatan 2020 mencapai 79,4% dan 82,6% persalinan tenaga kesehatan 2019. Dibawah ini adalah grafik cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan



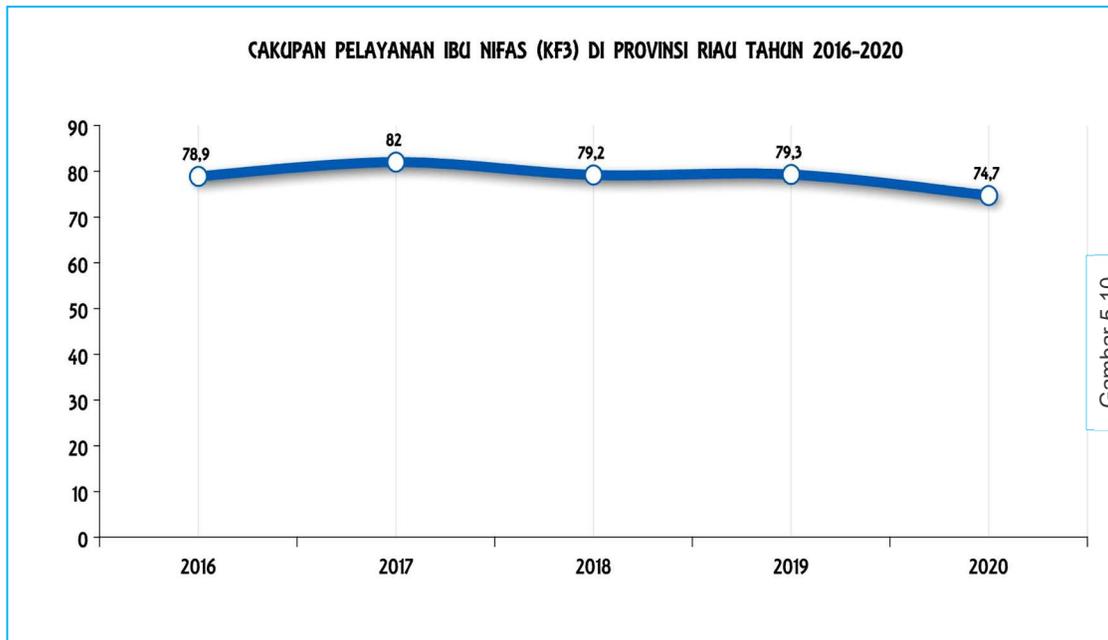
Dari grafik di atas terlihat bahwa capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar 78%. Dan capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan yakni 80%. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan dimana capaian PF di tahun 2019 sebesar 76%. Ada 4 (empat) kabupaten/kota sudah mencapai target yaitu Kota Dumai (109,5%), Kabupaten Pelalawan (94,4%), Kabupaten Kepulauan Meranti (87,4%), Kota Pekanbaru (84,5%).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil masih perlu pembinaan agar capaian dapat lebih ditingkatkan. Upaya yang dilakukan untuk kendala diatas adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan, orientasi dan sosialisasi
- Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas terpilih
- Puskesmas telah mengalokasikan anggaran melalui dana BOK untuk kunjungan rumah
- Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas
- Melakukan kemitraan Bidan dan Dukun
- Melakukan strategi peningkatan PF dengan Jampersal dan Rumah Tunggu Kelahiran

4. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan diperlukan dalam periode nifas ini karena merupakan masa krisis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama. Cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2020 sebesar 74,7% menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (79,3%) dan tahun 2018 (79,2%). Cakupan ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

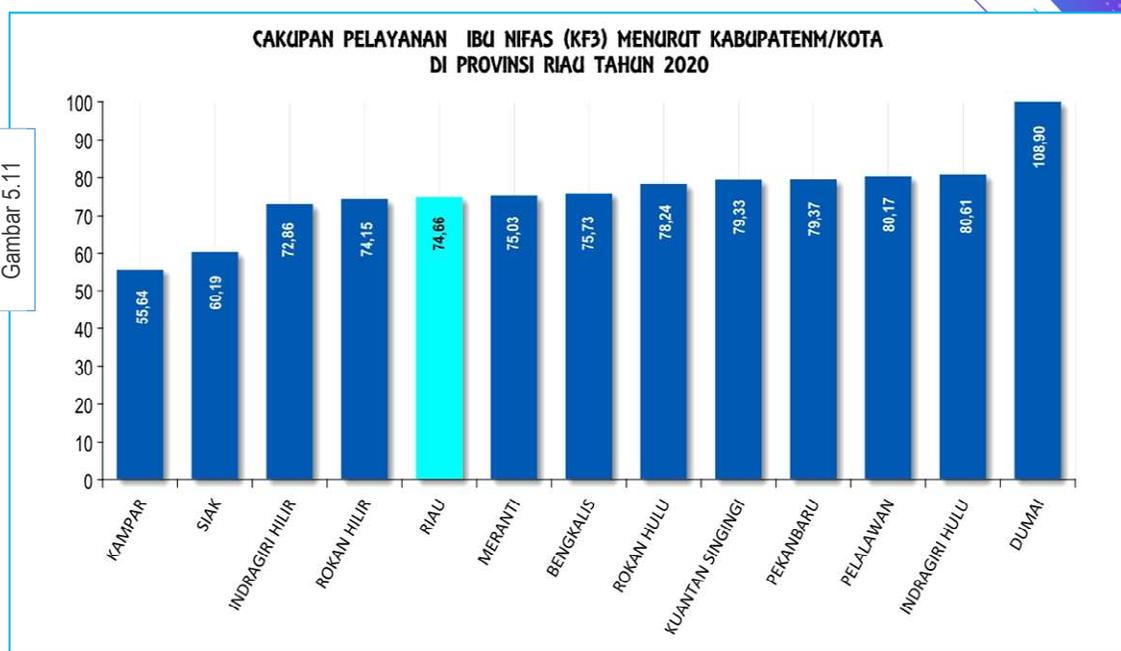


Gambar 5.10

Sedangkan gambaran cakupan pelayanan ibu nifas menurut kabupaten/kota tahun 2020, dimana caoaian tertinggi kota Dumai 108,9%, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu 80,6% dan 80,2%. Sedangkan Kabupaten Kampar 55,6% diikuti oleh Kabupaten Siak 60,2% dan Kabupaten Pelalawan 72,9%.

Utuk gambaran jelasnya cakupan pelayanan ibu nifas pada grafik dibawah ini.

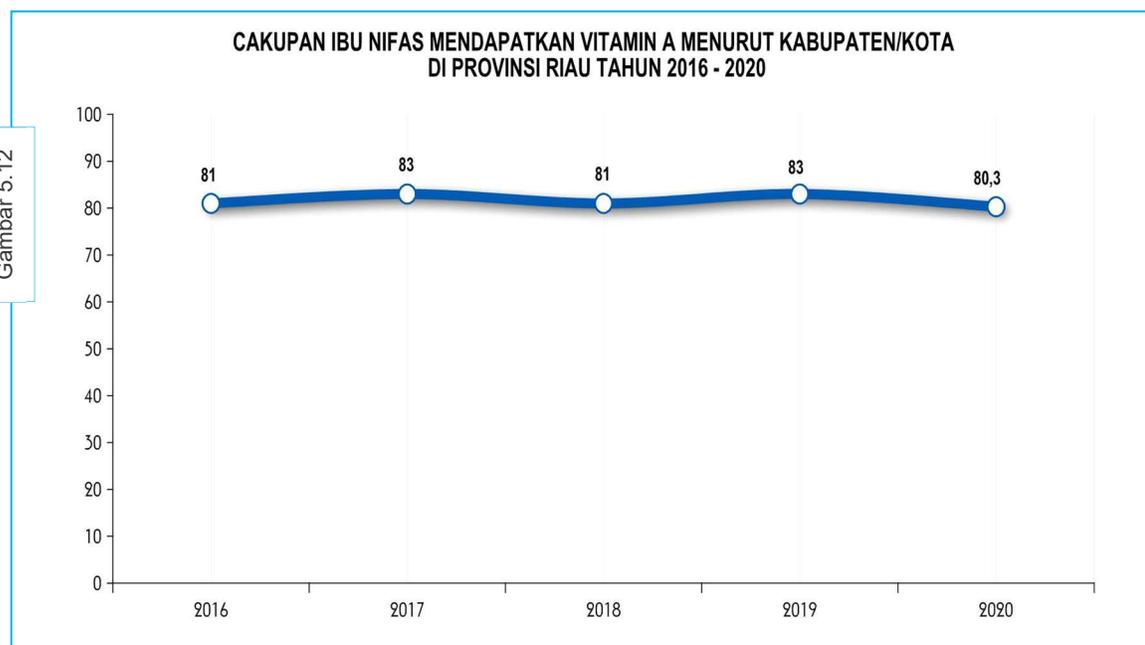
Gambar 5.11



5. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Ibu hamil yang kekurangan vitamin A meningkatkan risiko perdarahan dalam persalinan dan risiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Kekurangan vitamin A masa nifas meningkatkan kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi, ibu nifas memerlukan kapsul vitamin A dosis tinggi.

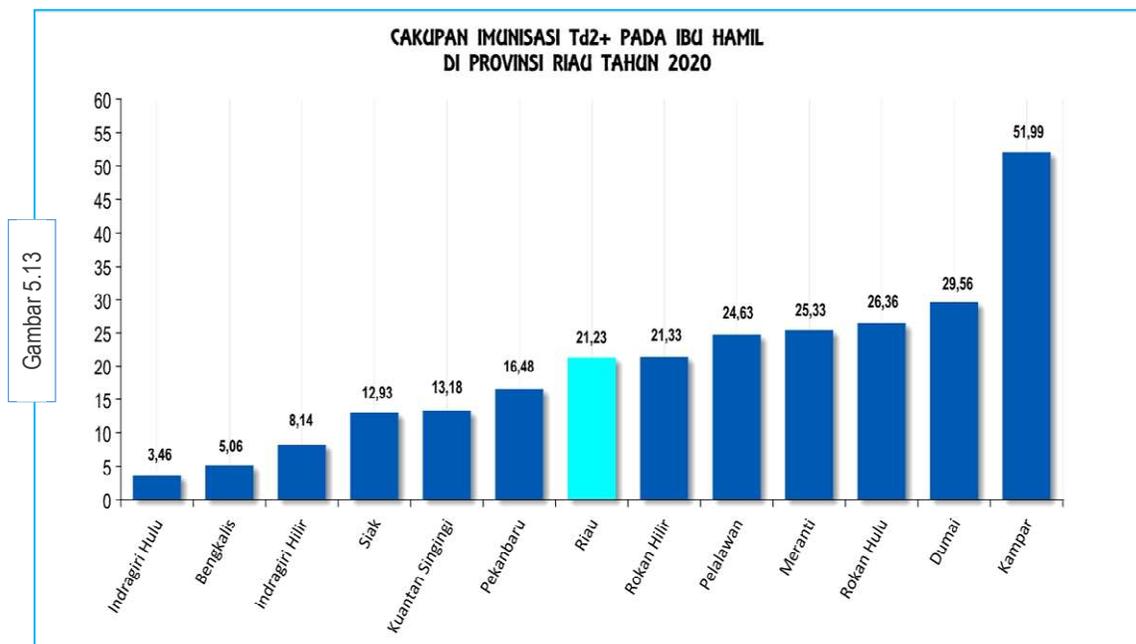
Gambar 5.12



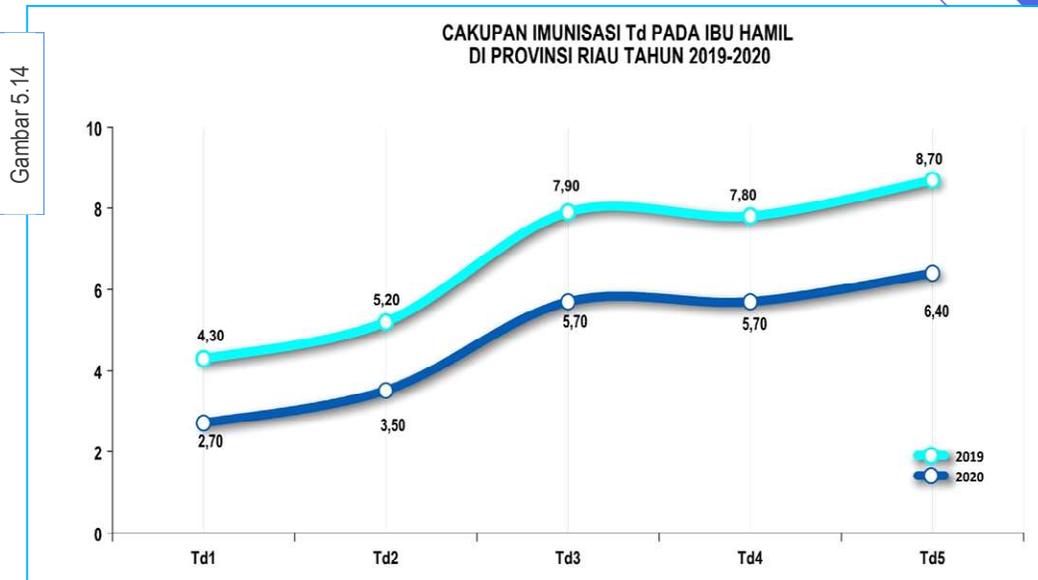
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa cakupan ibu nifas mendapat vitamin A pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dimana tahun 2020 (80,3%) dan tahun 2019 (83%).

6. Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil Dan Wanita Usia Subur

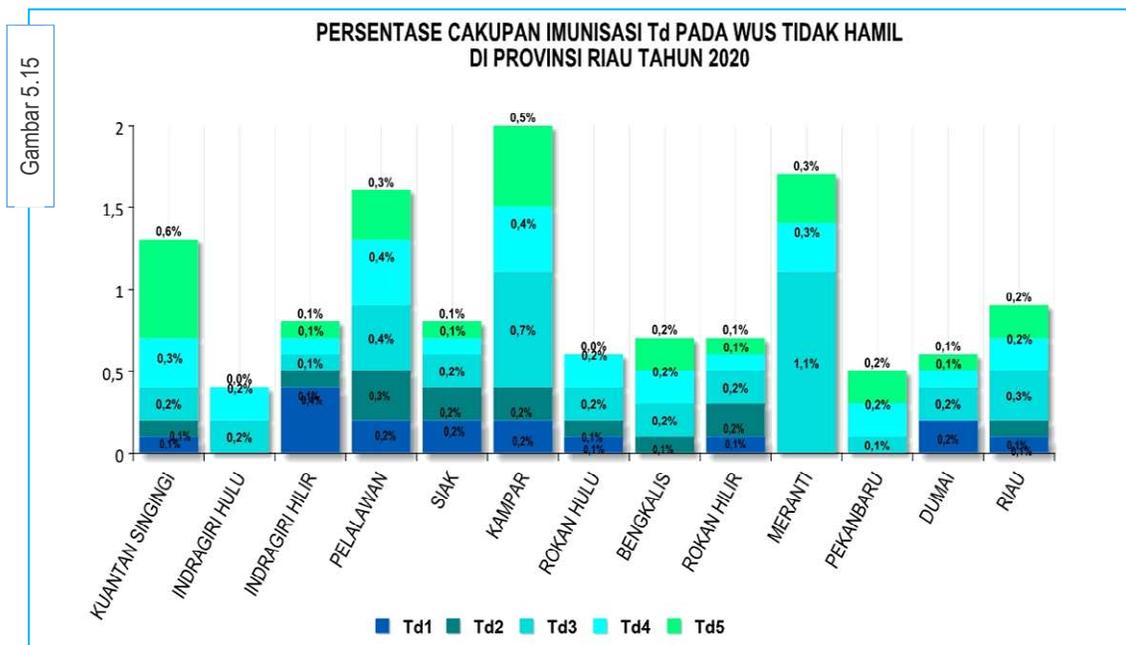
Pemberian Imunisasi Td pada ibu hamil dan wanita usia subur diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit difteri pada bayi baru lahir. Cakupan (jumlah dan persentase) ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td (Tetanus difteri) dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) dengan memperhatikan hasil skrining dan status T. Dalam pemberian imunisasi harus memperhatikan bahwa Setiap ibu hamil yang akan diimunisasi Td harus dilakukan skrining terlebih dahulu dengan melihat interval minimal, kemudian hasil skrining akan menentukan pemberian dosis imunisasi Td berikutnya pada ibu hamil.



Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil Provinsi Riau Tahun 2020 memperlihatkan Capaian imunisasi 21,2% menurun dibandingkan tahun 2019 (29,5%) dan tahun 2018 (28,5%). Capaian Td+ ini termasuk rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk imunisasi Td secara keseluruhan.

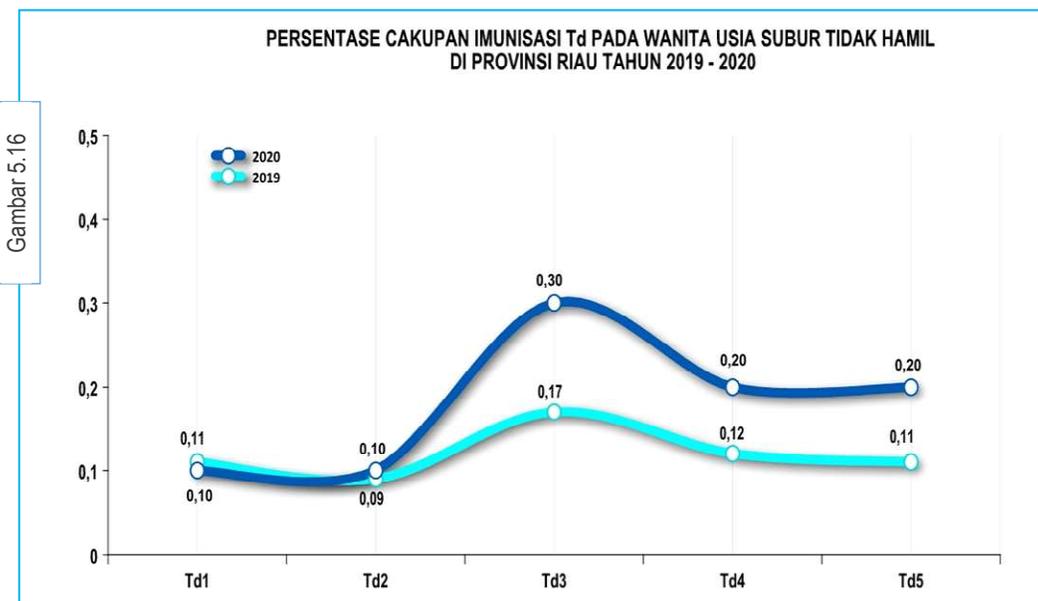


Sementara untuk capaian imunisasi Td pada wanita usia subur yang tidak hamil di kabupaten/kota Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut.



Dari diagram diatas dapat dilihat diagram yang paling tinggi cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur adalah kabupaten Kampar, Meranti, Pelalawan dan juga Kuantan Singingi. Sedangkan untuk yang terendah adalh kabupaten Indragiri Hulu, Pekanbaru, Rokan Hulu dan juga Dumai.

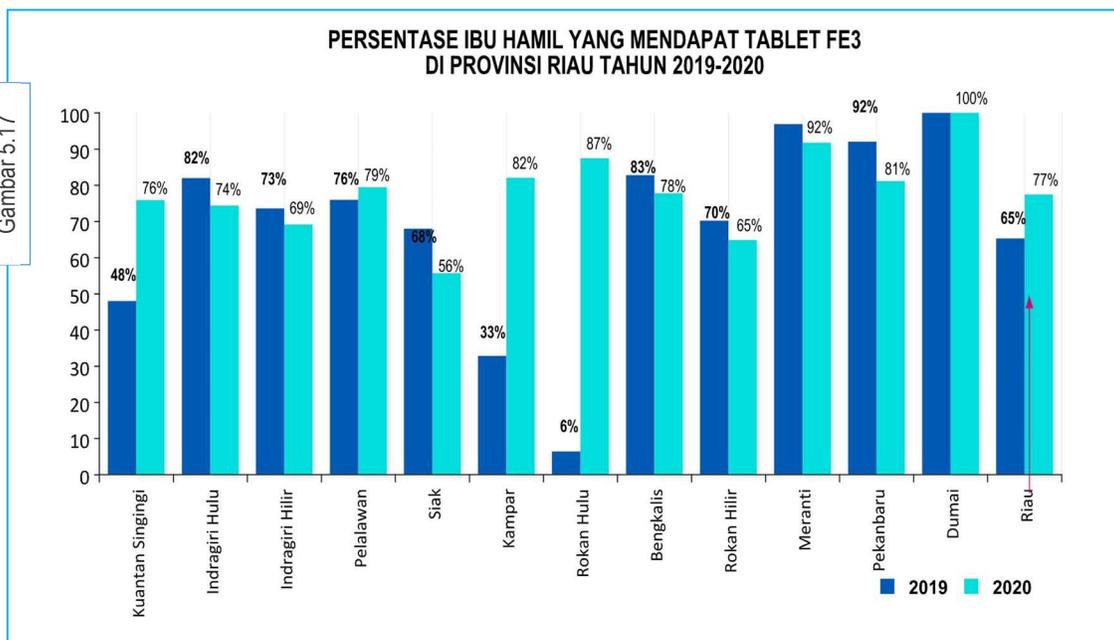
Berikut adalah trend dari cakupan imunisasi Td pada wanita usia subur tidak hamil.



Gambar 5.16

7. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah

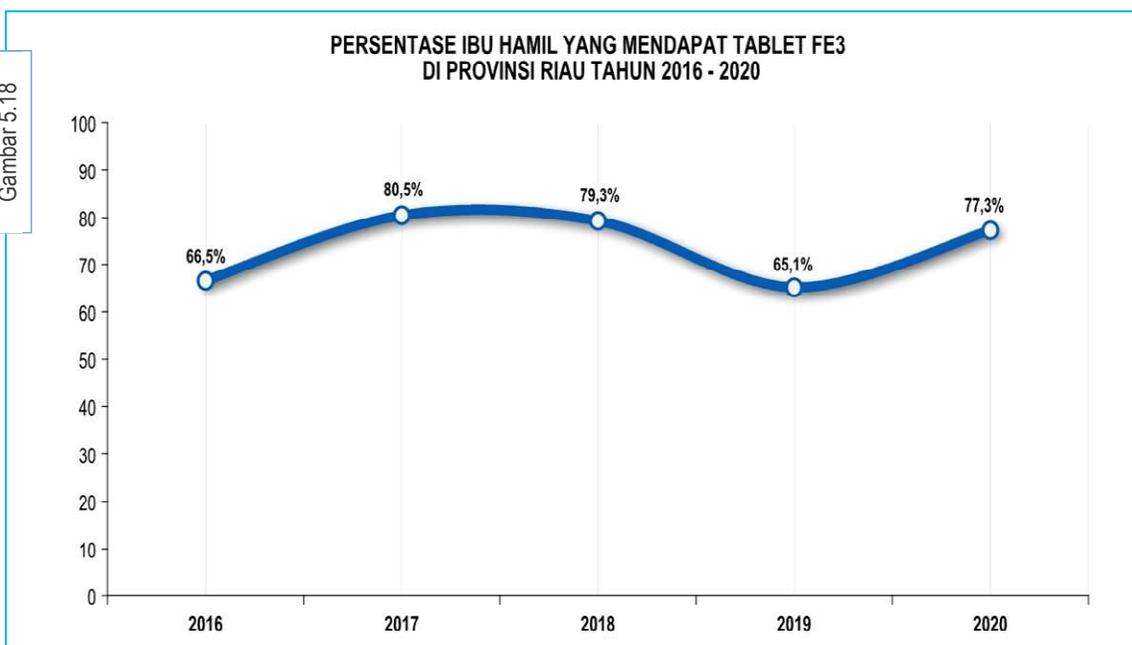
Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, merupakan langkah pencegahan dari terjadinya perdarahan selama kehamilan, persalinan dan nifas. Berikut merupakan Gambar ibu hamil yang mendapat Tablet Fe3 Tahun 2019-2020.



Gambar 5.17

Terlihat dari gambar diatas secara keseluruhan ibu hamil yang mendapat tablet FE3 di Provinsi Riau tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni tahun 2019 sebanyak 65%, sementara tahun 2020 ibu hamil yang mendapat tablet FE3 sebanyak 77,3%. Namun gambaran kabupaten/kota terjadi peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 ada sekitar 50 % dari kabupaten/kota di Provinsi Riau antara lain kabupaten Siak, kabupaten Kuantan Sengingi, kabupaten Pelalawan , kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai. Sedangkan Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet. Dan capaian tertinggi yakni Kota Dumai 105% dan yang terendah Kabupaten Siak 55,5%.

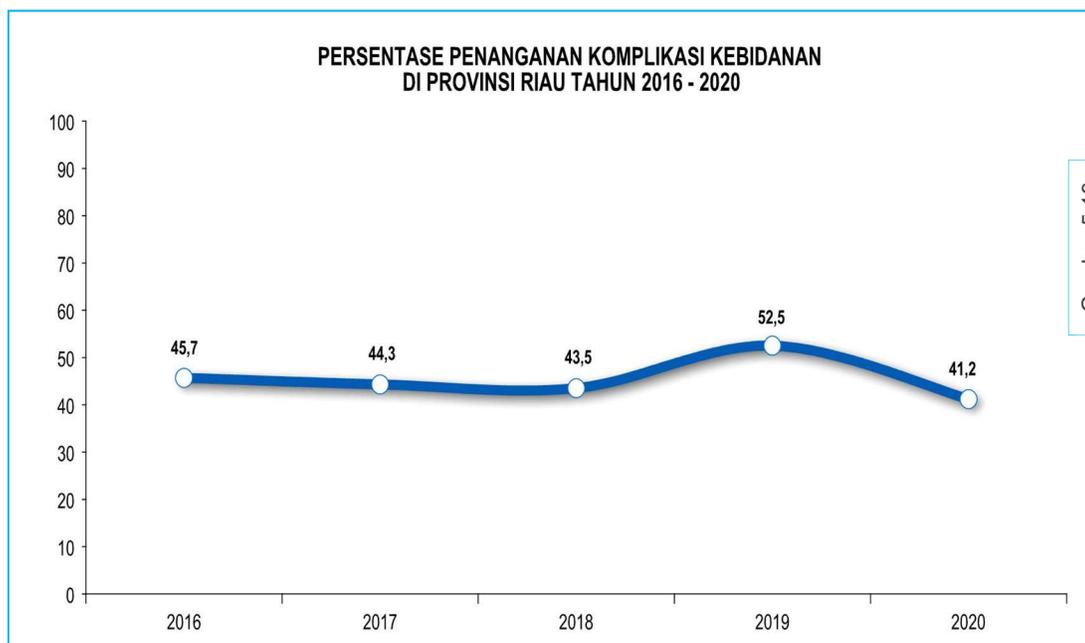
Gambaran ibu hamil yang mendapat tablet FE3 dari tahun 2016 – 2020 bisa dilihat dari gambar dibawah ini.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah persentase untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 77,3% dan mengalami penurunan tahun 2019 mencapai 65,1%. Terjadinya penurunan ibu hamil yang mendapat tablet FE3 ini harus mendapat perhatian mengingat pentingnya konsumsi tablet FE3 mencegah anemia pada ibu hamil dan terjadinya pendarahan pada persalinaan, dan untuk Provinsi Riau 40 % lebih kematian ibu disebabkan oleh pendarahan.

8. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

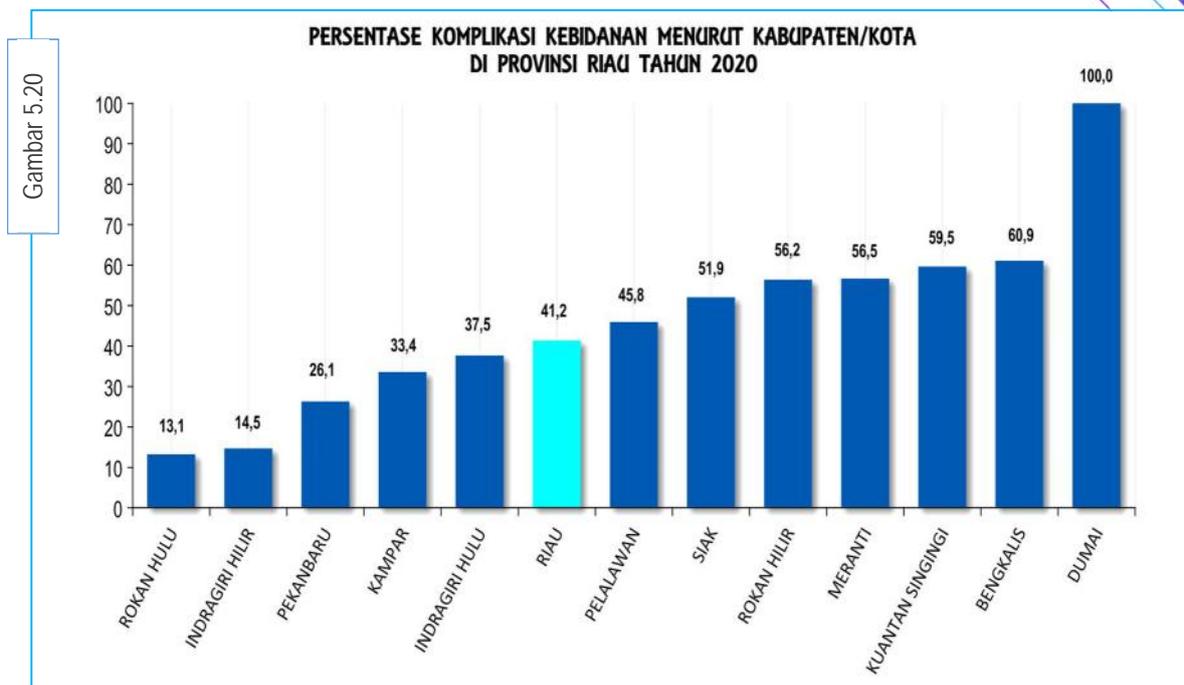
Komplikasi kebidanan menjadi faktor yang berkontribusi dalam kematian ibu dan bayi. Komplikasi kebidanan yang ditangani dengan baik akan memberi dampak pada keselamatan ibu dan bayi. Dibawah ini adalah grafik persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau untuk tahun 2016 – 2020.



Pada grafik terlihat bahwa persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya . Di tahun 2019 persentase penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Riau mencapai 52,5% dan di tahun 2020 mencapai 41,2%.

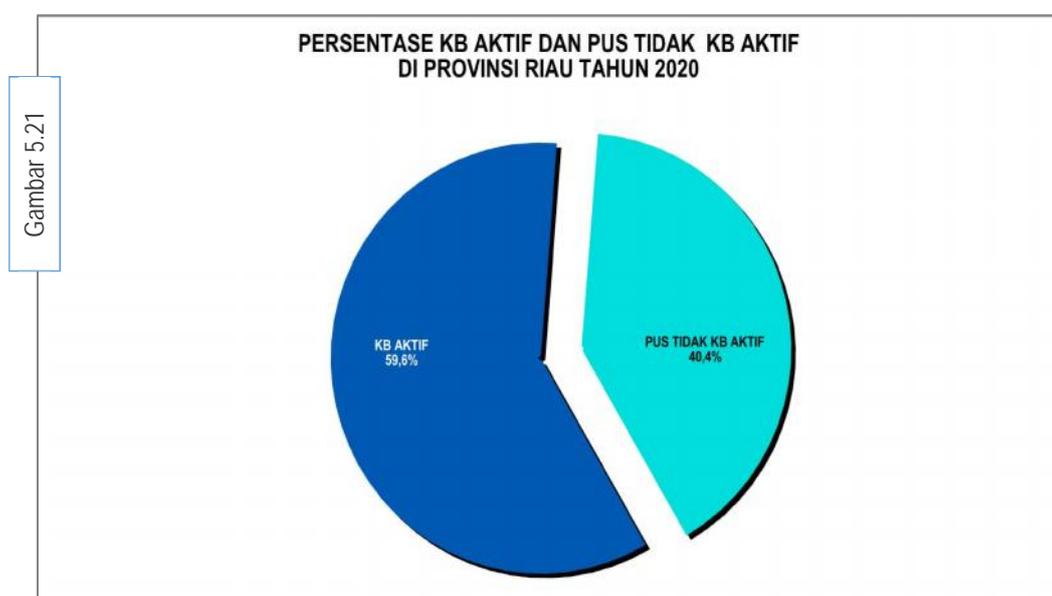
Dari 12 Kabupaten/Kota ada di provinsi Riau hanya 3 kabupaten/kota (Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai) mengalami peningkatan capaian penanganan komplikasi kebidanan. Sedangkan 9 Kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan penanganan komplikasi kebidanan. Dan Kota Dumai merupakan daerah yang telah mencapai 100%. Penanganan komplikasi kebidanan harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program kesehatan ibu, karena untuk menekan jumlah kematian ibu salah satunya melakukan penanganan komplikasi kebidanan.

Gambaran peningkatan komplikasi kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



9. Peserta Aktif KB

Keluarga Berencana berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, karena dengan keluarga berencana pengaturan jarak kelahiran memberikan waktu pemulihan pada ibu dan fokus dalam mengasuh bayi baru lahir dengan optimal. Menurut MDG's angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate, CPR), dengan target 63,4% pada tahun 2020 dan target KB Paska Persalinan (KBPP) 40%. Peserta Aktif KB merupakan Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan.

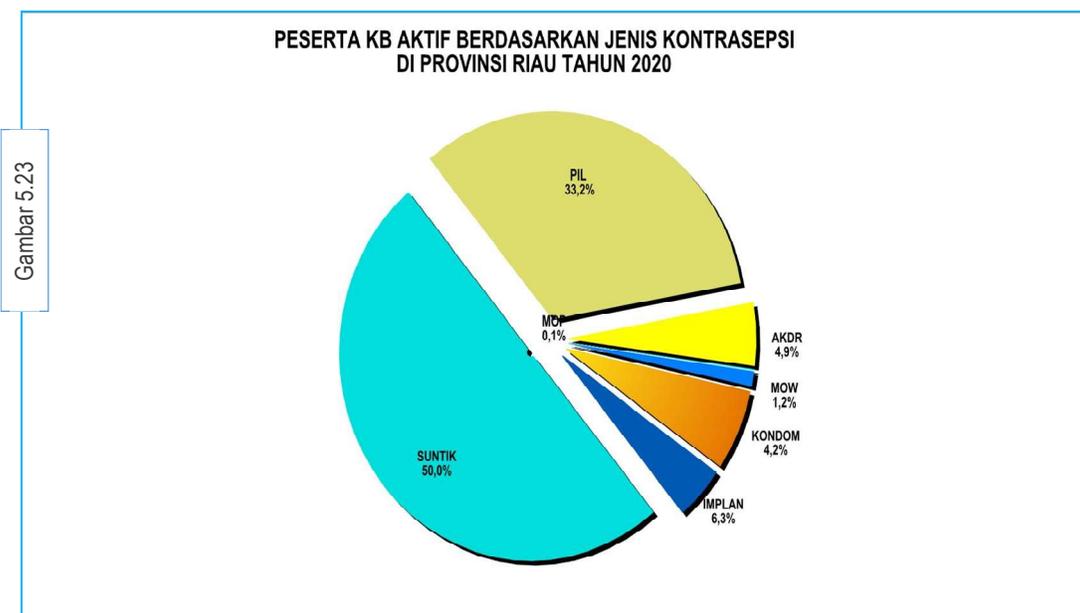


Gambar di atas Di Provinsi Riau jumlah peserta KB Aktif belum mencapai target nasional dimana cakupannya adalah 59,6,3% dan PUS yang tidak mengikuti KB Aktif sebesar 40.4%. Peserta KB Aktif tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya . Ini artinya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB sudah baik. Sedangkan gambaran peserta KB Aktif sejak tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



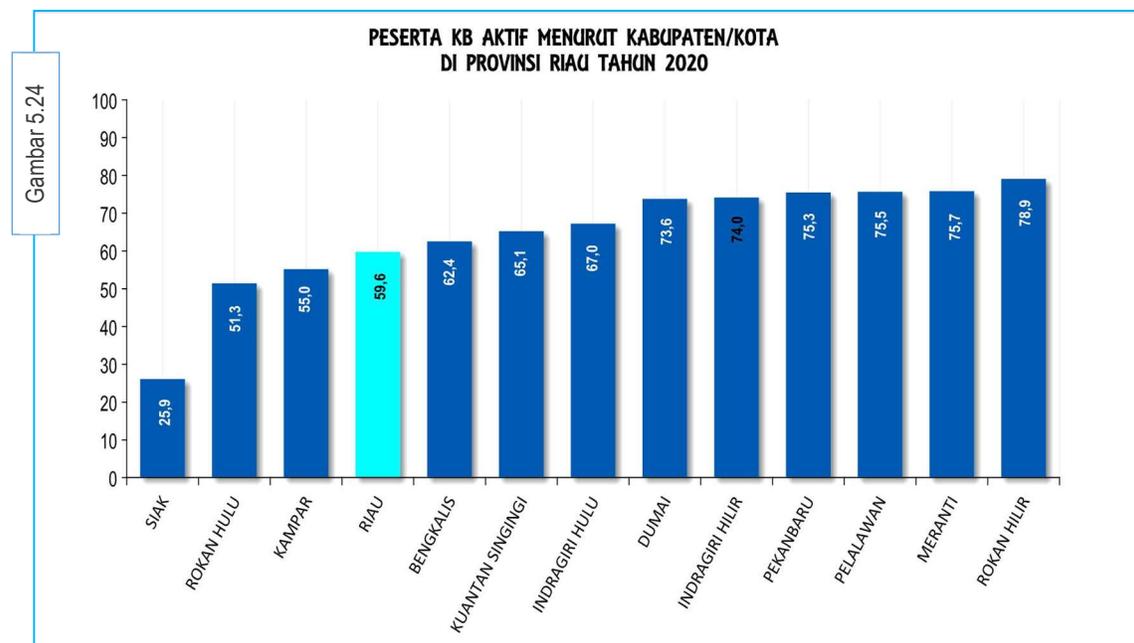
Gambar 5.22

Dari grafik diatas Peserta KB Aktif tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 63,8% dan juga menurun dibandingkan tahun 2018 (72,4%) dan PUS yang tidak ikut KB aktif tahun 2020 (40.4%).



Gambar 5.23

Dilihat dari gambar diagram diatas memperlihatkan bahwa alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh Peserta aktif KB adalah suntik 43,0% selanjutnya adalah pemakai pil 28,6% kemudian implant 5,4%, kondom 3,6% sisanya adalah AKDR 4,2%, MOW 1% dan MOP 0,1.

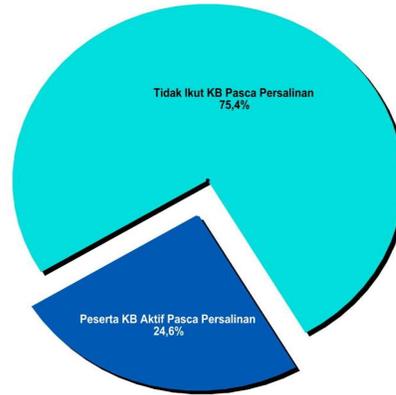


Dari gambar peserta KB aktif diagram dibawah ini menurut Kabupaten/Kota untuk Provinsi Riau sebanyak 69,3%. Masih ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yaitu Kabupaten Bengkalis 62,4%, Siak 55% dan Kampar 25,9%. Hal ini disebabkan oleh factor masih adanya PUS yang pengantin baru sehingga masih mengharapkan keturunan, PUS yang sudah lama menikah tapi belum memiliki keturunan, PUS yang sudah memiliki anak dan mau menambah keturunan lagi serta kondisi pandemi COVID-19 yang membuat PUS takut untuk berkunjung ke Puskesmas dan RS.

10. Peserta KB Pasca Persalinan

Peserta KB Pasca Persalinan merupakan PUS yang memakai kontrasepsi pada pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan)

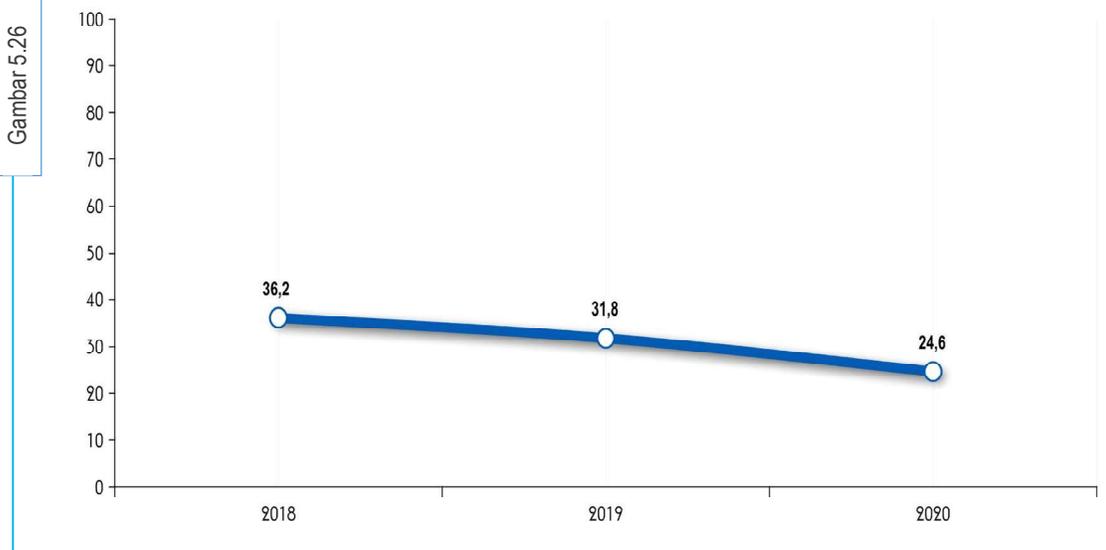
PESERTA KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN TIDAK IKUT KB
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2020



Gambar 5.25

Sementara itu untuk peserta KB Paska Persalinan (KBPP) masih jauh dari yang diharapkan yakni dari 16.088 jumlah ibu bersalin, yang langsung menggunakan alat kontrasepsi selama masa nifas hanya 40.18 orang atau sekitar 24,6%, sementara target diharapkan adalah 40%.

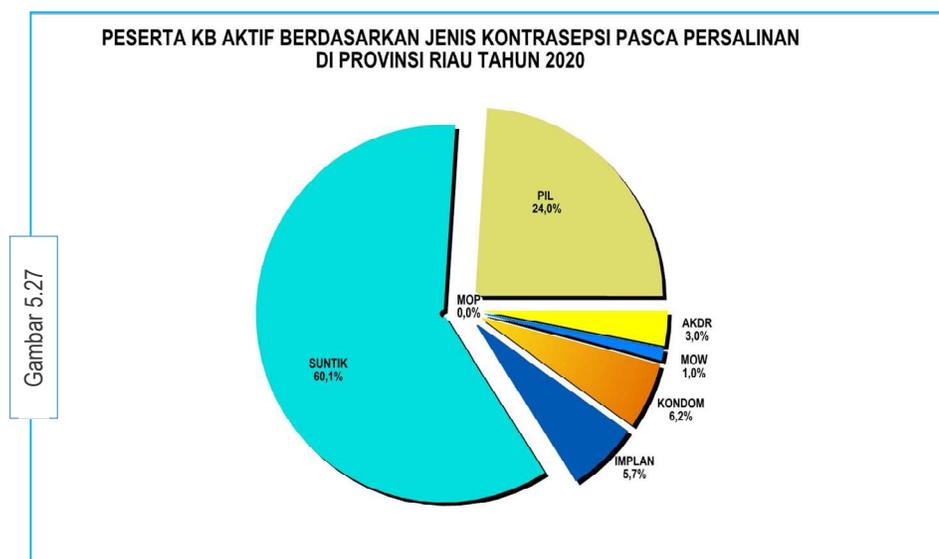
PESERTA KB AKTIF PASCA PERSALINAN DI PROVINSI RIAU DARI TAHUN 2018-2020



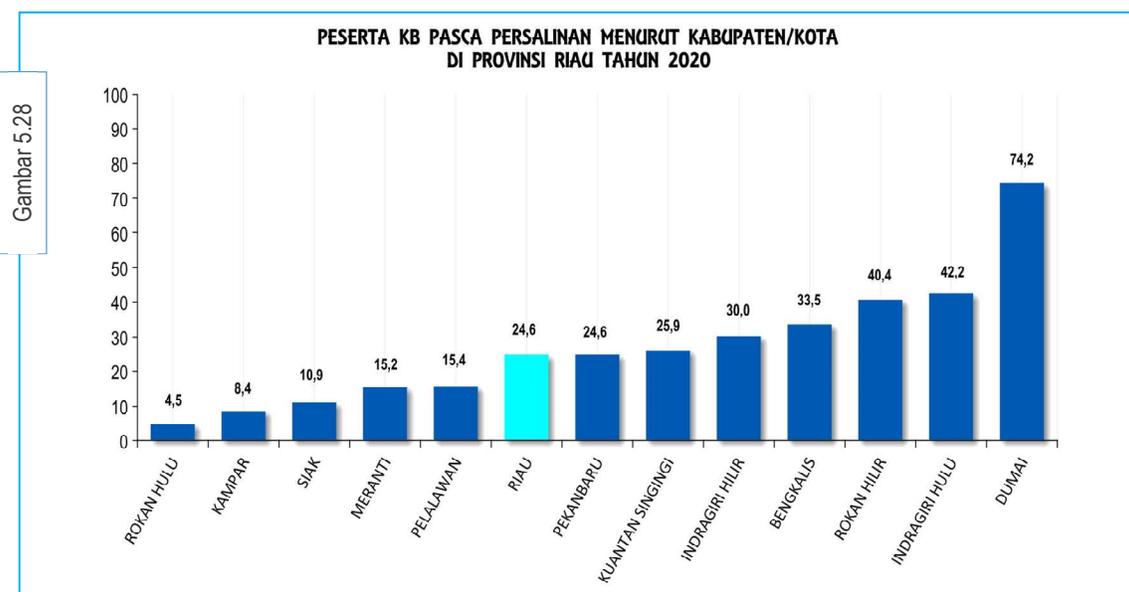
Gambar 5.26

Dari gambar di atas dapat dilihat peserta KB pasca persalinan tahun 2020 24,6% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 (31,8%) dan tahun 2018 (36,2%). Kondisi ini berarti perlu pendidikan kesehatan dari sejak seorang ibu mulai hamil, sehingga setelah bersalin sudah bisa memutuskan alat kontrasepsi atau metode KB yang akan digunakan.

Berikut adalah proporsi Peserta KB Pasca Persalinan di Provinsi Riau, terlihat dari diagram dibawah ini paling banyak menggunakan suntik, yaitu 60,1% diikuti dengan menggunakan Pil sebanyak 24%, sisanya menggunakan kondom 6,2%, implan 5,7% dan sisanya AKDR, MOW dan MOP. Untuk melihat gambaran proporsi peserta KB pasca persalinan di Provinsi Riau Tahun 2020.

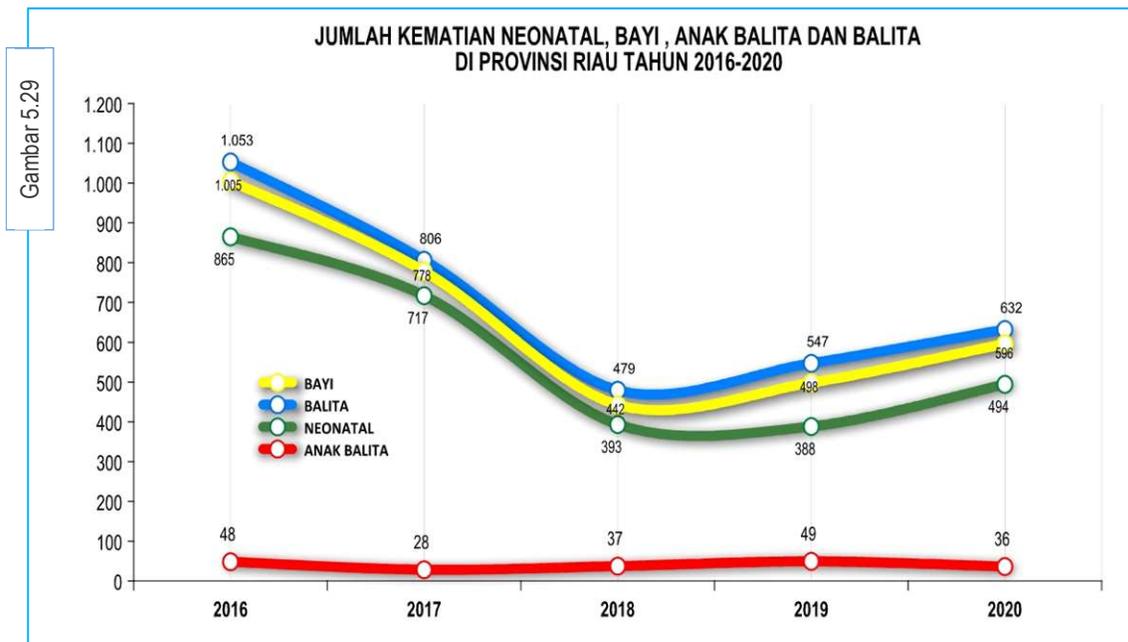


Dari gambar diagram dibawah ini akseptor KB pasca persalinan menurut Kabupaten/Kota terbanyak di Kota Dumai sebesar 74,2%, diikuti oleh kabupaten Indragiri Hulu 42,2% dan Rokan Hilir 40,4%. Sementara capaian terendah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,5% diikuti Kabupaten Kampar sebesar 8,4% dan Kabupaten Siak 10,9%. Dari 12 kabupaten/kota hanya 3 Kabupaten/kota yang telah mencapai target 40% yakni Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir.



B. Kesehatan Anak

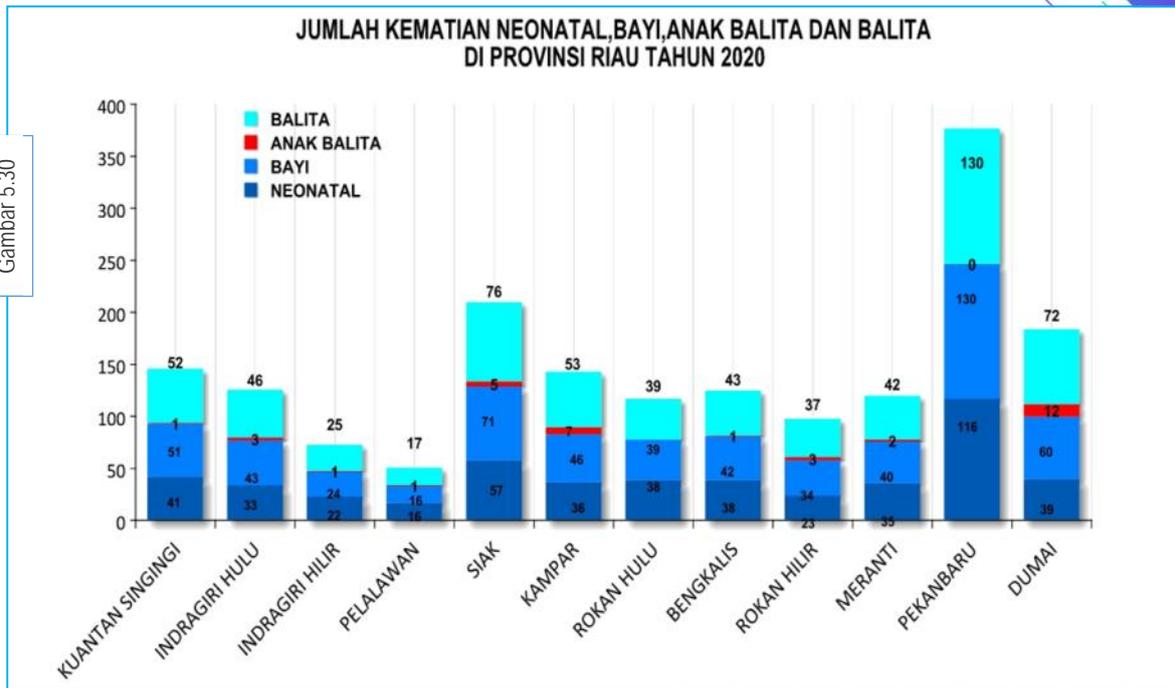
Periode tiga tahun pada masa balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak. Kematian balita, bayi, neonatal dan anak balita merupakan ukuran keberhasilan Pelayanan Kesehatan pada anak. Kematian neonatal, bayi dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat.



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 di Provinsi Riau hanya kematian anak balita saja yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kematian bayi, neonatal dan balita mengalami meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh wabah covid-19 yang sedang melanda dunia.

Sementara untuk jumlah kematian yang terbanyak neonatal, bayi, anak balita dan balita adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Dan Kematian paling sedikit adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir.

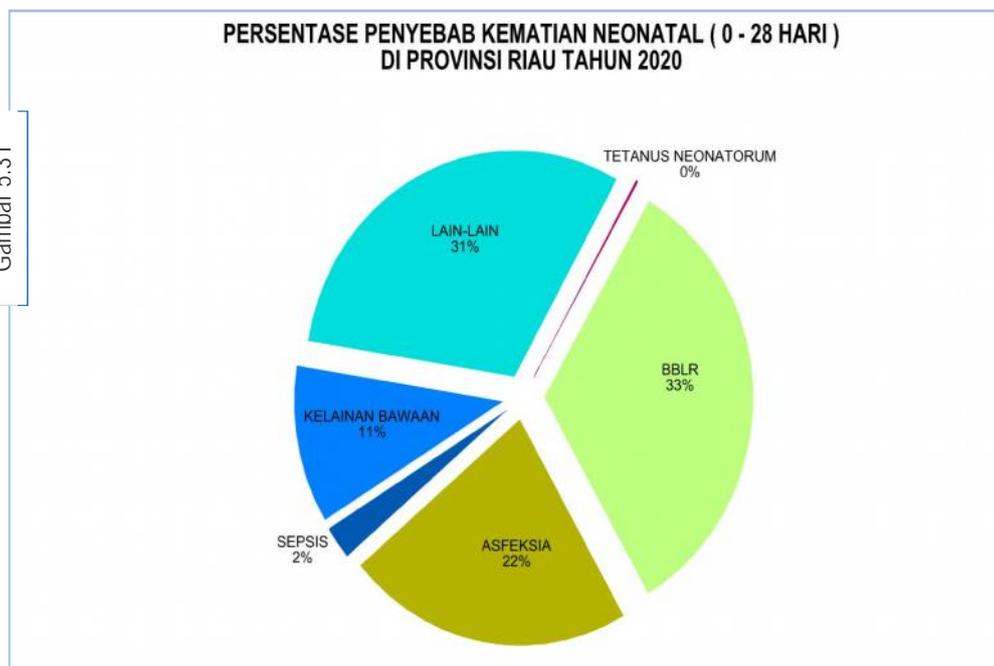
Gambar 5.30



Kematian neonatal, bayi, anak balita dan balita merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah diagram yang menggambarkan penyebab dan jumlah kematian Neonatal, bayi, anak bayi dan balita yang dilaporkan per-1000 kelahiran hidup:

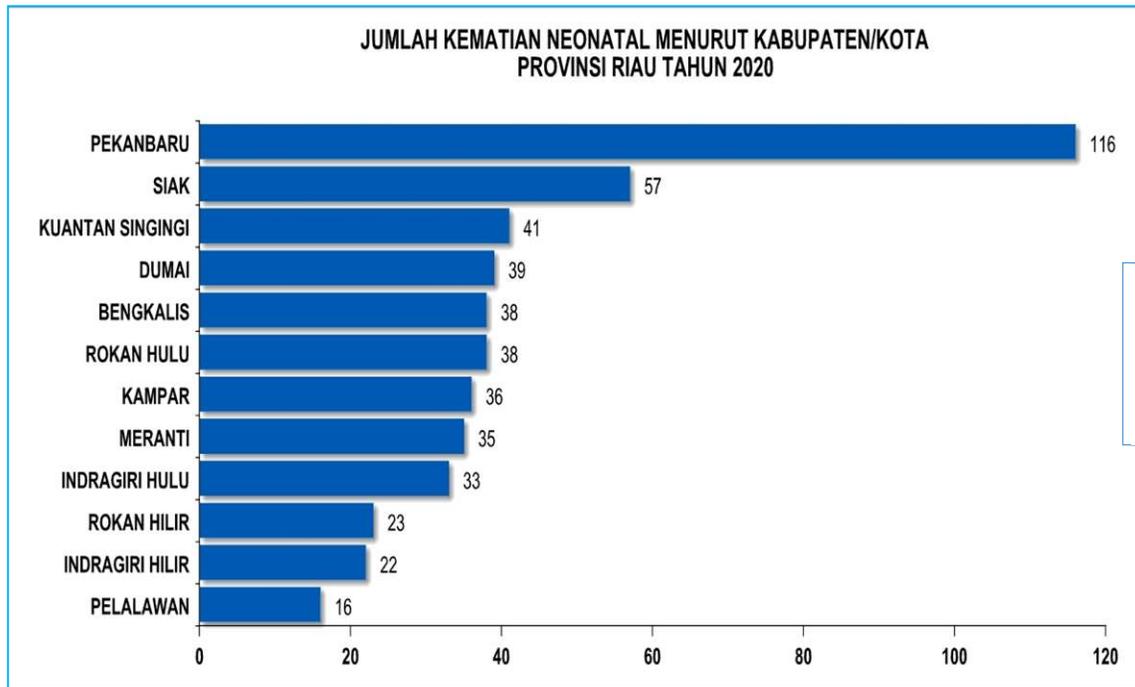
1. Kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup (yang dilaporkan)

Gambar 5.31



Pada gambar diatas dapat kita lihat, penyebab terbanyak dari Neonatal adalah bayi berat lahir rendah (BBLR) sebesar 33%. Bayi berat lahir rendah adalah bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari 2500 gram.

Berat badan saat lahir merupakan satu-satunya faktor penentu kesehatan seseorang. Selain BBLR penyebab lain kematian neonatal antara lain asfiksia 22%, kelainan bawaan 11%. Sepsis 2% dan lain-lain 31%.



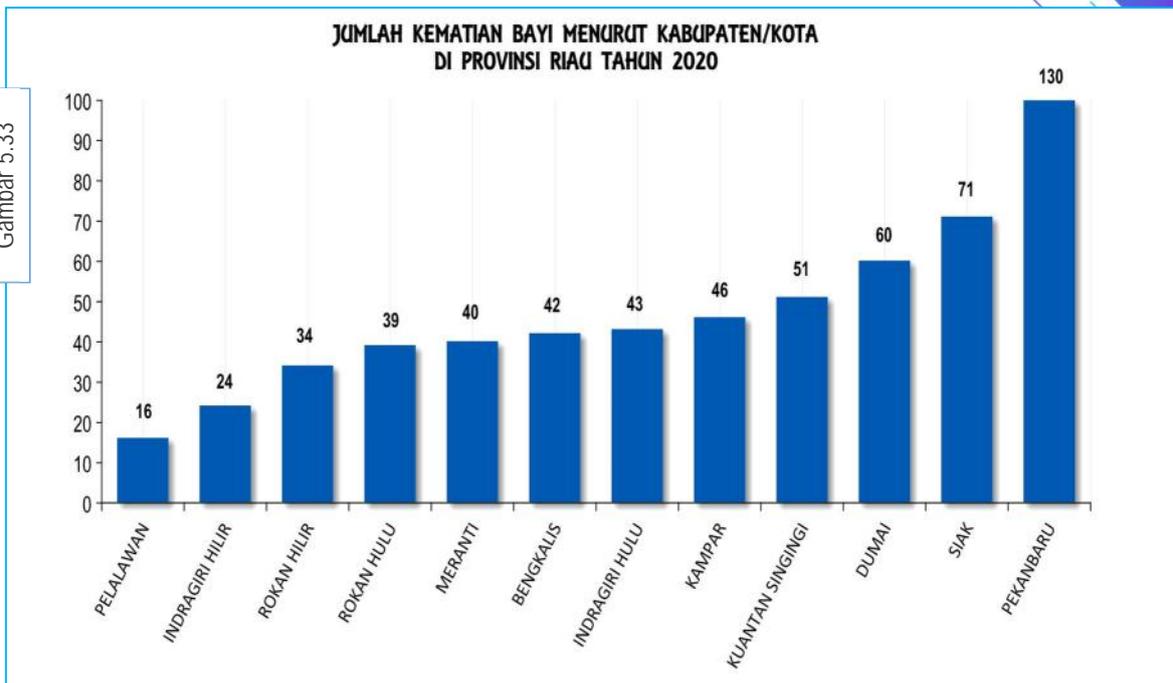
Gambar 5.32

Gambaran kematian neonatal di kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2020 terbanyak terdapat di Kota Pekanbaru sebanyak 116 orang. Tingginya jumlah kematian neonatal di Kota di Pekanbaru disebabkan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi memiliki jumlah penduduk yang terbesar sehingga jumlah kelahiran juga yang terbanyak. Dan Kota Pekanbaru juga memiliki jumlah Rumah Sakit yang terbanyak sehingga banyak rujukan kasus atau rujukan persalinan, sehingga ada beberapa kasus kematian di RS tersebut ditetapkan sebagai kematian di Pekanbaru.

2. Kematian Bayi dan Balita per-1.000 Kelahiran Hidup (yang dilaporkan)

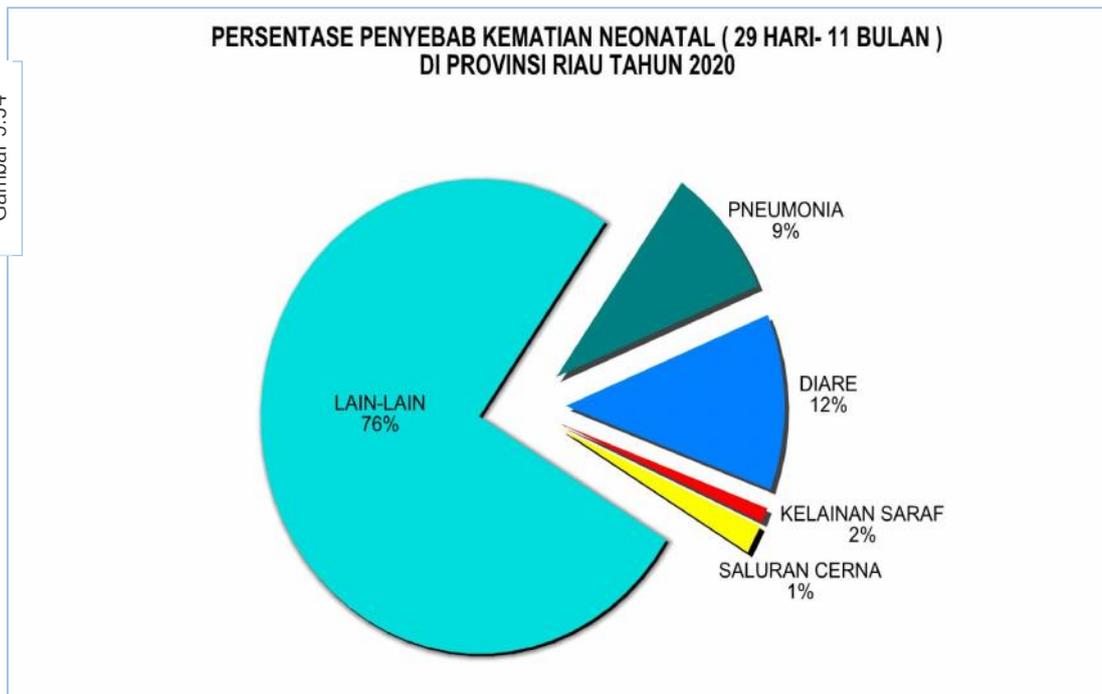
Kematian Bayi merupakan kematian yang terjadi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Gambaran kematian bayi di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.33



Sedangkan kematian post neonatal (29 hari-11 Bulan) disebabkan oleh pneumonia, diare dan saluran cerna. Kalo dilihat dari grafik dibawah bahwa kematian yang disebabkan diare 12% dan pneonomia 9%, namun kematian yang disebabkan lain-lain cukup banyak yakni 76%. Dan penyebab ini harus menjadi perhatian untuk dapat mencari apa penyebab jumlah lain-lain cukup besar. Pada gambar dibawah ini melihatkan penyebab kematian bayi di Provinsi Riau Tahun 2020.

Gambar 5.34

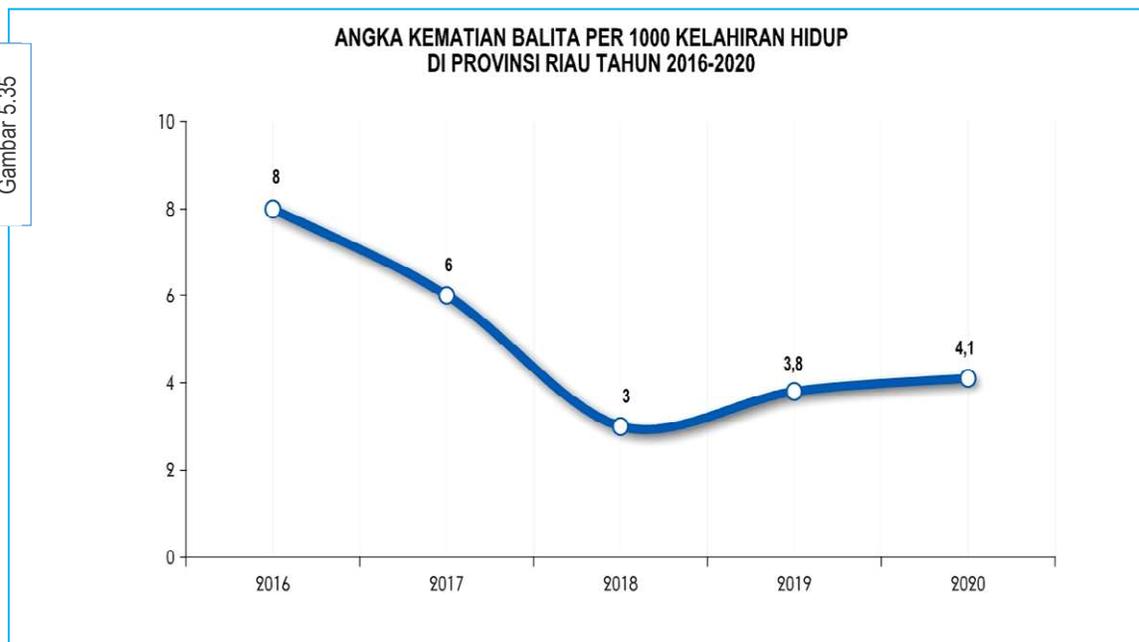


Adapun yang menjadi masalah adanya kematian pada bayi disebabkan antara lain;

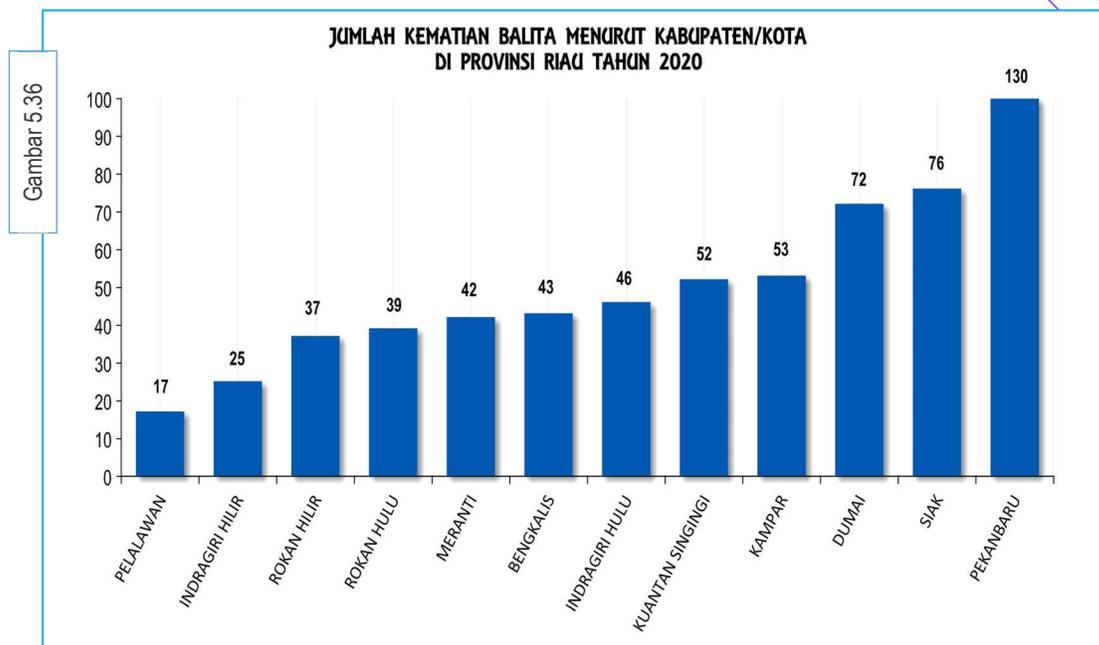
- Kualitas Pelayanan Ante Natal Care pada ibu hamil yang belum memenuhi Standar sehingga kurang terpantaunya kondisi/perkembangan janin
- Penanganan bayi baru lahir yang belum memenuhi standar
- Kompetensi petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan bayi baru lahir terutama didalam penanganan asfiksia dan bayi berat lahir rendah

Sedangkan kematian balita merupakan kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera ata bunuh diri.

Untuk angka kematian balita (dilaporkan) per-1000 kelahiran hidup di Provinsi Riau dari tahun 2016 adalah 4,1 per-1000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan harus lebih ditingkatkan agar dapat menghasilkan kualitas yang optimal, sehingga angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dapat ditekan serendah mungkin. Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup di Provinsi Riau ini tergambar pada grafik di bawah ini :



Sedangkan untuk jumlah kematian balita dapat dilihat pada gambar berikut;



Tingginya kematian pada bayi disebabkan antara lain;

- Kualitas Pelayanan Ante Natal Care pada ibu hamil yang belum memenuhi standar sehingga kurang terpantaunya kondisi/perkembangan janin
- Penanganan bayi baru lahir yang belum memenuhi standar
- Tidak semua bayi mendapatkan pelayanan bayi sesuai standar (pemantauan pertumbuhan perkembangan secara rutin, pemenuhan nutrisi, imunisasi, Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), pemberian tablet Vitamin A, ASI Eksklusif)
- Kompetensi petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan balita
- Belum semua balita di wilayah kerja puskesmas terjangkau untuk dipantau tumbuh kembang dan kondisi kesehatannya.

3. Penanganan Komplikasi Pada Neonatal

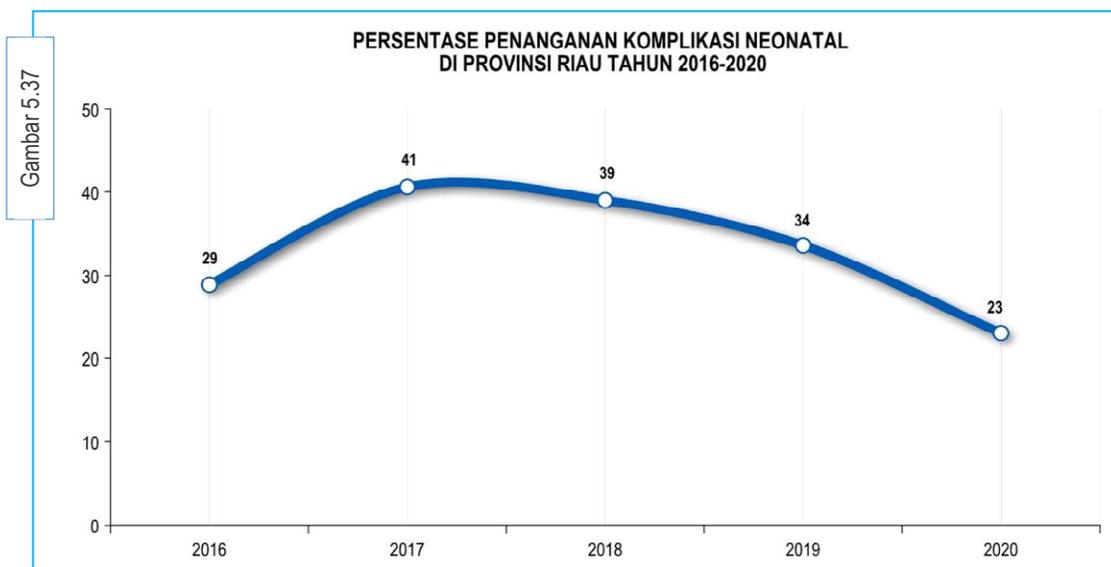
Dari seluruh bayi diperkirakan 15 % akan mengalami komplikasi nenatus dan harus dideteksi. Dari jumlah sasaran kelahiran hidup di provinsi Riau tahun 2020 (155.322) diperkirakan 23.298 bayi mengalami komplikasi. Penanganan komplikasi neonatal menjadi hal yang sangat penting guna menekan kematian pada bayi.

Yang termasuk neonatus komplikasi antara lain :

- Prematuritas dan BBLR (bayi berat lahir rendah < 2500 gr)
- Asfiksia

- Infeksi Bakteri
- Kejang
- Ikterus
- Diare
- Hipotermia
- Tetanus neonatorum
- Masalah pemberian ASI
- Trauma lahir, sindroma gangguan pernapasan, kelainan *kongenital*, dll.

Dan penanganan komplikasi neonatal di Provinsi Riau seperti gambar yang akan disajikan dibawah ini menunjukkan upaya pelayanan kesehatan masih belum memperlihatkan konsistensi dan kesinambungan karena terjadi fluktuasi pada penanganan komplikasi neonatal. Dan penanganan komplikasi neonatal tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada wabah yang terjadi, sehingga terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.



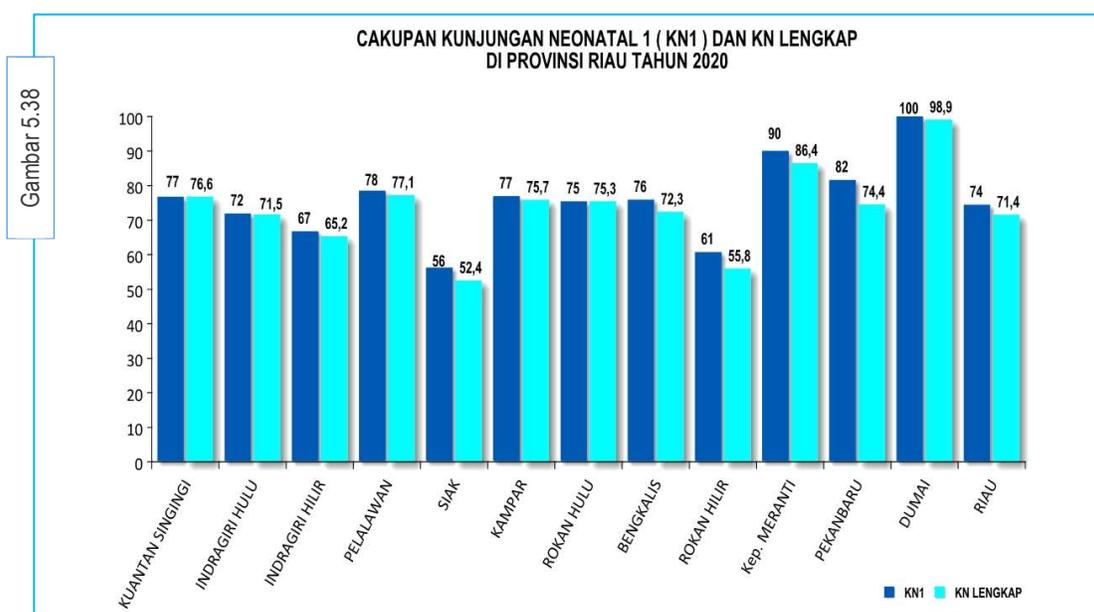
4. Cakupan Kunjungan Neonatal

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan atau masalah kesehatan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus adalah sebagai berikut :

- Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam setelah bayi lahir.
- Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai dengan hari ke 7 setelah bayi lahir.
- Kunjungan Neonatal ke-3 (KN-3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir.

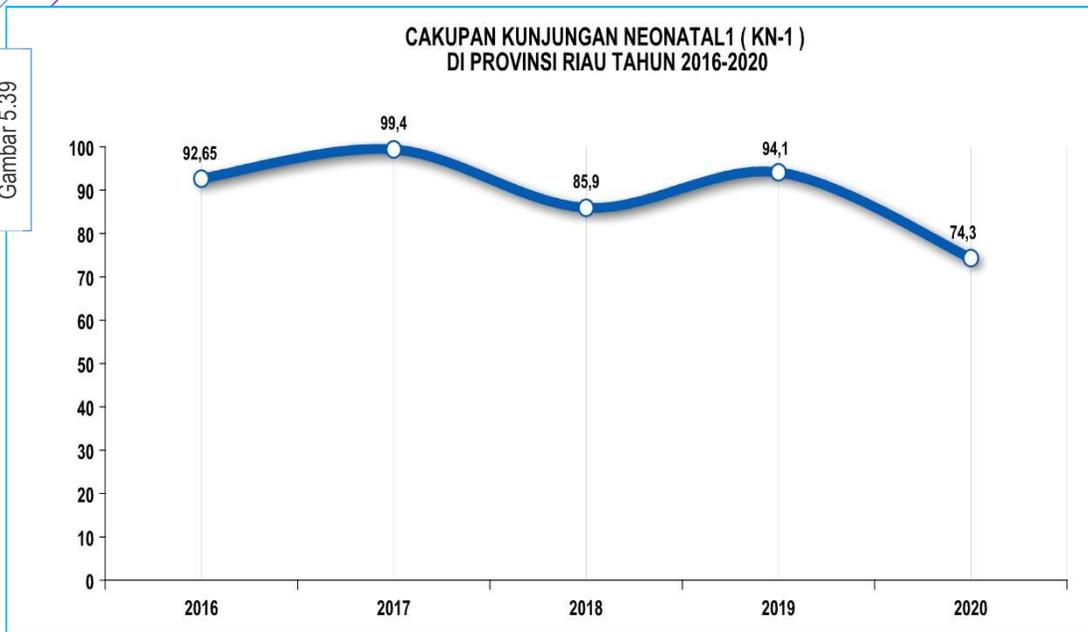
Kunjungan neonatal 1 (KN1) dan KN lengkap merupakan indikator penting dalam pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir.



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa cakupan kunjungan neonatal, dilihat dari Kunjungan pertama (KN1) dibanding kunjungan lengkap (KN lengkap) terjadi penurunan hampir disemua Kabupaten/Kota. Kabupaten Siak memiliki cakupan yang terendah untuk kunjungan neonatal (KN1) dan kabupaten Rokan Hilir untuk cakupan terendah kunjungan lengkap (KN lengkap). Dan dari 12 Kabupaten/kota yang hanya Kota Dumai yang kunjungan neonatal lengkapnya yang telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 92%. Perlu upaya peningkatan pengetahuan ibu tentang manfaat pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir.

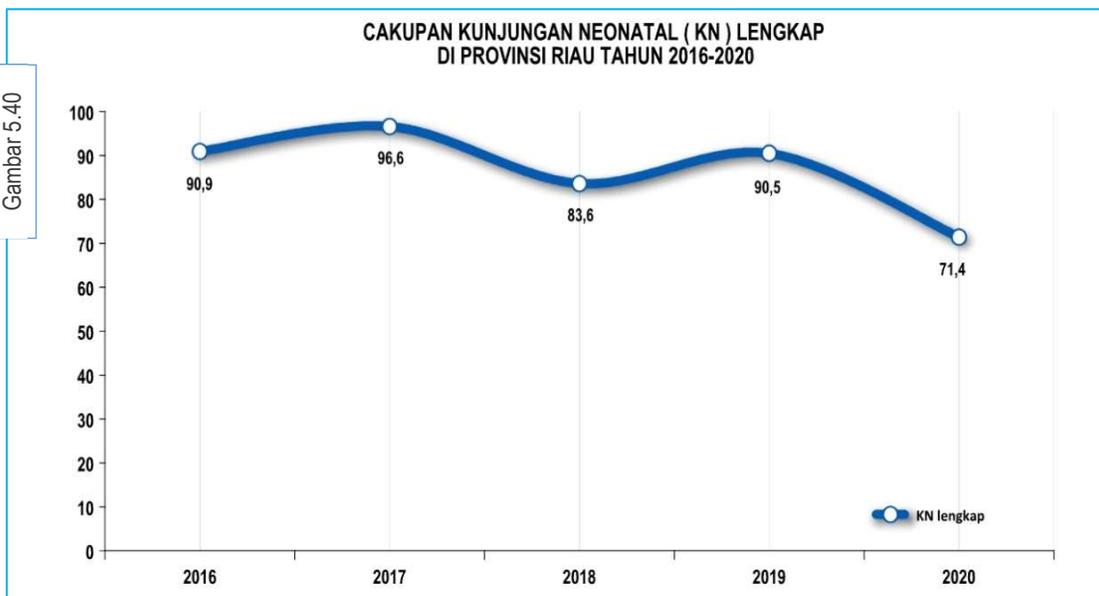
Untuk cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di Provinsi Riau mulai tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pada tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan wabah covid-19 yang melanda dunia. Sehingga menurunkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gambaran jelasnya kunjungan neonatal dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.39



Beriringan dengan meningkatnya cakupan kunjungan neonatal1 (KN-1) di Provinsi Riau maka untuk cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap di Provinsi Riau juga turut mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan capaian kunjungan neonatal lengkap ini secara provinsi juga masih jauh dari target yang ditetapkan yakni 92%. Hasil cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap di Provinsi Riau tahun 2016-2020 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :

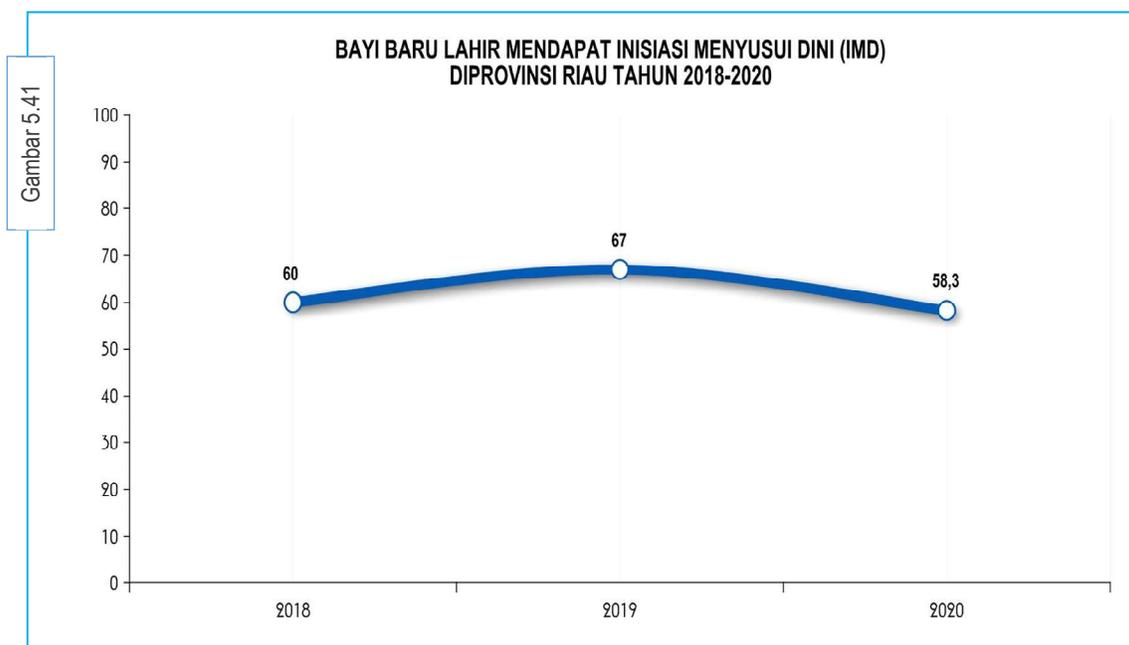
Gambar 5.40



5. Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal 1 jam. Persentase bayi baru lahir dapat IMD adalah proporsi bayi baru lahir yang mendapat IMD terhadap jumlah baru lahir di suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Seyogyanya petugas penolong persalinan yang sudah pernah dilatih tentang pelaksanaan IMD baik dalam Pelatihan Asuhan Persalinan Normal maupun Pelatihan Konseling Menyusui atau PMBA sudah dapat membantu ibu yang melahirkan untuk melaksanakan IMD.

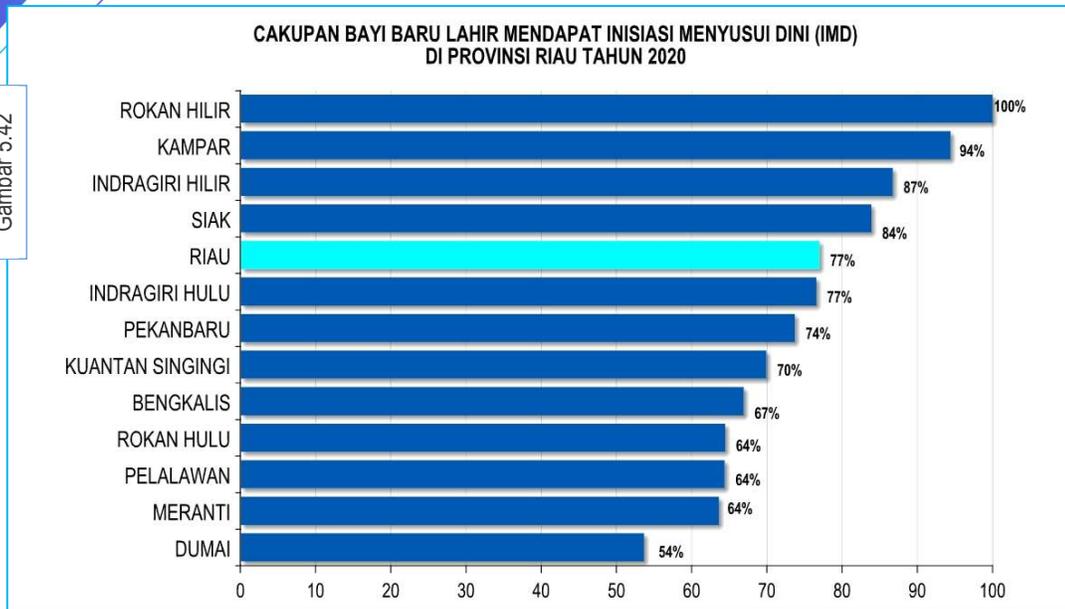
Dan capaian tahun 2020 ini mnurun dibandingkan tahun sebelumnya, ini mungkin terkait dengan terbatasnya akses petugas kesehatan terhadap masyarakat disebabkan wabah covid-19 sehingga promosi kesehatan tentang pentingnya IMD kurang sampai. Dan Cakupan inisiasi menyusui dini (IMD) di Provinsi Riau selama 3 tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dan terlaksananya Inisiasi Menyusu Dini pada ibu melahirkan tidak terlepas dari kebijakan agar ibu hamil melahirkan pada petugas kesehatan di fasilitas kesehatan dan tidak dibolehkan ke dukun atau bidan kampung. Namun bila kita lihat persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2020 adalah sebesar 78%.

Sedangkan gambaran capaian IMD di kabupaten/kota dan persalinan di fasilitas kesehatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.42



Pada grafik terlihat masih ada persalinan yang dilakukan oleh tenaga non kesehatan/dukun yaitu 22,1%, Walaupun sudah ada kebijakan dari Kemenkes bahwa tidak ada lagi persalinan selain oleh tenaga kesehatan dan harus di fasilitas kesehatan, namun kondisi di lapangan masih menunjukkan data adanya persalinan selain di faskes dan tidak dengan tenaga kesehatan. Masih adanya dukun yang belum terlatih dan belum ada kemitraan dengan petugas kesehatan atau tidak didampingi oleh petugas kesehatan pada saat melakukan persalinan kemungkinan tidak akan melakukan IMD. Demikian juga apabila persalinan dilakukan di rumah pasien, pengaruh keluarga (orang tua, nenek, suami) lebih dominan untuk menghambat terlaksananya IMD.

Pelaksanaan IMD pada saat persalinan tidak terlepas dari motivasi dan kesadaran pasien, dorongan dari keluarga dan kesabaran petugas. Kesadaran pasien akan pentingnya IMD dapat ditingkatkan melalui konseling oleh petugas pada saat ANC kepada ibu serta keluarga terutama suami dan orangtua (nenek) yang berpengaruh kuat dalam pengambilan keputusan.

Pemahaman petugas perlu ditingkatkan tentang definisi operasional IMD sehingga dapat melaksanakan IMD sesuai protap dan mampu meyakinkan ibu hamil dan keluarganya. Keberadaan petugas yang sudah dilatih Konseling Menyusui juga sangat penting untuk membantu ibu dalam melakukan IMD serta melanjutkan pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Pelatihan Konseling Menyusui kepada petugas kesehatan terutama di Puskesmas dan RS sudah diselenggarakan

dari tahun 2013 di Provinsi Riau. Jumlah Petugas yang sudah dilatih sekitar 543 orang petugas Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota kesehatan yang terdiri dari pelaksana gizi puskesmas, bidan koordinator, dan bidan desa serta dokter umum puskesmas. Selain itu juga sudah dilakukan pelatihan Konseling Menyusui bagi pelayanan kesehatan di RS swasta di wilayah kota Pekanbaru sebanyak 40 orang. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemantauan sebagian petugas yang sudah dilatih sudah pindah tugas ke puskesmas lain bahkan diluar instansi kesehatan.

Permasalahan yang dijumpai :

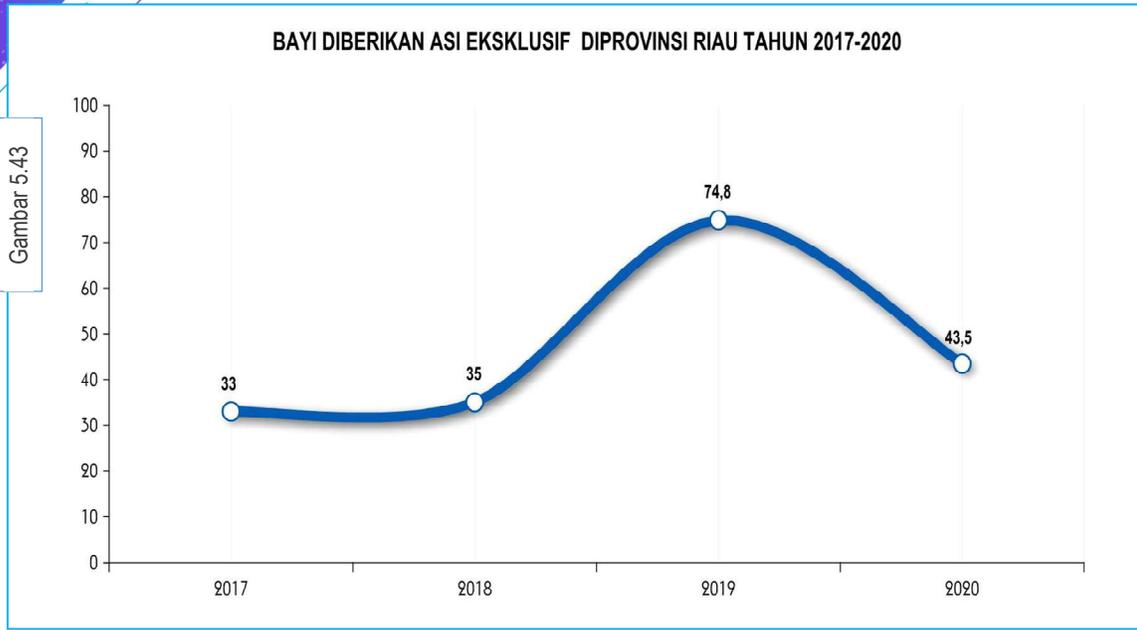
- Masih ada persalinan dilakukan di rumah, baik oleh petugas kesehatan maupun oleh non tenaga kesehatan, pengaruh keluarga sangat tinggi untuk mengambil keputusan akan dilakukan IMD atau tidak.
- Masih ada RS yang menolong persalinan dan tidak melakukan IMD, disebabkan tidak adanya kebijakan yang mendukung pemberian ASI
- Petugas kurang sabar dan menganggap tambahan pekerjaan dan merepotkan,
- Beberapa kabupaten seperti Indragiri Hilir dan Dumai melaporkan PN di fasyankes rendah namun IMD cukup tinggi. Analisanya kemungkinan persalinan yang tidak dilakukan di fasyankes, tapi ditolong oleh bidan dapat melakukan IMD karena kesadaran pasien yang cukup baik dan adanya dukungan dari keluarga.

6. Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

Bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif merupakan Bayi sampai usia 6 bulan yang hanya diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir. Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif dihitung dengan membagi jumlah bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif dengan jumlah bayi usia 6 bulan dikali 100%. Pencatatan dilakukan setiap waktu saat bayi usia 6 bulan dan dilaporkan setiap bulan. Laporan tahunan diperoleh melalui penjumlahan data bulan Januari sampai Desember (kumulatif).

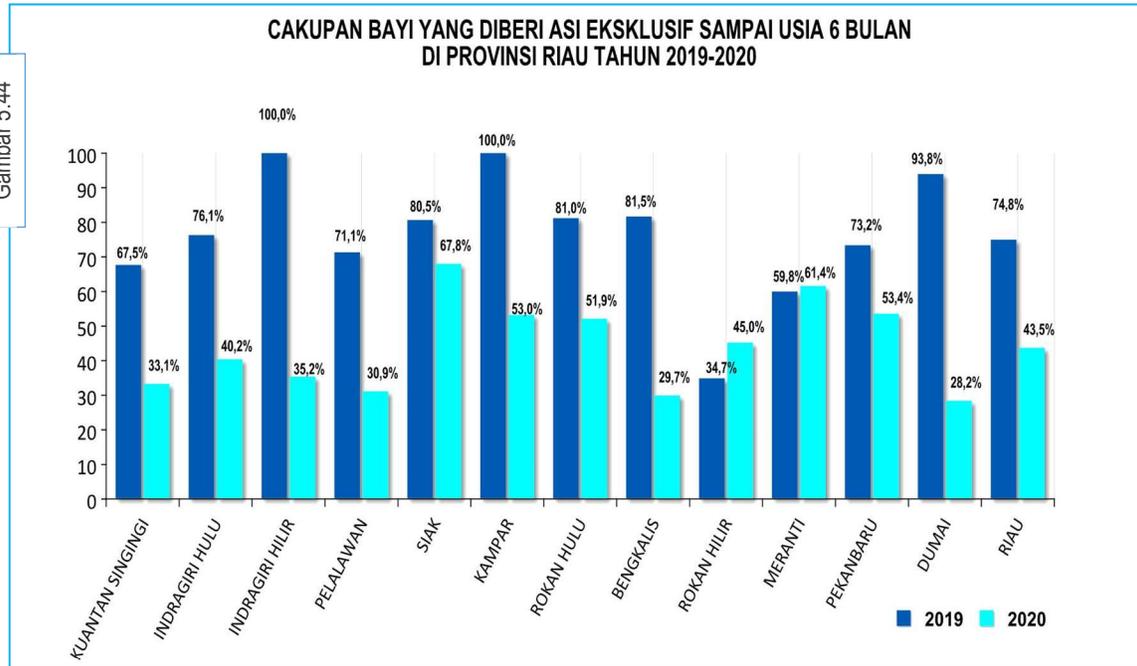
Dan gambaran cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6 bulan terdapat peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif dari tahun 2017 sampai 2020.

Gambar 5.43



Cakupan bayi usia 6 bulan (lulus) yang mendapat ASI Eksklusif pada tahun 2020 adalah 43,5%, meningkat dibanding tahun 2019 (37,21%) dan rata-rata semua kabupaten/kota menunjukkan peningkatan cakupan kecuali Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai. Untuk capaian provinsi, bila dibandingkan dengan target indikator kinerja (Renstra 2020-2024) tahun 2020 yaitu 35%, sudah mencapai target. Kabupaten yang belum mencapai target adalah : Kuantan Singingi, Pelalawan, Bengkalis dan Dumai. Sedangkan kabupaten yang paling rendah cakupannya adalah Dumai (28,2%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.44



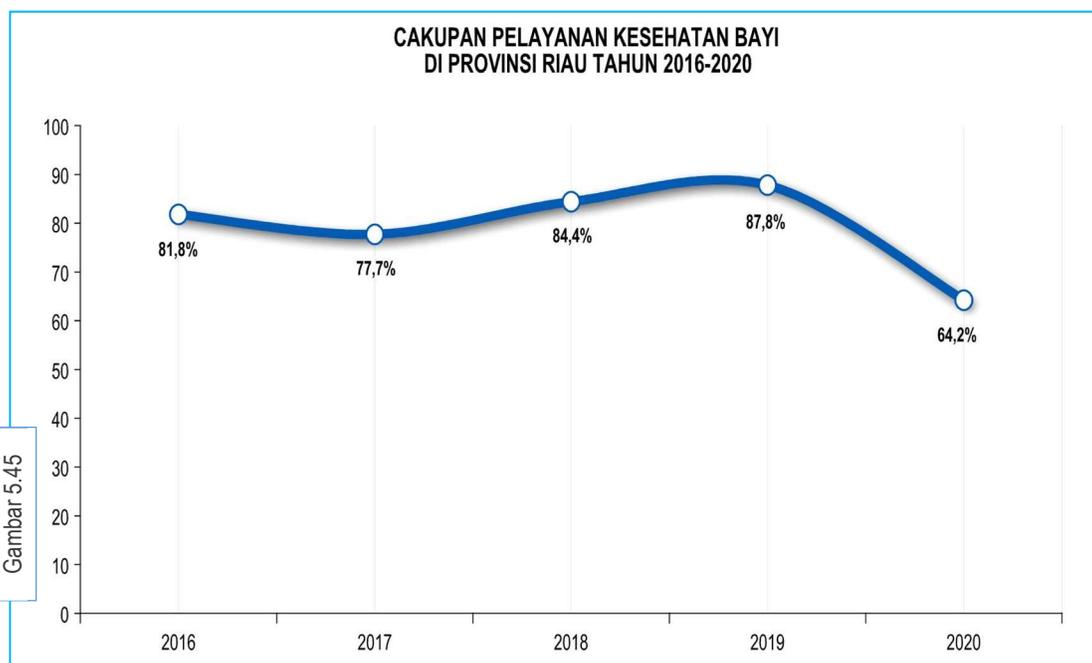
7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi

Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standart memiliki kriteria haruslah diberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standart secara komprehensif yang melibatkan beberapa program terkait (tidak hanya KIA) yaitu :

- Dilakukan SDIDTK minimal 4 kali dalam setahun
- Mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Mendapatkan vitamin A sekali dalam setahun
- Dilakukan penimbangan minimal 4 kali dalam setahun
- Mempunyai Buku KIA
- Mendapatkan ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan.

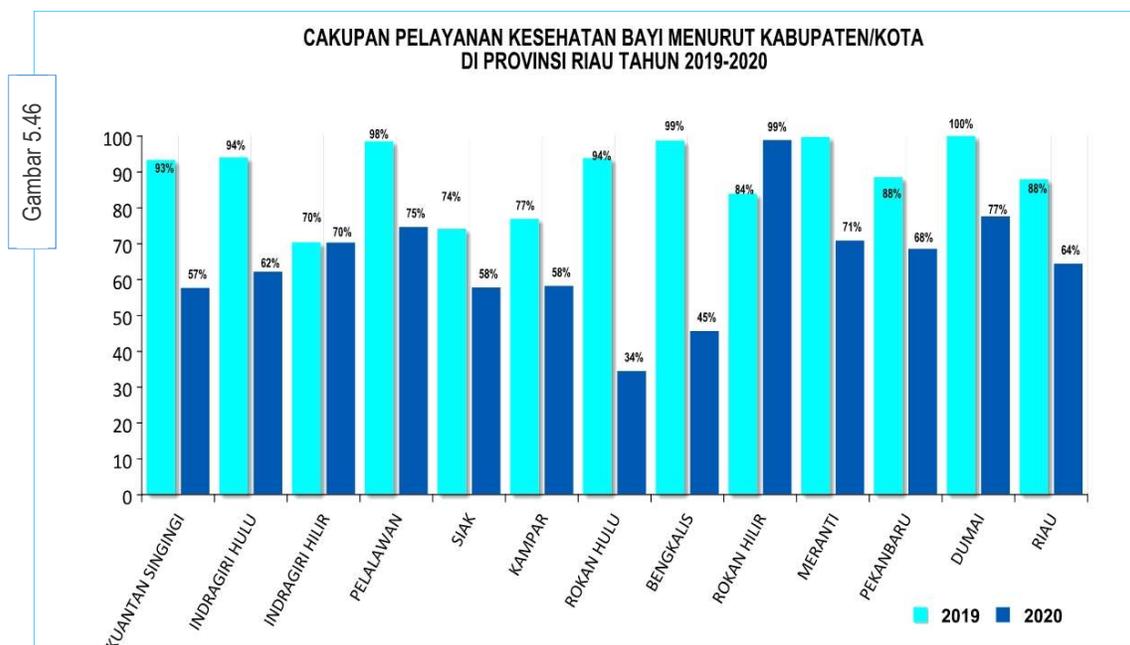
Pencapaian kunjungan bayi masih perlu diperkuat lagi terutama dari sisi kualitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain ;

1. Masih terdapat kunjungan bayi oleh tenaga kesehatan yang belum tercatat (under reported)
2. Program Public Health Nursing (PHN) belum berjalan secara maksimal
3. Jadwal imunisasi pada bayi hanya sampai sekitar umur 9 (sembilan) bulan sehingga hal ini juga menjadi penyebab masyarakat tidak membawa bayinya pada petugas kesehatan kecuali jika sakit.
4. Dikarenakan dalam kondisi Pandemi Covid 19



Gambar 5.45

Dari grafik cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi untuk Provinsi Riau baru tercapai 64,2% dari target 100% yang harus dicapai. Pencapaian kunjungan bayi tahun 2019 sebesar 87,8% (target Provinsi Riau 90%) . Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi selama 5 tahun (2016-2020) menunjukkan kondisi fluktuatif. Penurunan cakupan pelayanan kesehatan 2020 sangat tajam, hal ini karena kasus covid-19 yang sedang menjadi wabah. Untuk mendapat gambaran cakupan pelayanan kesehatan bayi menurut kabupaten/kota, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

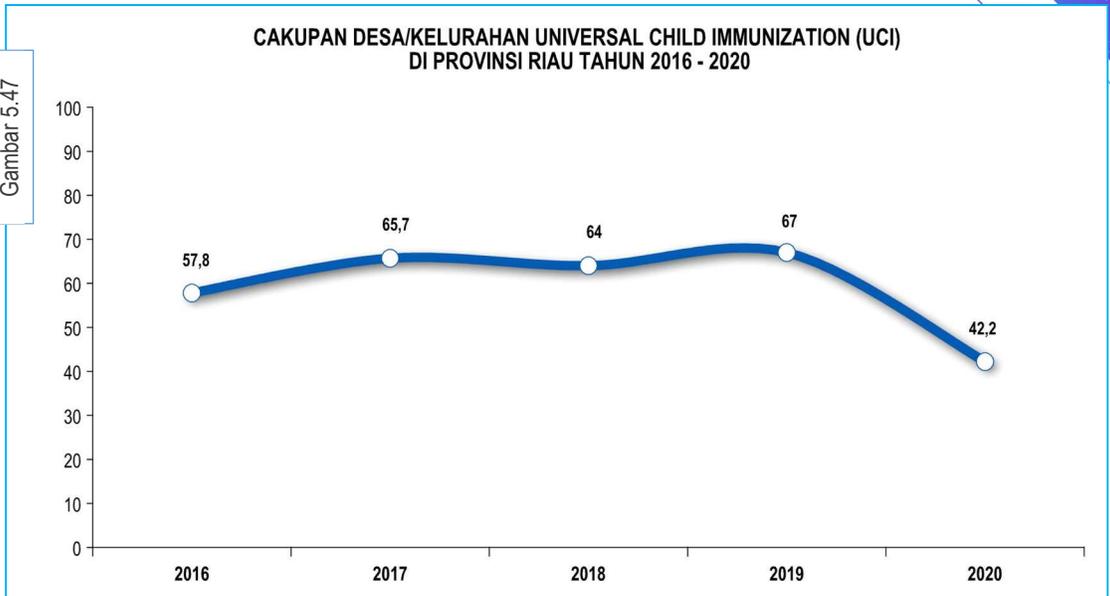


Dari grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan bayi kabupaten/kota terlihat bahwa hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan, hanya Kabupaten Rokan Hilir yang mengalami peningkatan cakupan.

8. Persentase Desa/Kelurahan UCI

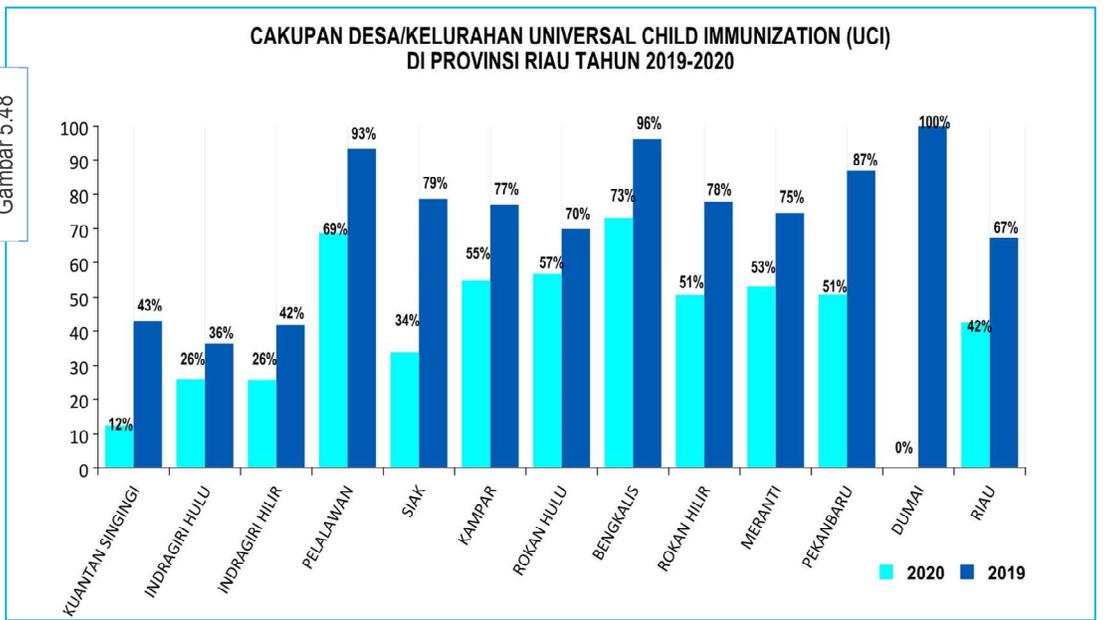
Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Keberhasilan UCI tercapai apabila semua bayi di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap sekitar 90 % atau lebih. Dari grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif. Cakupan UCI tahun 2020 yang hanya 42,2% ini merupakan dampak dari wabah covid-19, dimana pelaksanaan posyandu d masyarakat juga mengalami kendala atau rendah kunjungan balita ke posyandu.

Gambar 5.47



Cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Riau Tahun 2019-2020 pada Kabupaten/Kota, terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.48

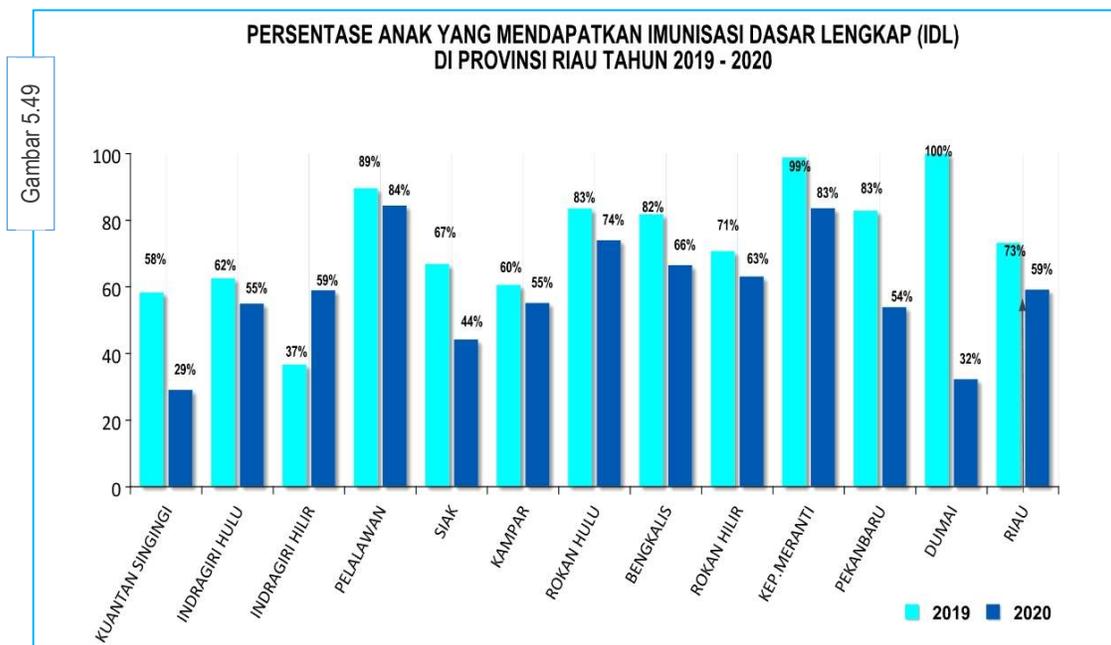


Pada grafik diatas dapat terlihat bahwa dampak wabah covid-19 yang sedang terjadi memang membawa dampak terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya pelayanan luar gedung seperti pelaksanaan posyandu, dimana imunisasi terhadap balita juga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terlihat dari data jumlah balita yang ditimbang (D/S) tahun 2020 hanya 39%.

9. Anak Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan indikator dalam program imunisasi, dimana setiap bayi usia 0-11 bulan sudah mendapatkan imunisasi hepatitis 1 kali, BCG 1 kali,

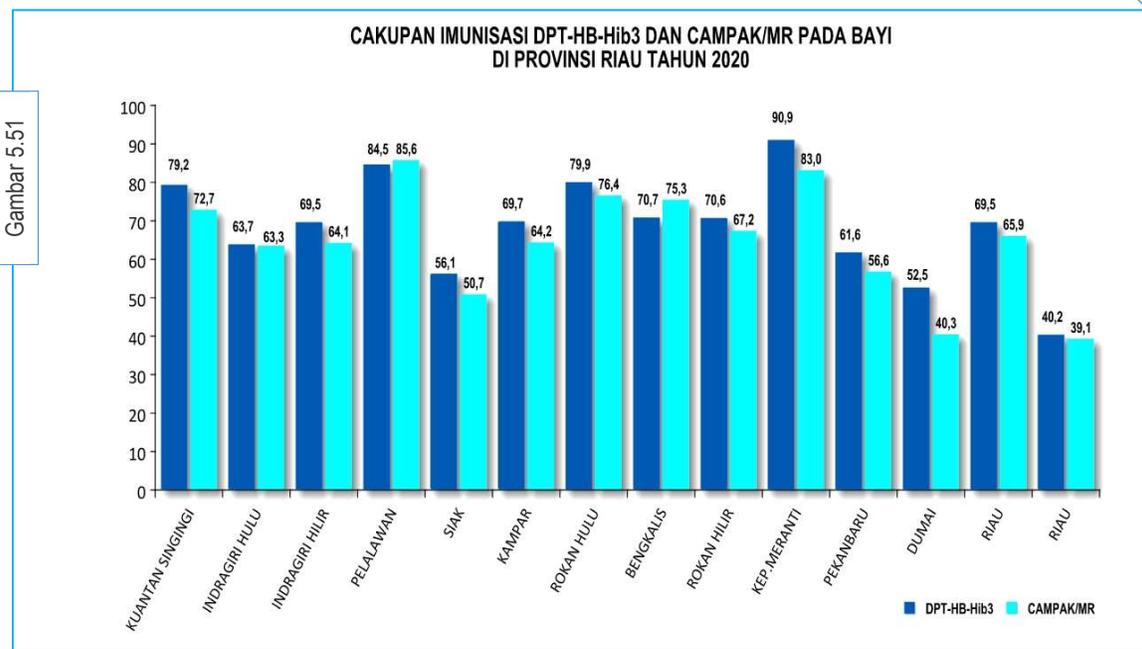
DPT-HB-Bib 3 kali, Polio 4 kali, IPV 1 kali dan Campak/Measles Rubella (MR) satu kali. Dari grafik dibawah terlihat bahwa dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau hanya Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan cakupan IDL. Kondisi ini disebabkan karena wabah covid-19.



Untuk persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) di Provinsi Riau Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik dibawah ini yakni persentase anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2019 menjadi 73%, dan tahun 2020 (59%).

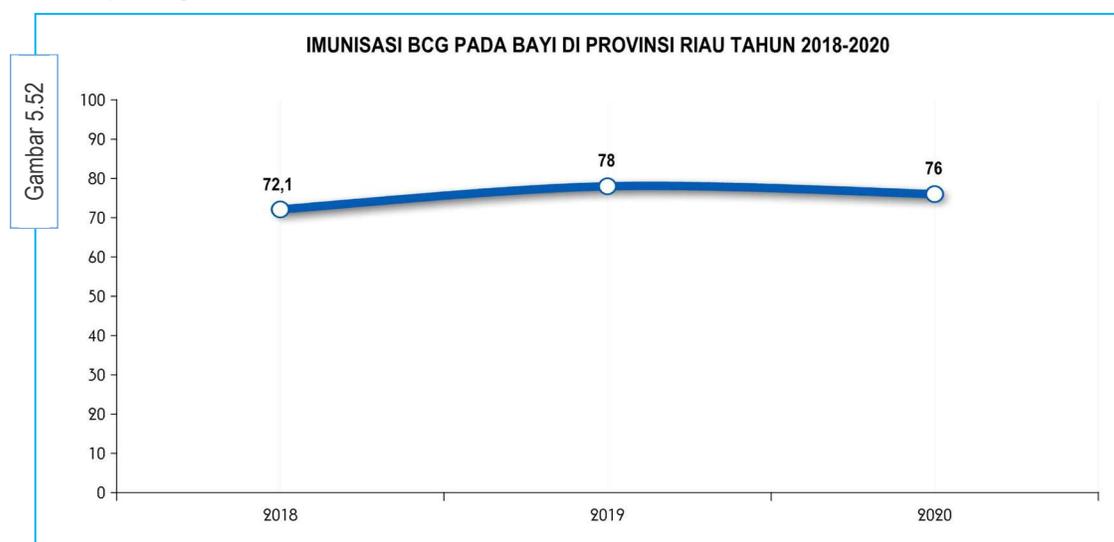


Berikut ini adalah gambaran cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib3 dan Campak/MR2 di Provinsi Riau tahun 2020.



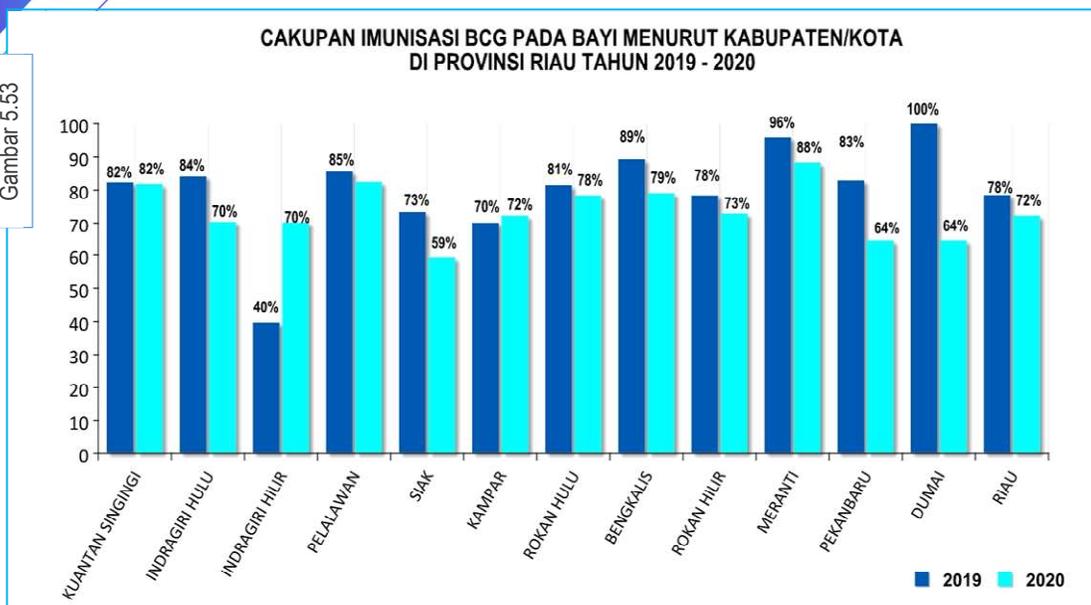
10. Imunisasi BCG Pada Bayi

Imunisasi BCG merupakan imunisasi yang diberikan dalam rangka menurunkan angka kesakitan yang disebabkan oleh bakteri gram (+) Tuberculosis (TBC). Anak yang diberikan imunisasi BCG ini diharapkan memiliki kekebalan terhadap TBC. Cakupan Imunisasi BCG pada bayi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sedangkan cakupan imunisasi BCG menurut kabupaten/kota juga mengalami penurunan, cakupan tertinggi pada Kabupaten Kep. Meranti (88%) sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Siak (59,1%).

Gambar 5.53



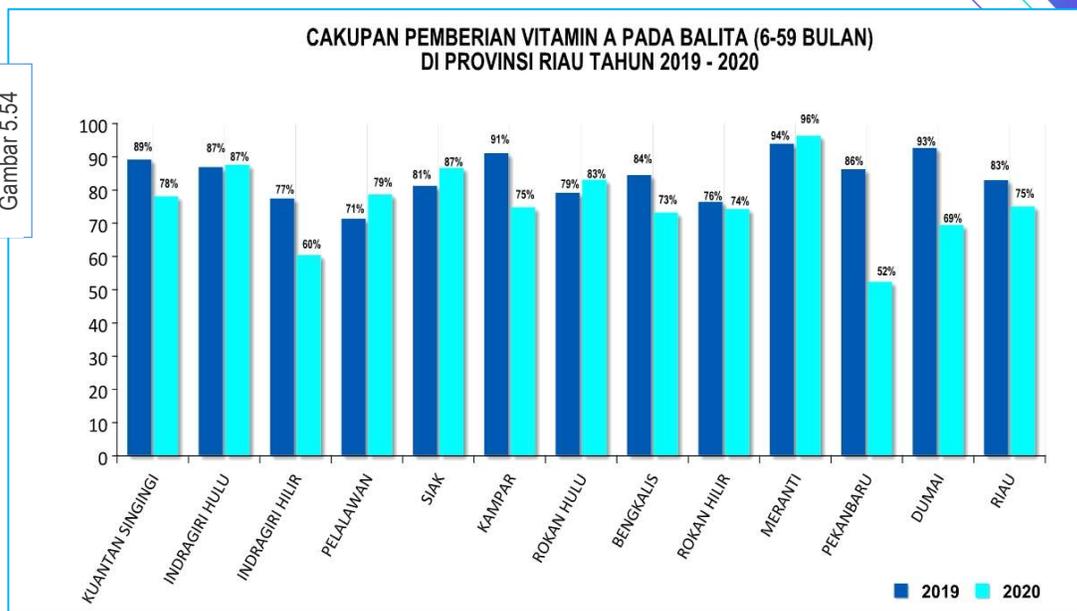
11. Memberian Vitamin A Pada Bayi Dan Anak Balita

Pemberian Vitamin A pada bayi adalah bayi usia 6 sampai 11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan vitamin A 100.000 Satuan Internasional (SI) dan anak umur 12 sampai 59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna merah dengan kandungan vitamin A sebesar 200.000 SI.

Tujuan pemberian kapsul vitamin A adalah untuk menurunkan prevalensi dan mencegah Kekurangan Vitamin A (KVA) pada balita. Kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat apabila cakupannya tinggi. Bukti-bukti lain menunjukkan peranan vitamin A dalam menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain untuk mencegah kebutaan, pentingnya vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak, kesehatan dan pertumbuhan anak.

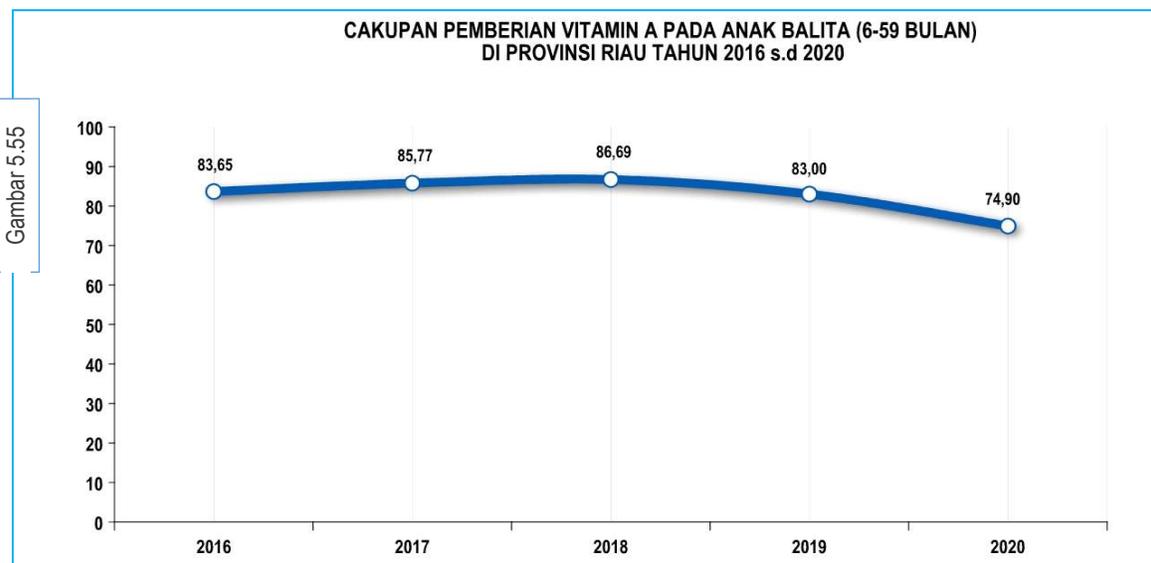
Pencatatan/entry data dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus yang direkap setiap bulan Februari dan Agustus. Laporan tahunan untuk cakupan bayi usia 6-11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A diperoleh melalui penjumlahan data bulan Februari dan Agustus sedangkan data cakupan balita umur 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A menggunakan data bulan Agustus. Cakupan pemberian kapsul vitamin A balita 6-59 bulan dihitung dengan menjumlahkan cakupan bayi 6-11 bulan dengan cakupan anak-balita 12-59 bulan, kemudian diambil rata-ratanya. Dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 5.54



Dalam grafik diatas terlihat bahwa cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 4% dimana tahun 2018 jumlah cakupan mencapai 87% menjadi 83% di tahun 2019. dimana di tahun 2019 ini cakupan mencapai 78%, dan untuk kabupaten/kota yang mencapai capaian cakupan imunisasi BCG pada bayi sebesar 100% adalah kota Dumai. Jumlah cakupan pemberian vitamin A pada balita (6-59 bulan) Provinsi Riau tertinggi di kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 94% dan jumlah terendah di kabupaten Rokan Hilir sebesar 76%.

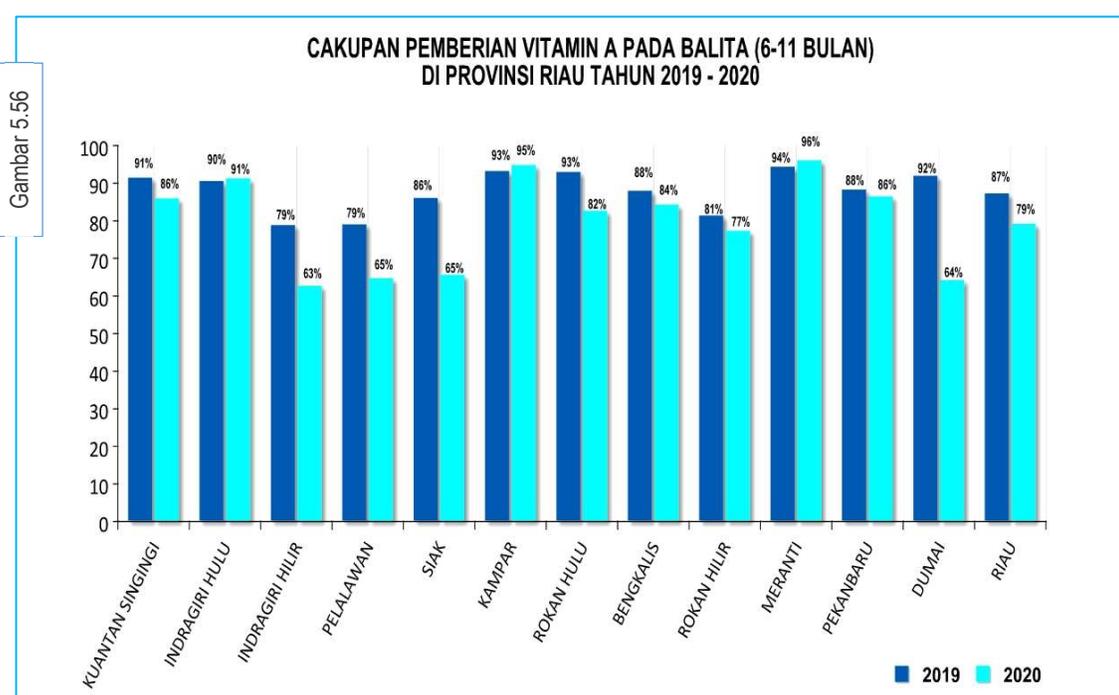
Dari tahun 2015 yang 81,16% meningkat ditahun 2016 (83,65%) meningkat lagi di tahun 2017 (85,77%) dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 86,69%. Dan cakupan pemberian vitamin A pad balita mengalami penurunan 83%.



Gambar 5.55

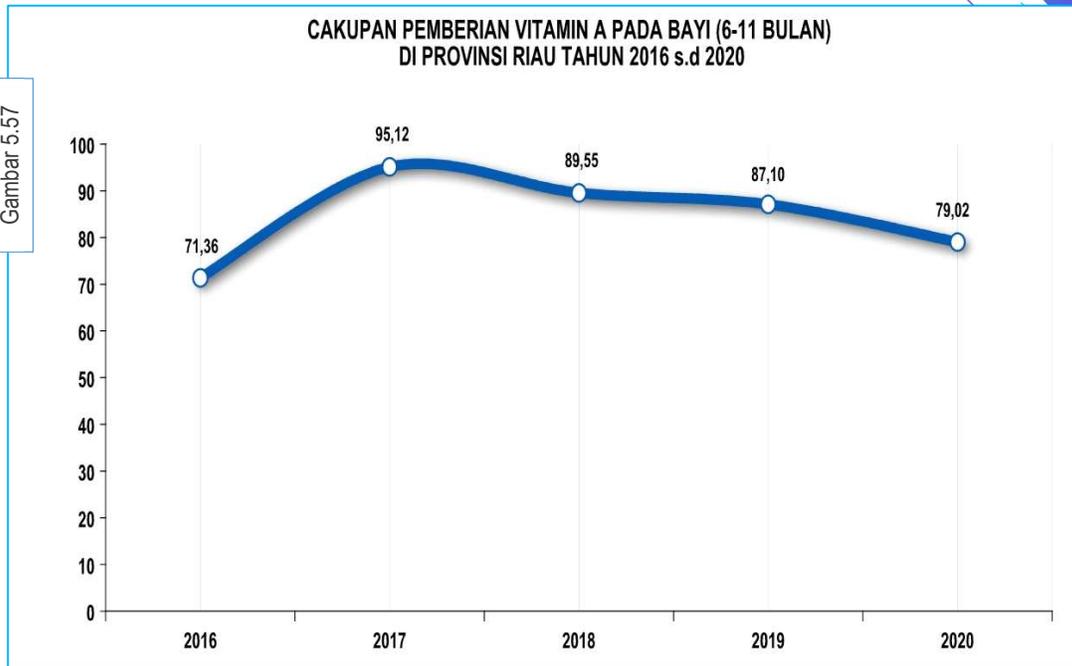
Cakupan pemberian kapsul vitamin A bayi terintegrasi dalam pelayanan kesehatan bayi. Berdasarkan laporan terdapat kesenjangan antara dua indikator ini. Cakupan pelayanan kesehatan bayi lebih rendah daripada cakupan vitamin A bayi. Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa indikator di Pelayanan Kesehatan Bayi yang belum dilaksanakan, seperti deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) dan minimal kunjungan bayi 4 kali setahun. Pemberian vitamin A adalah salah satu indikator saja dalam pelayanan kesehatan bayi.

Gambaran cakupan pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan bisa di lihat pada gambar dibawah ini.



Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi 6-11 bulan di Provinsi Riau pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Jumlah cakupan di tahun 2019 mencapai 87% dan tahun 2018 mencapai 90% dan capaian cakupan ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 90%. Tahun 2019 kabupaten yang paling tinggi capaian pemberian kapsul vitamin A bayi 6-11 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (94%) dan capaian terendah di kabupaten Indragiri Hilir (79%). Kabupaten yang sudah mencapai target 90% adalah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti dan Dumai.

Gambar 5.57

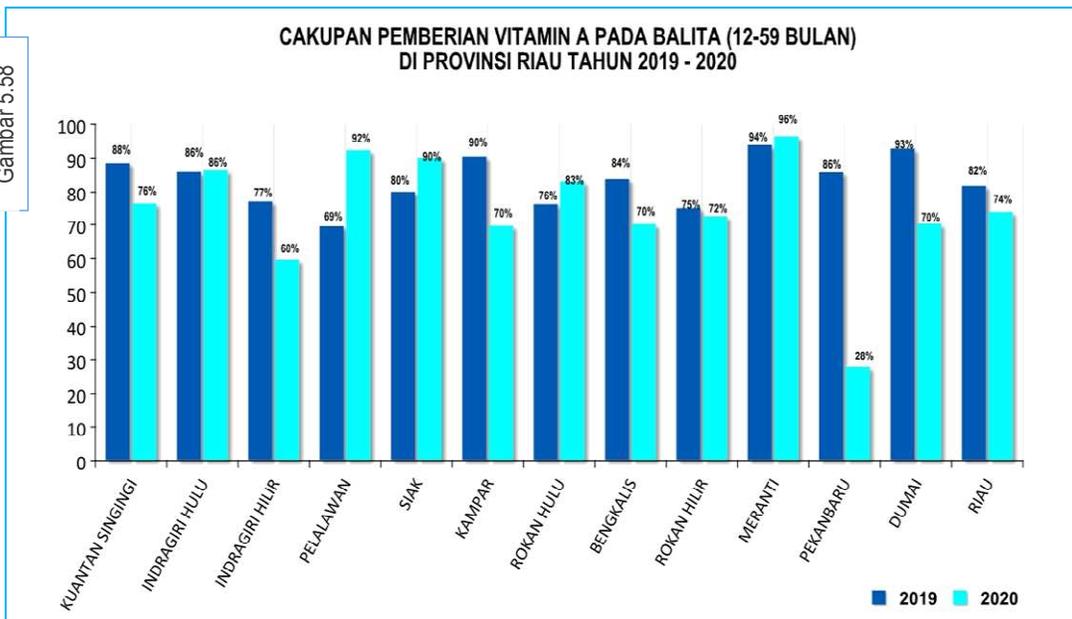


Dalam grafik diatas terlihat bahwa selama 5 tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, cakupan pemberian vitamin A pada bayi (6-11 bulan) di Provinsi Riau yang jumlah cakupannya sesuai dengan target yang ditentukan (90%) terjadi ditahun 2017 (9512%) dan jumlah cakupan terendah di tahun 2016 (71,36%).

12. Pelayanan Kesehatan Balita

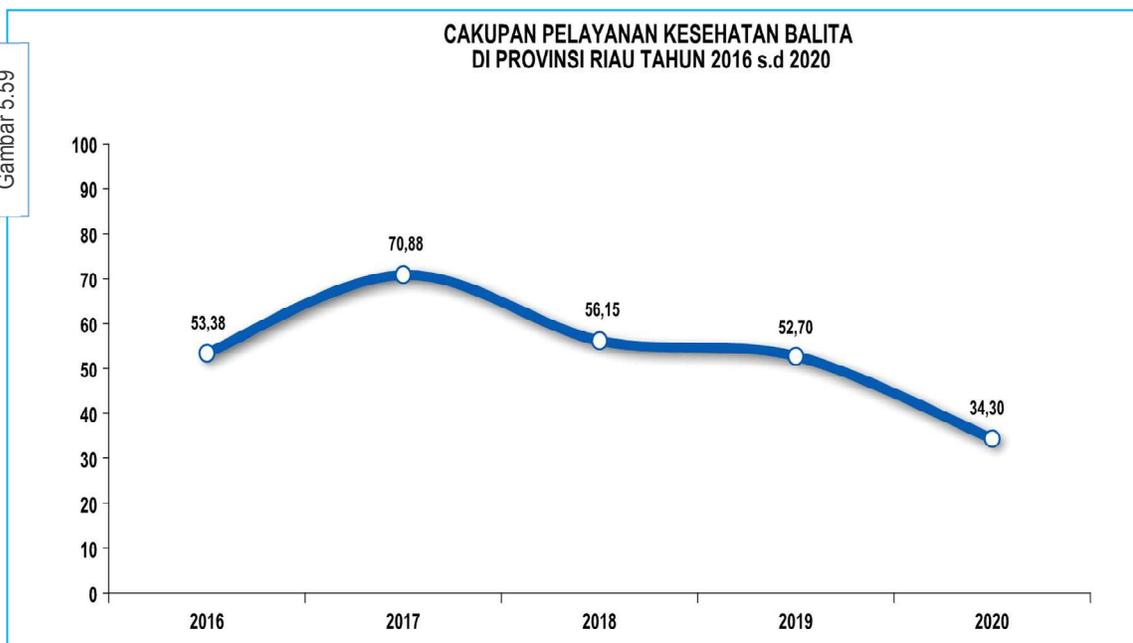
Definisi anak balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan (1 hari sebelum ulang tahunnya yang kelima). Sedangkan definisi operasional kunjungan anak balita adalah anak usia 12 s/d 59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Untuk menjaring anak balita relatif sulit dibandingkan bayi disebabkan antara lain karena orang tua merasa sudah lengkap imunisasi pada saat umur 9 bulan sehingga hanya membawa anak balita nya ke fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit saja. Padahal anak balita harus tetap dipantau pertumbuhan (minimal 4 kali dalam setahun) dan perkembangannya (minimal 2 kali dalam setahun) dan mendapatkan kapsul vitamin A (2 kali dalam setahun : Bulan Februari dan Agustus).

Gambar 5.58



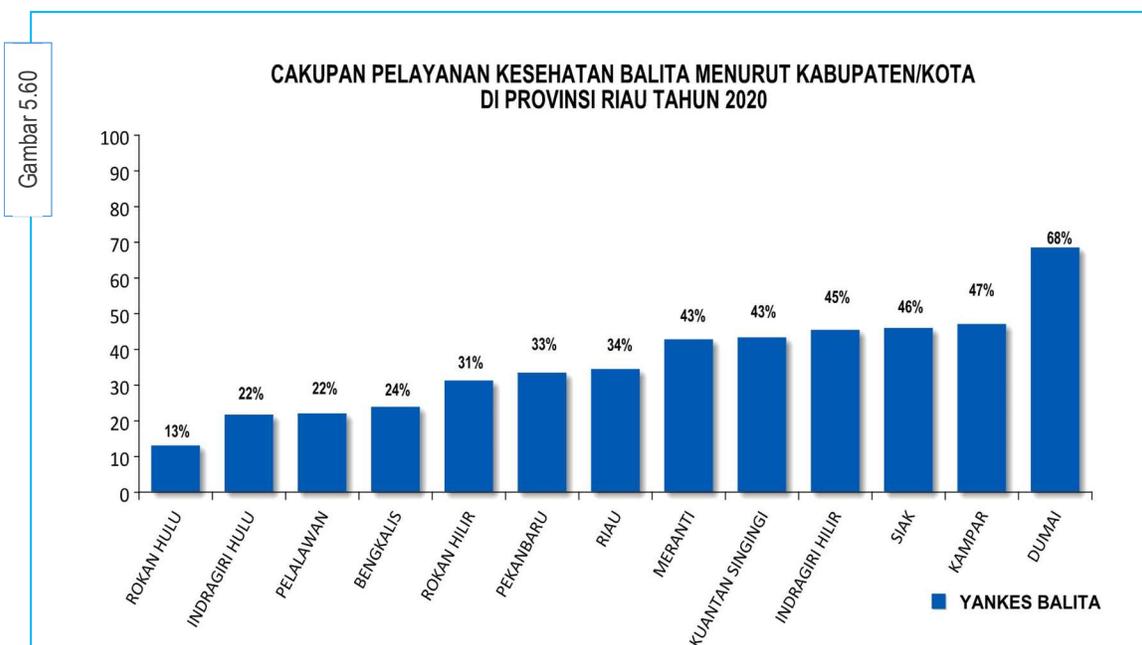
Sedangkan trend dari pelayanan kesehatan balita dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 5.59



Dari grafik di atas cakupan pelayanan kesehatan balita di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif dan juga mengalami penurunan. Adapun yang menjadi penyebabnya selain wabah covid-19, pencapatan dan pelaporan juga perlu pembenahan.

Cakupan pelayanan kesehatan balita di Provinsi Riau menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 34,3 %. Cakupan pelayanan kesehatan balita Kabupaten/kota tahun 2020 capaian rendah akibat pandemi covid-19 yang sedang mewabah. Gambarnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

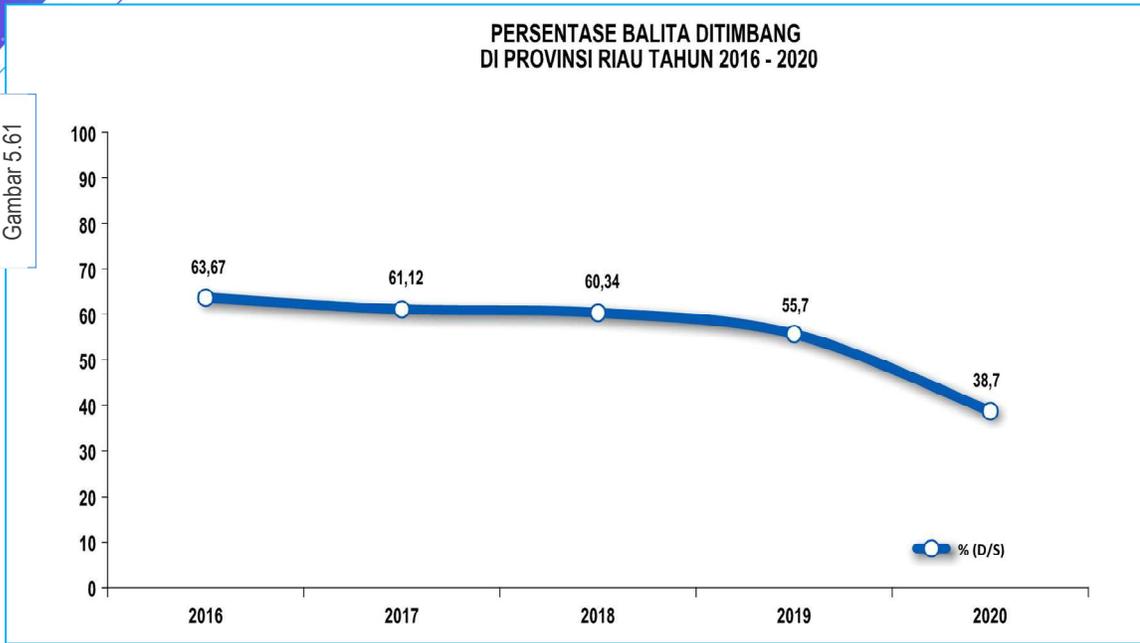


13. Balita Ditimbang

Penimbangan balita merupakan gambaran kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu. Indikatornya berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita, cakupan pelayanan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap prevalensi gizi kurang pada balita. Asumsinya semakin tinggi cakupan D/S, semakin tinggi cakupan vitamin A, semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin rendah prevalensi gizi kurang.

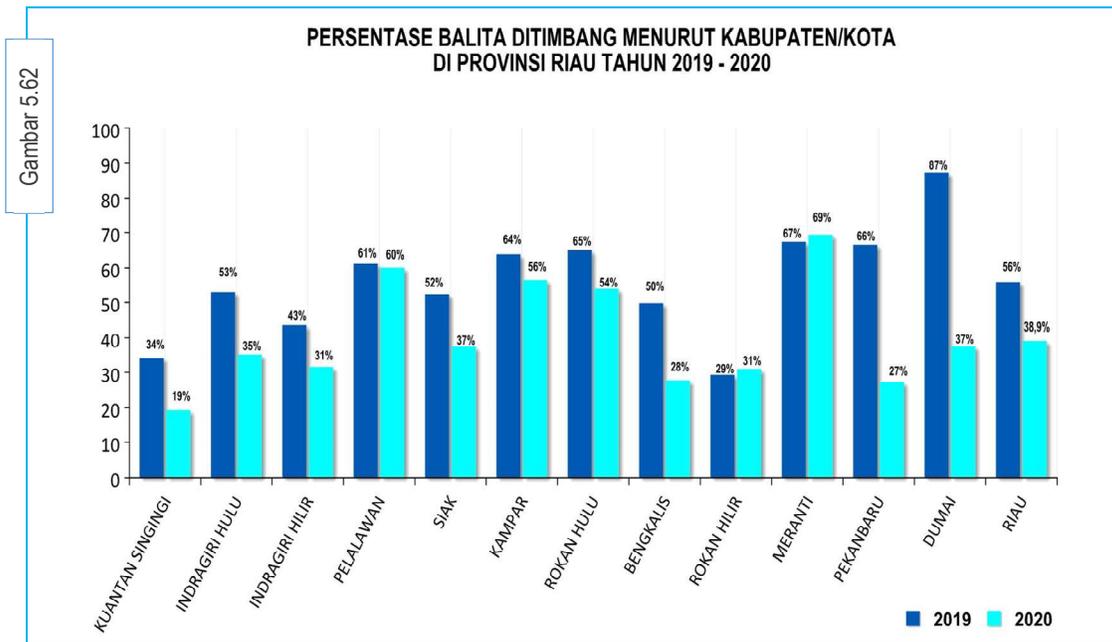
Balita di Provinsi Riau ditimbang pada tahun 2020 sebesar 38,7%, ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini belum mencapai target (80%). Bila diperhatikan dalam 5 tahun terakhir balita yang ditimbang terus mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian dan menjadi strategi promosi kesehatan. Untuk gambaran penimbangan 5 tahun (2016 – 2020) dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.61



Pada tahun 2020, terjadinya pandemi Covid 19, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan posyandu terhambat. Posyandu tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan seperti biasanya karena khawatir berisiko terjadinya penularan kepada masyarakat terutama anak-anak dan ibu hamil.

Penurunan balita ditimbang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

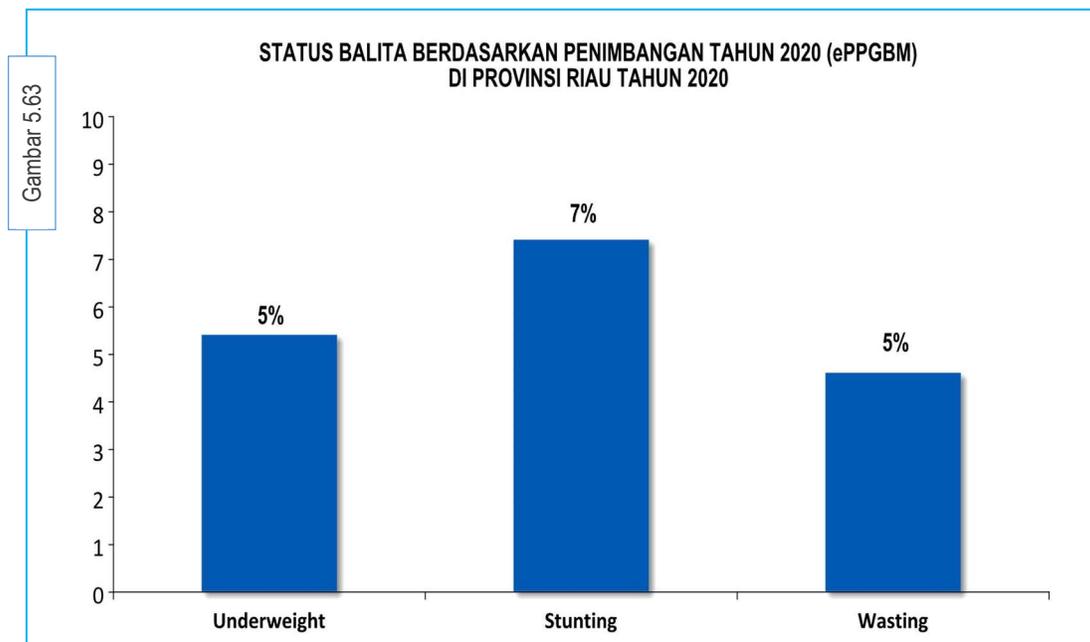


Gambar 5.62

C. STATUS GIZI PADA BALITA

Status gizi balita dapat diketahui melalui hasil pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) balita yang disajikan dalam tiga indikator status gizi berdasarkan standar antropometri anak, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Berdasarkan hasil pendataan di posyandu melalui kegiatan surveilans gizi yang diinput dalam aplikasi ePPGBM tahun 2020, diketahui persentase status gizi balita di Provinsi Riau. Berdasarkan analisa data status gizi balita terdapat 16.982 balita (5,4%) mengalami gizi kurang, 25.617 balita pendek dan sangat pendek (stunting), 7,4%, serta 16.019 balita mengalami gizi kurus dan sangat kurus (wasting), 4,6%.

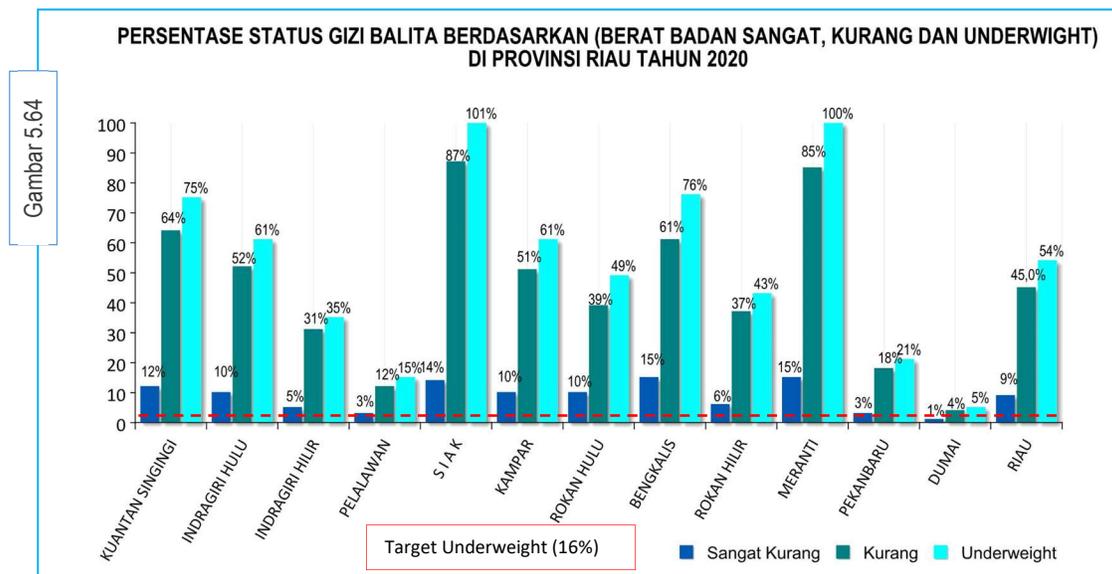


1. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U (Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang - Underweight)

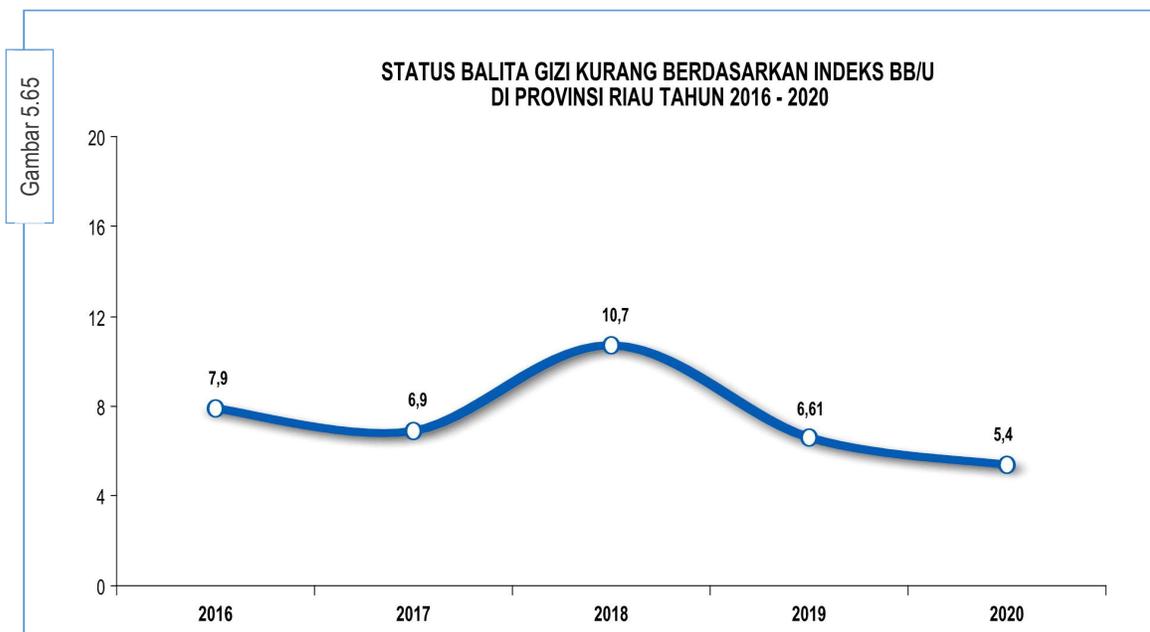
Status gizi balita berdasarkan indeks berat badan menurut umur atau BB/U menggambarkan terjadinya gangguan gizi saat ini pada balita (masalah gizi akut). Data BB balita diperoleh dari hasil penimbangan di posyandu bulan Agustus 2020 yang sudah dientry ke dalam aplikasi ePPGBM dengan jumlah balita yang ditimbang sebanyak 349.191 anak. Bila dibandingkan dengan jumlah sasaran balita, maka yang dipantau pertumbuhannya di posyandu adalah lebih kurang 68,8%, dengan gambaran status gizi balita di Provinsi Riau tahun 2020 underweight 5,4% . dimana underweight paling sedikit ditemui di Kota Dumai 0,5%, diikuti dengan Kabupaten Pelalawan 1,5% dan Kota Pekanbaru 2,1%.

Sedangkan Balita underweight terbanyak ditemui di Kabupaten Siak 10,1% diikuti oleh Kabupaten Kep. Meranti 10% dan Kabupaten Bengkalis 7,6%. Namun status gizi ini tidak melampaui target yang ditetapkan yakni 16%. Untuk gambaran status gizi di 12 kabupaten kota dapat dilihat dari berikut :

Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan (Berat Badan Sangat Kurang dan Berat Badan Kurang - Underweight)

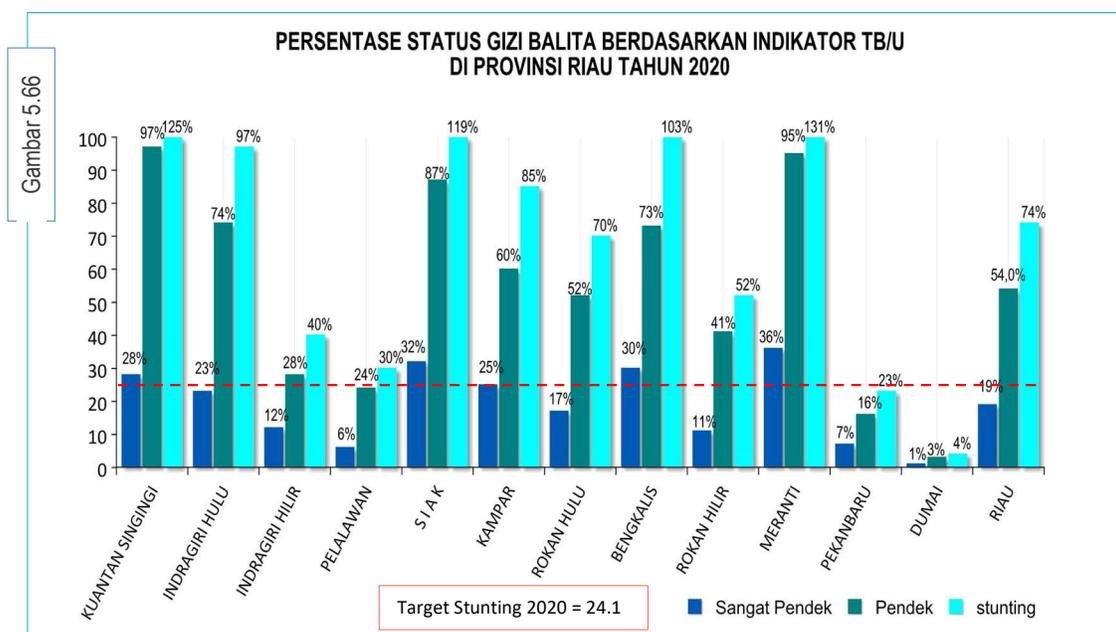


Status balita gizi kurang berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau Tahun 2018-2020 menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 5,4 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana status gizi kurang Tahun 2019 mencapai 6.61 dan pada tahun 2018 mencapai 10.7 seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini :



2. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Sangat pendek dan Berat Badan Pendek – (Stunting)

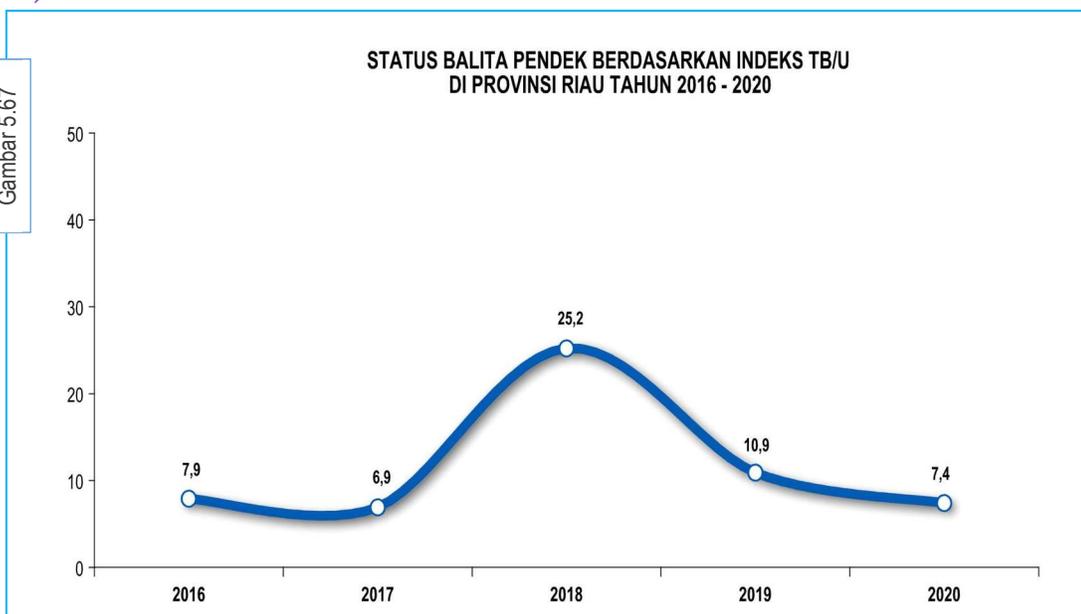
Definisi operasional : Anak umur 0 – 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD. Data yang dikumpulkan adalah data ukuran panjang badan atau tinggi badan, umur anak dan jenis kelamin. Hasil pengukuran diinput ke dalam aplikasi ePPGBM setiap waktu saat pengukuran dilakukan, dan direkap setiap bulan.



Persentase balita stunting adalah jumlah dari balita Sangat pendek dan pendek. Berdasarkan hasil analisa data ePPGBM dapat diketahui persentase balita stunting di Provinsi Riau tahun 2020 adalah 7,3% (sangat pendek 1,9% dan pendek 5,4%). Kabupaten yang paling tinggi persentase stunting adalah Kabupaten Kuantan Singingi (12,5%) dan yang paling rendah adalah Dumai (0,4%).

Status balita gizi stunting berdasarkan indeks TB/U di Provinsi Riau Tahun 2018-2020 menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 7,4 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana status balita pendek (TB/U) Tahun 2019 mencapai 10,9 dan pada tahun 2018 mencapai 25,2 seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

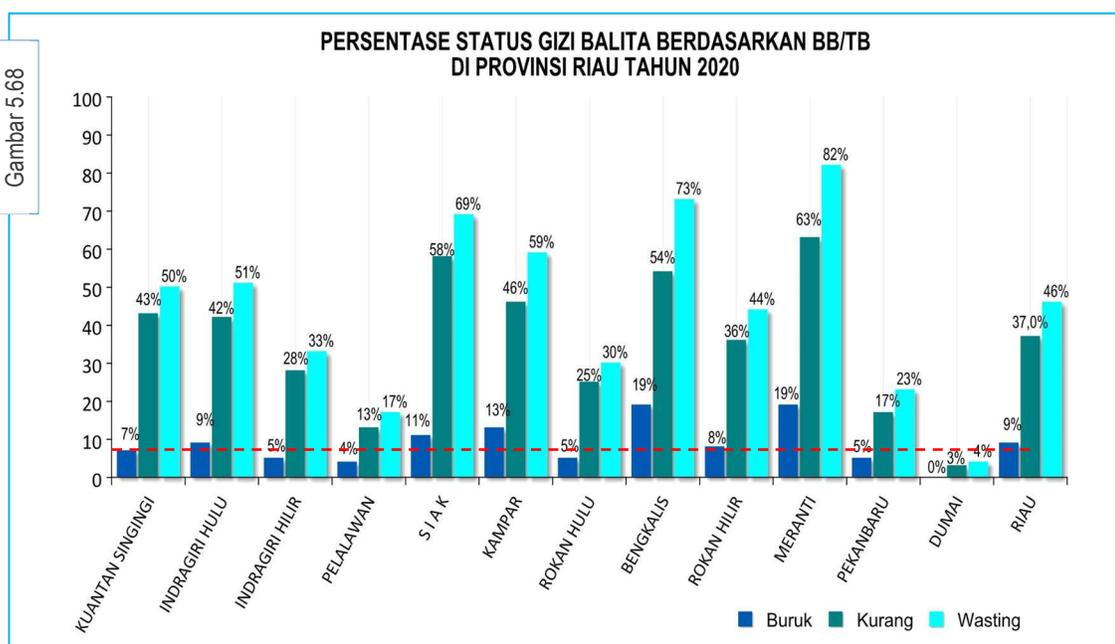
Gambar 5.67



3. Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator TB/U (Berat Badan Gizi Buruk dan Berat Gizi Kurang – (Wasting)

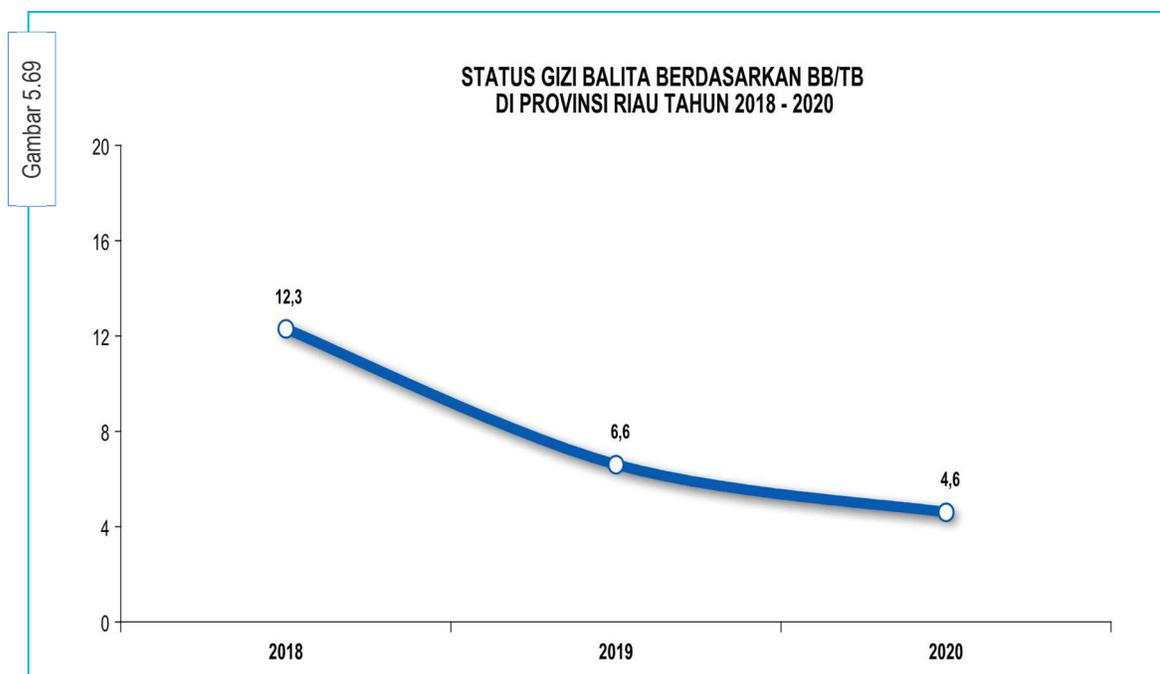
Definisi Operasional : Anak umur 0 – 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score dibawah -2SD. Data yang dikumpulkan adalah data berat badan, tinggi badan atau panjang badan. Umur dan jenis kelamin.

Gambar 5.68



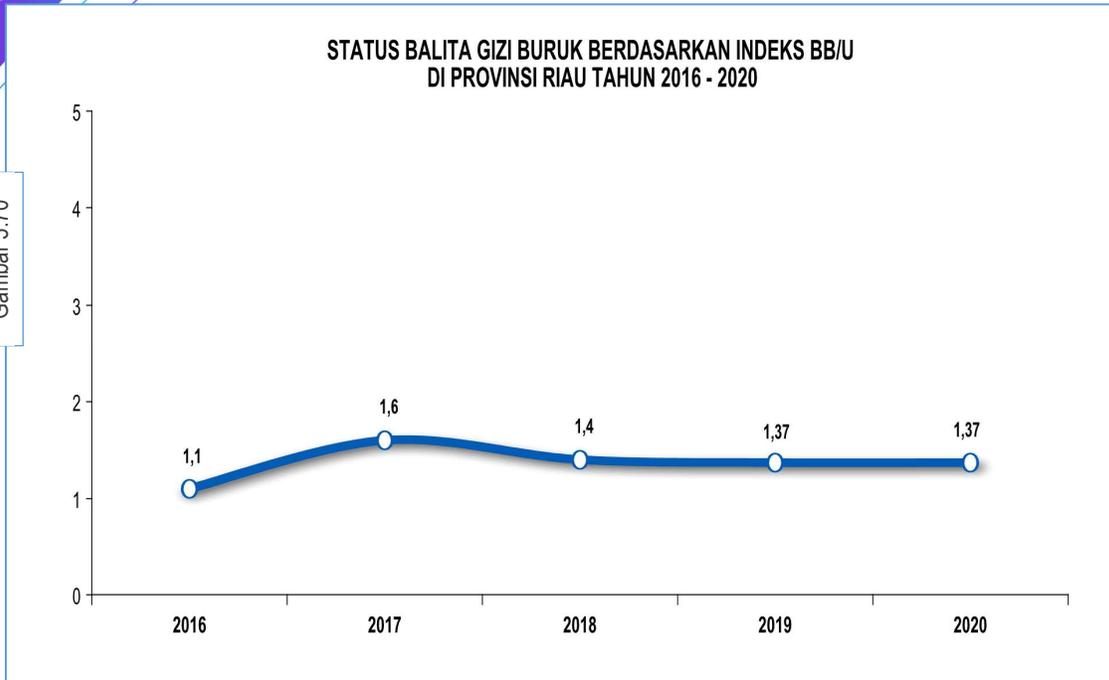
Persentase balita wasting adalah gambaran balita dengan pengukuran berat badan dibanding dengan tinggi badan (indeks BB/TB) dan merupakan gabungan status gizi buruk dan gizi kurang. Dari hasil analisa data ePPGBM diketahui persentase balita wasting di Provinsi Riau tahun 2020 adalah 4,6%. Kabupaten yang paling tinggi persentasenya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (8,2%) dan yang paling rendah adalah Kota Dumai 0,4%.

Status balita gizi stunting berdasarkan indeks BB/TB di Provinsi Riau Tahun 2018-2020 menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 4,6 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana status balita kurus Tahun 2019 mencapai 6,6 dan pada tahun 2018 mencapai 12,3 seperti yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini :



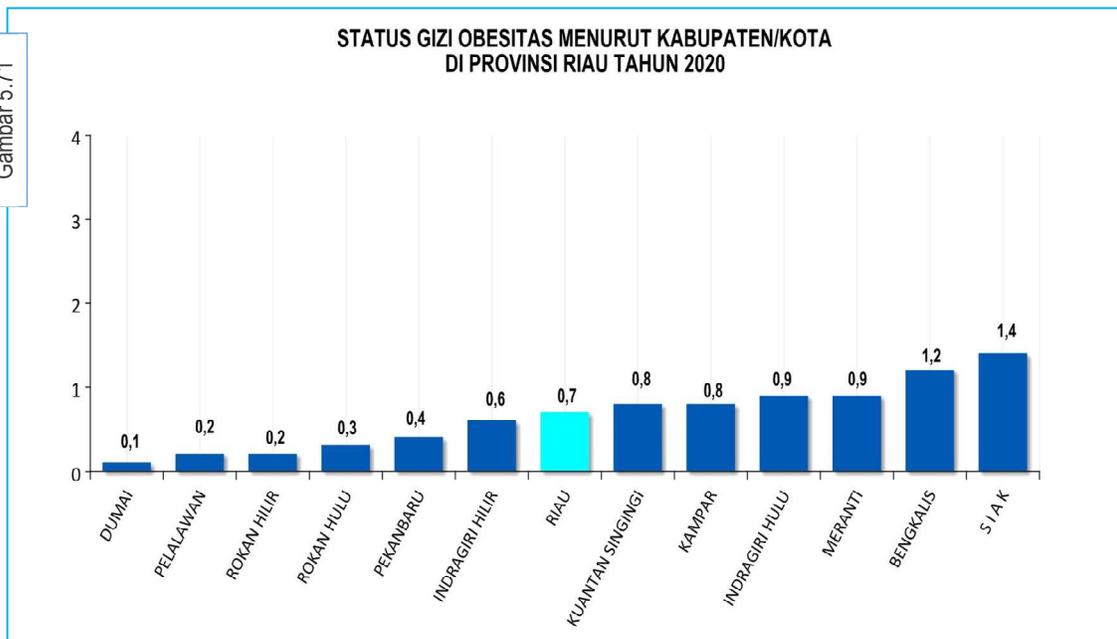
Selain status balita gizi di atas, maka ada juga status gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Riau tahun 2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana capaian tertinggi berada ditahun 2017 (1,6) dan capaian terendah di tahun 2015 (1). Untuk tahun 2020 gizi buruk sangat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 mencapai 0,9 menurun dibandingkan tahun 2019 mencapai 1,37, angka capaian ini menurun dari tahun sebelumnya yakni tahun 2018 yang mencapai 1,4 seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini :

Gambar 5.70



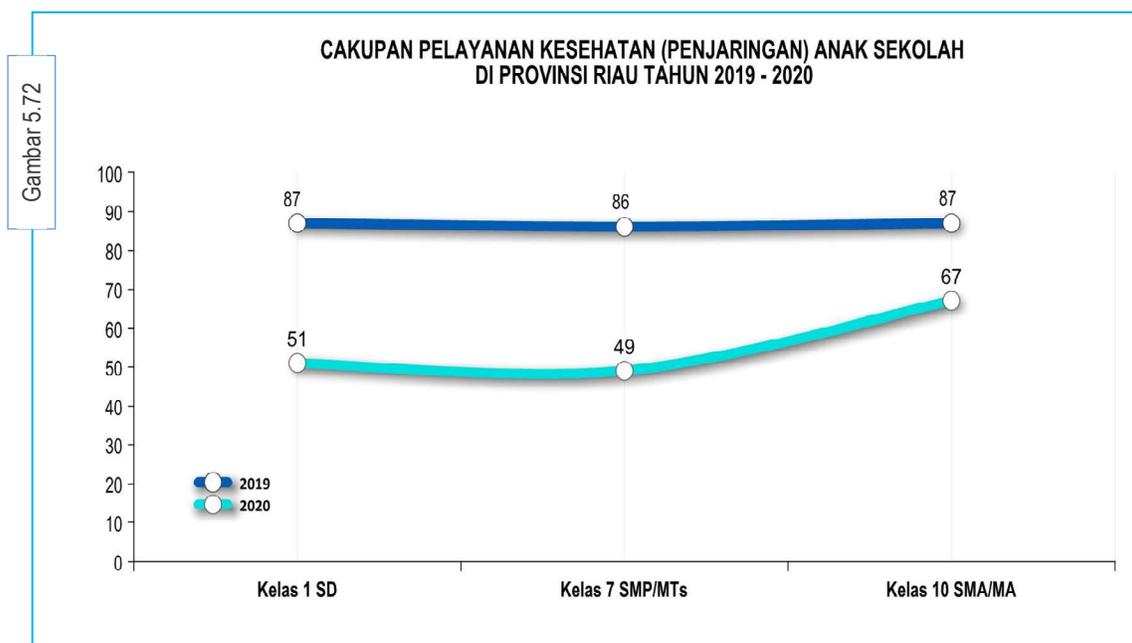
Selain kondisi gizi diatas yang harus mendapat perhatian juga gizi obesitas juga harus menjadi perhatian, meskipun angkanya masih kecil namun kondisi ini jika terus menerus akan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti penyakit yang ditimbulkan akibat kegemukan (misalnya hipertensi, diabetes dan PTM lainnya). Dan gambaran status gizi obesitas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.71



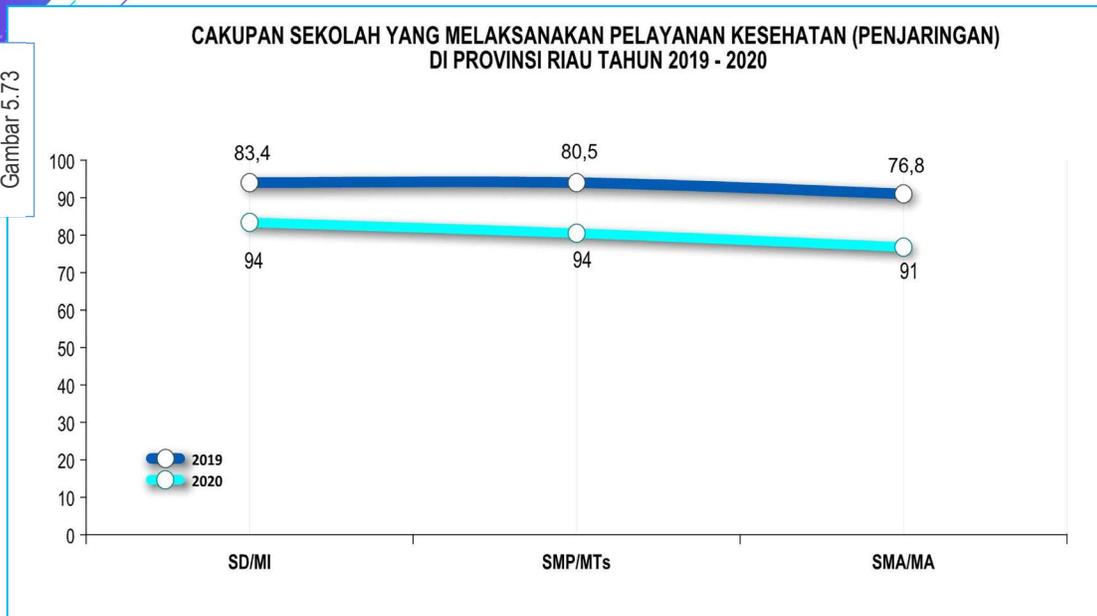
4. Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI, 7 SMP/MTs, dan 10 SMA/MA

Cakupan pelayanan kesehatan (penjaringan) anak sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2020 menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2019 dan tahun 2018. Dimana pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa untuk penjaringan kelas 1 Sekolah Dasar sebanyak 51%, kelas 7 SMP/MTS sebanyak 49%, kelas 10 SMA/MA sebanyak 67% seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Menurunnya cakupan penjaringan kesehatan siswa disebabkan adanya wabah covid-19 yang sedang melanda dunia, sehingga proses belajar banyak dilakukan secara online, yang akhirnya menyulitkan untuk melakukan penjaringan anak sekolah. Untuk cakupan sekolah yang melaksanakan pelayanan kesehatan (Penjaringan) di Provinsi Riau tahun 2020, tingkat sekolah dasar 8,4%, tingkat sekolah menengah pertama 80,5% dan tingkat sekolah menengah pertama 76,8%, cakupan tahun 2020 ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018.

Gambar 5.73



Rendahnya cakupan sekolah yang melaksanakan pelayanan kesehatan (penjaringan) pada tahun 2020 ini menurun dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Kondisi dunia yang sedang dilanda wabah memang sangat berpengaruh dengan capaian program kesehatan di masyarakat termasuk kegiatan sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan. Karena sebagian besar sekolah tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

D. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

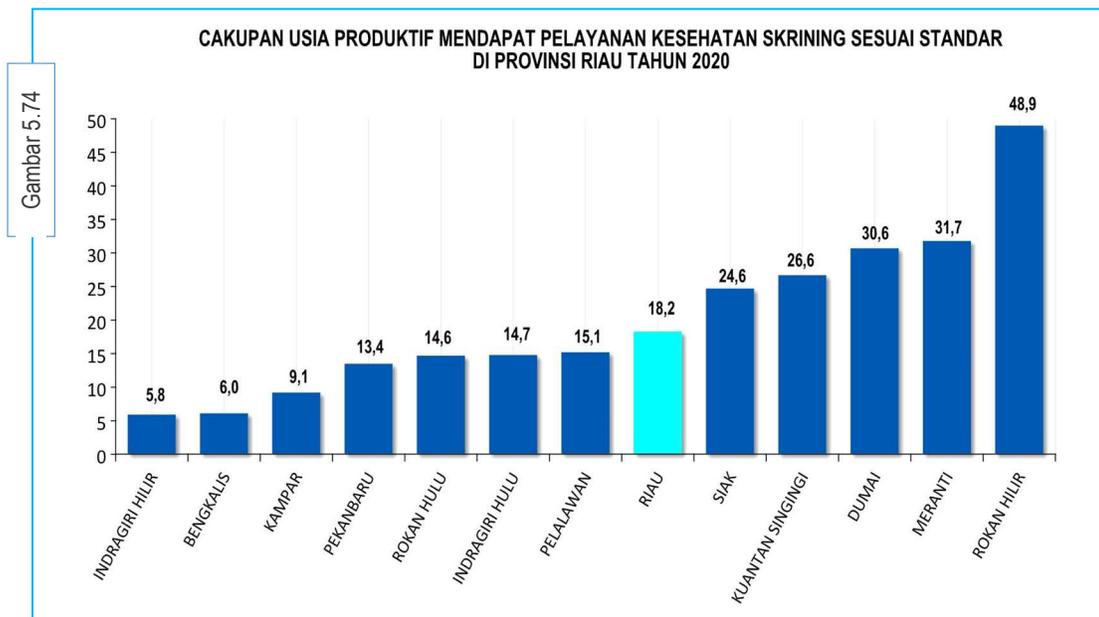
1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Penduduk usia 15-59 tahun mendapat adalah pelayanan skinning kesehatan sesuai standar Penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skinning kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:

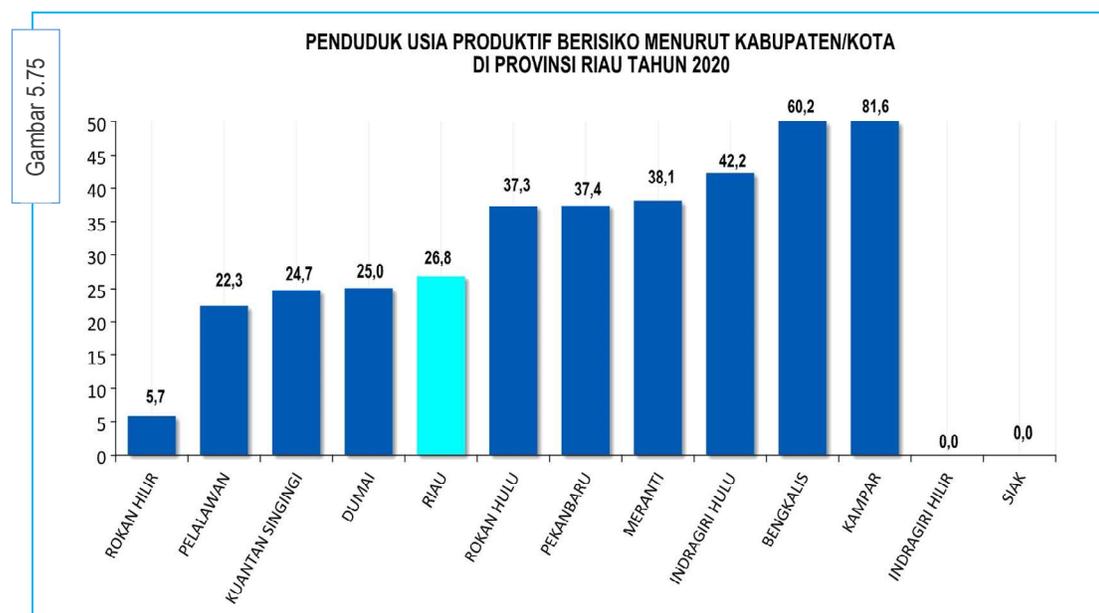
- 1) Deteksi kemungkinan Obesitas.
- 2) Deteksi Hipertensi.
- 3) Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus.
- 4) Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- 5) Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- 6) Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim

Penduduk usia 15-59 tahun berisiko : Penduduk usia 15-59 tahun yang ditemukan faktor risiko PTM. Sedangkan cakupan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar

18,20% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 21%. Untuk gambaran di kabupaten/kotanya cakupa tertinggi adalah Rokan Hilir sebesar 48,9%, diikuti dengan Kabupaten Kep. Meranti sebesar 31,7% dan Kota Dumai sebesar 30,6%. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir 5,8%, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebesar 6 % dan Kabupaten Rokan Hulu 5%.



Dari 796.655 ORANG penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan skrining kesehatan sesuai standar ditemukan penduduk yang beresiko sebanyak 213.610 orang atau sekitar 26,8%. Untuk gambaran penyebaran di 12 kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

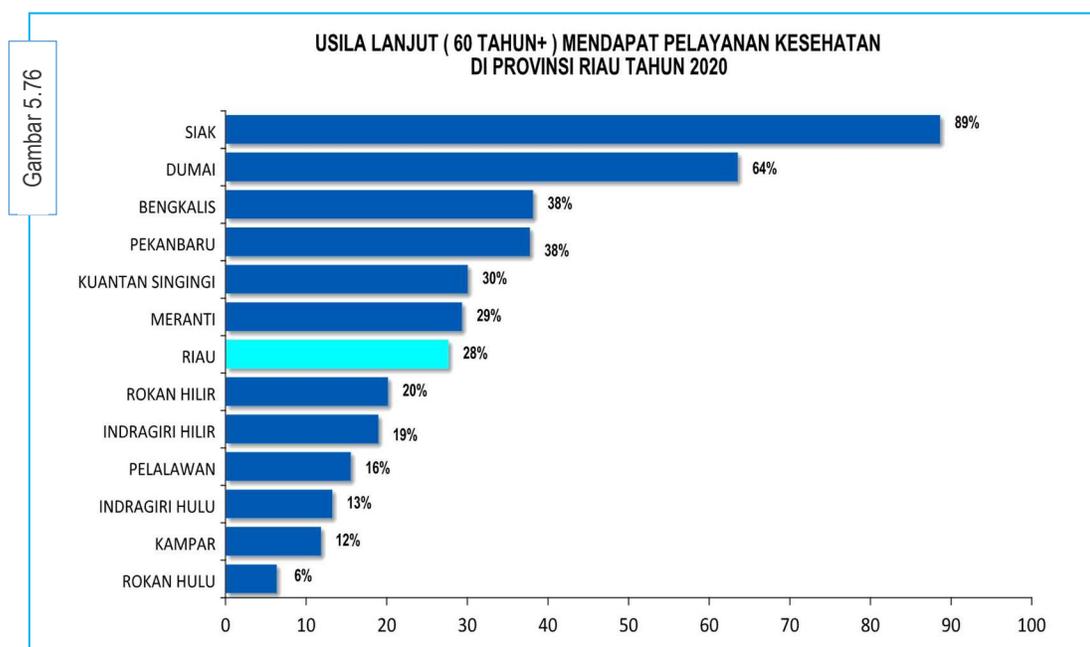


2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun)

Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah Pelayanan kesehatan untuk usia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun pada satu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu. Komponen skrining kesehatan yang dilakukan pada usia lanjut terdiri dari:

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut

Untuk cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebesar 27,6%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6 %. Untuk melihat gambaran cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Untuk cakupan usia lanjut (60 tahun+) yang mendapat pelayanan kesehatan pada tahun 2020 di Kabupaten/kota, yang tertinggi cakupannya adalah Kabupaten Siak sebesar 88,7%, diikuti Kota Dumai sebesar 63,5% dan Kabupaten 38,1%. Sedangkan yang capaian terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu 6,3%, diikuti dengan Kabupaten Kampar 11,8% dan kabupaten Indragiri Hulu 13,2%. *****



Pengendalian Penyakit

BAB 6

PENGEDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian penyakit.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban Tuberkulosis yang tertinggi menduduki posisi ketiga di dunia, sementara posisi pertama dan kedua saat ini adalah India dan Cina (Laporan global tuberkulosis TBC, 25 Maret 2021).

Mengutip dari laman WHO, bahwa tuberkulosis disebabkan dari bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan paling sering menyerang organ pernafasan paru-paru. tuberkulosis dapat menyebar melalui udara ketika penderita tuberkulosis batuk, bersin atau meludah. Seseorang bisa terinfeksi jika menghirup beberapa kuman saja. Data WHO tahun 2019, menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang 60% dari seluruh kasus TB di dunia.

Beban Tuberkulosis makin besar dengan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Untuk itu, diperlukan percepatan pencapaian target eliminasi tuberkulosis pada 2030, dan menuju Indonesia bebas 2050.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2020-2024.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insidens, prevalensi, dan mortalitas / kematian. Indikator yang digunakan adalah prevalensi berbasis mikroskopis, molekuler dan kultur. Percepatan eliminasi tuberkulosis dengan pokok bahasan, missing casses, compliance dan tuberkulosis resistensi (kebal terhadap obat tuberkulosis lini pertama). Dimana diperlukannya penanganan yang lebih serius untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi. Perjaringan kasus Tuberkulosis sebanyak-banyaknya diperlukan adanya strategi percepatan pencapaian target, dengan melakukan kerjasama lintas program yang terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) dan pemberdayaan masyarakat melalui kader, maka diperlukan perluasan investigasi kasus dalam penemuan kasus pada kelompok-kelompok yang berisiko. Indonesia memerlukan upaya komprehensif untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis pada Tahun 2030.

Penemuan kasus tuberkulosis seluruh Indonesia tahun 2019 sebanyak 560.000, berbeda dengan jumlah penemuan di tahun 2020 yang dilaporkan kurang dari 460.000 kasus. Meskipun penyakit Tuberkulosis dapat disembuhkan tetapi tergolong penyakit menular yang menjadi masalah di global dan di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan penemuan secara aktif dan mencontoh dari pelacakan kasus covid-19.

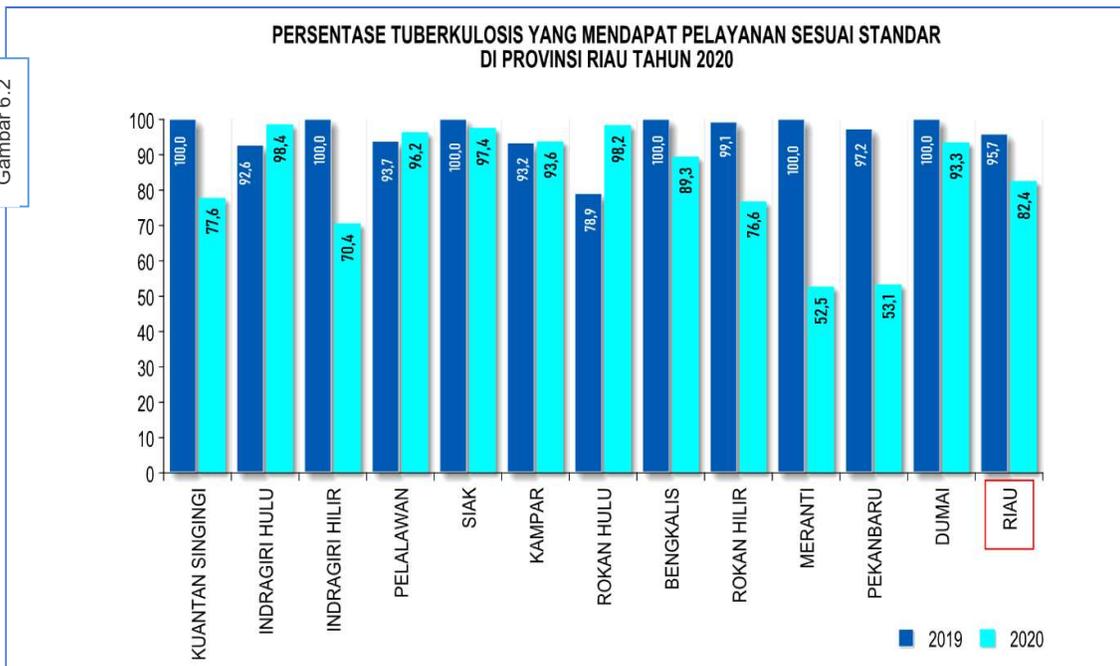
Penularan dan penyebaran penyakit tuberculosi sangat cepat dikarenakan menular melalui udara atau air borne disease. Makin banyak ditemukan terduga / suspek Tuberkulosis, maka makin tinggi juga kemungkinan penderita tuberkulosis yang terkonfirmasi positif yang ditemukan, karena 1 (satu) orang yang positif akan menularkan 10 – 15 orang ke orang yang sehat.

Gambar 6.1

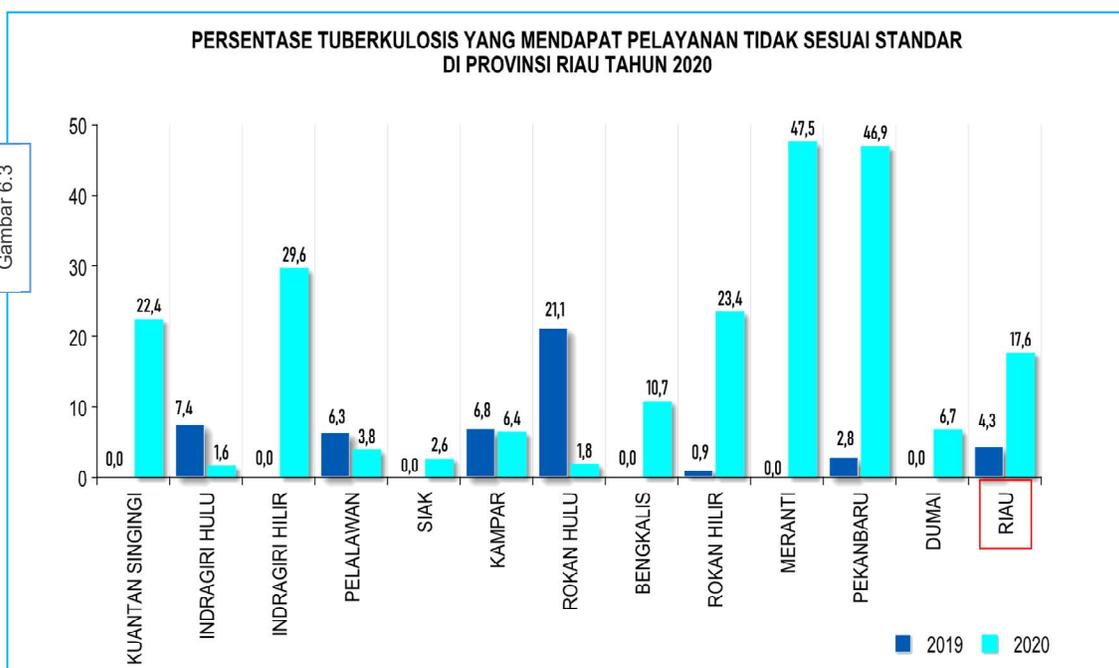


Tahun 2020 ditemukan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 38.587 orang, dari jumlah penduduk Provinsi Riau sebesar 7.128.305 jiwa. Dengan rincian yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (pemeriksaan bakteriologis dan klinis) sebanyak 31.779 (82%) dari 38.587 orang.

Gambar 6.2



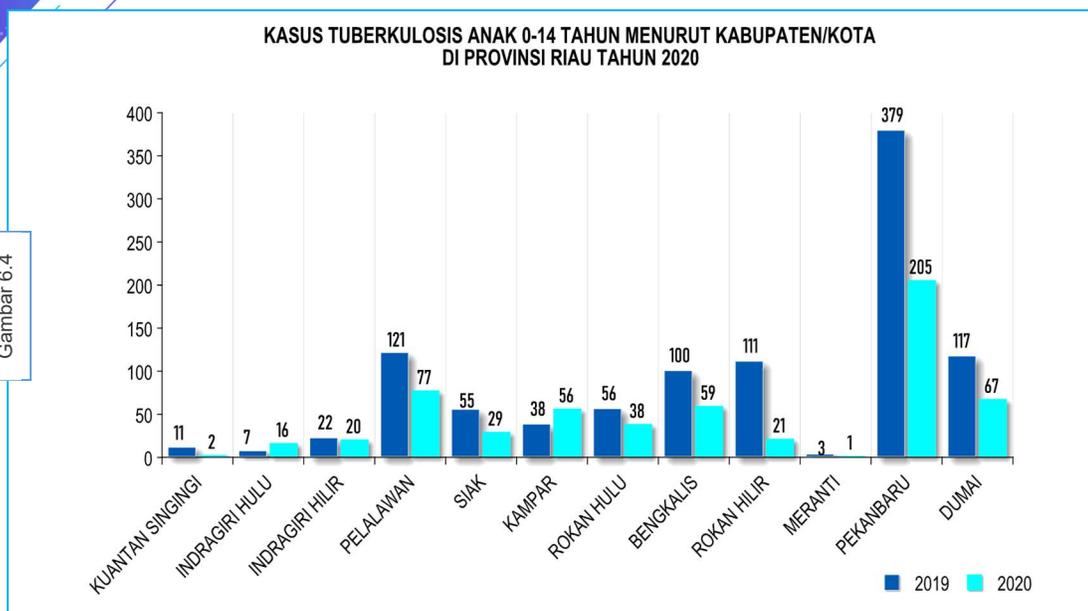
Tercatat terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yang tertinggi ditemukan di Kota Pekanbaru 7.728 kasus dan Rokan Hilir 4.540 kasus (98%) , tetapi secara persentase penemuan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hulu 3.868 dari 3.931 orang terduga tuberkulosis.



Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Kep.Meranti 390 (52%) dari 743 orang dan Kota Pekanbaru 4.100 (53%) dari 7.728 orang. Meskipun, Kota Pekanbaru melakukan penjarangan terduga tuberkulosis paling tinggi secara absolut dari semua Kabupaten/kota tetapi jumlah penduduknya paling besar di Provinsi Riau, sehingga berpotensi untuk dapat meningkatkan target penjarangan penemuan kasus tuberkulosis di Provinsi Riau.

Untuk itu sangat diperlukan strategi yang komprehensif untuk percepatan pencapaian target menuju eliminasi tuberkulosis 2030. Dari grafik diatas, ditemukan semua kasus tuberkulosis dengan klasifikasi tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru serta berdasarkan jenis tuberkulosis yang ditemukan di semua layanan kesehatan seperti TB dewasa, TB resistensi (TB - Multi Drug Resistensi), dan TB-HIV di Provinsi Riau sebanyak 8.236 orang. Sesuai data penemuan kasus yang dilaporkan Th 2020 ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 9.678 orang.

Gambar 6.4

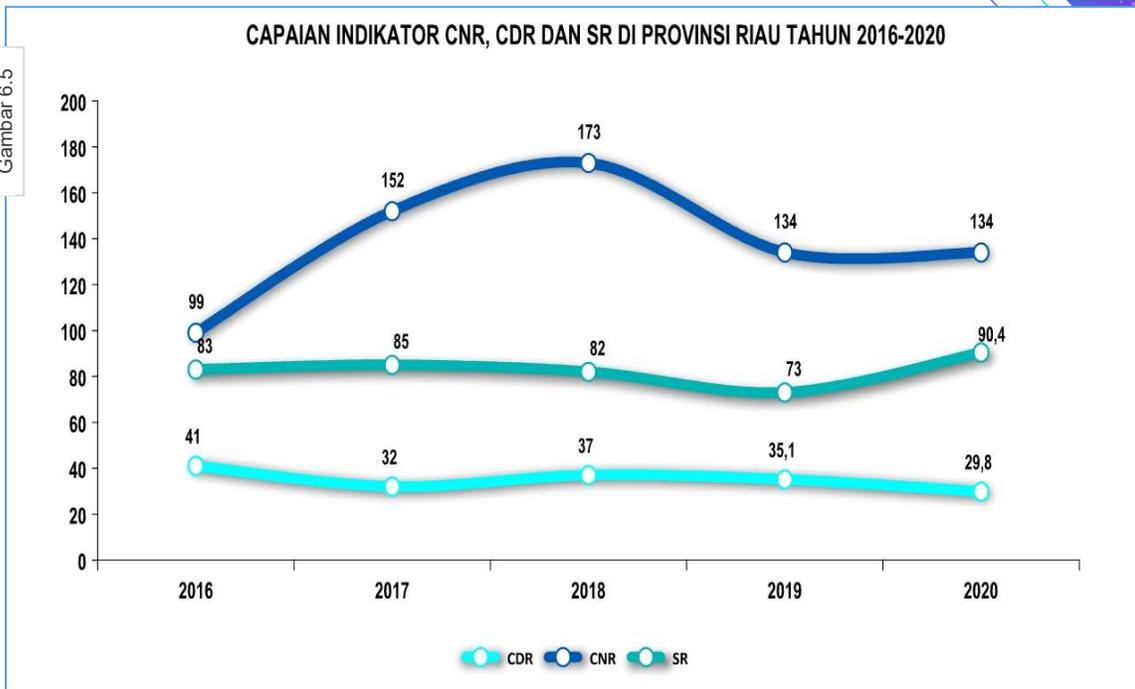


Dari semua kasus tuberkulosis yang ditemukan, kasus tuberkulosis pada anak di Provinsi Riau tahun 2020 ditemukan sebanyak 591 (7,2%) dari 8.236 orang, turun dari tahun sebelumnya 10,5%. Kota Pekanbaru masih yang terbanyak seperti tahun sebelumnya dengan jumlah kasus tuberkulosis pada anak usia 0 sampai 14 tahun (berat badan \geq 33 Kg) sebanyak 205 orang. Tetapi secara persentase, jumlah kasus anak dari jumlah semua kasus yang ditemukan dengan jumlah kasus anak yg tinggi yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi. Hal ini sangat dibutuhkan observasi lanjutan untuk dapat memastikan sumber penularan dari tuberkulosis dewasa terkonfirmasi bakteriologis.

Semua fasilitas layanan kesehatan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) di Provinsi Riau milik pemerintah, BUMN, TNI/POLRI, swasta telah melaksanakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) dan pemberian Profilaksis Isoniazid (INH) untuk upaya pencegahan terjadinya penularan penyakit tuberkulosis pada anak terutama yang mempunyai kontak yang terkonfirmasi positif secara bakteriologis sebagai sumber penularan.

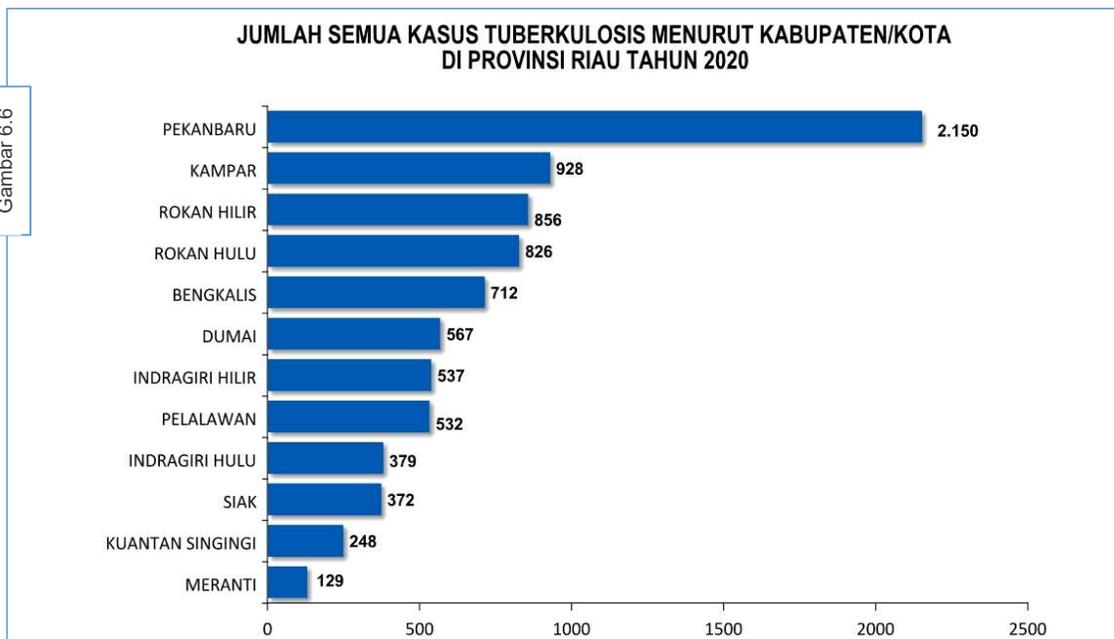
Penentuan diagnosa Tuberkulosis pada anak sering menimbulkan keraguan, sehingga sering ditemukan **over diagnosis** dan **under diagnosis** di layanan FKTP dan FKRTL. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, menjelaskan penegakan diagnosa tuberkulosis pada anak menggunakan tools Skoring.

Gambar 6.5



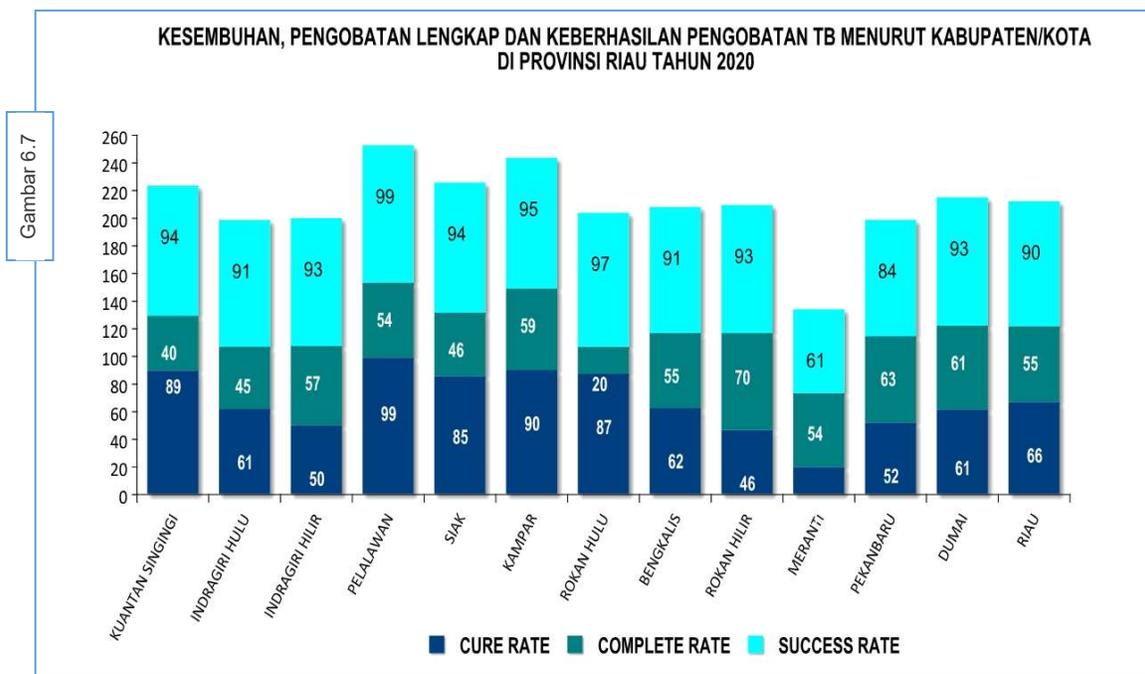
Trend capaian indikator utama tuberkulosis tahun 2020, CNR (Case Notification Rate) penemuan semua kasus tuberkulosis mengalami penurunan dari th 2019 menjadi 134 per 100.000 penduduk. Sedangkan indikator CDR (Case Detection Rate) penemuan kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan dari perkiraan jumlah semua kasus menurun menjadi 29,8% dengan angka keberhasilan pengobatan (Sukses Rate) terdiri dari cure rate/kesembuhan + pengobatan lengkap yang telah memenuhi target yaitu 90,4% (Target nasional = 90%).

Gambar 6.6



Penemuan semua kasus tuberkulosis di Provinsi Riau menurun dari tahun sebelumnya yaitu 10.830 orang, tahun 2020 menjadi 8.239 orang. Dan penemuan yang paling tinggi di Kota Pekanbaru, berjumlah 2.150 orang. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru selain jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dan juga sebagai pusat rujukan layanan kesehatan di Provinsi Riau.

Banyaknya jumlah penjarangan terduga tuberkulosis yang ditemukan, berbanding lurus dengan penemuan kasus tuberkulosis di suatu wilayah. Penemuan kasus dengan kontak tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan) di Puskesmas merupakan upaya preventif dan promotif yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan tuberkulosis.

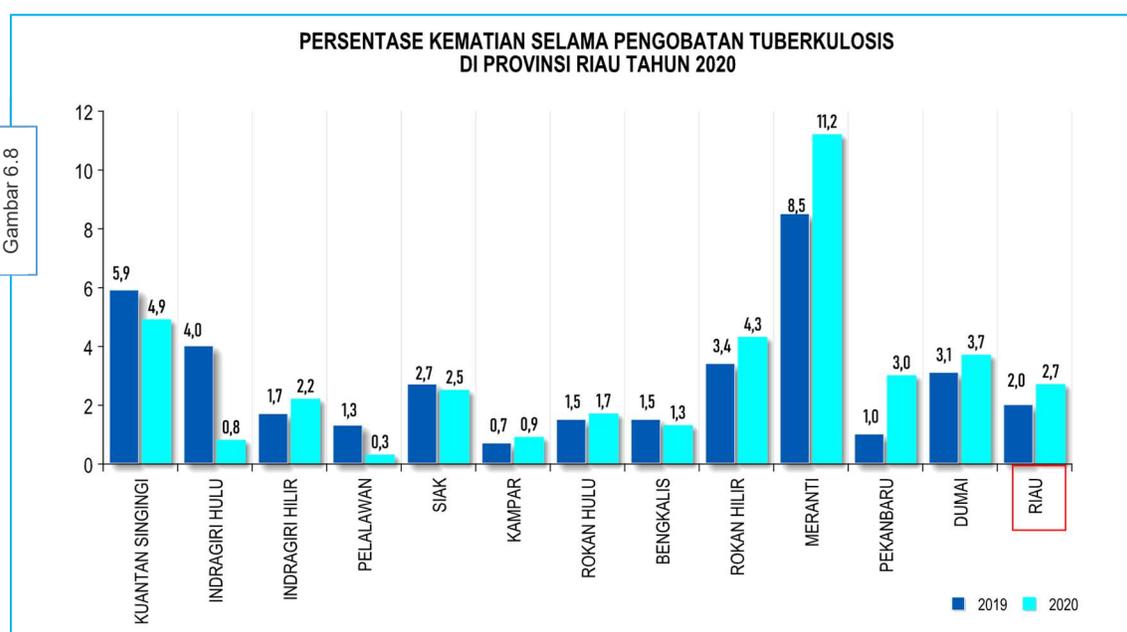


Dari uraian diatas, penemuan kasus tuberkulosis yang memenuhi standar kesehatan adalah diagnosa melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, sesuai yang tercantum di Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, dimana keberhasilan pengobatan Provinsi Riau telah mencapai target 90,4%.

Berdasarkan Pedoman Program Penanggulangan tuberkulosis tercantum di Permenkes nomor 67 tahun 2016, untuk meminimalisir dan memutus mata rantai penularan, bahwa persentase penemuan kasus tuberkulosis dengan pemeriksaan bakteriologis (keberhasilan pengobatan cure rate/sembuh) yang diperbolehkan target

≥ 65% dan penemuan dengan pemeriksaan klinis atau keberhasilan pengobatan lengkap yang diperbolehkan ≤ 35%. Sedangkan capaian keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Riau, capaian angka kesembuhan / cure rate kurang dari target yaitu 66 % (target ≥ 65%) dan persentase pengobatan lengkap telah melebihi target yang diperbolehkan yaitu 55 % (target ≤ 35%).

Persentase kesembuhan agar menjadi perhatian, karena menjadi sumber penularan baik tuberkulosis biasa maupun resistensi, sedangkan dengan hasil pengobatan lengkap yang melebihi target yang diperbolehkan memungkinkan adanya pemberian pelayanan kesehatan baik diagnosa maupun tatalaksana pengobatan yang tidak sesuai standar dengan tidak melakukan pemeriksaan bakteriologis tetapi hanya menggunakan pemeriksaan klinis saja.



Persentase angka kematian akibat tuberkulosis masih memenuhi target yaitu 2,7% (target ≤ 4%) dibandingkan dengan persentase kematian tahun sebelumnya hanya 2,0%. Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi adalah kabupaten yang tertinggi persentase angka kematian tuberkulosis dari tahun 2019-2020, dan persentase kematian di Provinsi Riau th.2020 meningkat menjadi 2,7%

Angka kematian yang tinggi diakibatkan, antara lain dikarenakan keterlambatan penanganan kasus dampak dari kurangnya pengetahuan tentang penyakit Tuberkulosis, penanganan pasien di layanan kesehatan yang tidak adekuat/ tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, dan jauhnya jangkauan layanan kesehatan, serta mempunyai penyakit penyerta/ komorbite dengan tuberkulosis yang akan makin

memperburuk kondisi pasien bahkan dapat menyebabkan kematian, seperti Tuberkulosis dengan diabetes militus (TB-DM), resistensi (TB MDR), Tuberkulosis dengan HIV/AIDS (TB-HIV).

No	Kab/Kota	Target Penemuan TB RO	Terkonfirmasi RR	Diobati	Sembuh / Pengobatan lengkap	Default	Meninggal	Gagal	Pindah
1	Pekanbaru	192	36	25	1	4	6	0	1
2	Kampar	42	16	15	1	2	4	0	0
3	Rohil	33	5	3	0	0	0	0	0
4	Rohil	37	12	11	0	2	3	0	0
5	Inhu	20	5	3	0	1	2	0	0
6	Inhil	37	10	8	0	2	1	2	0
7	Kuansing	14	5	5	2	0	1	0	0
8	Bengkalis	35	6	3	0	0	1	0	0
9	Dumai	21	9	6	0	0	1	0	0
10	Pelalawan	24	13	6	0	1	1	0	0
11	Siak	25	3	3	1	0	2	0	0
12	Meranti	9	3	3	1	0	1	0	0
	Riau	526	123	91	6	12	23	2	1

*Evaluasi TW 4 2020 per tanggal 8 Januari 2021

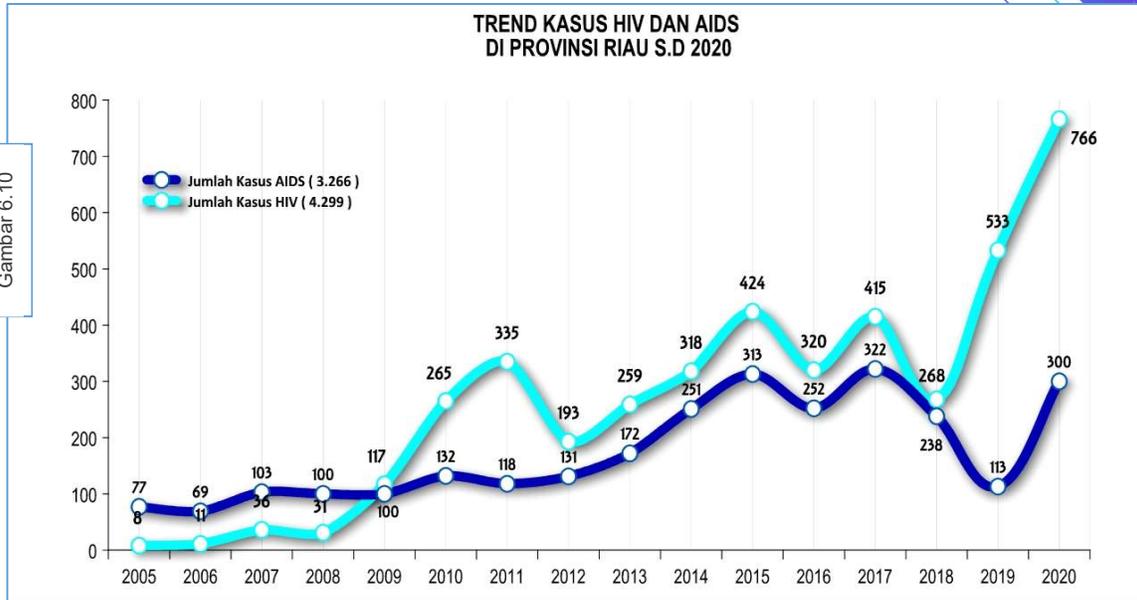
Kasus tuberkulosis resistensi terhadap isoniasid dan Refampisin Provinsi Riau, belum mencapai target sebanyak 123 orang (target 536 orang), dengan rincian yang mau diobati 91 orang (73%), dan yang bersedia diobati meninggal 23 orang.

2. HIV dan AIDS

HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus) merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekelompok gejala penyakit kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Program pengendalian HIV bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Penderita HIV dapat mempertahankan hidupnya dengan minum obat anti retroviral (ARV) rutin seumur hidup dalam waktu tertentu karena obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Sedangkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah menderita AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Satu orang dengan 2 penyakit yaitu TB-HIV semakin bertambah dengan munculnya koinfeksi dengan Tuberkulosis (TB-HIV).

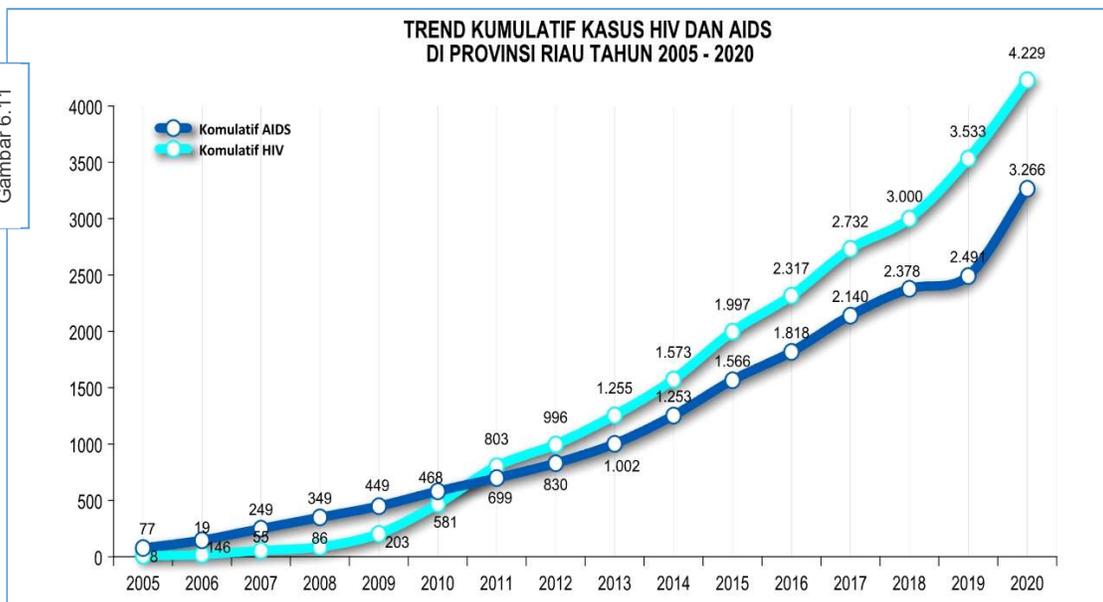
Gambar 6.10



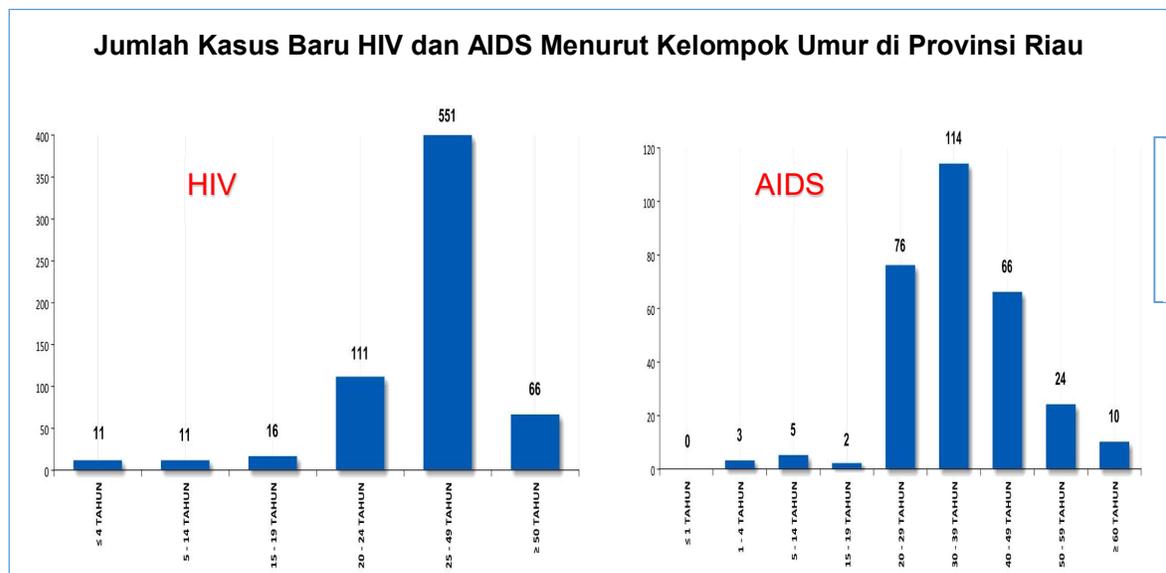
Jumlah penderita HIV mulai tahun 2019 meningkat signifikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya 268 kasus menjadi 533 kasus dan di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 766 orang.

Sedangkan penderita AIDS di tahun 2020 berbanding lurus dengan jumlah kasus HIV, yang berbeda di tahun sebelumnya, kondisinya berbanding terbalik dengan jumlah kasus HIV yang meningkat drastis, dimana tahun 2019 terjadi penurunan ditemukan 113 kasus dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 300 kasus.

Gambar 6.11

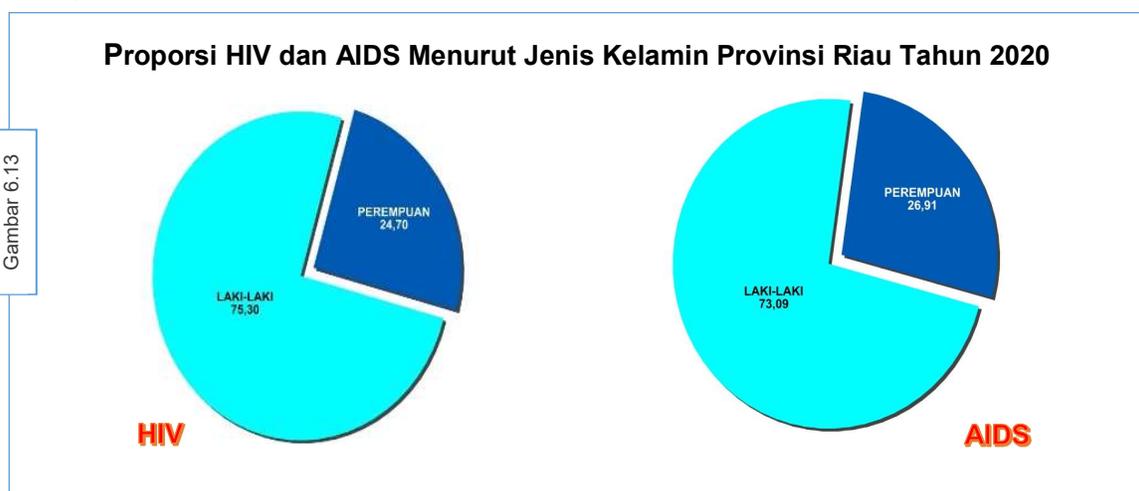


Dari grafik diatas secara komulatif trend jumlah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan secara komulatif dari tahun 2005-2020 meningkat terus. Tahun 2020, jumlah kasus HIV yang dilaporkan meningkat menjadi 4.229 kasus dan kasus AIDS menjadi 3.266 kasus.



Gambar 6.12

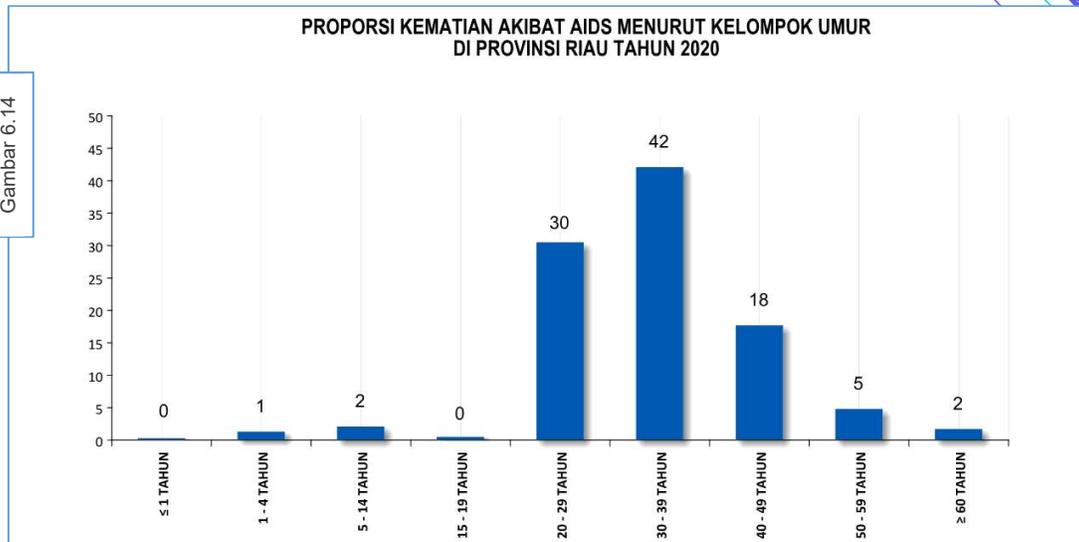
Penderita HIV dari kelompok umur kebanyakan dari usia produktif, antara 20-49 tahun meningkat setiap tahunnya. Golongan umur yang paling tinggi ditemukan antara 25-49 tahun sebanyak 551 orang. Sedangkan dari kelompok umur penderita AIDS yang paling banyak yaitu pada kelompok umur antara 30-39 tahun sebanyak 114 orang



Gambar 6.13

Kasus HIV dan AIDS yang ditemukan dan dilaporkan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki untuk HIV sebanyak 75,30% dan kasus AIDS sebanyak 73,09%.

Gambar 6.14

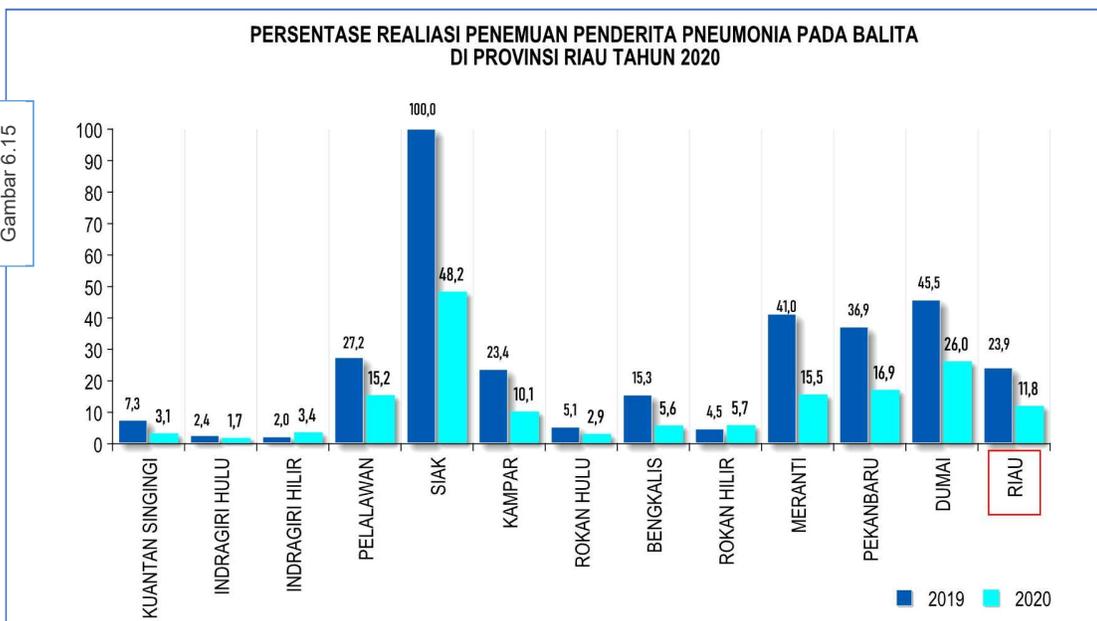


Dilihat dari grafik diatas, proporsi kematian diakibatkan AIDS tahun 2020 yang paling banyak pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 42 orang dan pada kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 30 orang.

3. Pneumonia

Pneumonia adalah pembunuh utama pada balita di dunia, data WHO angka kematian pneumonia pada balita berada pada peringkat pertama. Faktor resiko terjadinya pneumonia pada balita antara lain : kurangnya pemberian ASI eksklusif, qizi buruk, dan polusi udara di indoor, Bayi Baru Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak.

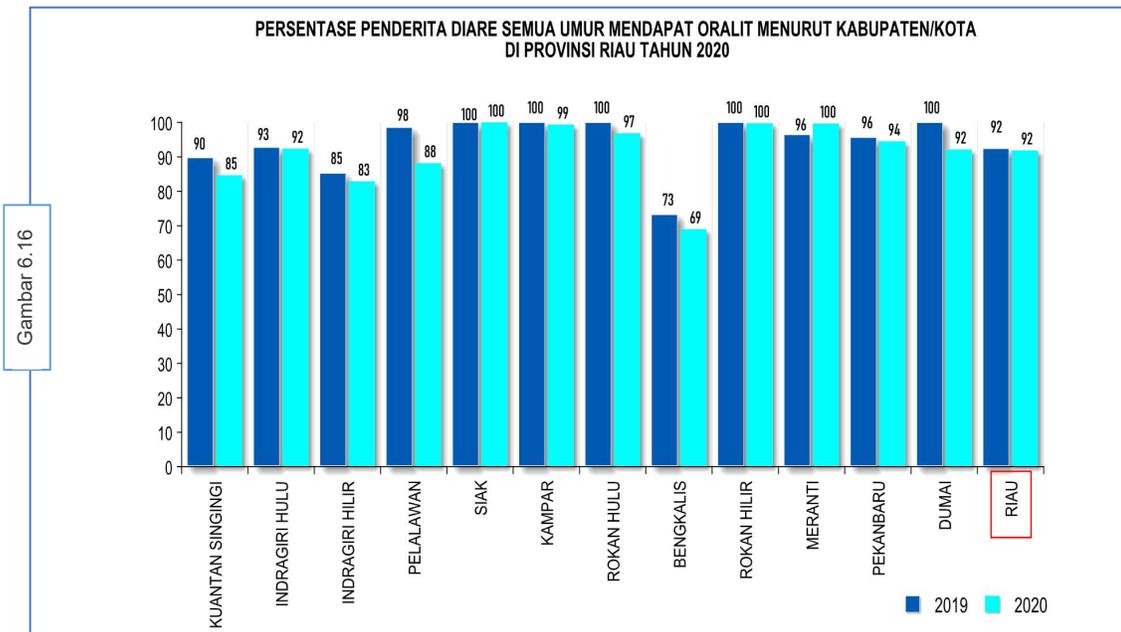
Gambar 6.15



Pneumonia pada balita tahun 2020 di Provinsi Riau menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 23,9%, menjadi 11,8%. Kabupaten Siak, kasus pneumonia yang paling tinggi dari tahun 2019-2020, meskipun telah mengalami penurunan di tahun 2020 dari 100% di tahun 2019 menjadi 48,2% di tahun 2020. Kabupaten/kota lainnya yang tinggi kasus pneumonia yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kep.Meranti

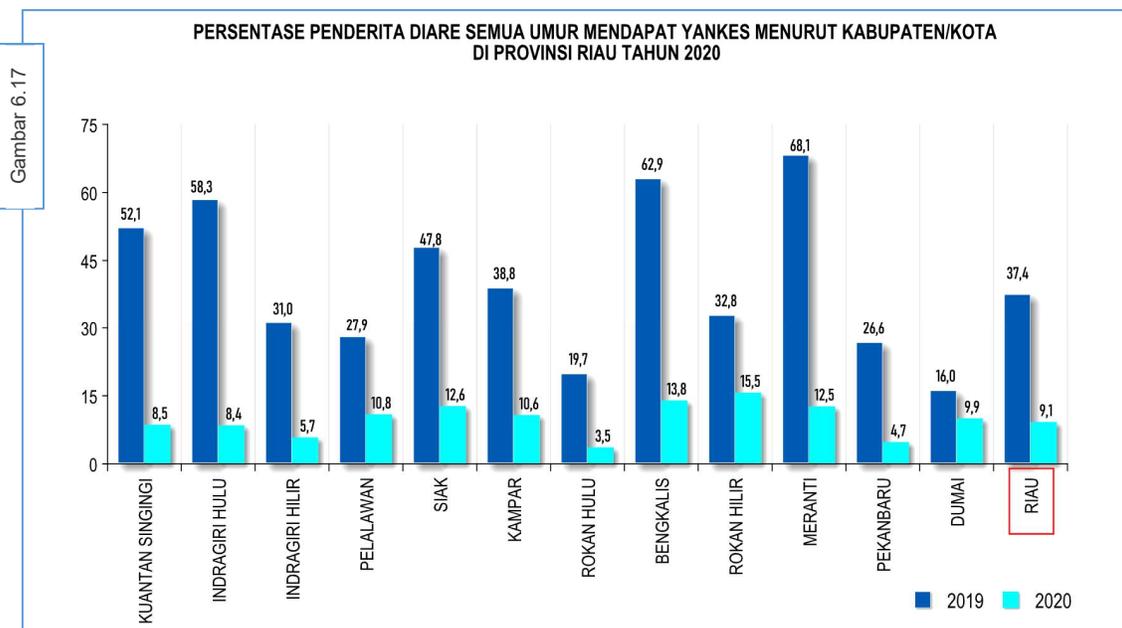
4. Diare

Morbiditas dan mortalitas akibat penyakit diare yang masih tinggi dan pengobatan yg tidak adekuat serta pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam upaya penanggulangan darurat. Target cakupan pelayanan penderita diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2018 jumlah penderita diare SU yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 80.498 orang (42,9%) dan terjadi penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi 70.348 orang atau (37,4%) dan tahun 2020 menjadi 64.753 orang (92%) dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Insiden diare semua umur secara nasional adalah 270/1.000 penduduk (Rapid Survey Diare tahun 2015).

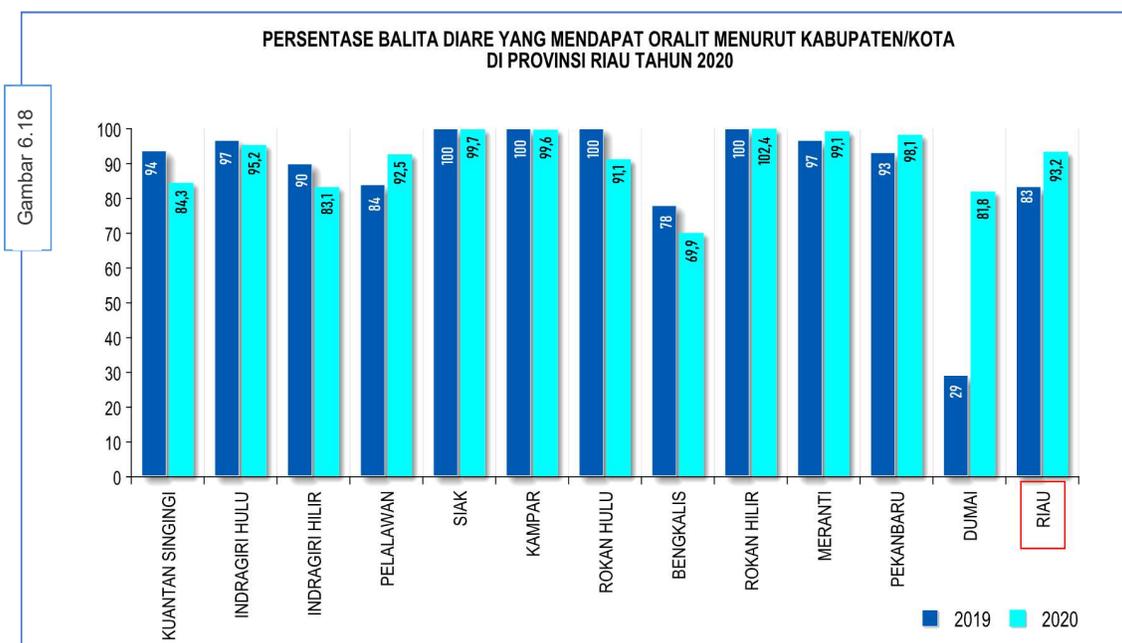


Penderita Diare semua umur mayoritas telah mendapatkan oralit sebanyak 92%, bahkan kabupaten/kota yg telah mencapai 100% yaitu Kabupaten Siak, Rohil, dan Kep.Meranti. Sedangkan kabupaten yang pemberian oralit pada penderita diare

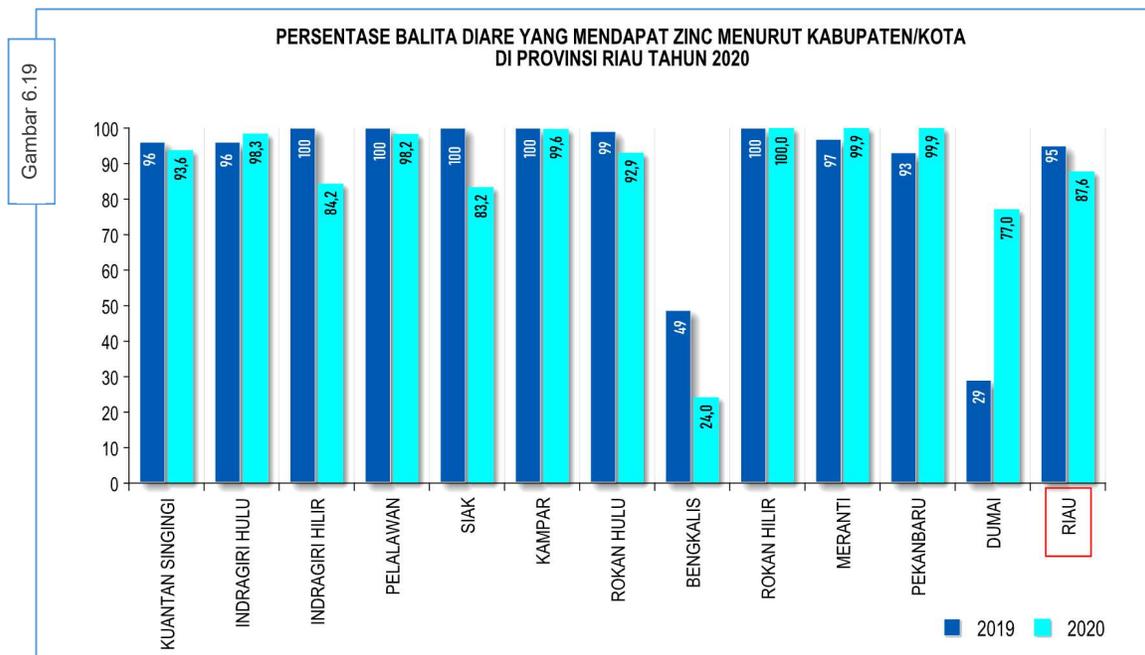
yang masih paling rendah yaitu Kabupaten Bengkalis, dari tahun 2019-2020 menjadi 69%. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi penanggulangan penyakit diare di Kabupaten Bengkalis.



Sedangkan kasus diare semua umur yang mendapatkan layanan kesehatan di Provinsi Riau terjadi penurunan menjadi 9,1%, dari tahun 2019 sebesar 37,4% . Hal ini disebabkan karena semua kabupaten/kota mengalami penurunan. Kabupaten yang capaiannya paling rendah yaitu Kabupaten Rokan Hulu 3,5%.



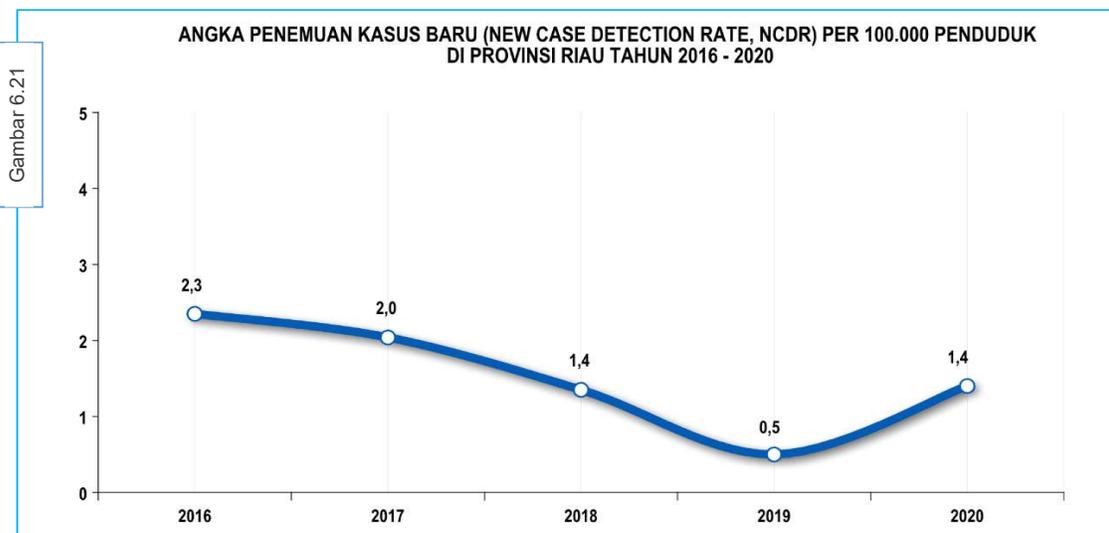
Target cakupan pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan adalah 20% dari perkiraan jumlah penderita diare balita (Insidens diare balita dikali jumlah balita di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Tahun 2020 jumlah balita penderita diare yang dilayani di sarana kesehatan sebanyak 20.678 orang (2,9 % per 1.000 penduduk) dari perkiraan diare di sarana kesehatan. Diare pada balita yang mendapatkan oralit di Provinsi Riau tahun 2020 meningkat menjadi 93,2% yang tahun sebelumnya hanya 83%.



Analisisnya bahwa masyarakat telah mengetahui manfaat tablet zinc untuk mencegah kematian akibat diare dan tidak cukup hanya dengan pemberian oralit saja, untuk perbaikan mukosa usus dan mempercepat pemulihan anak pasca diare. Dari data diatas terlihat bahwa penanggulangan penyakit diare dengan pemberian oralit pada balita (93,2%) lebih tinggi dibandingkan pemberian Zinc (87,68%). Pemberian oralit pada balita yang menderita diare paling rendah yaitu Kabupaten Bengkalis di tahun 2019 dan tahun 2020.

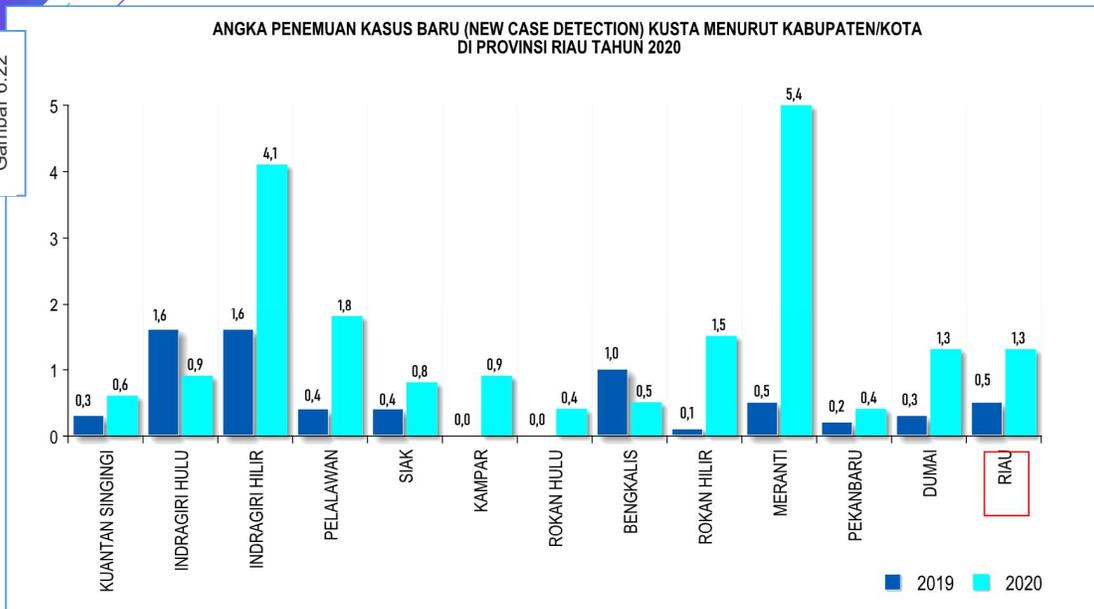
5. Kusta/Lepre

Penyakit kusta disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Lepae* bisa diobati dengan efektif dan penularannya pun bisa ditekan, atau disebut juga lepra atau penyakit Hansen yang menyebabkan borok kulit, kerusakan saraf, dan kelemahan pada otot bahkan dapat menyebabkan cacat parah dan cacat signifikan.



Dilihat dari Gambar diatas untuk Prevalensi penyakit kusta di Provinsi Riau tahun 2020 menurun kembali menjadi 0,14 per 10.000 penduduk setelah meningkat di tahun 2019 sebesar 0,2 per 10.000 penduduk atau < 1 per 10.000 penduduk dan penemuan kasus baru New Case Detection Rate (NCDR) meningkat menjadi 1,4 per 100.000 penduduk atau > 1 per 100.000 penduduk. Setelah lima tahun, kasus baru kusta / leprae (new case detection rate) di Provinsi Riau meningkat meskipun prevalensi tahun 2020 terjadi penurunan kembali dari tahun sebelumnya.

Gambar 6.22



Peningkatan kasus baru kusta / leprae di tahun 2020 secara signifikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Sehingga secara keseluruhan kasus baru kusta/leprae di Provinsi Riau meningkat menjadi 1,3/100.000 penduduk.

Gambar 6.23



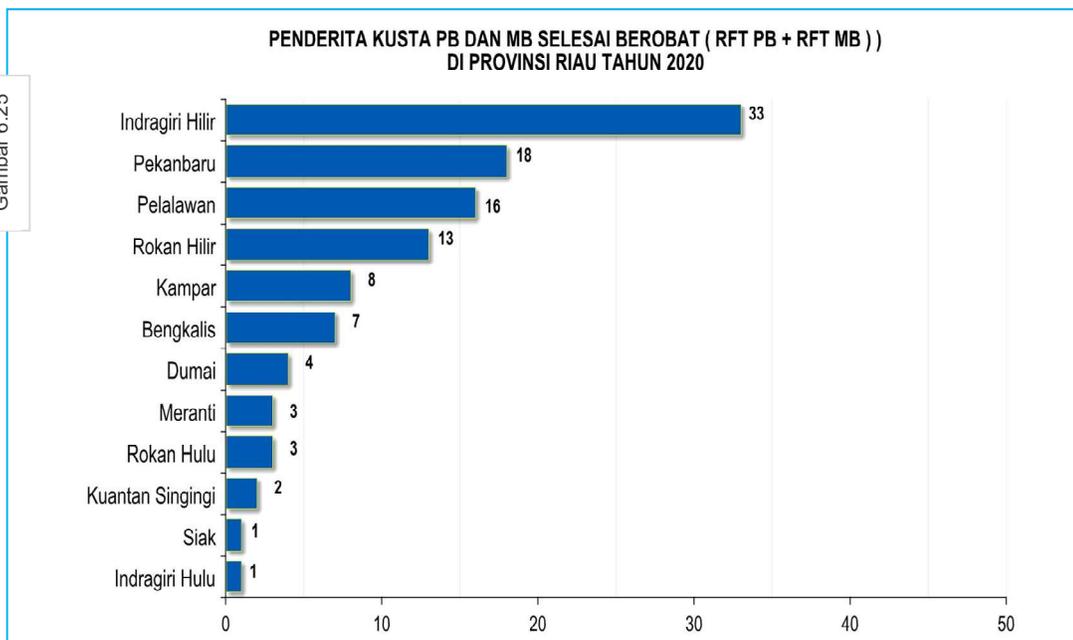
Berdasarkan Proporsi penderita baru kusta Provinsi Riau tahun 2020, lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan perbandingan rasio 1 : 1

Gambar 6.24



Cacat akibat kusta tingkat 2, dengan tanda gejala kelopak mata tidak dapat menutup dengan sempurna, penglihatan sangat terganggu dan bahkan terjadi kecacatan pada tangan dan kaki seperti luka terbuka dan jari membengkok permanen. Penyakit kusta di Provinsi Riau tergolong dalam *low burden* karena penemuan kasus baru kusta tahun 2020 (< 10 per 1.000.000 penduduk), yaitu 0,07 per 1.000.000 penduduk dan NCDR per kabupaten/kota tidak melebihi target nasional (<5 per 100.000 penduduk).

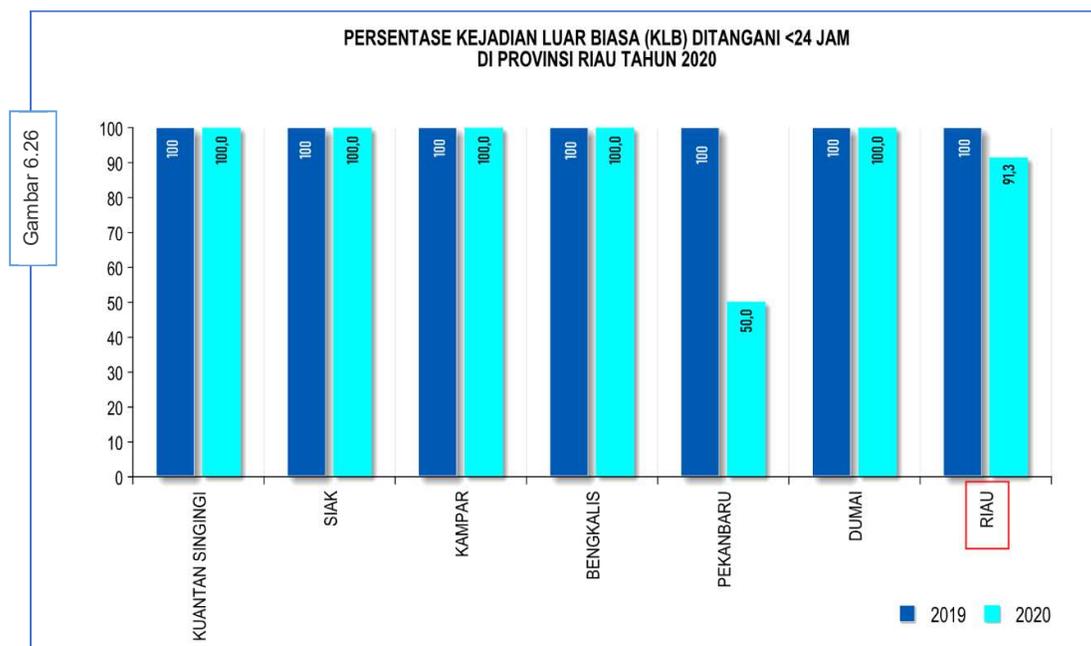
Gambar 6.25



Penderita PB dan MB selesai berobat paling banyak ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 33 orang, Rokan Hilir Pekanbaru 18 orang dan Pelalawan 16 orang. Yang mana jumlah secara total Provinsi sebanyak 109 .

6. Kejadian Luar Biasa

Kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia masih cukup menjadi perhatian dunia kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka KLB menjadi salah satu indikator kesuksesan upaya preventif bidang kesehatan dalam bidang surveillans epidemiologi.

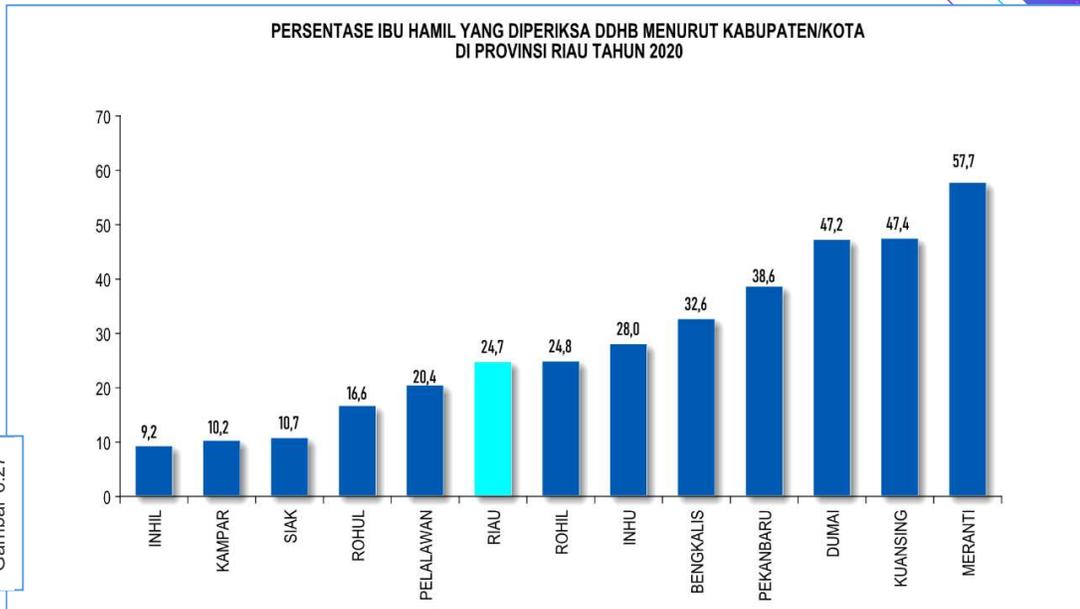


Apabila KLB terjadi di suatu daerah, maka tim surveillans epidemiologi segera melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) guna untuk mencegah distribusi penyakit. Target Provinsi Riau untuk krisis kesehatan termasuk KLB yang dilakukan penanggulangan < 24 jam di Provinsi Riau yaitu 100%.

7. Hepatitis (HbsAg)

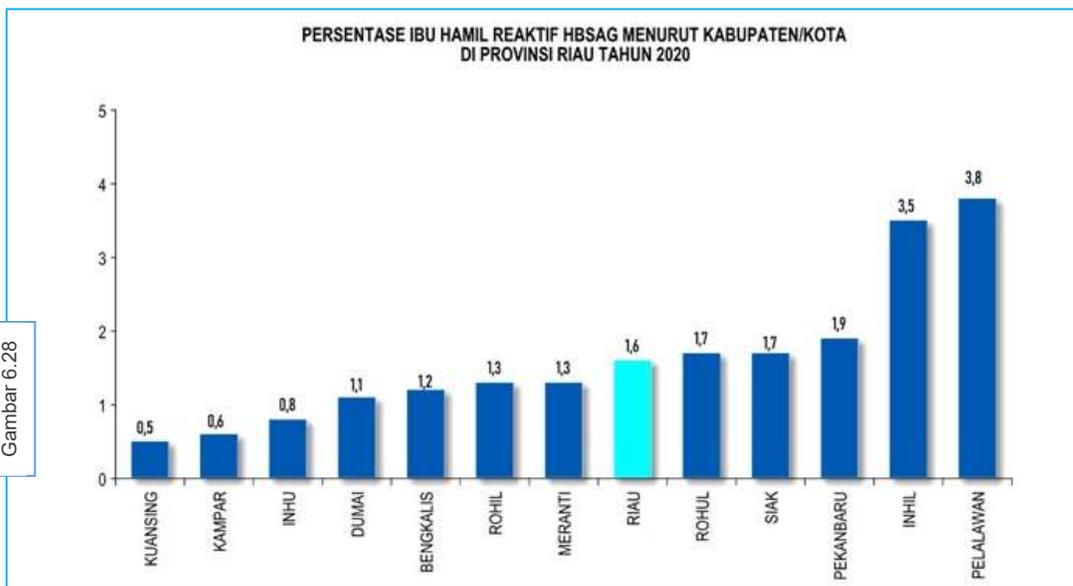
Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) dilakukan lebih baik pada awal kehamilan dengan melakukan tes HBsAg (hepatitis B surface antigen). Tes HbsAg adalah tes yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit hepatitis B dalam darah. Tes ini juga mampu mendeteksi hepatitis B lebih awal sebelum gejala muncul. Jika hasilnya positif, ibu hamil telah terinfeksi dan berisiko menularkan pada janin dalam kandungan.

Gambar 6.27

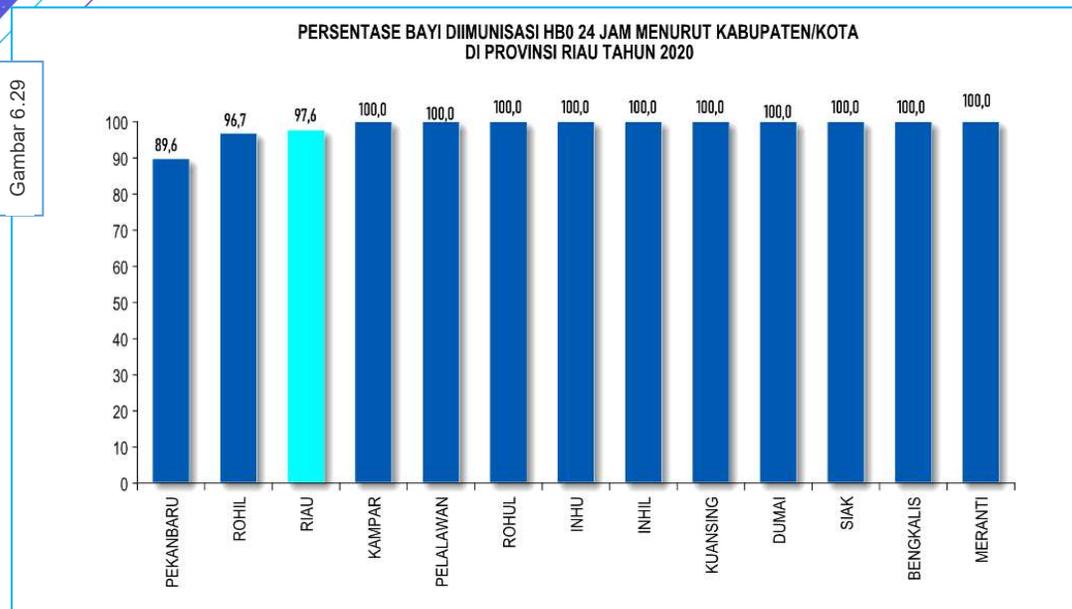


Upaya pengendalian penyakit Hepatitis telah dilaksanakan di semua kabupaten/kota dan semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kabupaten/ Kota 100% telah dapat melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil. Persentase ibu hamil yang diperiksa DDHB di Provinsi Riau 24,7%, yang paling tinggi persentase Kabupaten yang melakukan DDHB yaitu Kabupaten Kep.Meranti 57,7%.

Gambar 6.28



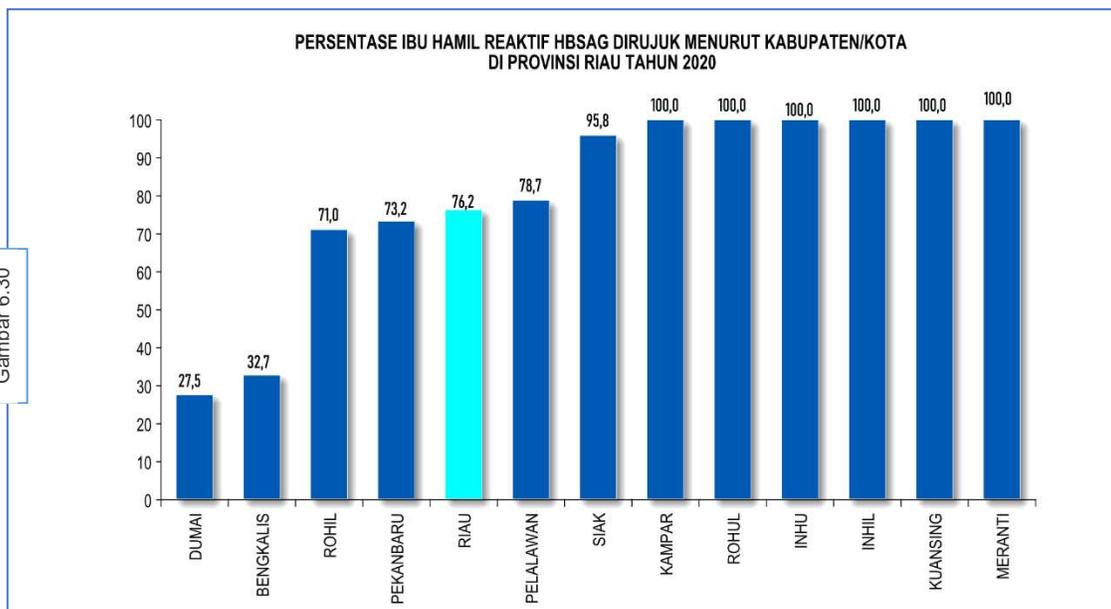
Dari ibu hamil yang diperiksa deteksi dini Hepatitis B dan hasil pemeriksaan reaktif paling tinggi di Kabupaten Pelalawan 3,8% dari 2.812 ibu hamil yang diperiksa DDHB dan yang reaktif 108 orang dan Kabupaten Indragiri Hilir 3,5%.



Gambar 6.29

Hepatitis B immunoglobulin umumnya digunakan untuk mencegah orang terjangkit hepatitis B setelah mendapat transplantasi hati, dan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis B. Juga dapat digunakan kepada orang yang telah terinfeksi hepatitis B melalui kontak dengan darah.

Provinsi Riau telah melakukan vaksin HB0 sebanyak 97,6%, pemberian imunisasi bayi baru lahir dianjurkan langsung mendapat vaksin HB0 untuk mencegah terinfeksi hepatitis B, vaksin HB0 dapat mengurangi infeksi virus hepatitis hingga 95%.



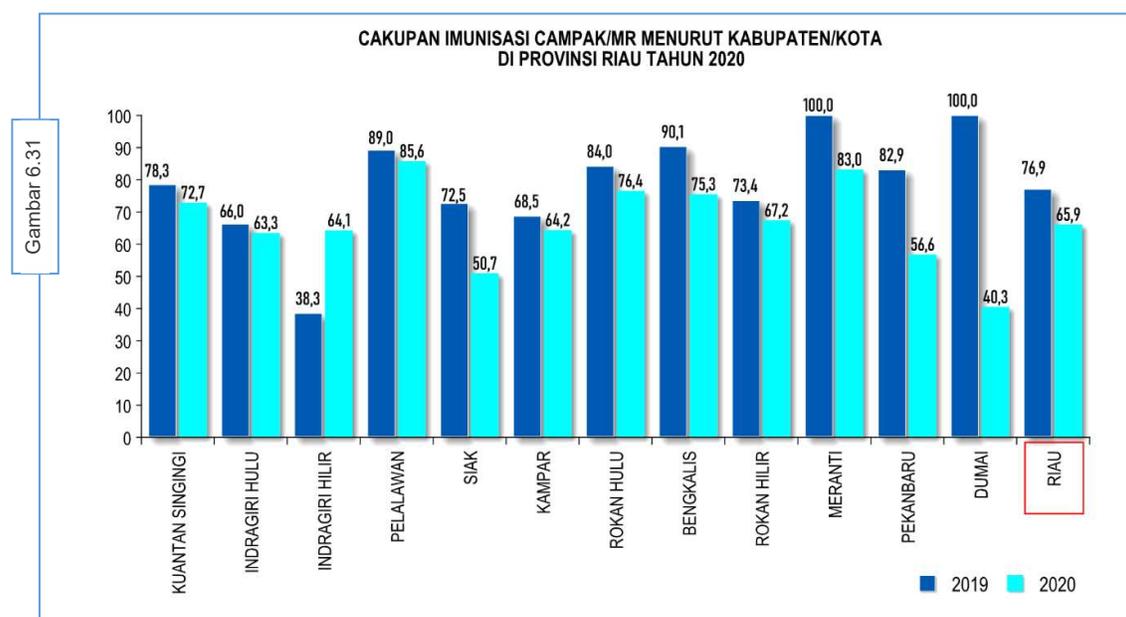
Gambar 6.30

Penderita hepatitis B pada ibu hamil yang reaktif dan dirujuk 503 orang dari 660 ibu hamil (76,2%). Ibu hamil dengan hepatitis B banyak yang dirujuk ke rumah sakit. Dikarenakan, Ibu hamil dengan hepatitis B, kemungkinan lebih rentan mengalami ketuban pecah dini, diabetes gestasional, dan/atau mengalami perdarahan berat pada akhir kehamilan, peningkatan risiko komplikasi persalinan seperti plasenta abrupsis dan bahkan kematian bayi saat lahir.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

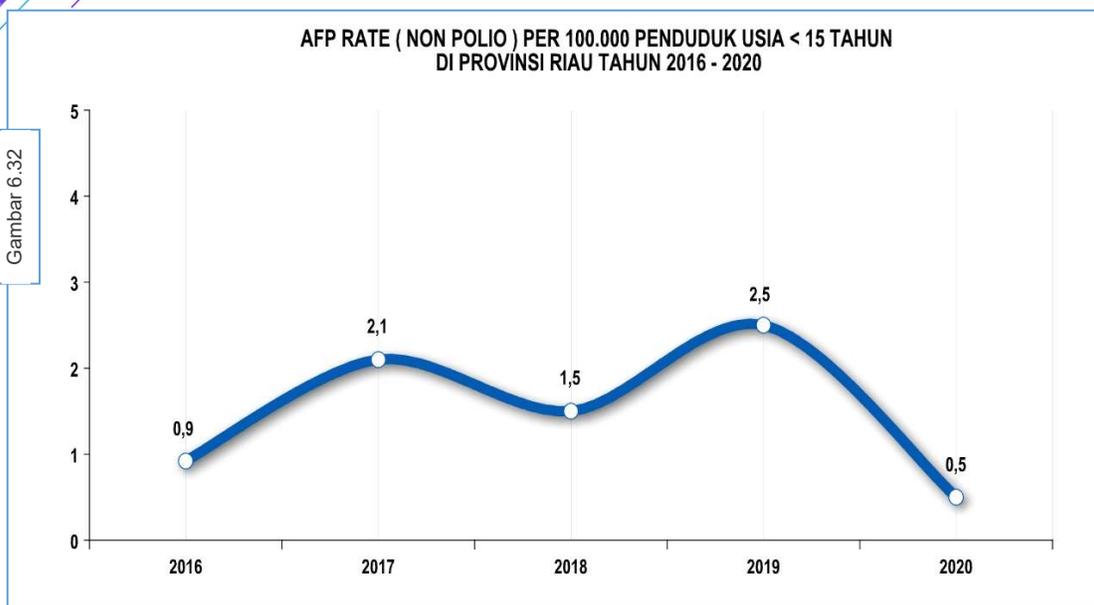
1. Campak Mesles Rubella (MR)

Pemberian imunisasi campak rutin untuk bayi usia minimal 9 bulan dan anak sekolah kelas 1 SD, sejak September 2018 sudah diganti dengan imunisasi Measles Rubella (MR) setelah pelaksanaan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

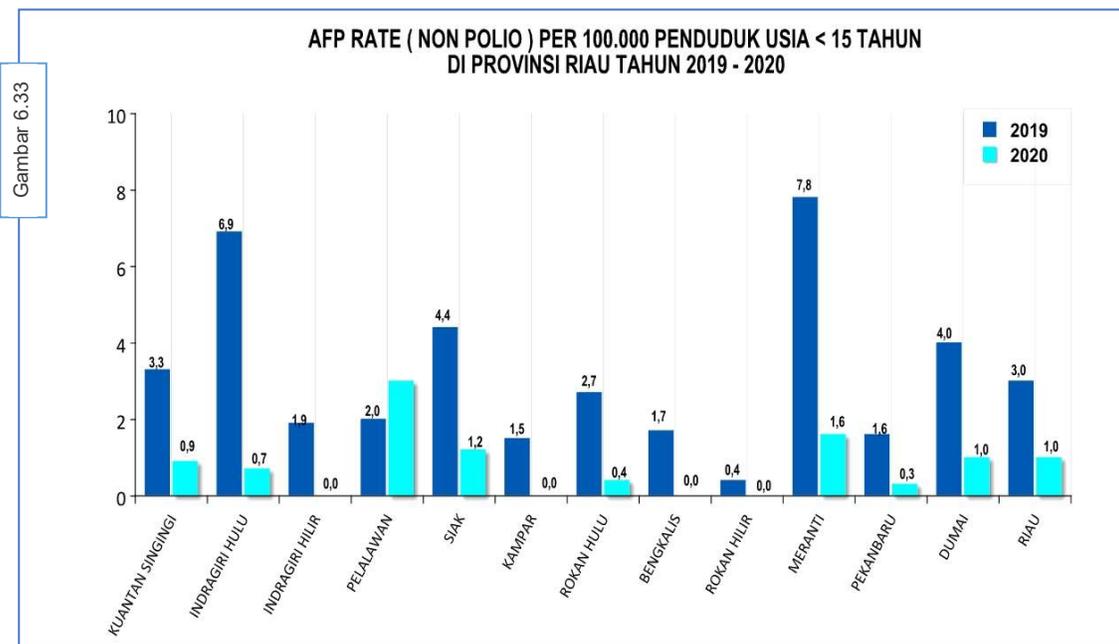


Cakupan imunisasi Campak / Measles Rubella (MR) Provinsi Riau tahun 2020 mengalami penurunan 65,9% (target 95%), dan hanya Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami peningkatan cakupan di tahun 2020 sebesar 64,15% dari tahun sebelumnya hanya 38,3%

2. Acute Flaccid Paralysis (AFP)



Dilihat dari trend kasus AFP tahun 2020 terjadi penurunan dan rata-rata ditemukan kasus AFP di tahun 2016-2020 sekitar 1 - 3 orang per 100.000 penduduk dari jumlah penduduk usia < 15 tahun sebanyak 2.374.119 orang.



Acute Flaccid Paralysis (lumpuh layu) disebabkan oleh virus dan gejala polio dapat menimbulkan kelumpuhan dan lumpuh layu. Jumlah kasus AFP usia < 15 tahun yang ditemukan di Provinsi Riau sebanyak 13 orang (0,5 per 100.000 penduduk).

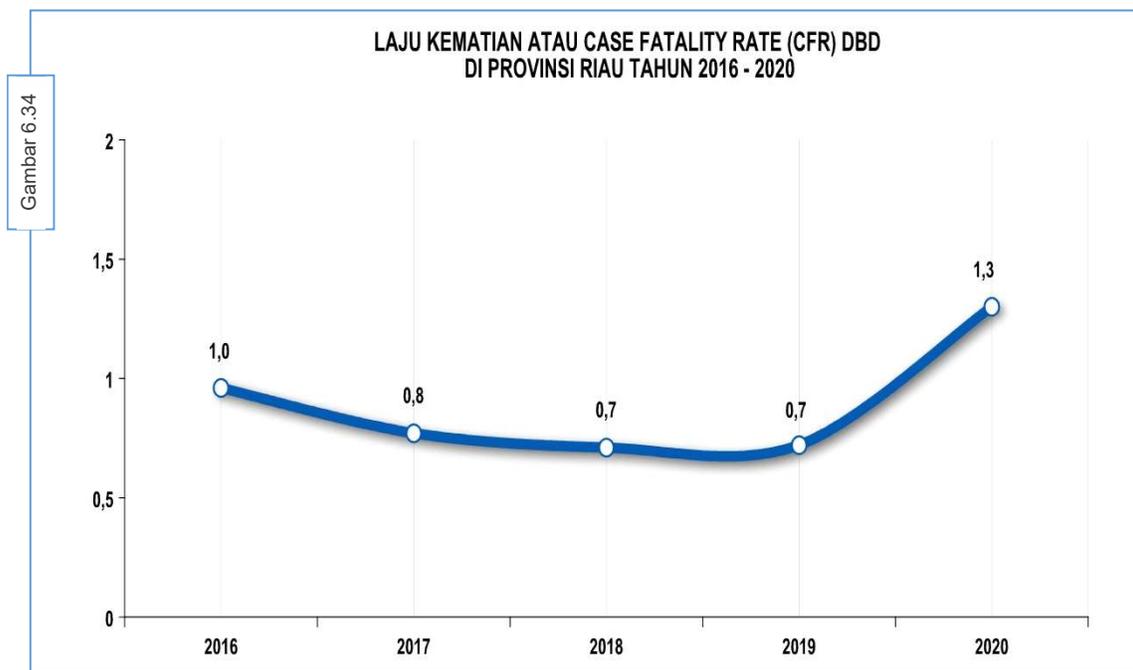
Peningkatan kasus AFP hanya terjadi di Kabupaten Pelalawan ditemukan 5 orang (3 per 100.000 penduduk).

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZONOTIK

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

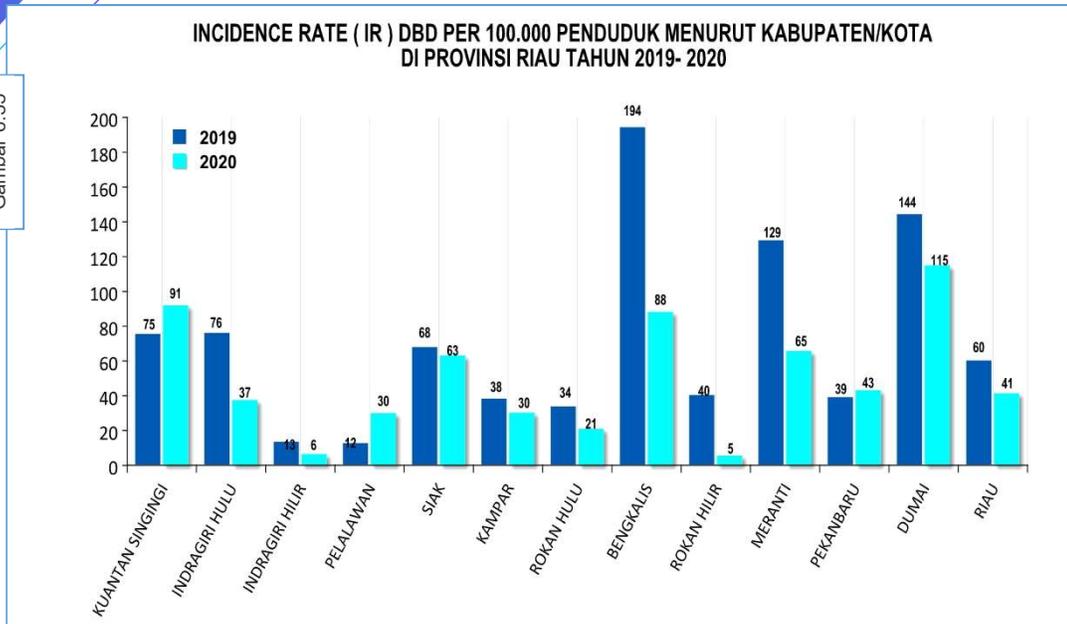
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus aedes, terutama *Aedes aegypti* atau *albopictus*.

Provinsi Riau jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2020 sebanyak 2.923 orang dan angka kematian sebanyak 38 orang (IR/Angka kesakitan = 41 per 100.000 penduduk dan CFR / Angka kematian = 1,3%). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dimana IR / Angka kesakitan sebesar 12,44 per 100.000 penduduk.



Laju kematian CFR Penyakit Demam Berdarah terjadi peningkatan tajam di tahun 2016 (1,0%) tetapi belum terjadi outbreaks dan dimulai tahun 2016-2019 terjadi penurunan angka kematian akibat DBD. Dan menurut hasil pengamatan penyakit DBD akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Tahun 2020, CFR penyakit DBD tinggi yaitu 1,3% (CFR >1%), dengan demikian pada tahun 2020 kabupaten/kota yang memiliki CFR tinggi yakni Kabupaten Indragiri Hilir 6,7%, dan Kampar 3%.

Gambar 6.35



Kasus baru penyakit Demam Berdarah (incidence rate) Provinsi Riau tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 59,9 per 100.000 menjadi 41 per 100.000 penduduk, dimana target yang telah ditentukan yaitu < 49 per 100.000 penduduk. Demikian juga hampir disemua kabupaten/kota terjadi penurunan. Kabupaten yang mengalami peningkatan penemuan kasus DBD yang tinggi yaitu kabupaten Kuantan Singingi, dimana tahun 2019 ditemukan 75 orang kasus DBD per 100.000 penduduk meningkat di tahun 2020 menjadi 91 per 100.000 penduduk.

2. Malaria

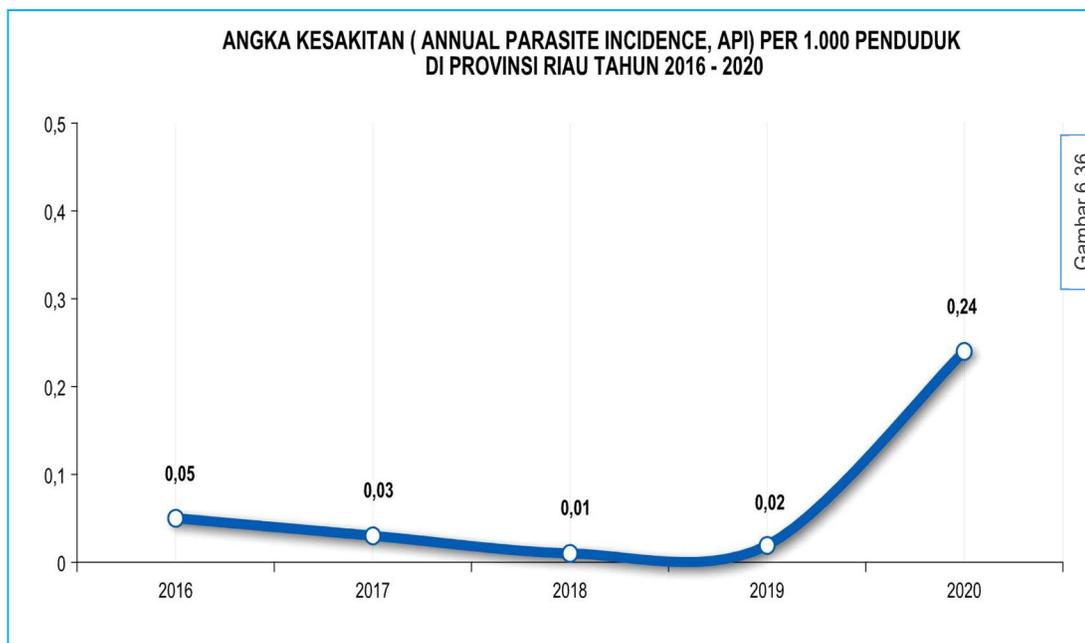
Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina. Di Provinsi Riau, hampir semua kabupaten/kota telah eliminasi malaria, hanya 2 (dua) kabupaten yang belum yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan secepatnya menuju eliminasi karena secara nasional 2030 Indonesia eliminasi Malaria.

Untuk percepatan pencapaian target, kegiatan operasional program malaria di layanan kesehatan melaksanakan penemuan penderita malaria melalui *Pasif Case Detection*, *Active Case Detection* berupa *Mass Blood Survey* (MBS) dan *Mass Fever Survey* (MFS). Indikator Utama Program Malaria antara lain :

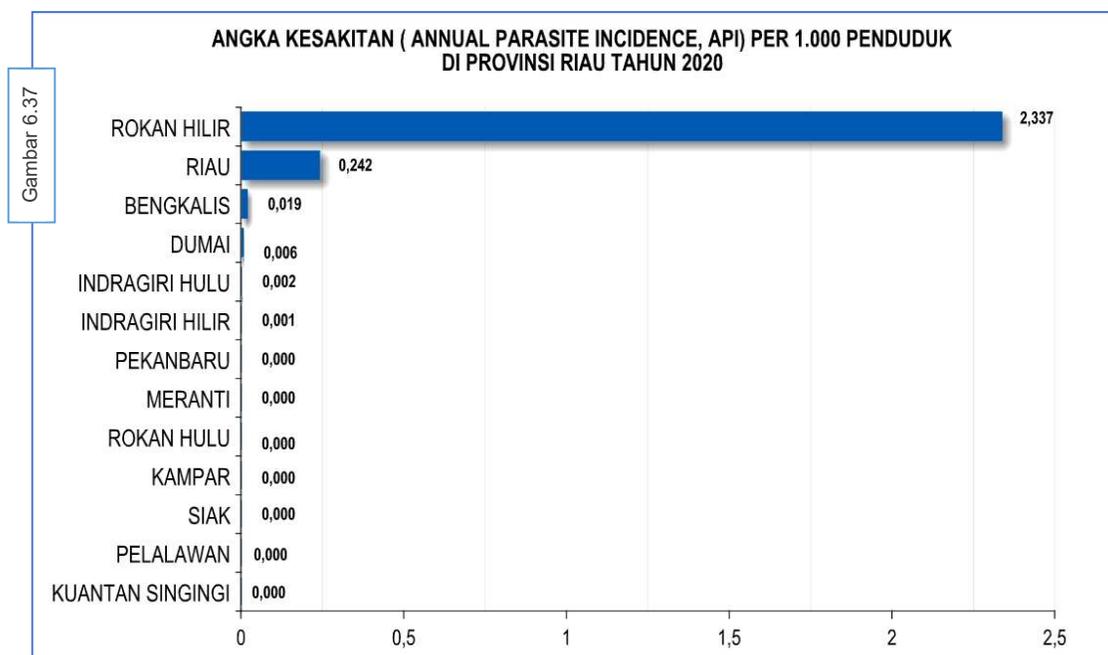
- (a). API (Annual Parasite Incidence) dengan penegakkan diagnosa kasus malaria (+) harus melalui pemeriksaan laboratorium sehingga tidak ada lagi kasus malaria (+) berdasarkan pemeriksaan klinis;

(b). Slide Positive Rate < 5 % ;

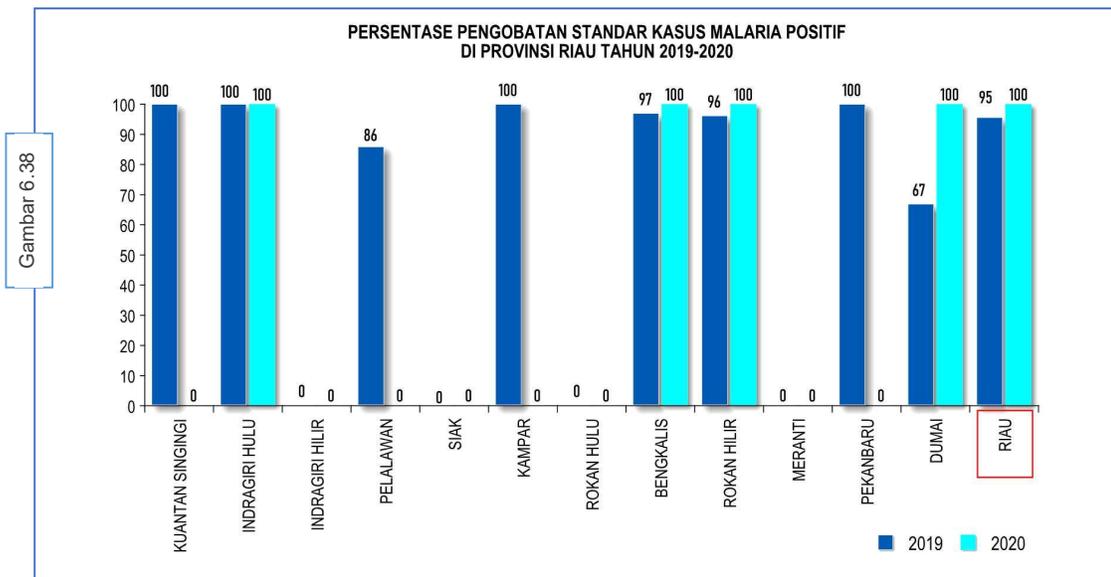
(c). Tidak ada indigenous /penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut.



Annual Parasite Incidence (API) dengan konfirmasi laboratorium positif di Provinsi Riau dari tahun 2016-2020 telah mengalami penurunan drastis dari 0,05 per 1.000 penduduk hingga mencapai 0,02 per 1.000 penduduk, dan tahun 2020 meningkat menjadi 0,24 per 1.000 penduduk dan masih memenuhi target (target Renstra dan nasional API < 1 per 1.000 penduduk).



Diagnosa kasus malaria secara mikroskopis di Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 7.991 orang, dengan pemeriksaan secara mikroskopis 5.843 orang dan menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) sebanyak 2.148 orang. Dari jumlah tersebut, ternyata yang hasilnya positif ada 1.725 suspek. Kabupaten/kota yang API tertinggi dan tidak memenuhi target yaitu Kabupaten Rokan Hilir yaitu 2,3 per 1.000 penduduk (target API < 1 per 1.000 penduduk).



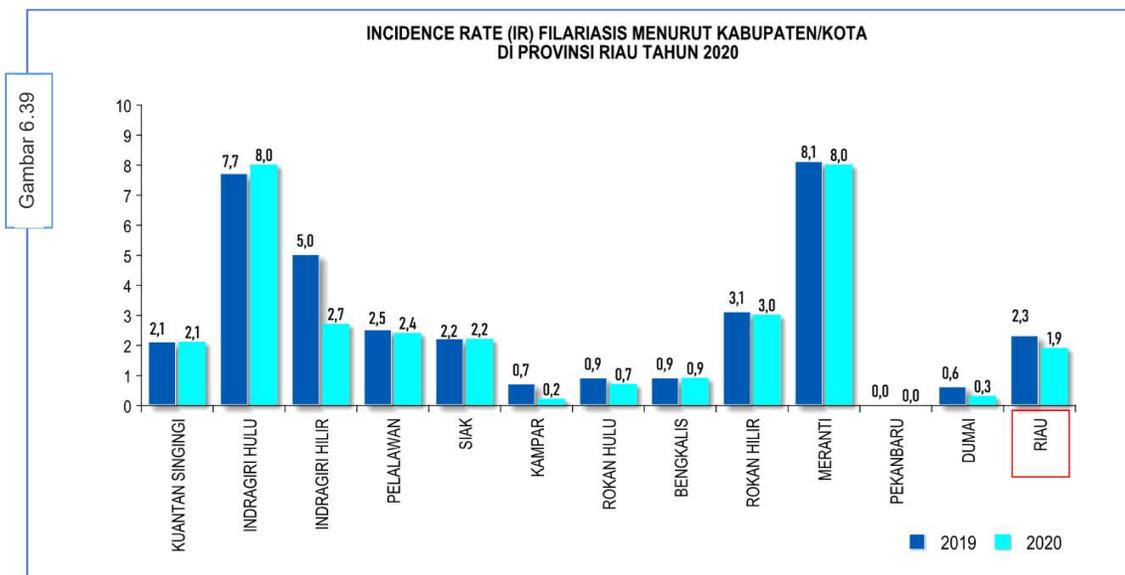
Jumlah kasus malaria di Provinsi Riau yang ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 7.991 orang dan yang mendapatkan pengobatan yang sesuai standar 1.725 orang (100%) dari seluruh jumlah suspek 11.431 orang.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan infeksi cacing filarial yang ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Program eliminasi filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan filariasis untuk memutus rantai penularan. Persentase kabupaten/kota terbanyak yang endemis filariasis tahun 2017 di Indonesia, Provinsi Riau mendapatkan peringkat ke 3 (tiga) yaitu 83,3% dengan 10 (sepuluh) dari 12 kabupaten/kota yang endemis atau belum terbebas kaki gajah. Dengan penentuan kabupaten/kota endemis maka dilakukan pemberian POPM (Pemberian Obat dan Pencegahan Massal) paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut dan monitoring evaluasi.

Angka kesakitan filariasis mengalami penurunan, dari tahun-tahun sebelumnya (komulatif dari tahun 2012) jumlah kasus filariasis ditemukan 226 orang dan IR = 3,3 per 100.000 penduduk dan tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 157

orang dengan IR = 2,3 per 100.000 penduduk. Tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi 1,9 per 100.000 penduduk.

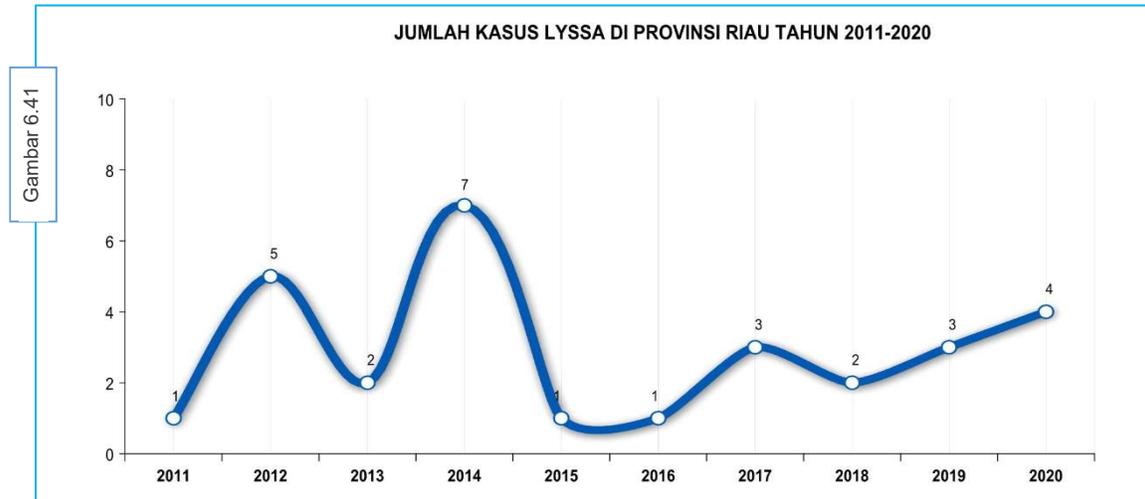


Penderita Filariasis sudah ada di semua kabupaten/kota Provinsi Riau. Grafik angka Incidence Rate Penyakit filariasis (kaki gajah) tahun 2020 diatas merupakan angka kumulatif dari tahun 2012. Dari data diatas terlihat di tahun 2019 bahwa kasus filariasis banyak ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir 37 orang (5 per 100.000 penduduk). Dan dari jumlah tersebut di tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan meninggal sebanyak 6 orang. Penemuan kasus filaria baru di tahun 2020 hanya terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 orang (8 per 100.000 penduduk)

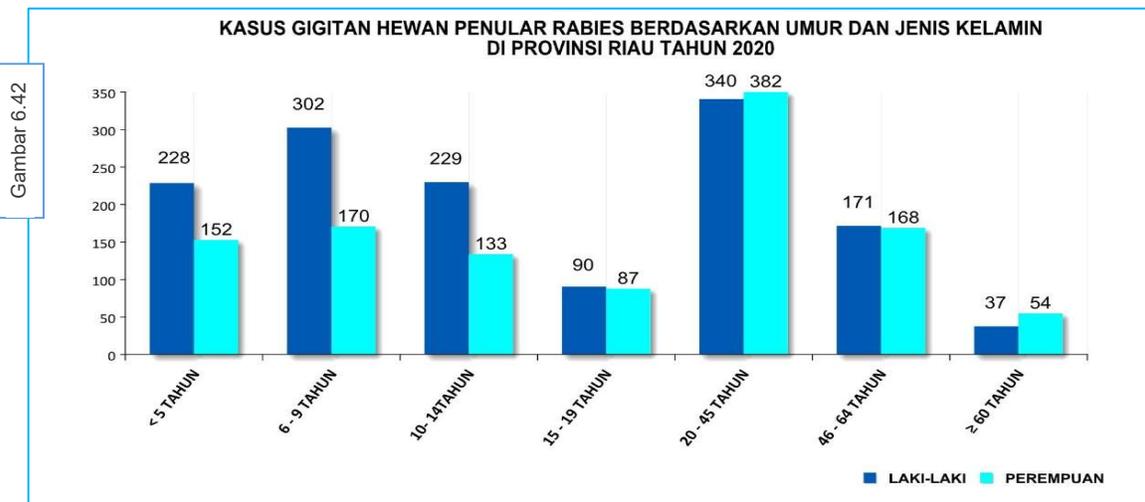
4. Rabies (Anjing Gila)



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa tidak semua kasus GHPR di berikan VAR. Berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun 1978 (SK Menkes No. 279A, Mentan No. 522, Mendagri no. 143) tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies VAR diberikan pada kasus gigitan hewan yang positif Rabies saja dan dilakukan observasi serta pengujian untuk melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan HPR tersebut positif Rabies atau tidak. Oleh sebab itu, jumlah kejadian GHPR tidak akan sama dengan yang mendapatkan VAR (Vaksin Anti Rabies)



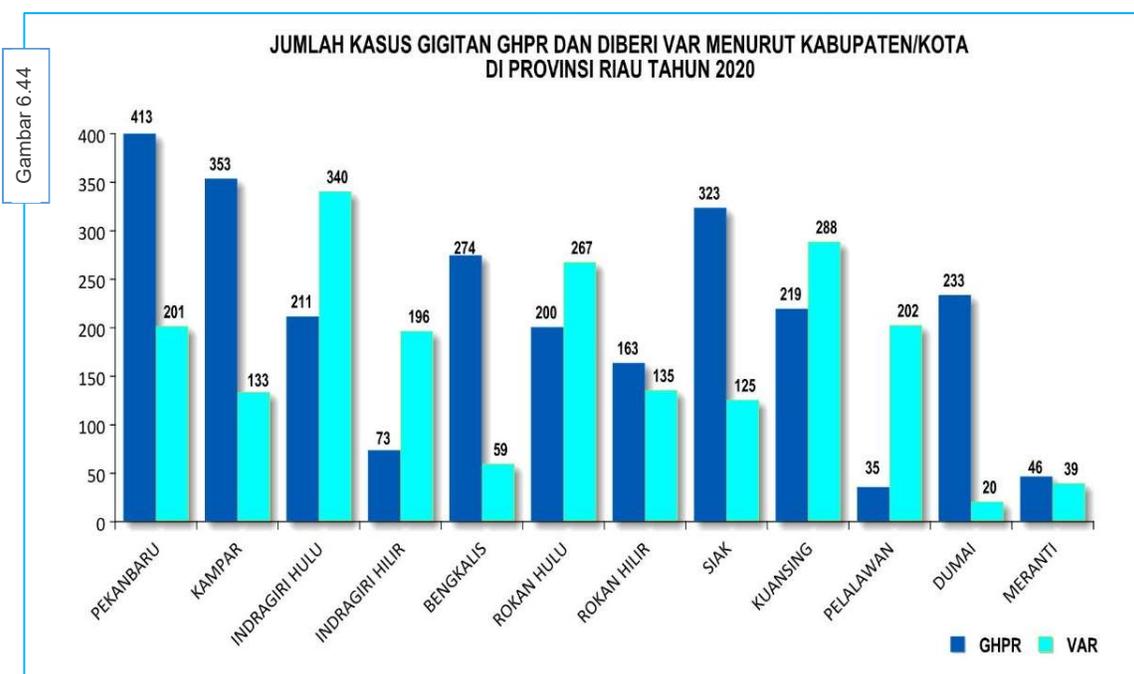
Dari grafik diatas terlihat bahwa masih terjadi kasus Lyssa atau orang yang meninggal akibat rabies di Provinsi Riau. Hal ini, di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies. padahal rabies adalah penyakit yang mematikan dengan Case Fatality Rate 100%, artinya setiap penderita rabies selalu berakhir dengan kematian. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penderita rabies, yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah yaitu dengan pemberian Vaksin Anti Rabies / VAR.



Berdasarkan perbandingan jenis kelamin dan kelompok umur kasus GHPR di atas, bahwa rentang usia laki-laki lebih banyak pada usia anak-anak 6 s.d 9 tahun, sedangkan pada jenis kelamin perempuan lebih banyak pada usia 20 s.d 45 tahun. Ini artinya perlu untuk meningkatkan pemahaman terhadap rabies pada masyarakat usia sekolah dan usia menengah kebawah, disamping juga terhadap seluruh lapisan masyarakat karena rabies bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan dll.



Berdasarkan grafik tersebut diatas terlihat bahwa penyakit rabies, lebih banyak diderita oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 1.403 kasus (55%), dibandingkan dengan perempuan 45%.



Pemberian VAR bertujuan untuk mencegah penyakit Rabies / menghambat agar virus yang masuk melalui luka gigitan /cakaran HPR tidak sampai ke saraf pusat atau otak, sehingga kematian akibat Rabies dapat dihindari. Pemberian VAR harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kemenkes karena keterlambatan dan kesalahan dalam pemberian VAR dapat berakibat fatal.

Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan kasus Rabies tertinggi ditemukan yaitu 323 kasus GHPR, selanjutnya Kabupaten Bengkalis dengan 322 kasus GHPR dan disusul Kabupaten Siak dengan 276 kasus GHPR. Kabupaten Meranti meskipun merupakan daerah yang bebas Rabies namun masih terjadi kasus gigitan, oleh karena itu kegiatan pencegahan dan pengendalian tetap dilaksanakan dalam upaya mempertahankan status bebas rabies mengingat tingginya lalu lintas HPR antar wilayah.

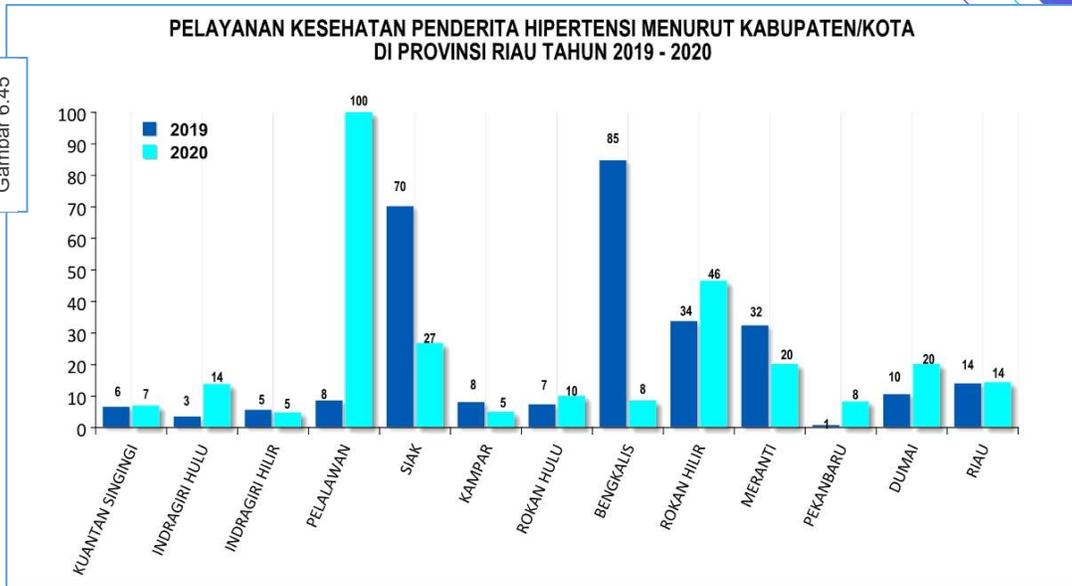
D. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Semakin meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan kini telah menjadi perhatian serius bagi dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya PTM sebagai salah satu target yang harus dicapai dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penyakit tidak menular (PTM) juga dikenal sebagai penyakit kronis, memiliki durasi panjang dan umumnya berkembang lambat dan faktor resiko penyakitnya. Empat jenis utama penyakit tidak menular adalah penyakit kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis (seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma) dan diabetes melitus (DM). Sekitar 80% dari semua kematian PTM terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

1. Hipertensi

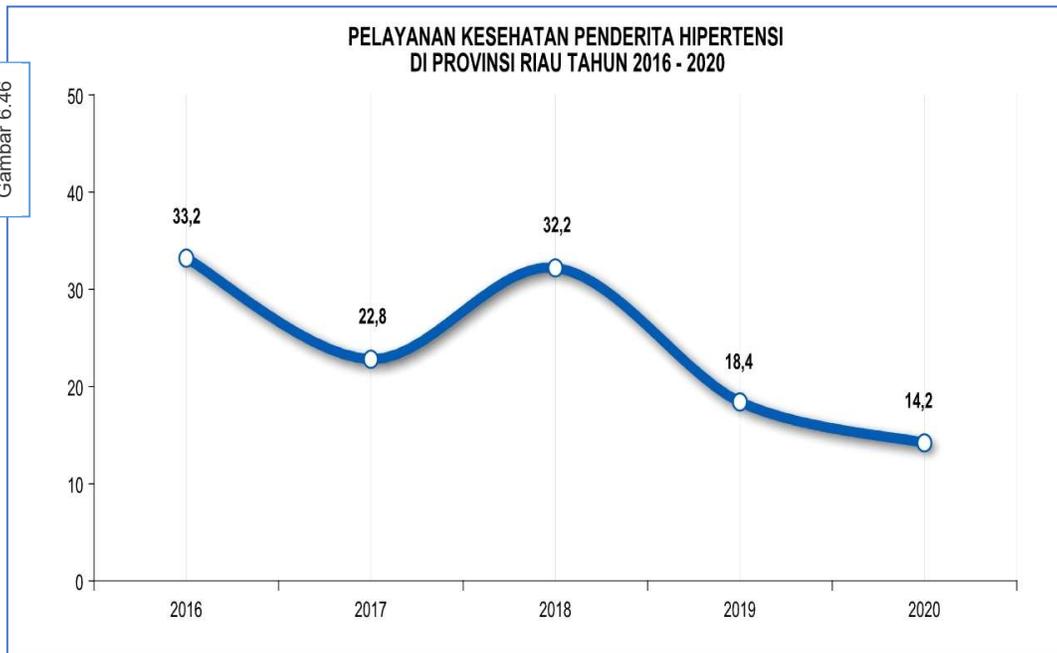
Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi di mana kekuatan aliran dari darah terhadap dinding arteri cukup tinggi. Faktor risiko penyebab hipertensi yang patut diwaspadai adalah obesitas, terlalu banyak minum alkohol, merokok, riwayat keluarga. Salah satu aspek yang paling berbahaya dari hipertensi adalah sering tidak disadari munculnya gejala hipertensi oleh penderitanya, hal ini akibat mengabaikan gaya hidup sehat. Satu-satunya cara upaya pencegahan yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah yang teratur terutama yang mempunyai resiko tinggi.

Gambar 6.45



Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang ditemukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau di tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi peningkatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

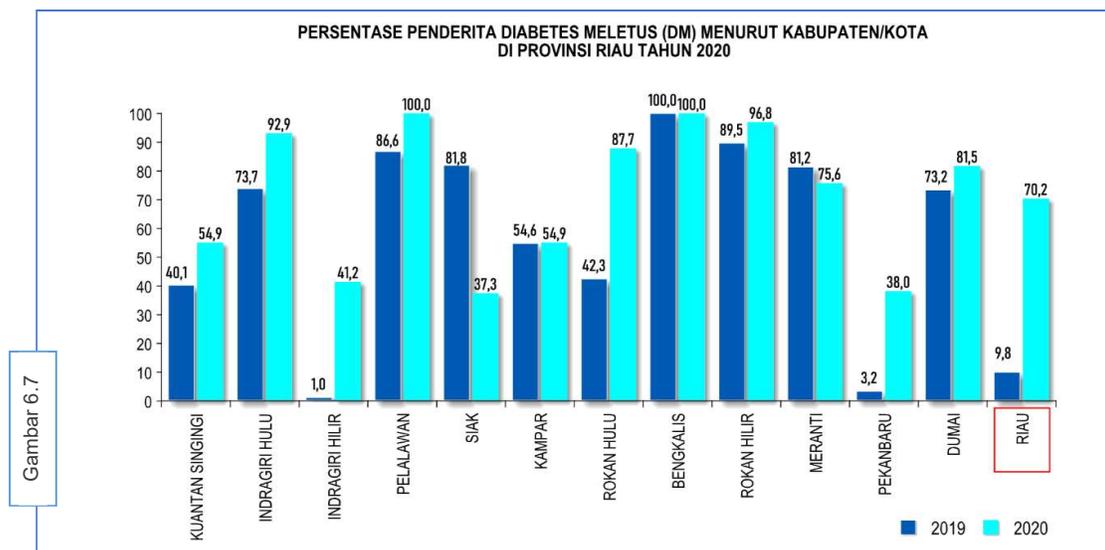
Gambar 6.46



Penderita hipertensi umur ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar turun dari tahun 2016-2020 dan menjadi 14,2%.

2. Diabetes Militus

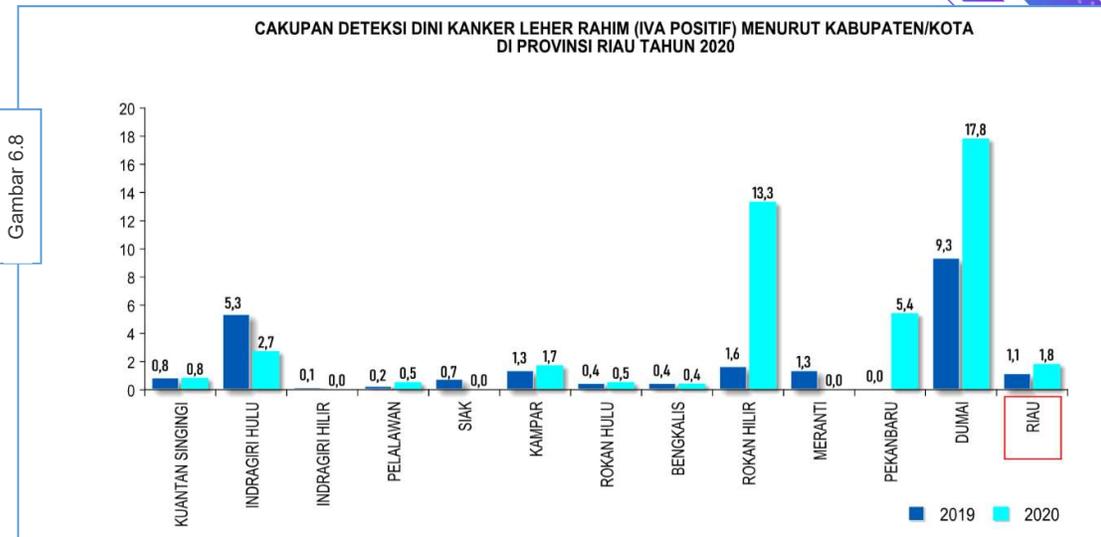
Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi.



Persentase penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 13,7% di tahun 2018 menurun menjadi 9,8% di tahun 2019. Dan di tahun 2020 terjadi peningkatan perbaikan layanan kesehatan hampir di setiap kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Siak pada penderita diabetes militus 70,2%. Pengendalian penyakit Diabetes militus masuk didalam indikator program prioritas, SDGs dan standar pelayanan minimal, untuk itu diperlukan adanya intervensi dari program penyakit tidak menular. Salah satunya dengan memaksimalkan integrasi lintas program di Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan melakukan pengendalian faktor risiko PTM.

3. Tumor/ Kanker

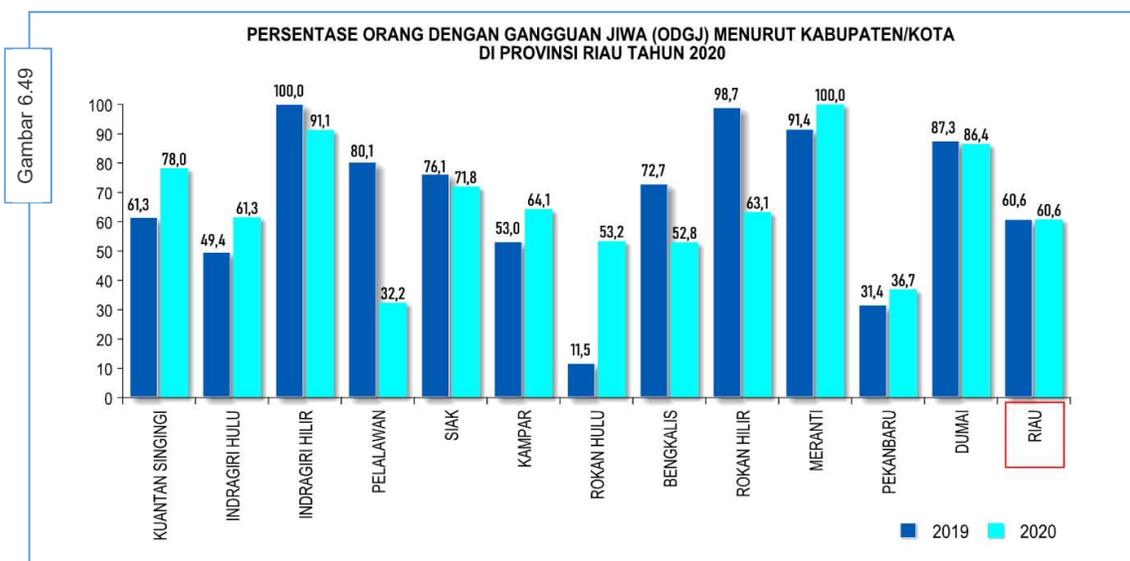
Tumor/ kanker adalah penyakit berbahaya, stadium awal penyakit ini seringkali tidak bergejala. Seperti yang diketahui jumlah penderita kanker diseluruh Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data GLOBAL 2012, diperkirakan terdapat 14,1 juta kasus kanker baru yang muncul, pada tahun yang sama terdapat 8,2 juta kematian karena kanker. Angka penderita ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan mencapai 23,6 juta kasus baru pada tahun 2030.



Tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kanker leher rahim dan payudara yang positif sebanyak 315 orang (1,8%) dari jumlah perempuan yang dilakukan pemeriksaan deteksi dini dari usia 30–50 tahun sebanyak 17.689 orang untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan periksa payudara secara klinis (SADANIS) minimal sebulan sekali. Kegiatan deteksi dini terhadap penyakit kanker telah rutin dilakukan di semua kabupaten/kota, tetapi cakupan yang tinggi di Kabupaten Rokan Hilir 13,3%.

4. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

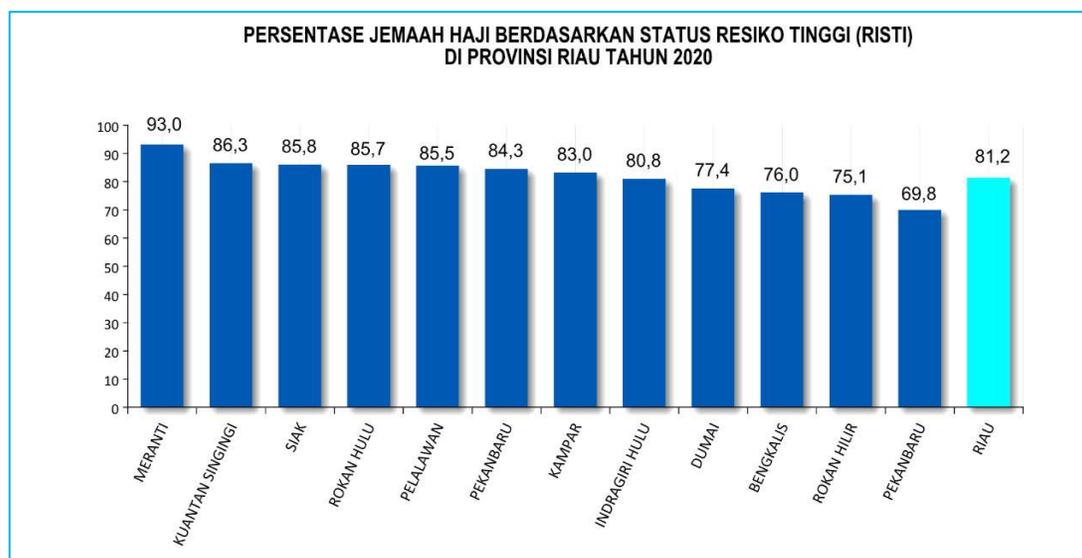
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan /atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya.



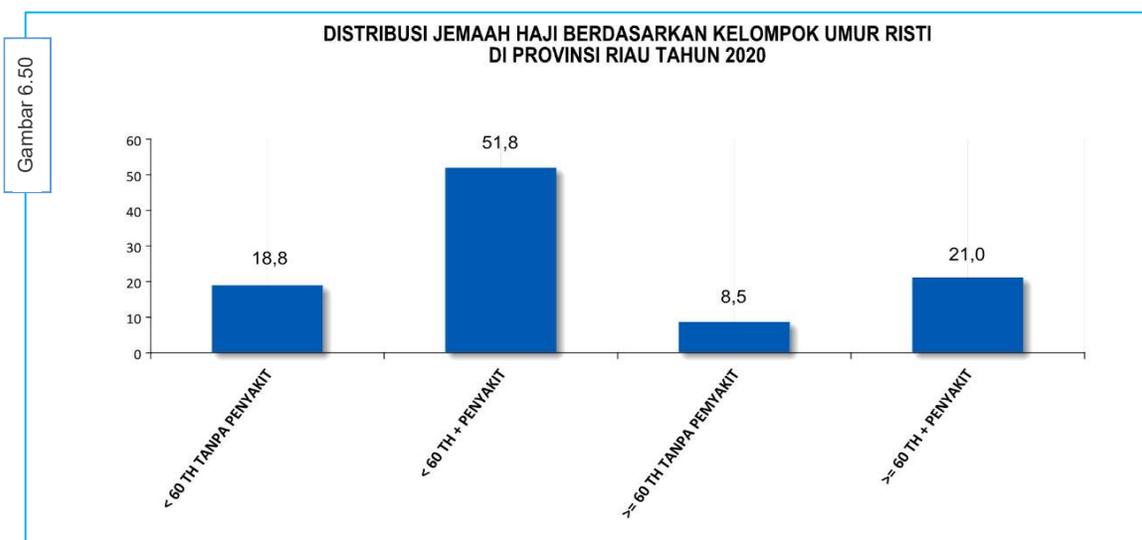
Sasaran orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 9.533 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5.773 orang (60,6%). Capaian yang masih rendah < 50% yaitu kabupaten Pelalawan 32,2% dan Kota Pekanbaru 36,7%.

E. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan jutaan manusia yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan melakukan berbagai ritual ibadah fisik dan spiritual. Pada proses ini terjadi kerentanan terhadap kejadian morbiditas maupun mortalitas.



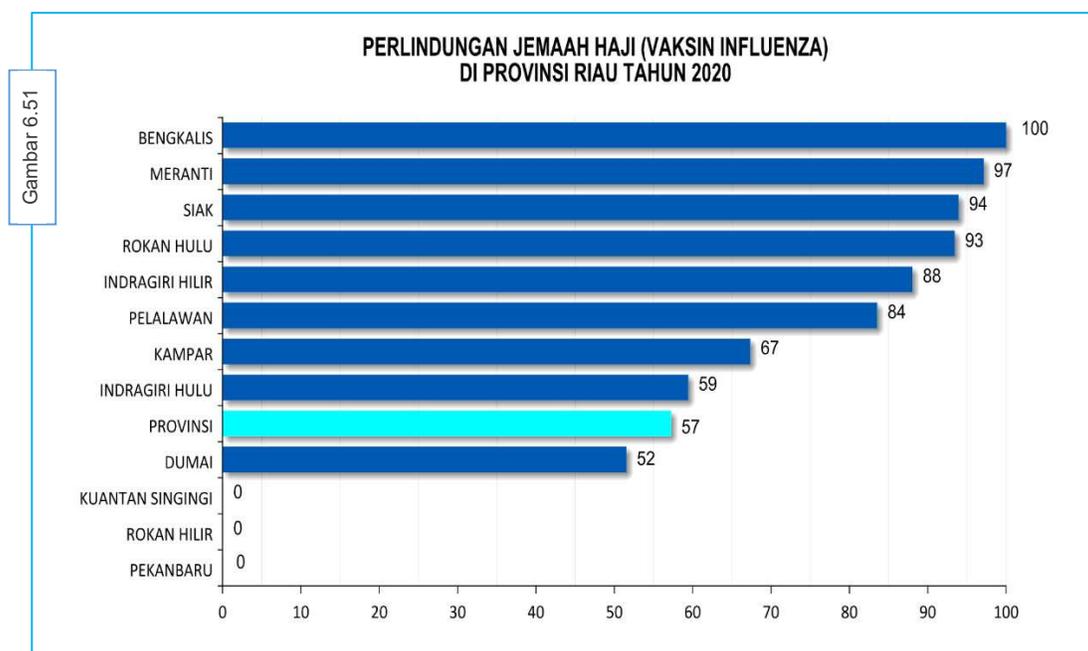
Sebagian besar Jemaah haji Provinsi Riau adalah beresiko tinggi baik dari resiko tinggi karena penyakit maupun karena umur, secara proporsional menurut Kabupaten/Kota Jemaah haji paling banyak resiko tingginya adalah Kepulauan Meranti sebesar 93,0) % sedangkan yang paling rendah adalah Indragiri Hilir sebesar 69,8 %



Gambar 6.50

Kelompok umur berdasarkan Risiko Tinggi (Risti) dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu kelompok umur mulai 60 tahun keatas dan kelompok umur dibawah 60 tahun. Pada kelompok umur 60 tahun keatas terdapat sebesar 21,0 % dengan penyakit dan 8,5 % tanpa penyakit sedangkan dibawah 60 tahun dengan penyakit sangat banyak sekali 51,8 %.Vaksinasi Meningitis Meningokokus diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi Jemaah haji dari penyakit tertentu, yang dilaksanakan di puskesmas dan / atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

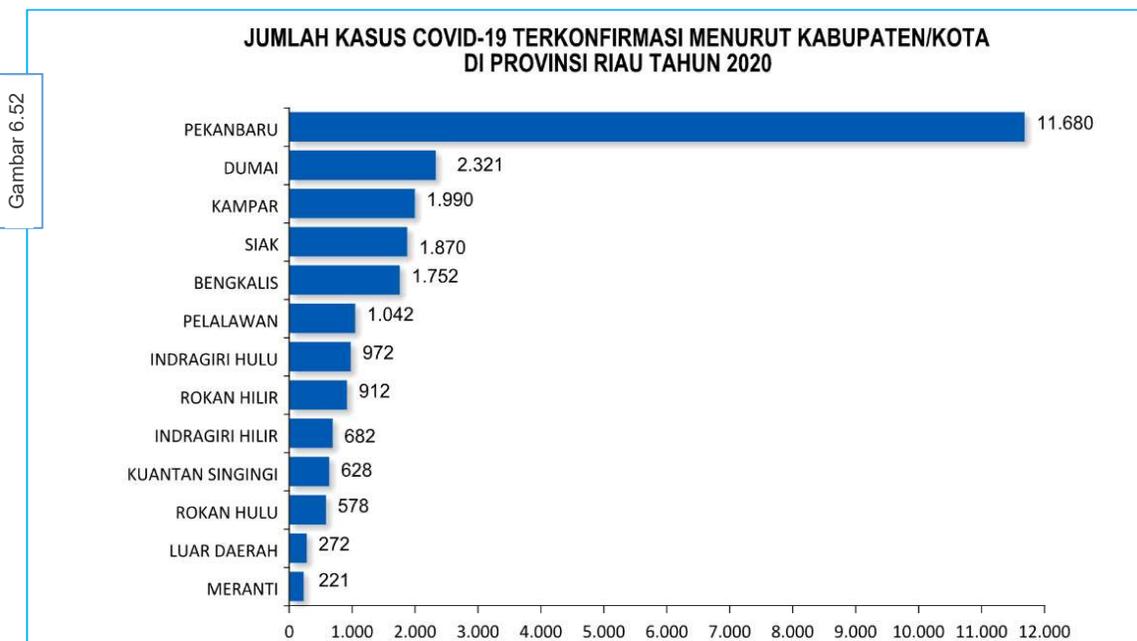
Vaksinasi sebagaimana dimaksud terdiri dari vaksinasi yang diwajibkan dan vaksinasi yang disarankan. Vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan vaksinasi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada Jemaah haji.Semua Jemaah haji yang berangkat untuk menunaikan Jemaah haji wajib melakukan vaksinasi Meningitis Meningokokus sehingga targetnya harus mencapai 100 % Dapat dilihat pada table dibawah ini.



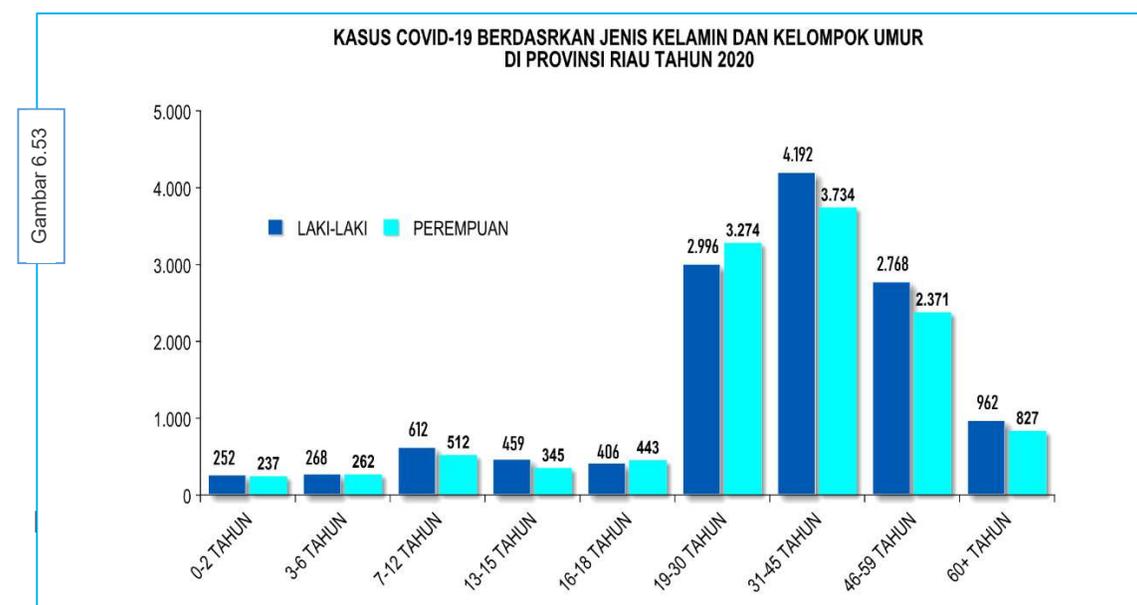
Sedangkan vaksinasi Influneza merupakan vaksinasi yang disarankan terutama kepada Jemaah haji dengan kategori Risti. Vaksinasi ini tidak dibiayai oleh pemerintah kecuali 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kep. Meranti dan Kabupaten Siak Anggaran Pembelian Vaksin di biayai melalui APBD sedangkan Kabupaten/Kota yang lain Jemaah haji biaya sendiri dan ada 3 Kabupaten yang tidak menyediakan vaksinasi influenza pada Jemaah hajinya yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

F. PENYAKIT COVID-19

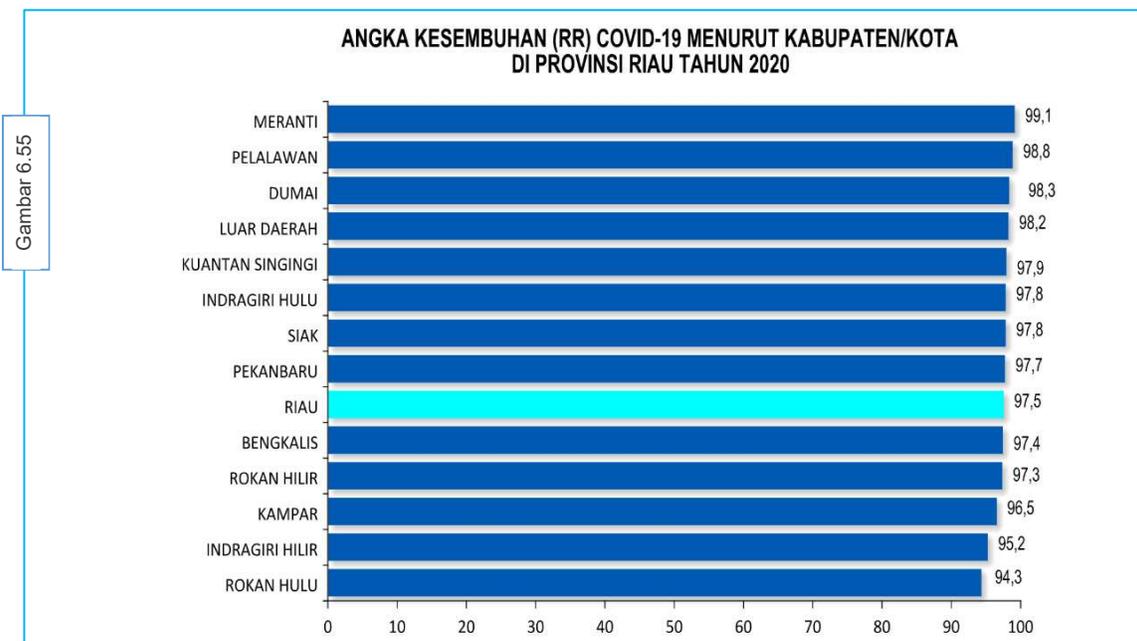
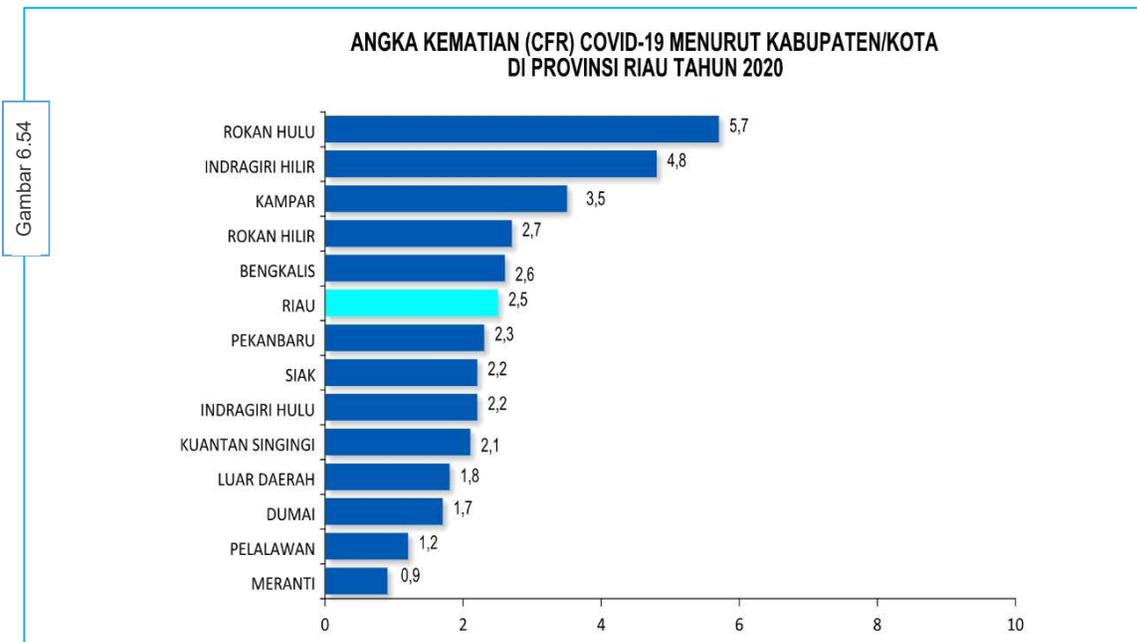
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.



Penyakit yang disebabkan virus corona ini, cepat menyebar dan merata terdapat di semua kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kasus Covid-19 paling banyak ditemukan di Kota Pekanbaru karena sebagai tempat pusat rujukan layanan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 11.680 orang.



Golongan umur yang paling banyak tertular penyakit covid-19 adalah usia produksi antara umur 19-59 tahun, dengan CFR 2,5%. Kabupaten/kota yang paling tinggi angka kematiannya di Kabupaten Rokan Hulu 5,7%, dengan persentase kesembuhan yang tinggi 97,5%. Yang paling tinggi usia produktif dengan bonus demografi yang merupakan suatu fenomena saat jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Bonus demografi dapat menjadi alat untuk mengembangkan kondisi daerah dengan generasi produktif yang berkualitas





Kesehatan Lingkungan

BAB 7

KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mencapai Visi nya yaitu **“Masyarakat Riau Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat Tahun 2020”** melalui seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan penjabaran dari target Universal Access Tahun 2019. Universal access Tahun 2019 mempunyai *Target 100% masyarakat telah akses terhadap air minum yang layak, 0% masyarakat hidup di pemukiman kumuh serta 100% masyarakat akses terhadap sanitasi dasar yang layak.* Untuk mencapai target- target dimaksud tentu Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan terus berbenah dan menyusun strategi dalam mencapainya, melalui program- program yang terintegrasi dengan baik, salah satunya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

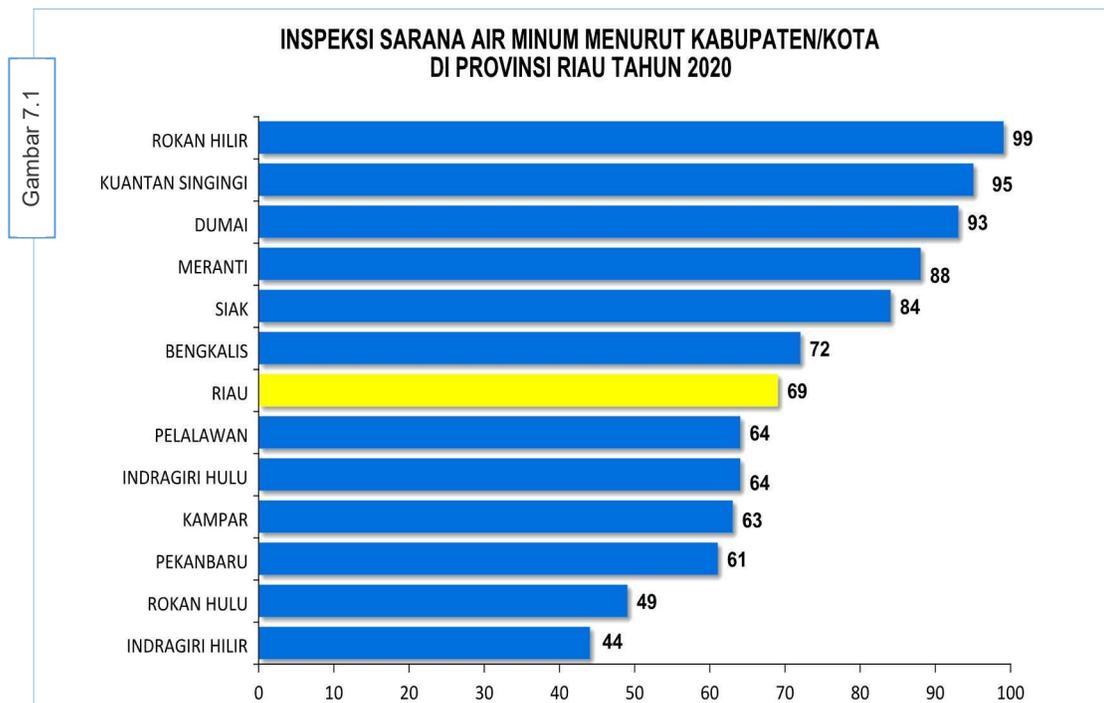
A. Air Minum

Penyelenggara air minum meliputi (1). PDAM /BPAM/PT yang terdaftar di persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia (PERPAMSI); (2). Sarana air minum perpipaan non PDAM (3). Sarana air minum bukan jaringan perpipaan komunal (Sumur gali, sumur bor dengan pompa, penampungan air hujan, mata air terlindung, terminal air/ tangki air, depot air minum)

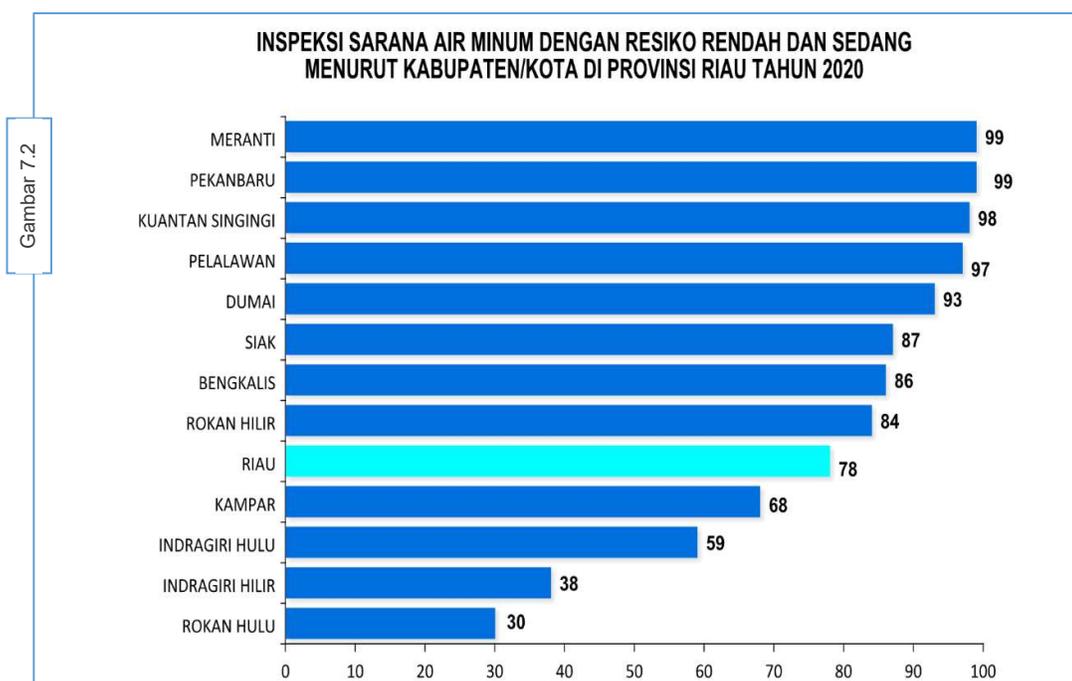
Pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum mengacu pada Permenkes No 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dengan melakukan kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). IKL adalah pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, perlengkapan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Adapun yang menjadi Tujuan IKL sarana air minum dan sanitasi adalah:

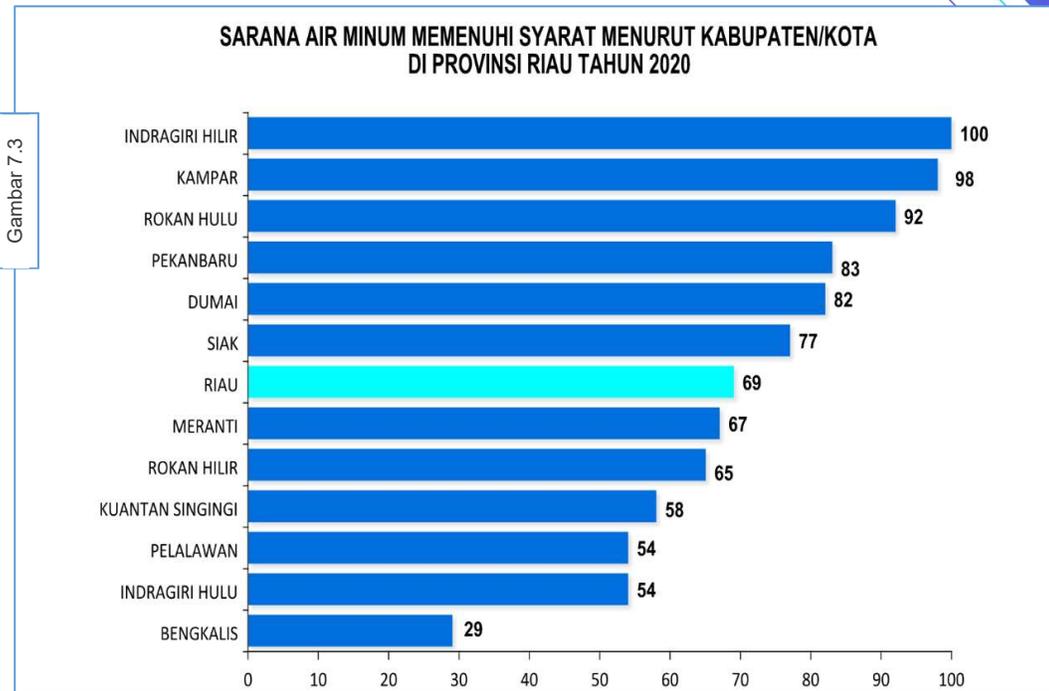
- a. Mengetahui informasi risiko pencemaran
- b. Tahapan sebelum melakukan pemeriksaan kualitas air minum
- c. Informasi untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan sarana air minum dan sanitasi
- d. Memberikan rekomendasi tentang keadaan sarana air minum dan sanitasi



Pengawasan Air Minum di Provinsi Riau Tahun 2020 dilaksanakan pada sekitar 3272 sarana atau 68,7% dari 4762 sarana air minum yang ada. Dan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%. Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, maka sekitar 83 % (10) kabupaten/kota yang telah mencapai target, dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hilir dengan 98,9,0%, diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 95,0% dan Kota Dumai sebesar 93,1%. Sedangkan Kabupaten/kota yang capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir 44,2% diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu 48,9% dan Kota Pekanbaru 60,8%.



Dari 3.272 sarana air minum yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan ditemukan sebanyak 2.545 (77,8%) sarana air minum telah berisiko baik risiko rendah maupun sedang.



Sarana air minum yang dilakukan pengawasan pada penyelenggara air minum melalui inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan (pengujian) kualitas air berdasarkan parameter fisik, kimia, mikrobiologi dan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau sebanyak 69,2%. Sarana air minum di Kabupaten Indragiri Hilir memenuhi syarat 100% dari jumlah Sarana air minum yang tercatat

B. Jamban Sehat

Fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki septic/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau Bersama. Perilaku buang air besar sembarangan dapat meningkatkan risiko masyarakat terkena penyakit menular. Akses sanitasi layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septic atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)



Untuk Provinsi Riau tahun 2020 keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 47%, ini artinya ada sekitar 53% kepala keluarga yang harus menjadi perhatian tentang kebutuhan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dengan rincian jumlah sarana jamban sehat sebagai berikut, jamban sehat permanen (JSP) 656.847 buah, jamban sehat semi permanen (JSSP) berjumlah 134.410 buah dan jamban umum/komunal 39.576 buah.

Jumlah desa melaksanakan STBM sebanyak 1.463 desa (78%), dan desa yang melaksanakan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) berjumlah 726 buah (38,7%). Trend penurunan persentase desa Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) tahun 2016-2020 menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku sehat.

Macam jamban sehat antara lain Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permaenen (JSSP), dan jamban sharing /komunal (jamban umum) dianjurkan untuk daerah/wilayah yang padat penduduk dan daerah yang sempit atau sulit akses untuk membuat sarana jamban dan septink tank.

Gambar 7.4



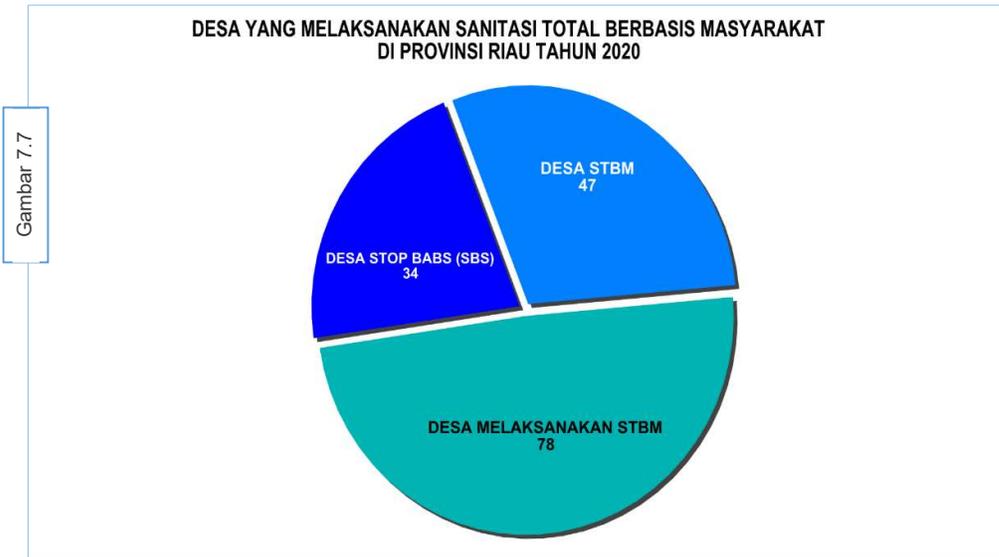
Gambar 7.5



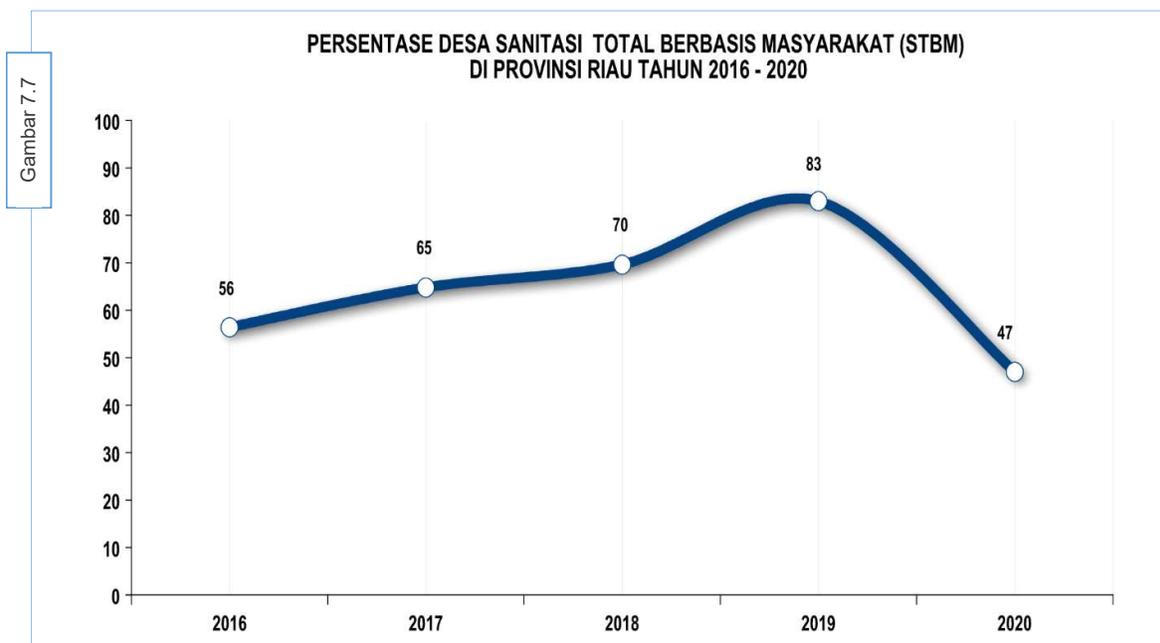
Persentase desa yang melaksanakan kegiatan stop buang air besar sembarangan di Provinsi Riau tahun 2020 yang paling aktif yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis masing-masing 56%, dan Kabupaten Kampar sebesar 52%. Sedangkan kabupaten yang masih kurang dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 15%, diikuti dengan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 18% dan Kabupaten Kep. Meranti sebesar 35%.

C. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

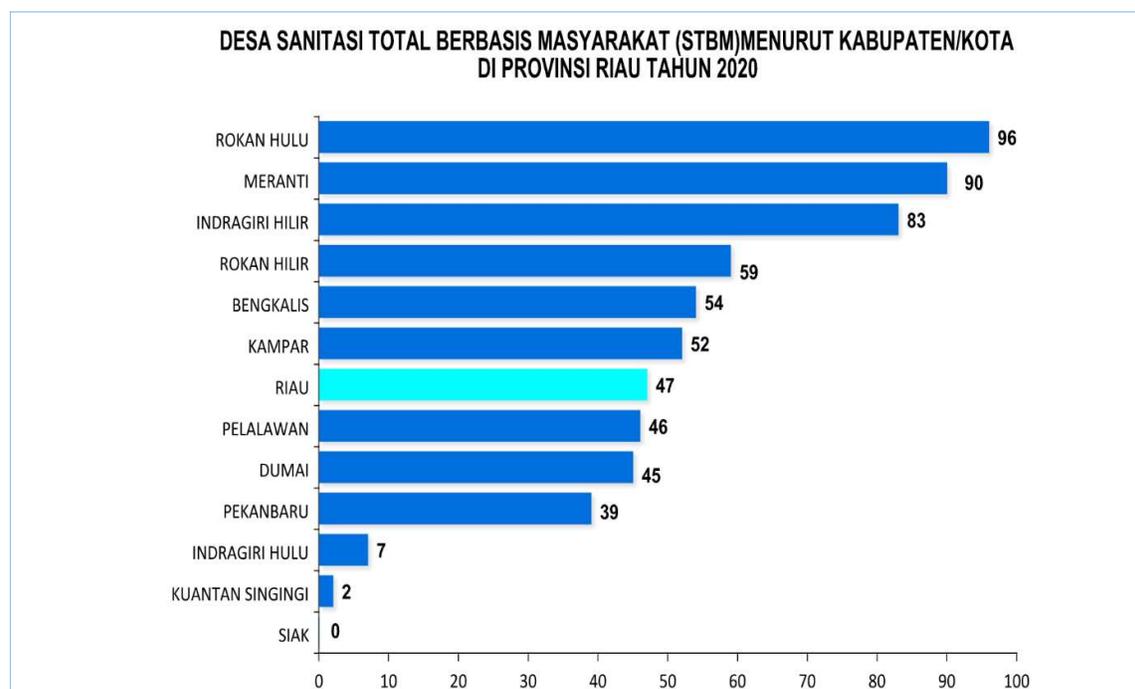
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dengan tujuan untuk menurunkannya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 1.878 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau maka ada sekitar 1.463 desa/kelurahan (78%) yang telah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan ada sekitar 726 desa/kelurahan (34%) Desa Stop BABS (SBS) dan selanjutnya untuk Desa STBM berjumlah sekitar 879 desa/kelurahan (47%).



Persentase desa yang melaksanakan STBM dan aktif mulai tahun 2016-2019 mulai meningkat signifikan. Dimana pada tahun 2016 (56,4%) meningkat menjadi 83% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena dunia dilanda wabah virus corona, menyebabkan beberapa kegiatan terkendala, termasuk pembinaan STBM ke masyarakat di desa.



Secara Provinsi, persentase desa yang aktif melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yaitu 46,8% dan Rokan Hulu telah mencapai 95,9%, sedangkan kabupaten yang masih rendah yaitu Kabupaten Siak 0%.

D. Tempat - Tempat Umum

Pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kegiatan inspeksi sanitasi pada Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan pada hotel, wisma/ penginapan, pasar/swalayan/supermarket, tempat ibadah, pondok pesantren, kolam renang/ pemandian umum, terminal/bandara/pelabuhan dan TTU lainnya.



Gambar 7.9

Dari gambar diketahui bahwa persentase tempat - tempat umum yang memenuhi syarat selama 5 (lima) tahun terakhir belum stabil. Hal ini disebabkan masih lemahnya inspeksi sanitasi di tempat-tempat umum terutama pada kolam renang / pemandian umum, terminal / bandara / pelabuhan, pasar / swalayan / supermarket.



Gambar 7.10

Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2020 sekitar 58% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 52%. Dari 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau 6 (enam) kabupaten/kota yang telah mencapai target renstra 58%, yakni Kabupaten Pelalawan 96%, kota Dumai 89%, Kota Pekanbaru 76%, Kabupaten Kampar 75% dan Kabupaten Kuantan Singingi 67%, Kabupaten Rokan Hilir 65 %. kabupaten/kota yang memiliki TTU yang memenuhi syarat kesehatan yang rendah adalah kabupaten Indragiri Hilir 23%, Kabupaten kep. Meranti 33% dan Kabupaten Indragiri Hulu 34%.

E. Tempat Pengelolaan Makanan

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk mengolah makanan dari bahan mentah hingga disajikan menjadi makanan jadi yang dilakukan pengawasan, terutama pada TPM di area pelabuhan, dikarenakan banyak masyarakat yang beraktifitas di daerah pelabuhan yang perlu dilindungi kesehatannya. Sasarannya meliputi Jasa boga, Rumah/ Restoran, Depot Air Minum dan Makanan Jajanan.

Pengelolaan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu mendapat perhatian dari segi nilai gizi, segi kemurnian, maupun dari segi kebersihan. Sebab meskipun nilai gizi dan kemurnian baik namun kebersihan lingkungan tidak diawasi dan dipelihara, maka makanan tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat terkontaminasi.

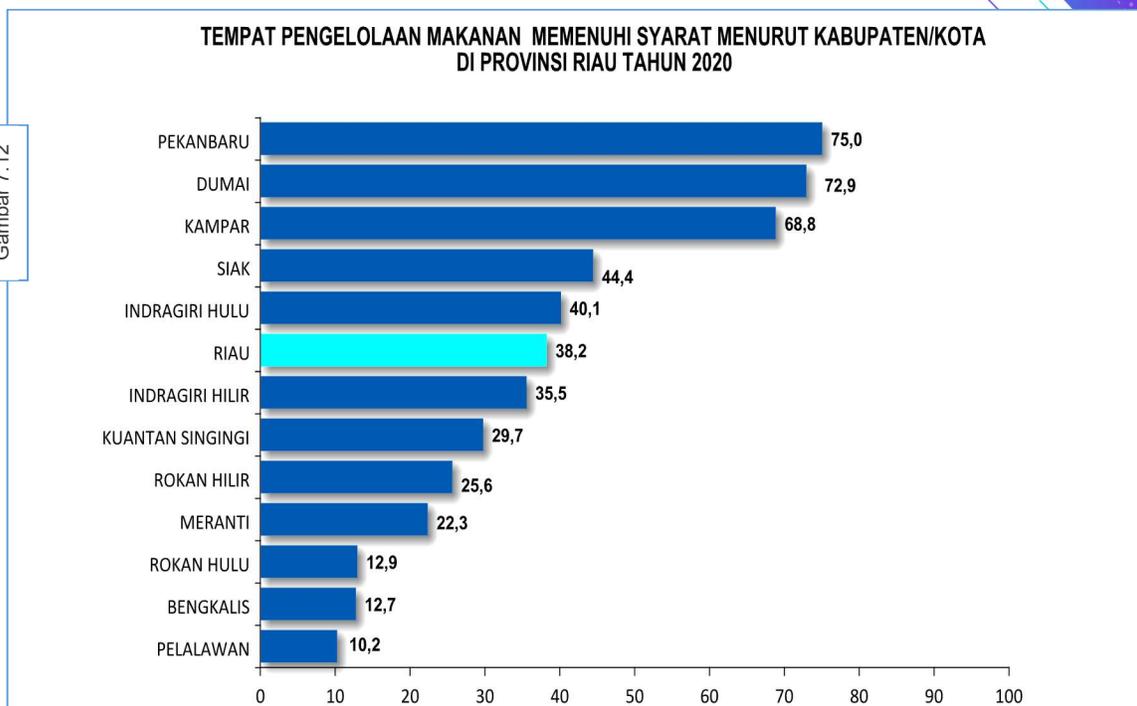
Dengan demikian, kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan TPM antara lain persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan penyajian makanan jadi, dan persyaratan peralatan yang digunakan.



Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa, jumlah TPM yang sudah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,2% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 40,2%. Angka tersebut telah melampaui target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 26%.

Untuk kabupaten/kota yang capaian TPM telah memenuhi syarat kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2020 adalah sebesar 38,2% dan yang tertinggi adalah Kota Pekanbaru 75,0% diikuti oleh Kota Dumai sebesar 72,9% dan Kabupaten Kampar sebesar 68,8%. Sedangkan untuk Kabupaten/kota yang TPMnya memenuhi syarat kesehatan adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 10,2% diikuti oleh Kabupaten Bengkalis 12,7% dan kabupaten Rokan Hulu 12,9%. Gambaran capaian TPM yang telah memenuhi syarat kesehatan dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 7.12



Namun, dari 19.404 TPM yang ada, tetapi yang memenuhi syarat hanya 7.407 (38,2%) Meskipun hasil capaian setiap tahunnya telah melampaui target, namun pencapaian TPM yang memenuhi syarat kesehatan selama 5 (lima) tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan meningkatkan pembinaan yang melibat semua lintas program/sector terkait, sebagaimana kita ketahui bahwa TPM memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit, bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan evaluasi rutin untuk semua TPM, dan diprioritaskan untuk TPM yang belum memenuhi syarat dan atau TPM yang belum pernah dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan yaitu sebanyak 61,8% (11.032 TPM).

F. Program Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Sehat

Target program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan Sehat adalah kabupaten yang menyelenggarakan pendekatan Kabupaten/Kota Sehat dengan membentuk Tim Pembina, Forum Kabupaten/Kota dan yang menerapkan minimal 2 tatanan wajib dari 9 tatanan kawasan sehat dan rencana kerja.

Realisasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat di Provinsi Riau tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 7.13 berikut;

Pencapaian Kab/Kota yang Menyelenggarakan Kab/Kota Sehat di Provinsi Riau Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2020	
		TARGET	PENCAPAIAN
1	KAMPAR	0	0
2	PELALAWAN	1	1
3	SIAK	1	1
4	INDRAGIRI HULU	0	0
5	INDRAGRI HILIR	1	1
6	KUANTAN SINGINGI	0	0
7	ROKAN HULU	1	1
8	ROKAN HILIR	0	0
9	BENGGALIS	0	0
10	MERANTI	0	0
11	DUMAI	0	0
12	PEKANBARU	1	1
JUMLAH		5	5

Dari data diatas terlihat pencapaian tahun 2020 yaitu 100% (sesuai dengan defenisi operasional). Untuk tahun 2020 yang merupakan tahun Verifikasi KKS tingkat Provinsi, dimana ada 5 Kab/Kota mengikut serta dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru. Meskipun 3 Kabupaten/Kota telah ikut verifikasi tingkat pusat.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran Kabupaten Kota Sehat (KKS) secara keseluruhan antara lain ;

1. Pemahaman lintas sektor dan program dalam menyelenggarakan Kab/kota sehat masih terbatas.
2. Belum optimalnya kerjasama LS dan LP terkait di tingkat daerah dalam pengembangan KKS.

3. Kurang optimalnya fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota.
4. Pimpinan Daerah yang tidak teradvokasi dan sosialisasi Kab/Kota sehat.
5. Kurangnya Komitmen pengambil keputusan (Komitmen Bupati/Walikota yang kurang mensupport)
6. Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat di indetikkan milik Kesehatan.
7. Kurangnya kerjasama antara Pemerintah, Forum, dan Masyarakat di Daerah.
8. Sering terjadinya mutasi antar pejabat.
9. Kurang tersedianya dana di Kab/kota untuk penyelenggaraan KKS.

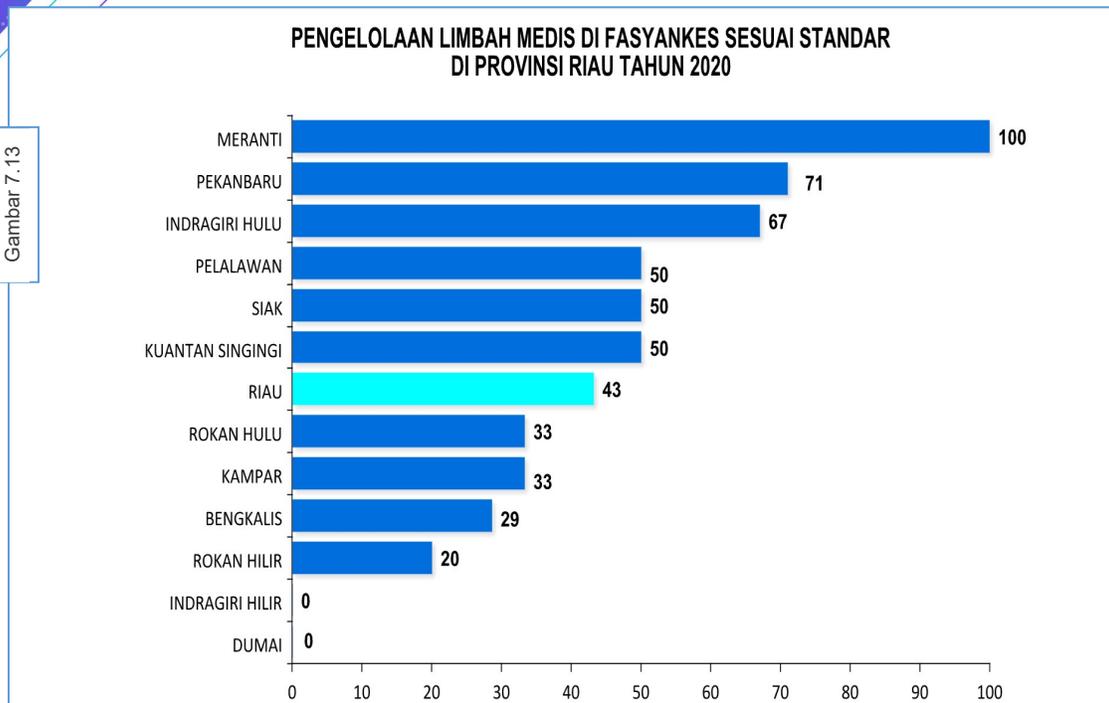
Solusi/Strategi pemecahan masalah untuk penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS):

1. Advokasi dan sosialisasi KKS kepada Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan KKS.
2. Membuat komitmen bersama dengan pengambil keputusan sehingga terbentuknya Tim Pembina dan Forum KKS.
3. Melakukan koordinasi LS dan LP dari tingkat Kab/kota, Kecamatan sehingga Desa/Kelurahan.
4. Memasukkan kegiatan penyelenggaraan tatanan kawasan sehat ke Renstra Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perencanaan yaitu Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan RKPD 2021 dan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

G. Program Pengawasan Limbah Fasilitas Sarana Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Limbah Fasyankes adalah jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar meliputi pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah B3 (TPSL B3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 berizin. Capaian Program Pengelolaan Limbah Medis sesuai standar di Provinsi Riau s.d.Triwulan IV Tahun 2020 seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Gambar 7.13



Sumber : Laporan E-monev & manual Fasyankes

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa ada 6 Kabupaten (Kabupaten Kuansing, Indragiri Hulu, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Kota Pekanbaru) yang mempunyai wilayah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO=Defenisi Operasional) dan sudah mencapai target. selain sesuai DO Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan ke Rumah Sakit adalah :

1. Mempunyai Dokumen Izin Lingkungan
2. Mempunyai Tenaga Kesehatan Lingkungan
3. Melakukan pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium yang sudah terakreditasi
4. Bekerjasama dengan pihak swasta berizin
5. Melakukan pemeriksaan limbah cairnya setiap bulan

Untuk data Puskesmas dari 230 yang sudah melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar baru 1 puskesmas yaitu puskesmas harapan raya.

Program Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes di Provinsi Riau untuk Puskesmas belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 41% untuk target di tahun 2020, jadi masih banyak Puskesmas yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, serta harus di support dengan anggaran. Sementara untuk Rumah

Sakit sudah mencapai target yang telah ditentukan. Dari data diatas dapat dilihat ada 32 Rumah Sakit (43,24%) yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar (DO). Ditahun 2020 Program Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes anggaran APBD nya sebesar 108.516.600 setelah rasionalisasi anggarannya menjadi 36.083.600 , sementara untuk anggaran APBN sebesar 94.257.000 diharapkan untuk tahun kedepan program ini mendapat anggaran dari APBN untuk menunjang capaian dan target ditahun ini. Kegiatan APBD yang dilaksanakan yaitu pembinaan ke Rumah Sakit di 12 Kabupaten/Kota. Sementara untuk kegiatan APBN tahun 2020 terfokus pada masalah merkuri dengan judul kegiatan koordinasi dalam pengelolaan limbah medis dan penyelesaian masalah merkuri bagi petugas puskesmas, rumah sakit dan fasyankes lainnya. Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam pencapaian program ini, diantaranya :

1. Belum adanya dukungan kebijakan Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota khususnya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes.
2. Pengelola program di Kabupaten/kota belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
3. Mahalnya sarana maupun biaya untuk pengelolaan limbah medis fasyankes
4. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor, lintas program, dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis dilapangan
5. Masih banyaknya Rumah Sakit yang tidak mengirimkan laporan (mengisi E-money).
6. Masih banyak nya Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan fasyankes lainnya belum mengisi borang alkes bermerkuri

Diharapkan tahun kedepan Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar dan belum mengirimkan laporannya baik secara manual maupun E-monevnya bisa melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar (DO) dan mengirimkan laporannya.



Lampiran

TABEL 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km ²)	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA	KEPADATAN PENDUDUK <i>per Km²</i>
				DESA	KELURAHAN	DESA + KELURAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	5,259.36	15	218	11	229	330,078	82,520	4	63
2	INDRAGIRI HULU	7,723.80	14	178	16	194	449,531	112,383	4	58
3	INDRAGIRI HILIR	12,614.78	20	197	39	236	749,813	187,453	4	59
4	PELALAWAN	12,758.45	12	104	14	118	507,074	126,769	4	40
5	SIAK	8,275.18	14	122	9	131	502,199	125,550	4	61
6	KAMPAR	10,983.47	21	242	8	250	890,211	222,553	4	81
7	ROKAN HULU	7,588.13	16	139	9	148	718,321	179,580	4	95
8	BENGKALIS	6,975.41	11	136	19	155	579,430	144,858	4	83
9	ROKAN HILIR	8,881.59	18	160	38	198	731,783	182,946	4	82
10	MERANTI	3,707.84	9	98	5	103	186,629	46,657	4	50
11	PEKANBARU	632.27	12	-	83	83	1,169,070	292,268	4	1849
12	DUMAI	1,623.38	7	-	33	33	314,166	78,542	4	194
JUMLAH (KAB/KOTA)		87,023.66	169	1594	284	1878	7,128,305	1,782,076	4	82

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten/Kota

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	387,873	372,754	760,627	104.06
2	5 - 9	370,432	356,096	726,528	104.03
3	10 - 14	337,006	318,565	655,571	105.79
4	15 - 19	317,500	303,130	620,630	104.74
5	20 - 24	306,352	295,718	602,070	103.60
6	25 - 29	321,823	312,372	634,195	103.03
7	30 - 34	305,830	294,167	599,997	103.96
8	35 - 39	284,946	278,011	562,957	102.49
9	40 - 44	269,080	251,816	520,896	106.86
10	45 - 49	229,485	206,570	436,055	111.09
11	50 - 54	180,535	161,308	341,843	111.92
12	55 - 59	134,024	121,134	255,159	110.64
13	60 - 64	93,589	84,794	178,383	110.37
14	65 - 69	57,163	52,598	109,761	108.68
15	70 - 74	31,086	32,251	63,337	96.39
16	75+	27,237	33,058	60,295	0.00
JUMLAH		3,653,963	3,474,342	7,128,305	105.17
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)			50		

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Riau

TABEL 3

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF
DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	VARIABEL	JUMLAH			PERSENTASE		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+ PEREMPUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS	2,569,572	2,437,411	5,006,983			
2	PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF	1,092,839	941,816	2,034,655	42.53	38.64	40.64
3	PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN :						
	a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD	263,895	341,969	605,864	10.27	14.03	12.10
	b. SD/MI	594,085	561,336	1,155,421	23.12	23.03	23.08
	c. SMP/ MTs	619,010	592,291	1,211,301	24.09	24.30	24.19
	d. SMA/ MA	712,285	585,466	1,297,751	27.72	24.02	25.92
	e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	160,084	95,303	255,387	6.23	3.91	5.10
	f. DIPLOMA I/DIPLOMA II	10,278	15,356	25,634	0.40	0.63	0.51
	g. AKADEMI/DIPLOMA III	26,210	64,348	90,557	1.02	2.64	1.81
	h. UNIVERSITAS/DIPLOMA IV, S2/S3 (MASTER/DOKTOR)	183,981	181,343	365,325	7.16	7.44	7.30

Sumber: BPS Provinsi Riau

TABEL 4

JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						
		KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUMAH SAKIT								
1	RUMAH SAKIT UMUM	1	3	15	4	2	36	61
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	0	1	0	0	0	12	13
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA								
1	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	106	0	0	0	106
	- JUMLAH TEMPAT TIDUR	0	0	594	0	0	0	594
2	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	122	0	0	0	122
3	PUSKESMAS KELILING	0	0	202	0	0	0	202
4	PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	981	0	0	0	981
SARANA PELAYANAN LAIN								
1	RUMAH BERSALIN	0	0	1	0	0	6	7
2	KLINIK PRATAMA	0	0	0	0	0	566	566
3	KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	29	29
4	BALAI PENGOBATAN	0	0	0	0	0	11	11
5	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	0	0	0	0	0	6	6
6	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	0	0	0	0	0	964	964
7	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	0	0	0	0	0	350	350
8	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	0	0	0	0	0	65	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0	0	332	332
10	BANK DARAH RUMAH SAKIT	0	0	2	0	0	3	5
11	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	8	0	0	1	9
12	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	0	0	0	11	11
SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN								
1	INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	0	0	0
2	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	2	2
3	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	1	1
4	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
5	PEDAGANG BESAR FARMASI	0	0	0	0	4	42	46
6	APOTEK	0	0	0	0	17	682	699
7	APOTEK PRB	0	0	0	0	14	0	14
8	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	473	473
9	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	11	11
10	PIRT	0	0	0	0	0	1819	1,819
11	KOSMETIK	0	0	0	0	0	2	2
12	PENYALUR ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	3	43	46

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 5

JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama									
1	KUANTAN SINGINGI	1,100	586	79,273	0	0	1,701	0	0	1
2	INDRAGIRI HULU	66,676	71,552	136,866	1,203	1,254	4,385	235	159	427
3	INDRAGIRI HILIR	62,142	144,157	94,015	1,982	2,273	1,364	621	298	282
4	PELALAWAN	78,022	72,576	279,741	566	630	820	526	410	936
5	SIAK	120,501	43,742	272,391	954	844	6,142	196	189	385
6	KAMPAR	103,079	101,854	170,154	1,904	1,907	1,118	401	234	640
7	ROKAN HULU	36,085	40,783	169,107	416	453	2,038	1,322	2,191	8,270
8	BENGKALIS	9,646	9,639	205,855	76	73	835	2,342	1,325	1,127
9	ROKAN HILIR	127,812	137,331	260,802	2,585	2,619	5,204	247	237	484
10	MERANTI	53,630	81,046	153,699	401	490	886	232	101	350
11	PEKANBARU	107,751	154,505	452,150	120	238	878	772	491	1,496
12	DUMAI	33,018	41,833	117,860	238	372	1,721	2,585	1,265	217
SUB JUMLAH I		799,462	899,604	2,391,913	10,445	11,153	27,092	9,479	6,900	14,615
B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut									
1	KUANTAN SINGINGI	172	118	0	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	24,254	36,498	60,752	4,779	8,525	13,304	-	-	-
3	INDRAGIRI HILIR	35,149	38,779	167,950	5,887	7,486	13,373	216	102	318
4	PELALAWAN	45,554	46,640	77,992	9,112	66,380	75,492	2	4	6
5	SIAK	23,381	27,819	51,200	2,989	4,579	7,568	-	-	-
6	KAMPAR	45,465	54,852	95,924	4,840	9,066	13,906	1,571	1,584	3,155
7	ROKAN HULU	195,944	237,399	433,343	15,415	19,216	34,631	502	307	809
8	BENGKALIS	93,736	104,686	433,343	9,514	11,568	21,082	374	281	655
9	ROKAN HILIR	23,392	13,174	36,566	3,275	4,992	8,267	461	174	635
10	MERANTI	19,102	25,862	46,615	2,485	4,709	7,194	36	3	39
11	PEKANBARU	794,840	980,410	2,113,002	61,388	81,773	143,161	18,642	12,948	31,590
12	DUMAI	63,807	50,055	138,078	6,329	9,556	15,885	796	610	1,406
SUB JUMLAH II		1,364,796	1,616,292	3,654,765	126,013	227,850	353,863	22,600	16,013	38,613
JUMLAH (KAB/KOTA)		2,164,258	2,515,896	6,046,678	136,458	239,003	380,955	32,079	22,913	53,228
JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		3,574,942	3,396,803	6,971,745	3,574,942	3,396,803	6,971,745			
CAKUPAN KUNJUNGAN (%)		60.54	74.07	86.73	3.82	7.04	5.46			

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

TABEL 6

PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR) LEVEL I
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)	JUMLAH FASYANKES	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	RUMAH SAKIT UMUM	58	58	100.0
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	16	16	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		74	74	100.0

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Tabel 7

ANGKA KEMATIAN KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE KELUAR (HIDUP + MATI)			PASIE KELUAR MATI			PASIE KELUAR MATI			Gross Death Rate			Net Death Rate		
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	RS Umum Daerah Teluk kuantan	109	1,564	1,383	2,947	125	121	246	75	77	152	79.9	87.5	83.5	48.0	55.7	51.6
2	RS Ibu dan Anak Milano	45	1,192	3,990	5,182	13	20	33	1	4	5	10.9	5.0	6.4	0.84	1.00	0.96
3	RS RS Umum Daerah Indrasari Rengat	195	2,983	3,761	6,744	286	265	551	103	112	215	95.9	70.5	81.7	34.53	29.78	31.88
4	RS umum Kasih Ibu Rengat	53	1,290	3,190	4,480	44	53	97	3	4	7	34.1	16.6	21.7	2.33	1.25	1.56
5	RS Ibu dan Anak Safira	31	457	1,574	2,031	0	1	1	0	0	0	0.0	0.6	0.5	0.00	0.00	0.00
6	RS Umum Daerah Puri Husada	186	5,344	6,369	11,713	383	295	678	186	159	345	71.7	46.3	57.9	34.81	24.96	29.45
7	RS Umum Daerah Raja Musa	39	153	306	459	3	4	7	2	0	2	19.6	13.1	15.3	13.07	0.00	4.36
8	RS umum Daerah Tengku Sulung	32	137	144	281	4	7	11	2	0	2	29.2	48.6	39.1	14.60	0.00	7.12
9	RS Umum 3M Plus	52	322	334	656	5	6	11	4	4	8	15.5	18.0	16.8	12.42	11.98	12.20
10	RS Umum Daerah Selasih Riau	153	1,501	2,185	3,686	52	49	101	21	17	38	34.6	22.4	27.4	13.99	7.78	10.31
11	RS Umum Efarina	238	4,312	5,953	10,265	109	82	191	45	40	85	25.3	13.8	18.6	10.44	6.72	8.28
12	RS Umum Medicare Sorek	60	1,886	2,727	4,613	10	9	19	5	4	9	5.3	3.3	4.1	2.65	1.47	1.95
13	RS Umum Amalia Medika	66	1,087	1,885	2,972	32	42	74	8	7	15	29.4	22.3	24.9	7.36	3.71	5.05
14	RS Umum Daerah Tengku Raff'an Siak Sri Indrapura	150	2,476	3,980	6,456	144	109	253	68	56	124	58.2	27.4	39.2	27.46	14.07	19.21
15	RS Type D Perawang	21	63	148	211	3	0	3	1	1	2	47.6	0.0	14.2	15.87	6.76	9.48
16	RS umum Daerah Bangkinang	134	2,419	3,107	5,526	217	190	407	81	86	167	89.7	61.2	73.7	33.48	27.68	30.22
17	RS Umum Tandun	50	685	460	1,145	3	3	6	1	1	2	4.4	6.5	5.2	1.46	2.17	1.75
18	RS Umum Mesra	35	930	1,395	2,325	8	10	18	3	3	6	8.6	7.2	7.7	3.23	2.15	2.58
19	RS Ibu Anak Husada Bunda	26	760	1,140	1,900	3	3	6	0	0	0	3.9	2.6	3.2	0.00	0.00	0.00
20	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	29	182	714	896	1	0	1	0	0	0	5.5	0.0	1.1	0.00	0.00	0.00
21	RS ibu Anak Norfa Husada	30	650	2,373	3,023	3	6	9	0	0	0	4.6	2.5	3.0	0.00	0.00	0.00
22	RS Umum Daerah Rokan Hulu	130	2,459	3,879	6,338	170	170	340	28	34	62	69.1	43.8	53.6	11.39	8.77	9.78
23	RS umum Awal Bros ujung Batu	100	2,387	3,425	5,812	91	76	167	11	22	33	38.1	22.2	28.7	4.61	6.42	5.68
24	RS Umum Azzahra	45	530	670	1,200	0	5	5	7	5	12	0.0	7.5	4.2	13.21	7.46	10.00
25	RS Umum Surya Insani	55	1,861	3,186	5,047	28	32	60	18	9	27	15.0	10.0	11.9	9.67	2.82	5.35
26	RS Ibu dan Anak Harapan Medika	25	31	649	680	1	1	2	1	1	2	32.3	1.5	2.9	32.26	1.54	2.94
27	RS Umum Daerah Bengkalis	231	3,104	4,956	8,060	114	100	214	64	45	109	36.7	20.2	26.6	20.62	9.08	13.52
28	RS Umum Daerah Kec. Mandau	199	3,669	3,112	6,781	152	136	288	103	78	181	41.4	43.7	42.5	28.07	25.06	26.69
29	RS umum Mutia Sari	60	1,640	1,985	3,625	9	9	18	6	7	13	5.5	4.5	5.0	3.66	3.53	3.59
30	RS Umum PT. Chevron pacific Indonesia	16	61	70	131	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
31	RS Umum Thursina	49	1,360	1,614	2,974	12	16	28	2	0	2	8.8	9.9	9.4	1.47	0.00	0.67
32	RS Umum Permata Hati	102	2,730	4,304	7,034	80	84	164	39	46	85	29.3	19.5	23.3	14.29	10.69	12.08
33	RS Umum Aad	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RS Umum Agung	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RS Umum Indah	74	1,074	894	1,968	11	4	15	9	4	13	10.2	4.5	7.6	8.38	4.47	6.61
36	RS Umum Cahaya	50	1,225	1,983	3,208	39	44	83	8	10	18	31.8	22.2	25.9	6.53	5.04	5.61
37	RS Umum Regita Medika	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	RS Ibunda	48	712	1,010	1,722	37	43	80	21	16	37	52.0	42.6	46.5	29.49	15.84	21.49
39	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo bagan Siapiapi	117	2,541	4,119	6,660	143	99	242	41	52	93	56.3	24.0	36.3	16.14	12.62	13.96
40	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	139	2,451	4,409	6,860	67	73	140	26	29	55	27.3	16.6	20.4	10.61	6.58	8.02
41	RS Umum Daerah Arifin Achmad	505	11,125	8,254	19,379	863	829	1,692	549	314	863	77.6	100.4	87.3	49.35	38.04	44.53
42	RS TK. IV Pekanbaru	50	304	804	1,108	2	3	5	1	2	3	6.6	3.7	4.5	3.29	2.49	2.71
43	RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau	61	812	744	1,556	42	30	72	29	22	51	51.7	40.3	46.3	35.71	29.57	32.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	RS Santa Maria Pekanbaru	200	3,958	3,432	7,390	168	64	232	57	29	86	42.4	18.6	31.4	14.40	8.45	11.64
45	RS Umum Eka Hospital pekanbaru	160	3,974	4,480	8,454	115	56	171	108	56	164	28.9	12.5	20.2	27.18	12.50	19.40
46	RS Umum Syafira	189	4,218	5,479	9,697	162	110	272	87	55	142	38.4	20.1	28.0	20.63	10.04	14.64
47	RS Umum Daerah Petala Bumi	76	784	1,066	1,850	42	43	85	19	17	36	53.6	40.3	45.9	24.23	15.95	19.46
48	RS Umum Islam Ibnu Sina	152	2,359	2,928	5,287	139	171	310	67	81	148	58.9	58.4	58.6	28.40	27.66	27.99
49	RS Prof. Dr. Tabrani	49	832	904	1,736	17	21	38	12	19	31	20.4	23.2	21.9	14.42	21.02	17.86
50	RS Umum Bina Kasih	54	921	2,253	3,174	40	19	59	8	8	16	43.4	8.4	18.6	8.69	3.55	5.04
51	RSU RNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	50	75	118	193	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
52	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	250	4,866	4,803	9,669	209	163	372	138	118	256	43.0	33.9	38.5	28.36	24.57	26.48
53	RS Umum Lancang Kuning	52	230	551	781	4	3	7	2	5	7	17.4	5.4	9.0	8.70	9.07	8.96
54	RS Umum Pekanbaru Medical Center	103	2,648	2,620	5,268	120	114	234	36	30	66	45.3	43.5	44.4	13.60	11.45	12.53
55	RS Umum Sansani	124	2,231	4,043	6,274	115	157	272	72	43	115	51.5	38.8	43.4	32.27	10.64	18.33
56	RS Awal Bros A. Yani	201	3,821	5,362	9,183	158	115	273	81	56	137	41.4	21.4	29.7	21.20	10.44	14.92
57	RS JMB Pekanbaru	22	149	110	259	0	1	1	0	1	1	0.0	9.1	3.9	0.00	9.09	3.86
58	RS Awal Bros Panam	186	5,381	5,758	11,139	134	94	228	97	58	155	24.9	16.3	20.5	18.03	10.07	13.92
59	RS Universitas Riau	52	8	16	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
60	RS Umum Aulia Hospital	178	3,999	4,954	8,953	101	158	259	18	21	39	25.3	31.9	28.9	4.50	4.24	4.36
61	RS Umum Prima Pekanbaru	179	9,677	9,476	19,153	100	93	193	18	93	111	10.3	9.8	10.1	1.86	9.81	5.80
62	RS Daerah Madani Kota Pekanbaru	39	130	175	305	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
63	RS Hermina Pekanbaru	50	213	279	492	22	17	39	10	5	15	103.3	60.9	79.3	46.95	17.92	30.49
64	RS Jiwa Tampan	250	1,419	429	1,848	1	0	1	0	0	0	0.7	0.0	0.5	0.00	0.00	0.00
65	RS Ibu dan Anak Eria Bunda	88	237	2,752	2,989	3	3	6	1	1	2	12.7	1.1	2.0	4.22	0.36	0.67
66	RS Ibu Dan Anak Andini	34	19	2,018	2,037	1	6	7	1	1	2	52.6	3.0	3.4	52.63	0.50	0.98
67	RS Ibu dan Anak Annisa	27	482	2,037	2,519	3	4	7	0	0	0	6.2	2.0	2.8	0.00	0.00	0.00
68	RS Ibu dan Anak Zainab	74	2,051	3,183	5,234	4	5	9	1	2	3	2.0	1.6	1.7	0.49	0.63	0.57
69	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	25	74	56	130	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
70	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	20	311	217	528	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
71	RS Ibu dan Anak Budhi Mulia	36	191	890	1,081	2	3	5	1	2	3	10.5	3.4	4.6	5.24	2.25	2.78
72	RS Umum Daerah Kota Dumai	323	5,747	8,801	14,548	363	305	668	219	205	424	63.2	34.7	45.9	38.11	23.29	29.14
73	RS Pertamina Dumai	36	578	852	1,430	12	11	23	5	5	10	20.8	12.9	16.1	8.65	5.87	6.99
74	RS Bhayangkara Dumai	23	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
JUMLAH (KABKOTA)		7,173	132,056	177,229	309,285	5,344	4,765	10,109	2,630	2,182	4,812	40.5	26.9	32.7	19.92	12.31	15.56

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: ^a termasuk rumah sakit swasta

TABEL 8

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE N KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RS Umum Daerah Teluk kuantan	109	2,947	8,901	11,030	22.4	27.0	10.5	3.7
2	RS Ibu dan Anak Milano	45	5,182	16,012	15,664	97.5	115.2	0.1	3.0
3	RS RS Umum Daerah Indrasari Rengat	195	6,744	25,515	22,833	35.85	34.58	6.77	3.39
4	RS umum Kasih Ibu Rengat	53	4,480	11,350	13,225	58.67	84.53	1.78	2.95
5	RS Ibu dan Anak Safira	31	2,031	3,418	2,454	30.21	65.52	3.89	1.21
6	RS Umum Daerah Puri Husada	186	11,713	52,250	47,630	77.0	63.0	1.3	4.1
7	RS Umum Daerah Raja Musa	39	459	4,137	4,137	29.1	11.8	22.0	9.0
8	RS umum Daerah Tengku Sulung	32	281	1,008	1,329	8.6	8.8	38.0	4.7
9	RS Umum 3M Plus	52	656	1,250	1,890	6.6	12.6	27.0	2.9
10	RS Umum Daerah Selasih Riau	153	3,686	14,658	11,018	26.2	24.1	11.2	3.0
11	RS Umum Efarina	238	10,265	40,881	30,913	47.1	43.1	4.5	3.0
12	RS Umum Medicare Sorek	60	4,613	8,616	11,659	39.3	76.9	2.9	2.5
13	RS Umum Amalia Medika	66	2,972	9,267	8,938	38.5	45.0	5.0	3.0
14	RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura	150	6,456	24,469	18,128	44.7	43.0	4.7	2.8
15	RS Type D Perawang	21	211	580	228	7.6	10.0	33.6	1.1
16	RS umum Daerah Bangkinang	134	5,526	25,546	19,136	52.23	41.24	4.23	3.46
17	RS Umum Tandun	50	1,145	6,904	5,469	37.83	22.90	9.91	4.78
18	RS Umum Mesra	35	2,325	5,193	6,960	40.65	66.43	3.26	2.99
19	RS Ibu Anak Husada Bunda	26	1,900	4,890	1,589	51.528	73.077	2.421	0.836
20	RS Ibu Anak Bunda Anisyah	29	896	3,433	1,789	32.43	30.90	7.98	2.00
21	RS ibu Anak Norfa Husada	30	3,023	8,027	8,027	73.31	100.77	0.97	2.66
22	RS Umum Daerah Rokan Hulu	130	6,338	21,461	28,381	45.23	48.75	4.10	4.48
23	RS umum Awal Bros ujung Batu	100	5,812	18,030	29,110	49.40	58.12	3.18	5.01
24	RS Umum Azzahra	45	1,200	3,674	2,733	22.4	26.7	10.6	2.3
25	RS Umum Surya Insani	55	5,047	14,454	10,045	72.00	91.76	1.11	1.99
26	RS Ibu dan Anak Harapan Medika	25	680	1,563	1,563	17.13	27.20	11.12	2.30
27	RS Umum Daerah Bengkalis	231	8,060	45,701	33,705	54.20	34.89	4.79	4.18
28	RS Umum Daerah Kec. Mandau	199	6,781	23,977	24,916	33.01	34.08	7.18	3.67
29	RS umum Mutia Sari	60	3,625	1,168	9,877	5.33	60.42	5.72	2.72

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
30	RS Umum PT. Chevron pacific Indonesia	16	131	429	407	7.35	8.19	41.31	3.11
31	RS Umum Thursina	49	2,974	4,487	26	25.09	60.69	4.51	0.01
32	RS Umum Permata Hati	102	7,034	23,348	20,164	62.71	68.96	1.97	2.87
33	RS Umum Aad	10	-	-	-	-	-	-	-
34	RS Umum Agung	12	-	-	-	-	-	-	-
35	RS Umum Indah	74	1,968	7,872	55	29.1	26.6	9.7	0.0
36	RS Umum Cahaya	50	3,208	5,981	8,760	32.8	64.2	3.8	2.7
37	RS Umum Regita Medika	59	-	-	-	-	-	-	-
38	RS Ibunda	48	1,722	365	5,166	2.1	35.9	0.0	0.0
39	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo bagan Siapiapi	117	6,660	18,674	20,377	43.7	56.9	3.6	3.1
40	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	139	6,860	14,560	14,901	28.7	49.4	5.3	2.2
41	RS Umum Daerah Arifin Achmad	505	19,379	108,334	95,179	58.8	38.4	3.9	4.9
42	RS TK. IV Pekanbaru	50	1,108	2,856	2,856	15.6	22.2	13.9	2.6
43	RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau	61	1,556	6,513	4,957	29.3	25.5	10.1	3.2
44	RS Santa Maria Pekanbaru	200	7,390	30,272	30,014	41.5	37.0	5.8	4.1
45	RS Umum Eka Hospital pekanbaru	160	8,454	37,869	36,697	64.8	52.8	2.4	4.3
46	RS Umum Syafira	189	9,697	32,110	38,426	46.5	51.3	3.8	4.0
47	RS Umum Daerah Petala Bumi	76	1,850	6,261	6,266	22.6	24.3	11.6	3.4
48	RS Umum Islam Ibnu Sina	152	5,287	18,220	15,958	32.8	34.8	7.0	3.0
49	RS Prof. Dr. Tabrani	49	1,736	6,011	5,802	33.6	35.4	6.8	3.3
50	RS Umum Bina Kasih	54	3,174	5,101	7,054	25.9	58.8	4.6	2.2
51	RSU RNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	50	193	1,282	1,282	7.0	3.9	87.9	6.6
52	RS Umum Awal Bros Pekanbaru	250	9,669	46,848	48,195	51.3	38.7	4.6	5.0
53	RS Umum Lancang Kuning	52	781	6,667	5,605	35.1	15.0	15.8	7.2
54	RS Umum Pekanbaru Medical Center	103	5,268	1,679	14,025	4.5	51.1	6.8	2.7
55	RS Umum Sansani	124	6,274	19,749	22,143	43.6	50.6	4.1	3.5
56	RS Awal Bros A. Yani	201	9,183	34,006	37,467	46.4	45.7	4.3	4.1
57	RS JMB Pekanbaru	22	259	269	269	3.3	11.8	30.0	1.0
58	RS Awal Bros Panam	186	11,139	37,307	46,862	55.0	59.9	2.7	4.2
59	RS Universitas Riau	52	24	139	122	0.7	0.5	785.0	5.1
60	RS Umum Aulia Hospital	178	8,953	36,527	35,744	56.2	50.3	3.2	4.0
61	RS Umum Prima Pekanbaru	179	19,153	40,947	39,838	62.7	107.0	1.3	2.1
62	RS Daerah Madani Kota Pekanbaru	39	305	3,510	3,183	24.7	7.8	0.0	0.0
63	RS Hermina Pekanbaru	50	492	2,480	2,928	13.6	9.8	32.1	6.0
64	RS Jiwa Tampan	250	1,848	79,917	78,069	87.6	7.4	6.1	42.2

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIE KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
65	RS Ibu dan Anak Eria Bunda	88	2,989	5,848	5,880	18.2	34.0	8.8	2.0
66	RS Ibu Dan Anak Andini	34	2,037	4,496	4,413	36.2	59.9	3.9	2.2
67	RS Ibu dan Anak Annisa	27	2,519	4,578	4,414	46.5	93.3	2.1	1.8
68	RS Ibu dan Anak Zainab	74	5,234	10,654	9,940	39.4	70.7	3.1	1.9
69	RS Khusus Mata Pekanbaru Eye Center	25	130	181	181	2.0	5.2	68.8	1.4
70	RS Khusus Mata SMEC Pekanbaru	20	528	1,215	696	16.6	26.4	11.5	1.3
71	RS Ibu dan Anak Budhi Mulia	36	1,081	2,784	1,690	21.2	30.0	9.6	1.6
72	RS Umum Daerah Kota Dumai	323	14,548	74,886	70,815	63.5	45.0	3.0	4.9
73	RS Pertamina Dumai	36	1,430	6,068	5,511	46.2	39.7	4.9	3.9
74	RS Bhayangkara Dumai	23	6	60	54	0.7	0.3	1389.2	9.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		7173	309,285	1,157,693	1,136,767	44.2	43.12	4.7	3.7

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: termasuk rumah sakit swasta

TABEL 9

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL	
			memiliki obat dan vaksin esensial $\geq 80\%$	memiliki obat dan vaksin esensial $< 80\%$
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	23	16	7
2	INDRAGIRI HULU	20	20	0
3	INDRAGIRI HILIR	26	26	0
4	PELALAWAN	14	12	2
5	SIAK	15	15	0
6	KAMPAR	31	31	0
7	ROKAN HULU	21	21	0
8	BENGKALIS	18	18	0
9	ROKAN HILIR	19	19	0
10	MERANTI	10	10	0
11	PEKANBARU	21	21	0
12	DUMAI	10	10	0
JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL		228	219	9
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR				228
% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL				96.1

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: *) beri tanda "V" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial $\geq 80\%$

*) beri tanda "X" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial $< 80\%$

*) jika puskesmas tersebut tidak melapor, mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"

TABEL 10

JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM* MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF (PURI)*		JUMLAH POSBINDU PTM**
		PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KUANTAN SINGINGI	100	26.1	211	55.1	40	10.4	32	8.4	383	72	18.8	92
2	INDRAGIRI HULU	127	31.7	227	56.6	38	9.5	9	2.2	401	47	11.7	166
3	INDRAGIRI HILIR	88	14.4	309	50.7	169	27.8	43	7.1	609	212	34.8	72
4	PELALAWAN	31	8.6	160	44.3	116	32.1	54	15.0	361	170	47.1	98
5	SIAK	3	0.7	176	41.7	183	43.4	60	14.2	422	243	57.6	53
6	KAMPAR	172	21.8	172	21.8	312	39.5	133	16.9	789	445	56.4	172
7	ROKAN HULU	35	5.7	107	17.4	328	53.4	144	23.5	614	472	76.9	145
8	BENGKALIS	112	21.9	292	57.1	96	18.8	11	2.2	511	107	20.9	27
9	ROKAN HILIR	68	12.1	347	61.6	98	17.4	50	8.9	563	148	26.3	37
10	MERANTI	7	2.8	78	30.7	157	61.8	12	4.7	254	169	66.5	74
11	PEKANBARU	9	1.4	187	28.5	459	70.1	0	0.0	655	459	70.1	60
12	DUMAI	0	0.0	0	0.0	4	2.0	193	98.0	197	197	100.0	30
JUMLAH (KAB/KOTA)		752	13.1	2,266	39.3	2000	34.7	741	12.9	5,759	2,741	47.6	1,026
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA										0.8			

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

*PURI: Purnama Mandiri

**PTM: Penyakit Tidak Menular

TABEL 11

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DR SPESIALIS			DOKTER UMUM			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A PUSKESMAS																			
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	13	39	52	13	39	52	5	14	19	0	0	0	5	14	19
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	25	47	72	25	47	72	2	15	17	0	0	0	2	15	17
3	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	19	45	64	19	45	64	2	21	23	0	0	0	2	21	23
4	PELALAWAN	0	0	0	12	49	61	12	49	61	3	23	26	0	0	0	3	23	26
5	SIAK	0	0	0	26	53	79	26	53	79	3	16	19	0	0	0	3	16	19
6	KAMPAR	0	0	0	29	83	112	29	83	112	8	44	52	0	0	0	8	44	52
7	ROKAN HULU	0	0	0	12	37	49	12	37	49	2	17	19	0	0	0	2	17	19
8	BENGKALIS	0	0	0	28	87	115	28	87	115	7	32	39	0	0	0	7	32	39
9	ROKAN HILIR	0	0	0	39	88	127	39	88	127	4	18	22	0	0	0	4	18	22
10	MERANTI	0	0	0	21	32	53	21	32	53	3	6	9	0	0	0	3	6	9
11	PEKANBARU	0	0	0	17	94	111	17	94	111	11	50	61	0	0	0	11	50	61
12	DUMAI	0	0	0	15	44	59	15	44	59	0	14	14	0	0	0	0	14	14
JUMLAH PUSKESMAS		0	0	0	256	698	954	256	698	954	50	270	320	0	0	0	50	270	320
B RUMAH SAKIT																			
1	KUANTAN SINGINGI	9	4	13	7	12	19	16	16	32	2	2	4	0	0	0	2	2	4
2	INDRAGIRI HULU	16	6	22	19	25	44	35	31	66	0	2	2	1	2	3	1	4	5
3	INDRAGIRI HILIR	19	12	31	18	31	49	37	43	80	0	3	3	0	0	0	0	3	3
4	PELALAWAN	22	11	33	19	30	49	41	41	82	1	5	6	0	1	1	1	6	7
5	SIAK	15	11	26	16	27	43	31	38	69	2	9	11	0	0	0	2	9	11
6	KAMPAR	17	18	35	20	49	69	37	67	104	2	4	6	0	0	0	2	4	6
7	ROKAN HULU	25	14	39	23	39	62	48	53	101	2	5	7	1	1	2	3	6	9
8	BENGKALIS	45	38	83	33	58	91	78	96	174	2	16	18	1	0	1	3	16	19
9	ROKAN HILIR	23	9	32	14	21	35	37	30	67	2	2	4	0	0	0	2	2	4
10	MERANTI	4	6	10	6	9	15	10	15	25	2	2	4	0	0	0	2	2	4
11	PEKANBARU	313	224	537	224	422	646	537	646	1,183	28	87	115	9	20	29	37	107	144
12	DUMAI	19	13	32	25	38	63	44	51	95	2	6	8	1	1	2	3	7	10
JUMLAH RUMAH SAKIT		527	366	893	424	761	1,185	951	1,127	2,078	45	143	188	13	25	38	58	168	226
JUMLAH (KAB/KOTA)^b		527	366	893	680	1,459	2,139	1,207	1,825	3,032	95	413	508	13	25	38	108	438	546
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK^b				12.5		30.0			42.5		7.1		0.5		7.7				

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 12

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PERAWAT ^a			BIDAN
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
A PUSKESMAS					
1	KUANTAN SINGINGI	38	121	159	298
2	INDRAGIRI HULU	108	216	324	578
3	INDRAGIRI HILIR	187	351	538	781
4	PELALAWAN	69	169	238	451
5	SIAK	68	284	352	422
6	KAMPAR	134	390	524	749
7	ROKAN HULU	69	142	211	441
8	BENGGALIS	61	193	254	257
9	ROKAN HILIR	188	428	616	724
10	MERANTI	31	152	183	269
11	PEKANBARU	42	101	143	204
12	DUMAI	11	238	249	185
JUMLAH PUSKESMAS		1,006	2,785	3,791	5,359
B RUMAH SAKIT					
1	KUANTAN SINGINGI	26	81	107	10
2	INDRAGIRI HULU	64	145	209	74
3	INDRAGIRI HILIR	62	185	247	113
4	PELALAWAN	51	154	205	112
5	SIAK	47	136	183	88
6	KAMPAR	98	200	298	106
7	ROKAN HULU	55	124	179	108
8	BENGGALIS	130	1,372	1,502	271
9	ROKAN HILIR	83	108	191	110
10	MERANTI	35	74	109	51
11	PEKANBARU	792	2,617	3,409	714
12	DUMAI	83	108	191	137
JUMLAH RUMAH SAKIT		1,526	5,304	6,830	1,894
JUMLAH (KAB/KOTA) ^b		2,532	8,089	10,621	7,253
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK ^b		35.5	113.5	149.0	101.7

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3; b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 13

**JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	KESEHATAN MASYARAKAT			KESEHATAN LINGKUNGAN			GIZI		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PUSKESMAS									
1	KUANTAN SINGINGI	9	13	22	4	15	19	3	28	31
2	INDRAGIRI HULU	18	45	63	4	14	18	1	19	20
3	INDRAGIRI HILIR	17	43	60	4	16	20	3	23	26
4	PELALAWAN	15	46	61	3	9	12	2	20	22
5	SIAK	7	41	48	13	16	29	1	25	26
6	KAMPAR	27	33	60	6	13	19	1	19	20
7	ROKAN HULU	23	44	67	4	8	12	2	20	22
8	BENGKALIS	4	29	33	2	14	16	2	25	27
9	ROKAN HILIR	16	49	65	10	5	15	4	19	23
10	MERANTI	9	17	26	4	8	12	1	13	14
11	PEKANBARU	8	61	69	6	23	29	0	45	45
12	DUMAI	3	26	29	2	10	12	0	17	17
JUMLAH PUSKESMAS		156	447	603	62	151	213	20	273	293
B	RUMAH SAKIT									
1	KUANTAN SINGINGI	1	1	2	0	0	0	0	2	2
2	INDRAGIRI HULU	1	1	2	0	1	1	0	4	4
3	INDRAGIRI HILIR	3	9	12	0	1	1	3	13	16
4	PELALAWAN	1	4	5	1	3	4	0	6	6
5	SIAK	3	12	15	1	3	4	0	17	17
6	KAMPAR	9	21	30	1	1	2	2	17	19
7	ROKAN HULU	2	15	17	0	0	0	2	3	5
8	BENGKALIS	8	30	38	1	6	7	0	21	21
9	ROKAN HILIR	13	11	24	1	1	2	0	10	10
10	MERANTI	3	3	6	2	1	3	0	3	3
11	PEKANBARU	7	41	48	5	16	21	3	86	89
12	DUMAI	3	15	18	0	0	0	0	14	14
JUMLAH RUMAH SAKIT		54	163	217	12	33	45	10	196	206
JUMLAH (KAB/KOTA)^a		210	610	820	74	184	258	30	469	499
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		2.95	8.56	11.50	1.04	2.58	3.62	0.42	6.58	7.00

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 14

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	AHLI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISAN MEDIK		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PUSKESMAS												
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	6	10
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	21
3	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	17	17
4	PELALAWAN	0	0	0	0	0	0	22	0	22	1	6	7
5	SIAK	0	0	0	0	0	0	17	0	17	4	18	22
6	KAMPAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	29
7	ROKAN HULU	0	0	0	0	0	0	0	8	8	2	10	12
8	BENGKALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9
9	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	3	17	20	2	15	17
12	MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	19	20
10	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	13
11	DUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33	35
JUMLAH PUSKESMAS		0	0	0	0	0	0	43	31	74	27	185	212
B	RUMAH SAKIT												
1	KUANTAN SINGINGI	1	2	3	8	5	13	1	4	5	4	5	9
2	INDRAGIRI HULU	1	11	12	6	14	20	2	2	4	1	5	6
3	INDRAGIRI HILIR	4	17	21	12	27	39	1	11	12	14	20	34
4	PELALAWAN	0	7	7	9	14	23	1	12	13	3	10	13
5	SIAK	6	17	23	12	21	33	3	9	12	7	11	18
6	KAMPAR	1	14	15	3	21	24	1	8	9	5	14	19
7	ROKAN HULU	2	15	17	9	21	30	1	8	9	10	9	19
8	BENGKALIS	5	33	38	19	54	73	6	13	19	17	31	48
9	ROKAN HILIR	0	5	5	5	8	13	2	1	3	6	7	13
10	MERANTI	0	10	10	3	15	0	1	5	6	3	6	9
11	PEKANBARU	58	242	300	130	329	459	48	79	127	71	145	216
12	DUMAI	1	14	15	5	25	30	5	6	11	4	17	21
JUMLAH RUMAH SAKIT		79	387	466	221	554	757	72	158	230	145	280	425
JUMLAH (KAB/KOTA)^a		79	387	466	221	554	757	115	189	304	172	465	637
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		1.1	5.4	6.5	3.1	7.8	10.6	1.6	2.7	4.3	2.4	6.5	8.9

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 15

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KEFARMASIAN								
		TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN ^a			APOTEKER			TOTAL		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A PUSKESMAS										
1	KUANTAN SINGINGI	1	14	15	1	16	17	2	30	32
2	INDRAGIRI HULU	2	16	18	5	16	21	7	32	39
3	INDRAGIRI HILIR	0	19	19	4	7	11	4	26	30
4	PELALAWAN	6	19	25	2	10	12	8	29	37
5	SIAK	5	32	37	1	11	12	6	43	49
6	KAMPAR	1	28	29	1	10	11	2	38	40
7	ROKAN HULU	2	14	16	3	9	12	5	23	28
8	BENGKALIS	5	27	32	2	13	15	7	40	47
9	ROKAN HILIR	2	38	40	1	13	14	3	51	54
10	MERANTI	3	17	20	2	7	9	5	24	29
11	PEKANBARU	4	28	32	6	20	26	10	48	58
12	DUMAI	0	19	19	1	6	7	1	25	26
JUMLAH PUSKESMAS		31	271	302	29	138	167	60	409	469
B RUMAH SAKIT										
1	KUANTAN SINGINGI	1	8	9	2	6	8	3	14	17
2	INDRAGIRI HULU	2	14	16	1	5	6	3	19	22
3	INDRAGIRI HILIR	5	14	19	3	17	20	8	31	39
4	PELALAWAN	4	14	18	4	10	14	8	24	32
5	SIAK	1	19	20	0	9	9	1	28	29
6	KAMPAR	2	23	25	2	17	19	4	40	44
7	ROKAN HULU	8	21	29	7	15	22	15	36	51
8	BENGKALIS	9	25	34	6	32	38	15	57	72
9	ROKAN HILIR	4	54	58	1	11	12	5	65	70
10	MERANTI	2	9	11	2	8	10	4	17	21
11	PEKANBARU	37	263	300	28	184	212	65	447	512
12	DUMAI	2	23	25	2	19	21	4	42	46
JUMLAH RUMAH SAKIT		77	487	564	58	333	391	135	820	955
JUMLAH (KAB/KOTA) ^b		108	758	866	87	471	558	195	1,229	1,424
RASIO TERHADAP 100.000 PDDK		1.52	10.63	12.15	1.22	6.61	7.83	2.74	17.24	19.98

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan :

a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 16

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN									TOTAL		
		PEJABAT STRUKTURAL			TENAGA PENDIDIK			TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN			L	P	L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A PUSKESMAS													
1	KUANTAN SINGINGI	8	5	13	0	0	0	16	14	30	24	19	43
2	INDRAGIRI HULU	1	0	1	0	0	0	60	86	146	61	86	147
3	INDRAGIRI HILIR	31	17	48	0	0	0	109	94	203	140	111	251
4	PELALAWAN	3	1	4	0	0	0	79	54	133	82	55	137
5	SIAK	0	1	1	0	0	0	100	48	148	100	49	149
6	KAMPAR	12	17	29	1	0	1	71	24	95	84	41	125
7	ROKAN HULU	20	7	27	0	0	0	64	49	113	84	56	140
8	BENGKALIS	7	6	13	0	0	0	103	40	143	110	46	156
9	ROKAN HILIR	3	3	6	0	0	0	43	34	77	46	37	83
10	MERANTI	0	0	0	0	0	0	97	94	191	97	94	191
11	PEKANBARU	0	5	5	0	0	0	64	99	163	64	104	168
12	DUMAI	1	1	2	0	0	0	53	18	71	54	19	73
JUMLAH PUSKESMAS		86	63	149	1	0	1	859	654	1,513	946	717	1,663
B RUMAH SAKIT													
1	KUANTAN SINGINGI	6	6	12	0	0	0	18	23	41	24	29	53
2	INDRAGIRI HULU	7	7	14	0	0	0	96	177	273	103	184	287
3	INDRAGIRI HILIR	11	8	19	0	0	0	118	136	254	129	144	273
4	PELALAWAN	3	7	10	0	0	0	117	190	307	120	197	317
5	SIAK	6	10	16	0	0	0	175	162	337	181	172	353
6	KAMPAR	9	3	12	0	0	0	182	124	306	191	127	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ROKAN HULU	7	7	14	0	0	0	171	180	351	178	187	365
8	BENGKALIS	24	37	61	0	0	0	346	414	760	370	451	821
9	ROKAN HILIR	7	9	16	0	0	0	146	119	265	153	128	281
10	MERANTI	1	2	3	0	0	0	113	51	164	114	53	167
11	PEKANBARU	95	106	201	3	1	4	1,485	1,633	3,118	1,583	1,740	3,323
12	DUMAI	12	6	18	0	0	0	247	187	434	259	193	452
	JUMLAH RUMAH SAKIT	188	208	396	3	1	4	3,214	3,396	6,610	3,405	3,605	7,010
	JUMLAH (KAB/KOTA) ^a	274	271	545	4	1	5	4,073	4,050	8,123	4,351	4,322	8,673

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan : a) Tenaga penunjang/pendukung kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

TABEL 17

CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS JAMINAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	2	3	4
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	1,703,048	35.1
2	PBI APBD	686,931	14.2
SUB JUMLAH PBI		2,389,979	49.2
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	1,539,522	31.7
	PPU - PN	403,070	8.3
	PPU - BU	1,136,452	23.4
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	857,695	17.7
3	Bukan Pekerja (BP)	66,026	1.4
SUB JUMLAH NON PBI		2,463,243	50.8
JUMLAH (KAB/KOTA)		4,853,222	68.08

Sumber: Bidang Yankes - Dinkes Prov. Riau

TABEL 18

PERSENTASE DESA YANG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	DESA		
		JUMLAH	YG MEMANFAATKAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN	%
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	229	229	100.0
2	INDRAGIRI HULU	194	179	92.268
3	INDRAGIRI HILIR	197	197	100.0
4	PELALAWAN	104	104	100.0
5	SIAK	122	122	100.0
6	KAMPAR	250	219	87.60
7	ROKAN HULU	139	139	100.0
8	BENGKALIS	136	136	100.0
9	ROKAN HILIR	173	173	100.0
10	MERANTI	96	96	100.0
11	PEKANBARU	83	83	100.0
12	DUMAI	33	33	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,756	1,710	97.4

Sumber : Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 19

ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER :			
1	APBD KAB/KOTA	Rp 2,882,900,576,927	11.65
	a. Belanja Langsung	Rp 1,468,471,141,993	5.93
	Kuantan Singingi	Rp 69,498,800,590	
	Indragiri Hulu	Rp 88,492,858,928	
	Indragiri Hilir	Rp 177,905,461,102	
	Pelalawan	Rp 196,116,568,476	
	Siak	Rp 291,374,283,471	
	Kampar	Rp 97,607,661,075	
	Rokan Hulu	Rp 65,667,894,000	
	Bengkalis	Rp 149,535,828,600	
	Rokan Hilir	Rp 1,903,578,257	
	Kep. Meranti	Rp 48,021,286,389	
	Kota Pekanbaru	Rp 195,730,350,840	
	Kota Dumai	Rp 86,616,570,266	
	b. Belanja Tidak Langsung	Rp 891,947,326,382	3.60
	Kuantan Singingi	Rp 58,182,865,449	
	Indragiri Hulu	Rp 78,767,262,169	
	Indragiri Hilir	Rp 31,183,232,582	
	Pelalawan	Rp 77,480,095,823	
	Siak	Rp 130,038,722,824	
	Kampar	Rp 77,306,407,021	
	Rokan Hulu	Rp 142,041,170,993	
	Bengkalis	Rp 73,228,326,347	
	Rokan Hilir	Rp 1,816,414,335	
	Kep. Meranti	Rp 30,916,957,844	
	Kota Pekanbaru	Rp 109,977,720,844	
	Kota Dumai	Rp 81,008,150,151	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp 522,482,108,551	2.11
	c.1 DAK fisik	Rp 273,622,021,198	1.11
	1. Reguler	Rp 147,684,301,470	0.60
	Kuantan Singingi	Rp 7,571,250,923	
	Indragiri Hulu	Rp 12,305,014,000	
	Indragiri Hilir	Rp 17,224,615,000	
	Pelalawan	Rp 2,075,675,640	
	Siak	Rp 24,934,722,745	
	Kampar	Rp 11,236,374,000	
	Rokan Hulu	Rp 19,004,712,492	
	Bengkalis	Rp 276,270,991	
	Rokan Hilir	Rp 7,300,421,000	
	Kep. Meranti	Rp 5,082,856,000	
	Kota Pekanbaru	Rp 11,094,246,679	
	Kota Dumai	Rp 29,578,142,000	
	2. Penugasan	Rp 51,961,366,686	0.21
	Kuantan Singingi		
	Indragiri Hulu	Rp 819,760,000	
	Indragiri Hilir	Rp 1,178,525,000	
	Pelalawan	Rp 25,724,783,313	
	Siak	Rp 1,667,460,403	
	Kampar	Rp 3,537,058,000	
	Rokan Hulu	Rp 2,418,390,592	
	Bengkalis	Rp 2,226,007,000	
	Rokan Hilir	Rp 6,995,821,000	
	Kep. Meranti	Rp 1,058,006,878	
	Kota Pekanbaru	Rp 3,875,283,225	

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	Kota Dumai	Rp 2,460,271,275	
	3. Afirmasi	Rp 73,976,353,042	0.30
	Kuantan Singingi	-	
	Indragiri Hulu	-	
	Indragiri Hilir	Rp 7,617,327,000	
	Pelalawan	Rp 10,666,393,415	
	Siak	-	
	Kampar	-	
	Rokan Hulu	-	
	Bengkalis	Rp 6,738,016,000	
	Rokan Hilir	-	
	Kep. Meranti	Rp 31,426,315,627	
	Kota Pekanbaru	-	
	Kota Dumai	Rp 17,528,301,000	
	c.2 DAK non fisik	Rp 248,860,087,353	1.01
	1. BOK	Rp 181,527,412,353	0.73
	Kuantan Singingi	Rp 23,504,410,353	
	Indragiri Hulu	Rp 17,794,810,000	
	Indragiri Hilir	Rp 22,881,000,000	
	Pelalawan	Rp 10,675,282,000	
	Siak	Rp 11,421,559,000	
	Kampar	Rp 27,612,481,000	
	Rokan Hulu	Rp 15,773,324,000	
	Bengkalis	Rp 13,418,319,000	
	Rokan Hilir	Rp 10,975,016,000	
	Kep. Meranti	Rp 10,266,360,000	
	Kota Pekanbaru	Rp 11,087,505,000	
	Kota Dumai	Rp 6,117,346,000	
	2. Akreditasi	Rp 32,988,459,000	0.13
	Kuantan Singingi	Rp 2,616,362,000	
	Indragiri Hulu	Rp 17,794,810,000	
	Indragiri Hilir	Rp 1,500,000,000	
	Pelalawan	Rp 840,396,000	
	Siak	Rp 1,213,657,000	
	Kampar	Rp 1,193,650,000	
	Rokan Hulu	Rp 2,267,356,000	
	Bengkalis	Rp 1,088,755,000	
	Rokan Hilir	Rp 2,097,000,000	
	Kep. Meranti	Rp 1,168,479,000	
	Kota Pekanbaru	Rp 884,646,000	
	Kota Dumai	Rp 323,348,000	
	3. Jampersal	Rp 34,344,216,000	0.14
	Kuantan Singingi	Rp 1,355,585,000	
	Indragiri Hulu	Rp 1,013,046,000	
	Indragiri Hilir	Rp 4,888,000,000	
	Pelalawan	Rp 2,805,528,000	
	Siak	Rp 2,968,968,000	
	Kampar	Rp 2,808,106,000	
	Rokan Hulu	Rp 4,454,729,000	
	Bengkalis	Rp 3,520,693,000	
	Rokan Hilir	Rp 6,454,807,000	
	Kep. Meranti	Rp 1,690,531,000	
	Kota Pekanbaru	Rp 707,654,000	
	Kota Dumai	Rp 1,676,569,000	
2	APBN :	Rp 69,843,892,293	
	b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi	Rp 69,843,892,293	
	Kuantan Singingi	-	

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	Indragiri Hulu	Rp 23,064,112,482	
	Indragiri Hilir	-	
	Pelalawan	-	
	Siak	-	
	Kampar	Rp 30,436,414,081	
	Rokan Hulu	-	
	Bengkalis	-	
	Rokan Hilir	Rp 2,191,745,730	
	Kep. Meranti	-	
	Kota Pekanbaru	-	
	Kota Dumai	Rp 14,151,620,000	
3	TOTAL ANGGARAN KABUPATEN/KOTA		
	Kuantan Singingi	Rp 1,416,066,322,084	
	Indragiri Hulu	Rp 1,498,029,989,393	
	Indragiri Hilir	Rp 2,375,393,357,162	
	Pelalawan	Rp 1,535,045,823,202	
	Siak	Rp 2,267,541,825,379	
	Kampar	Rp 2,765,824,755,856	
	Rokan Hulu	Rp 1,471,159,104,760	
	Bengkalis	Rp 3,820,517,806,345	
	Rokan Hilir	Rp 2,143,997,805,687	
	Kep. Meranti	Rp 1,406,074,494,016	
	Kota Pekanbaru	Rp 2,613,792,090,305	
	Kota Dumai	Rp 1,434,271,092,996	
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN		Rp 2,952,744,469,220	
TOTAL APBD KAB/KOTA		Rp 24,747,714,467,186	
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA			11.65
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA		Rp 414,228	

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN								
		LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
		HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	3,274	21	3,295	3,205	12	3,217	6,479	33	6,512
2	INDRAGIRI HULU	4,932	17	4,950	4,590	13	4,602	9,522	30	9,552
3	INDRAGIRI HILIR	7,072	25	7,097	6,933	28	6,961	14,005	53	14,058
4	PELALAWAN	6,433	18	6,451	6,085	9	6,094	12,518	27	12,545
5	SIAK	6,322	28	6,350	5,655	13	5,668	11,977	41	12,018
6	KAMPAR	10,327	30	10,356	9,551	14	9,566	19,878	44	19,922
7	ROKAN HULU	8,974	6	8,980	8,624	4	8,628	17,598	10	17,608
8	BENGKALIS	6,409	20	6,429	6,155	13	6,168	12,564	33	12,597
9	ROKAN HILIR	8,584	4	8,588	8,554	2	8,556	17,138	6	17,144
10	MERANTI	1,672	15	1,686	1,612	9	1,622	3,284	24	3,308
11	PEKANBARU	11,894	45	11,939	11,392	17	11,409	23,286	62	23,348
12	DUMAI	3,626	25	3,650	3,447	8	3,456	7,073	33	7,106
JUMLAH (KAB/KOTA)		79,519	253	79,772	75,803	143	75,946	155,322	396	155,718
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)			3.2			1.9			2.5	

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

TABEL 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU																
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU				
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	KUANTAN SINGINGI	6,479	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	5	6	13	2	6	6	14
2	INDRAGIRI HULU	9,522	0	0	1	1	0	5	1	6	0	3	0	3	0	8	2	10	
3	INDRAGIRI HILIR	14,005	0	2	0	2	0	3	2	5	0	1	2	3	0	6	4	10	
4	PELALAWAN	12,518	0	2		2	0	1	1	2	0	2	2	4	0	5	3	8	
5	SIAK	11,977	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	2	5	0	3	6	9	
6	KAMPAR	19,878	0	2	0	2	0	1	1	2	0	6	1	7	0	9	2	11	
7	ROKAN HULU	17,598	0	0	1	1	0	2	4	6	0	0	0	0	0	2	5	7	
8	BENGGALIS	12,564	0	4	3	7	0	1	1	2	0	8	4	12	0	13	8	21	
9	ROKAN HILIR	17,138	0	4	0	4	0	3	3	6	0	4	0	4	0	11	3	14	
10	MERANTI	3,284	0	0	0	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	4	4	8	
11	PEKANBARU	23,286	0	4	1	5	0	0	0	0	0	6	3	9	0	10	4	14	
12	DUMAI	7,073	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	
JUMLAH (KAB/KOTA)		155,322	0	20	8	28	0	21	19	40	2	39	20	61	2	80	47	129	
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																		83	

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas
- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

TABEL 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	PENYEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN	INFEKSI	GANGGUAN SISTEM PEREDARAN DARAH *	GANGGUAN METABOLIK**	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KUANTAN SINGINGI	14	3	6	0	0	0	5
2	INDRAGIRI HULU	10	5	0	0	2	0	3
3	INDRAGIRI HILIR	10	7	0	0	0	0	3
4	PELALAWAN	8	3	2	1	0	0	2
5	SIAK	9	2	2	0	0	1	4
6	KAMPAR	11	3	0	2	1	0	5
7	ROKAN HULU	7	4	1	1	0	0	1
8	BENGKALIS	21	7	6	1	0	2	5
9	ROKAN HILIR	14	5	4	0	0	0	5
10	MERANTI	8	4	3	0	0	0	1
11	PEKANBARU	14	1	1	1	0	0	11
12	DUMAI	3	1	2	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		129	45	27	6	3	3	45

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes

* Jantung, Stroke, dll

** Diabetes Mellitus, dll

TABEL 23

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	IBU HAMIL					IBU BERSALIN/NIFAS												
		JUMLAH	K1		K4		JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES		PERSALINAN DI FASYANKES		KF1		KF2		KF3		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KUANTAN SINGINGI	7,127	6,152	86.3	5,567	78.1	6,803	5,399	79.4	5,370	78.9	5,489	80.7	6,441	94.7	5,397	79.3	5,042	74.1
2	INDRAGIRI HULU	10,474	8,608	82.2	8,072	77.1	9,998	8,069	80.7	7,364	73.7	8,125	81.3	8,110	81.1	8,059	80.6	8,135	81.4
3	INDRAGIRI HILIR	15,406	12,632	82.0	11,641	75.6	14,705	11,340	77.1	8,695	59.1	11,712	79.6	11,474	78.0	10,714	72.9	11,630	79.1
4	PELALAWAN	13,770	12,411	90.1	11,431	83.0	13,144	8,988	68.4	12,411	94.4	10,791	82.1	10,752	81.8	10,537	80.2	10,099	76.8
5	SIAK	13,175	8,697	66.0	6,753	51.3	12,576	7,381	58.7	7,206	57.3	7,717	61.4	7,677	61.0	7,570	60.2	7,374	58.6
6	KAMPAR	21,865	17,297	79.1	16,471	75.3	20,872	16,434	78.7	15,669	75.1	16,368	78.4	11,614	55.6	11,614	55.6	16,527	79.2
7	ROKAN HULU	19,358	8,184	42.3	15,394	79.5	18,478	14,457	78.2	14,213	76.9	14,457	78.2	14,457	78.2	14,457	78.2	14,457	78.2
8	BENGKALIS	13,820	11,311	81.8	10,563	76.4	13,192	10,358	78.5	9,966	75.5	10,457	79.3	10,408	78.9	9,990	75.7	10,433	79.1
9	ROKAN HILIR	18,852	16,246	86.2	15,484	82.1	17,995	15,068	83.7	14,280	79.4	15,066	83.7	14,771	82.1	13,343	74.1	15,066	83.7
10	MERANTI	3,612	3,305	91.5	3,173	87.8	3,448	3,231	93.7	3,014	87.4	3,264	94.7	3,039	88.1	2,587	75.0	3,448	100.0
11	PEKANBARU	25,615	22,130	86.4	20,948	81.8	24,450	20,660	84.5	20,651	84.5	20,654	84.5	20,351	83.2	19,407	79.4	20,654	84.5
12	DUMAI	7,780	8,487	109.1	8,135	104.6	7,427	8,145	109.7	8,135	109.5	8,146	109.7	8,116	109.3	8,088	108.9	8,146	109.7
JUMLAH (KAB/KOTA)		170,854	135,460	79.3	133,632	78.2	163,088	129,530	79.4	126,974	77.9	132,246	81.1	127,210	78.0	121,763	74.7	131,011	80.3

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KUANTAN SINGINGI	7,127	16	0.2	18	0.3	61	0.9	181	2.5	679	9.5	939	13.2
2	INDRAGIRI HULU	10,474	16	0.2	30	0.3	55	0.5	162	1.5	115	1.1	362	3.5
3	INDRAGIRI HILIR	15,406	545	3.5	497	3.2	419	2.7	218	1.4	120	0.8	1,254	8.1
4	PELALAWAN	13,770	629	4.6	757	5.5	930	6.8	934	6.8	770	5.6	3,391	24.6
5	SIAK	13,175	358	2.7	463	3.5	507	3.8	356	2.7	378	2.9	1,704	12.9
6	KAMPAR	21,865	1,479	6.8	1,723	7.9	3,303	15.1	3,043	13.9	3,298	15.1	11,367	52.0
7	ROKAN HULU	19,358	762	3.9	1,007	5.2	1,428	7.4	1,418	7.3	1,250	6.5	5,103	26.4
8	BENGKALIS	13,820	0	0.0	94	0.7	161	1.2	203	1.5	241	1.7	699	5.1
9	ROKAN HILIR	18,852	396	2.1	632	3.4	1,207	6.4	1,212	6.4	971	5.2	4,022	21.3
10	MERANTI	3,612	0	0.0	0	0.0	255	7.1	222	6.1	438	12.1	915	25.3
11	PEKANBARU	25,615	303	1.2	414	1.6	828	3.2	1,149	4.5	1,831	7.1	4,222	16.5
12	DUMAI	7,780	73	0.9	271	3.5	617	7.9	611	7.9	801	10.3	2,300	29.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		170,854	4,577	2.7	5,906	3.5	9,771	5.7	9,709	5.7	10,892	6.4	36,278	21.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 25

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KUANTAN SINGINGI	54,974	42	0.1	63	0.1	84	0.2	143	0.3	329	0.6
2	INDRAGIRI HULU	81,011	2	0.0	6	0.0	156	0.2	150	0.2	18	0.0
3	INDRAGIRI HILIR	136,334	519	0.4	189	0.1	193	0.1	121	0.1	86	0.1
4	PELALAWAN	97,330	203	0.2	294	0.3	379	0.4	377	0.4	326	0.3
5	SIAK	92,190	160	0.2	153	0.2	205	0.2	107	0.1	95	0.1
6	KAMPAR	158,270	315	0.2	331	0.2	1,081	0.7	645	0.4	753	0.5
7	ROKAN HULU	126,025	157	0.1	86	0.1	292	0.2	223	0.2	54	0.0
8	BENGGALIS	101,083	0	0.0	53	0.1	195	0.2	196	0.2	218	0.2
9	ROKAN HILIR	126,594	146	0.1	291	0.2	316	0.2	125	0.1	83	0.1
10	MERANTI	30,954	0	0.0	0	0.0	328	1.1	85	0.3	102	0.3
11	PEKANBARU	238,368	73	0.0	74	0.0	272	0.1	390	0.2	556	0.2
12	DUMAI	55,707	123	0.2	22	0.0	84	0.2	36	0.1	37	0.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,298,840	1,740	0.1	1,562	0.1	3,585	0.3	2,598	0.2	2,657	0.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WUS (15-39 TAHUN)	IMUNISASI Td PADA WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KUANTAN SINGINGI	62,101	58	0.1	81	0.1	145	0.2	324	0.5	1,008	1.6
2	INDRAGIRI HULU	91,485	18	0.0	36	0.0	211	0.2	312	0.3	133	0.1
3	INDRAGIRI HILIR	151,740	1,064	0.7	686	0.5	612	0.4	339	0.2	206	0.1
4	PELALAWAN	111,100	832	0.7	1,051	0.9	1,309	1.2	1,311	1.2	1,096	1.0
5	SIAK	105,365	518	0.5	616	0.6	712	0.7	463	0.4	473	0.4
6	KAMPAR	180,135	1,794	1.0	2,054	1.1	4,384	2.4	3,688	2.0	4,051	2.2
7	ROKAN HULU	145,383	919	1.2	1,093	1.2	1,720	1.6	1,641	1.3	1,304	1.1
8	BENGKALIS	114,903	0	0.0	147	0.1	356	0.3	399	0.3	459	0.4
9	ROKAN HILIR	145,446	542	0.4	923	0.6	1,523	1.0	1,337	0.9	1,054	0.7
10	MERANTI	34,566	0	0.0	0	0.0	583	1.7	307	0.9	540	1.6
11	PEKANBARU	263,983	355	0.1	488	0.2	1,100	0.4	1,539	0.6	2,387	0.9
12	DUMAI	63,487	196	1.6	293	1.6	701	2.7	647	2.6	838	3.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,469,694	6,296	0.4	7,468	0.5	13,356	0.9	12,307	0.8	13,549	0.9

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 27

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	7,127	5,395	75.7
2	INDRAGIRI HULU	10,474	7,769	74.2
3	INDRAGIRI HILIR	15,406	10,627	69.0
4	PELALAWAN	13,770	10,914	79.3
5	SIAK	13,175	7,311	55.5
6	KAMPAR	21,865	17,902	81.9
7	ROKAN HULU	19,358	16,903	87.3
8	BENGGALIS	13,820	10,718	77.6
9	ROKAN HILIR	18,852	12,199	64.7
10	MERANTI	3,612	3,310	91.6
11	PEKANBARU	25,615	20,744	81.0
12	DUMAI	7,780	8,204	105.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		170,854	131,996	77.3

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau
Sasaran dari Kabupaten/Kota

TABEL 28

PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUS	PESERTA KB AKTIF															
			KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IMPLAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KUANTAN SINGINGI	55,297	957	2.7	21,547	59.9	7,084	19.7	2,658	7.4	57	0.2	385	1.1	3,294	9.2	35,982	65.1
2	INDRAGIRI HULU	67,004	214	0.5	28,577	63.6	9,682	21.6	1,870	4.2	33	0.1	298	0.7	4,252	9.5	44,926	67.0
3	INDRAGIRI HILIR	124,337	1,891	2.1	26,280	28.6	60,967	66.3	1,077	1.2	19	0.0	125	0.1	1,615	1.8	91,974	74.0
4	PELALAWAN	84,174	2,216	3.5	29,849	47.0	21,675	34.1	7,415	11.7	27	0.0	1,198	1.9	1,159	1.8	63,539	75.5
5	SIAK	72,725	1,224	6.5	2,667	14.1	10,785	57.2	874	4.6	11	0.1	679	3.6	2,612	13.9	18,852	25.9
6	KAMPAR	133,694	1,992	2.7	44,861	61.0	16,102	21.9	1,695	2.3	0	0.0	1,439	2.0	7,488	10.2	73,577	55.0
7	ROKAN HULU	133,322	782	1.1	2,935	4.3	2,415	3.5	231	0.3	43	0.1	237	0.3	755	1.1	68,376	51.3
8	BENGKALIS	97,349	2,350	3.9	38,085	62.7	14,286	23.5	1,902	3.1	111	0.2	853	1.4	3,128	5.2	60,715	62.4
9	ROKAN HILIR	93,974	2,914	3.9	46,558	62.8	22,005	29.7	164	0.2	6	0.0	183	0.2	2,315	3.1	74,145	78.9
10	MERANTI	26,460	969	4.8	12,960	64.7	3,642	18.2	448	2.2	108	0.5	372	1.9	1,525	7.6	20,024	75.7
11	PEKANBARU	194,065	9,177	6.3	66,291	45.4	41,478	28.4	13,811	9.5	330	0.2	2,457	1.7	12,558	8.6	146,102	75.3
12	DUMAI	52,152	3,972	10.3	17,341	45.2	14,444	37.6	690	1.8	0	0.0	11	0.0	1,947	5.1	38,405	73.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,134,553	28,658	4.2	337,951	50.0	224,565	33.2	32,835	4.9	745	0.1	8,237	1.2	42,648	6.3	675,639	59.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

TABEL 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KAUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU BERSALIN	PESERTA KB PASCA PERSALINAN															
			KONDOM	%	SUNTIK	%	PIL	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	IM PLAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KUANTAN SINGINGI	6,803	84	4.8	1,125	63.8	280	15.9	79	4.5	0	0.0	18	1.0	176	10.0	1,762	25.9
2	INDRAGIRI HULU	9,998	64	1.5	3,288	77.9	644	15.3	41	1.0	0	0.0	9	0.2	176	4.2	4,222	42.2
3	INDRAGIRI HILIR	14,705	164	3.7	2,553	57.8	1,074	24.3	205	4.6	1	0.0	119	2.7	300	6.8	4,417	30.0
4	PELALAWAN	13,144	123	6.1	1,146	56.5	500	24.7	116	5.7	2	0.1	8	0.4	130	6.4	2,027	15.4
5	SIAK	12,576	372	27.2	614	44.8	265	19.3	47	3.4	1	0.1	5	0.4	65	4.7	1,370	10.9
6	KAMPAR	20,872	7	0.4	1,561	88.6	93	5.3	38	2.2	0	0.0	15	0.9	48	2.7	1,762	8.4
7	ROKAN HULU	18,478	54	6.5	385	46.1	302	36.2	26	3.1	0	0.0	11	1.3	57	6.8	835	4.5
8	BENGKALIS	13,192	164	3.7	2,553	57.8	1,074	24.3	205	4.6	1	0.0	119	2.7	300	6.8	4,417	33.5
9	ROKAN HILIR	17,995	492	6.8	3,954	54.3	2,179	29.9	57	0.8	1	0.0	36	0.5	558	7.7	7,278	40.4
10	MERANTI	3,448	21	4.0	360	68.7	58	11.1	9	1.7	0	0.0	13	2.5	63	12.0	524	15.2
11	PEKANBARU	24,450	504	8.4	3,459	57.5	1,464	24.3	316	5.2	0	0.0	38	0.6	239	4.0	6,020	24.6
12	DUMAI	7,427	432	7.8	3,109	56.4	1,707	31.0	70	1.3	0	0.0	3	0.1	189	3.4	5,510	74.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		163,088	2,481	6.2	24,107	60.1	9,640	24.0	1,209	3.0	6	0.01	394	1.0	2,301	5.7	40,138	24.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 30

JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN		JUMLAH LAHIR HIDUP			PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI			PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL					
				Σ	%	L	P	L + P	L	P	L + P	L		P		L + P	
												Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KUANTAN SINGINGI	7,127	1,425	848	59.5	3,274	3,205	6,479	-	-	972	-	-	-	-	257	26.4
2	INDRAGIRI HULU	10,474	2,095	786	37.5	4,932	4,590	9,522	-	-	1,428	-	-	-	-	162	11.3
3	INDRAGIRI HILIR	15,406	3,081	447	14.5	7,072	6,933	14,005	-	-	2,101	-	-	-	-	397	18.9
4	PELALAWAN	13,770	2,754	1,260	45.8	6,433	6,085	12,518	-	-	1,878	-	-	-	-	1,032	55.0
5	SIAK	13,175	2,635	1,367	51.9	6,322	5,655	11,977	-	-	1,797	-	-	-	-	651	36.2
6	KAMPAR	21,865	4,373	1,460	33.4	10,327	9,551	19,878	-	-	2,982	-	-	-	-	205	6.9
7	ROKAN HULU	19,358	3,872	506	13.1	8,974	8,624	17,598	-	-	2,640	-	-	-	-	210	8.0
8	BENGKALIS	13,820	2,764	1,684	60.9	6,409	6,155	12,564	-	-	1,885	-	-	-	-	258	13.7
9	ROKAN HILIR	18,852	3,770	2,120	56.2	8,584	8,554	17,138	-	-	2,571	-	-	-	-	478	18.6
10	MERANTI	3,612	722	408	56.5	1,672	1,612	3,284	-	-	493	-	-	-	-	156	31.7
11	PEKANBARU	25,615	5,123	1,337	26.1	11,894	11,392	23,286	-	-	3,493	-	-	-	-	552	15.8
12	DUMAI	7,780	1,556	1,849	118.8	3,626	3,447	7,073	-	-	1,061	-	-	-	-	1,011	95.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		170,854	34,171	14,072	41.2	79,519	75,803	155,322	-	-	23,298	-	-	-	-	5,369	23.0

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA		
			BAYI ^a	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI ^a	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI ^a	ANAK BALITA	BALITA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	41	51	1	52
2	INDRAGIRI HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	33	43	3	46
3	INDRAGIRI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	22	24	1	25
4	PELALAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	1	17
5	SIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	57	71	5	76
6	KAMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	36	46	7	53
7	ROKAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	38	39	0	39
8	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	38	42	1	43
9	ROKAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	23	34	3	37
10	MERANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	35	40	2	42
11	PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	116	130	0	130
12	DUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	39	60	12	72
JUMLAH (KAB/KOTA)		-	-	-	-	-	-	-	-	494	596	36	632
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)										3.2	3.8	0.2	4.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

TABEL 32

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)								PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)							PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)						
		BBLR	PREMATUR	ASFIKZIA	TETANUS NEONATORUM	SEPSIS	KELAINAN BAWAAN	IKTERUS	LAIN-LAIN	PNEUMONIA	DIARE	SALURAN CERNA	TETANUS	KELAINAN SARAF	MALARIA	LAIN-LAIN	DIARE	PNEUMONIA	MALARIA	CAMPAK	DEMAM	DIFTERI	LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	KUANTAN SINGINGI	14	0	4	0	1	1	0	21	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0
2	INDRAGIRI HULU	13	0	13	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	3
3	INDRAGIRI HILIR	9	0	5	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	PELALAWAN	9	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	SIAK	23	0	16	0	1	5	0	12	1	0	0	0	1	0	12	1	0	0	0	0	0	4
6	KAMPAR	16	0	7	0	1	5	0	7	0	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	7
7	ROKAN HULU	16	0	13	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	BENGGALIS	4	0	10	1	2	5	0	16	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1
9	ROKAN HILIR	10	0	1	0	0	0	0	12	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
10	MERANTI	9	0	15	0	1	6	0	4	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2
11	PEKANBARU	30	0	9	0	2	14	0	61	1	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
12	DUMAI	12	0	13	0	4	10	0	0	5	0	0	0	1	0	15	3	0	0	0	3	0	6
JUMLAH (KAB/KOTA)		165	0	109	1	12	56	0	151	9	12	1	0	2	0	78	4	0	0	0	4	0	28

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI BARU LAHIR DITIMBANG						BBLR					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KUANTAN SINGINGI	3,274	3,205	6,479	-	-	-	-	5,069	78.2	-	-	-	-	14	0.3
2	INDRAGIRI HULU	4,932	4,590	9,522	-	-	-	-	6,863	72.1	-	-	-	-	2	0.0
3	INDRAGIRI HILIR	7,072	6,933	14,005	-	-	-	-	8,414	60.1	-	-	-	-	8	0.1
4	PELALAWAN	6,433	6,085	12,518	-	-	-	-	9,839	78.6	-	-	-	-	8	0.1
5	SIAK	6,322	5,655	11,977	-	-	-	-	6,720	56.1	-	-	-	-	6	0.1
6	KAMPAR	10,327	9,551	19,878	-	-	-	-	15,264	76.8	-	-	-	-	16	0.1
7	ROKAN HULU	8,974	8,624	17,598	-	-	-	-	13,247	75.3	-	-	-	-	2	0.0
8	BENGKALIS	6,409	6,155	12,564	-	-	-	-	9,538	75.9	-	-	-	-	4	0.0
9	ROKAN HILIR	8,584	8,554	17,138	-	-	-	-	10,386	60.6	-	-	-	-	13	0.1
10	Kep. MERANTI	1,672	1,612	3,284	-	-	-	-	2,952	89.9	-	-	-	-	8	0.3
11	PEKANBARU	11,894	11,392	23,286	-	-	-	-	18,983	81.5	-	-	-	-	20	0.1
12	DUMAI	3,626	3,447	7,073	-	-	-	-	7,357	104.0	-	-	-	-	7	0.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		79,519	75,803	155,322	-	-	-	-	114,632	73.8	-	-	-	-	108	0.1

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1)						KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KUANTAN SINGINGI	3,274	3,205	6,479	-	-	-	-	4,965	76.6	-	-	-	-	4,965	76.6
2	INDRAGIRI HULU	4,932	4,590	9,522	-	-	-	-	6,840	71.8	-	-	-	-	6,805	71.5
3	INDRAGIRI HILIR	7,072	6,933	14,005	-	-	-	-	9,333	66.6	-	-	-	-	9,128	65.2
4	PELALAWAN	6,433	6,085	12,518	-	-	-	-	9,812	78.4	-	-	-	-	9,648	77.1
5	SIAK	6,322	5,655	11,977	-	-	-	-	6,720	56.1	-	-	-	-	6,271	52.4
6	KAMPAR	10,327	9,551	19,878	-	-	-	-	15,264	76.8	-	-	-	-	15,054	75.7
7	ROKAN HULU	8,974	8,624	17,598	-	-	-	-	13,245	75.3	-	-	-	-	13,245	75.3
8	BENGKALIS	6,409	6,155	12,564	-	-	-	-	9,527	75.8	-	-	-	-	9,079	72.3
9	ROKAN HILIR	8,584	8,554	17,138	-	-	-	-	10,386	60.6	-	-	-	-	9,564	55.8
10	Kep. MERANTI	1,672	1,612	3,284	-	-	-	-	2,952	89.9	-	-	-	-	2,836	86.4
11	PEKANBARU	11,894	11,392	23,286	-	-	-	-	18,975	81.5	-	-	-	-	17,323	74.4
12	DUMAI	3,626	3,447	7,073	-	-	-	-	7,357	104.0	-	-	-	-	6,997	98.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		79,519	75,803	155,322	-	-	-	-	115,376	74.3	-	-	-	-	110,915	71.4

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 35

BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA < 6 BULAN		
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KUANTAN SINGINGI	6,479	3,620	55.9	6,946	2,297	33.1
2	INDRAGIRI HULU	9,522	5,622	59.0	5,914	2,376	40.2
3	INDRAGIRI HILIR	14,005	9,030	64.5	16,596	5,848	35.2
4	PELALAWAN	12,518	6,410	51.2	13,262	4,099	30.9
5	SIAK	11,977	5,968	49.8	5,209	3,533	67.8
6	KAMPAR	19,878	15,260	76.8	17,838	9,447	53.0
7	ROKAN HULU	17,598	9,274	52.7	15,859	8,233	51.9
8	BENGGALIS	12,564	7,513	59.8	12,243	3,632	29.7
9	ROKAN HILIR	17,138	5,930	34.6	7,976	3,586	45.0
10	MERANTI	3,284	2,669	81.3	2,931	1,799	61.4
11	PEKANBARU	23,286	14,990	64.4	17,581	9,395	53.4
12	DUMAI	7,073	4,284	60.6	6,843	1,931	28.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		155,322	90,570	58.3	129,198	56,176	43.5

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

TABEL 36

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI			PELAYANAN KESEHATAN BAYI					
					L		P		L + P	
		L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	3,211	3,006	6,217	-	-	-	-	3,574	57.5
2	INDRAGIRI HULU	4,763	4,552	9,315	-	-	-	-	5,776	62.0
3	INDRAGIRI HILIR	6,715	6,367	13,082	-	-	-	-	9,177	70.1
4	PELALAWAN	6,233	6,245	12,478	-	-	-	-	9,299	74.5
5	SIAK	5,701	5,680	11,381	-	-	-	-	6,555	57.6
6	KAMPAR	9,931	9,424	19,355	-	-	-	-	11,231	58.0
7	ROKAN HULU	8,701	8,383	17,084	-	-	-	-	5,862	34.3
8	BENGKALIS	6,099	5,954	12,053	-	-	-	-	5,480	45.5
9	ROKAN HILIR	8,551	8,138	16,689	-	-	-	-	16,478	98.7
10	MERANTI	1,561	1,469	3,030	-	-	-	-	2,142	70.7
11	PEKANBARU	12,527	11,696	24,223	-	-	-	-	16,568	68.4
12	DUMAI	3,656	3,501	7,157	-	-	-	-	5,543	77.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		77,649	74,415	152,064	-	-	-	-	97,685	64.2

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU
2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN UCI	% DESA/KELURAHAN UCI
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	229	28	12.2
2	INDRAGIRI HULU	194	50	25.8
3	INDRAGIRI HILIR	234	60	25.6
4	PELALAWAN	118	81	68.6
5	SIAK	131	44	33.6
6	KAMPAR	250	136	54.4
7	ROKAN HULU	145	82	56.6
8	BENGGALIS	155	113	72.9
9	ROKAN HILIR	198	100	50.5
10	MERANTI	102	54	52.9
11	PEKANBARU	83	42	50.6
12	DUMAI	33	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,872	790	42.2

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 38

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP			BAYI DIIMUNISASI																				
					HB0									BCG											
					< 24 Jam						1 - 7 Hari						L			P			L + P		
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P				
L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	KUANTAN SINGINGI	3,240	3,239	6,479	1,876	58	1,805	55.7	3,681	56.8	410	12.7	359	11.1	769	11.9	2,743	84.7	2,542	78.5	5,285	81.6			
2	INDRAGIRI HULU	4,761	4,761	9,522	2,785	58	2,496	52.4	5,281	55.5	452	9.5	440	9.2	892	9.4	3,401	71.4	3,280	68.9	6,681	70.2			
3	INDRAGIRI HILIR	7,002	7,003	14,005	4,466	64	4,171	59.6	8,637	61.7	1,091	15.6	1,018	14.5	2,109	15.1	5,113	73.0	4,696	67.1	9,809	70.0			
4	PELALAWAN	6,259	6,259	12,518	4,847	77	4,658	74.4	9,505	75.9	321	5.1	360	5.8	681	5.4	5,275	84.3	5,020	80.2	10,295	82.2			
5	SIAK	5,988	5,989	11,977	2,792	47	2,485	41.5	5,277	44.1	413	6.9	374	6.2	787	6.6	3,650	61.0	3,430	57.3	7,080	59.1			
6	KAMPAR	9,939	9,939	19,878	6,336	64	6,029	60.7	12,365	62.2	601	6.0	616	6.2	1,217	6.1	7,377	74.2	6,954	70.0	14,331	72.1			
7	ROKAN HULU	8,799	8,799	17,598	6,840	78	6,760	76.8	13,600	77.3	16	0.2	23	0.3	39	0.2	6,955	79.0	6,800	77.3	13,755	78.2			
8	BENGKALIS	6,282	6,282	12,564	3,752	60	3,409	54.3	7,161	57.0	184	2.9	40	0.6	224	1.8	4,977	79.2	4,937	78.6	9,914	78.9			
9	ROKAN HILIR	8,569	8,569	17,138	5,336	62	5,099	59.5	10,435	60.9	1,423	16.6	1,439	16.8	2,862	16.7	6,333	73.9	6,131	71.5	12,464	72.7			
10	MERANTI	1,642	1,642	3,284	1,529	93	1,431	87.1	2,960	90.1	24	1.5	26	1.6	50	1.5	1,445	88.0	1,448	88.2	2,893	88.1			
11	PEKANBARU	11,643	11,643	23,286	7,000	60	6,743	57.9	13,743	59.0	486	4.2	434	3.7	920	4.0	7,623	65.5	7,376	63.4	14,999	64.4			
12	DUMAI	3,536	3,537	7,073	3,537	100	3,310	93.6	6,847	96.8	70	2.0	64	1.8	134	1.9	2,325	65.8	2,229	63.0	4,554	64.4			
JUMLAH (KAB/KOTA)		77,660	77,662	155,322	51,096	66	48,396	62.3	99,492	64.1	5,491	7.1	5,193	6.7	10,684	6.9	57,217	73.7	54,843	70.6	112,060	72.1			

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 39

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)			BAYI DIIMUNISASI																							
					DPT-HB-Hib3						POLIO 4*						CAMPAK/MR						IMUNISASI DASAR LENGKAP					
		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P				
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	KUANTAN SINGINGI	3,211	3,006	6,217	2,547	79.3	2,375	79.0	4,922	79.2	2,523	78.6	2,354	78.3	4,877	78.4	2,382	74	2,136	71	4,518	72.7	904	28.2	892	29.7	1,796	28.9
2	INDRAGIRI HULU	4,763	4,552	9,315	3,011	63.2	2,919	64.1	5,930	63.7	2,980	62.6	2,899	63.7	5,879	63.1	3,051	64	2,841	62	5,892	63.3	2,646	55.6	2,463	54.1	5,109	54.8
3	INDRAGIRI HILIR	6,715	6,367	13,082	4,626	68.9	4,466	70.1	9,092	69.5	4,590	68.4	4,416	69.4	9,006	68.8	4,367	65	4,021	63	8,388	64.1	4,020	59.9	3,674	57.7	7,694	58.8
4	PELALAWAN	6,233	6,245	12,478	5,337	85.6	5,208	83.4	10,545	84.5	5,308	85.2	5,183	83.0	10,491	84.1	5,478	88	5,206	83	10,684	85.6	5,402	86.7	5,110	81.8	10,512	84.2
5	SIAK	5,701	5,680	11,381	3,327	58.4	3,057	53.8	6,384	56.1	2,876	50.4	2,659	46.8	5,535	48.6	2,971	52	2,800	49	5,771	50.7	2,603	45.7	2,400	42.3	5,003	44.0
6	KAMPAR	9,931	9,424	19,355	6,894	69.4	6,604	70.1	13,498	69.7	6,856	69.0	6,638	70.4	13,494	69.7	6,339	64	6,089	65	12,428	64.2	5,181	52.2	5,472	58.1	10,653	55.0
7	ROKAN HULU	8,701	8,383	17,084	6,868	78.9	6,787	81.0	13,655	79.9	6,744	77.5	6,603	78.8	13,347	78.1	6,563	75	6,496	77	13,059	76.4	6,322	72.7	6,292	75.1	12,614	73.8
8	BENGKALIS	6,099	5,954	12,053	4,262	69.9	4,258	71.5	8,520	70.7	4,140	67.9	4,277	71.8	8,417	69.8	4,509	74	4,566	77	9,075	75.3	4,046	66.3	3,941	66.2	7,987	66.3
9	ROKAN HILIR	8,551	8,138	16,689	5,952	69.6	5,831	71.7	11,783	70.6	5,935	69.4	5,788	71.1	11,723	70.2	5,624	66	5,596	69	11,220	67.2	5,279	61.7	5,219	64.1	10,498	62.9
10	MERANTI	1,561	1,469	3,030	1,391	89.1	1,362	92.7	2,753	90.9	1,376	88.1	1,334	90.8	2,710	89.4	1,272	81	1,243	85	2,515	83.0	1,278	81.9	1,250	85.1	2,528	83.4
11	PEKANBARU	12,527	11,696	24,223	7,616	60.8	7,295	62.4	14,911	61.6	7,534	60.1	6,719	57.4	14,253	58.8	7,008	56	6,709	57	13,717	56.6	6,685	53.4	6,332	54.1	13,017	53.7
12	DUMAI	3,656	3,501	7,157	1,877	51.3	1,879	53.7	3,756	52.5	1,875	51.3	1,876	53.6	3,751	52.4	1,426	39	1,460	42	2,886	40.3	1,139	31.2	1,155	33.0	2,294	32.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		77,649	74,415	152,064	53,708	69.2	52,041	69.9	105,749	69.5	52,737	67.9	50,746	68.2	103,483	68.1	50,990	66	49,163	66	100,153	65.9	45,505	58.6	44,200	59.4	89,705	59.0

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3
MR = measles rubella

TABEL 40

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BADUTA			BADUTA DIIMUNISASI											
					DPT-HB-Hib4						CAMPAK/MR2					
		L		P		L + P		L		P		L + P				
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KUANTAN SINGINGI	6,429	6,039	12,468	1,228	19.1	1,195	19.8	2,423	19.4	1,039	16.2	1,029	17.0	2,068	16.6
2	INDRAGIRI HULU	9,477	9,078	18,555	1,549	16.3	1,494	16.5	3,043	16.4	1,056	11.1	1,030	11.3	2,086	11.2
3	INDRAGIRI HILIR	13,504	12,872	26,376	3,490	25.8	3,206	24.9	6,696	25.4	2,859	21.2	2,686	20.9	5,545	21.0
4	PELALAWAN	12,352	12,411	24,763	3,484	28.2	3,237	26.1	6,721	27.1	3,211	26.0	2,955	23.8	6,166	24.9
5	SIAK	11,478	11,433	22,911	1,493	13.0	1,416	12.4	2,909	12.7	1,000	8.7	1,063	9.3	2,063	9.0
6	KAMPAR	19,838	18,843	38,681	4,297	21.7	4,301	22.8	8,598	22.2	3,398	17.1	3,207	17.0	6,605	17.1
7	ROKAN HULU	17,402	16,828	34,230	4,669	26.8	4,718	28.0	9,387	27.4	4,302	24.7	4,309	25.6	8,611	25.2
8	BENGKALIS	12,205	11,932	24,137	2,303	18.9	2,249	18.8	4,552	18.9	1,939	15.9	1,737	14.6	3,676	15.2
9	ROKAN HILIR	17,024	16,266	33,290	3,167	18.6	3,180	19.5	6,347	19.1	2,701	15.9	2,729	16.8	5,430	16.3
10	MERANTI	3,150	2,967	6,117	1,145	36.3	1,048	35.3	2,193	35.9	843	26.8	768	25.9	1,611	26.3
11	PEKANBARU	24,544	22,680	47,224	5,637	23.0	5,446	24.0	11,083	23.5	4,108	16.7	3,990	17.6	8,098	17.1
12	DUMAI	7,194	6,918	14,112	1,341	18.6	1,441	20.8	2,782	19.7	862	12.0	723	10.5	1,585	11.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		154,597	148,267	302,864	33,803	21.9	32,931	22.2	66,734	22.0	27,318	17.7	26,226	17.7	53,544	17.7

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	BAYI 6-11 BULAN			ANAK BALITA (12-59 BULAN)			BALITA (6-59 BULAN)		
		JUMLAH BAYI	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A		JUMLAH	MENDAPAT VIT A	
			Σ	%		Σ	%		Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	7,456	6,397	85.8	36,046	27,488	76.3	43,502	33,885	77.9
2	INDRAGIRI HULU	9,678	8,815	91.1	30,073	25,922	86.2	39,751	34,737	87.4
3	INDRAGIRI HILIR	13,093	8,185	62.5	44,307	26,351	59.5	57,400	34,536	60.2
4	PELALAWAN	19,200	12,389	64.5	19,804	18,245	92.1	39,004	30,634	78.5
5	SIAK	9,143	5,983	65.4	56,056	50,392	89.9	65,199	56,375	86.5
6	KAMPAR	17,247	16,332	94.7	67,679	47,053	69.5	84,926	63,385	74.6
7	ROKAN HULU	16,925	13,961	82.5	87,940	72,935	82.9	104,865	86,896	82.9
8	BENGKALIS	10,240	8,615	84.1	37,732	26,427	70.0	47,972	35,042	73.0
9	ROKAN HILIR	19,321	14,906	77.1	36,541	26,472	72.4	55,862	41,378	74.1
10	MERANTI	3,055	2,929	95.9	12,589	12,121	96.3	15,644	15,050	96.2
11	PEKANBARU	24,224	20,904	86.3	33,930	9,434	27.8	58,154	30,338	52.2
12	DUMAI	8,168	5,233	64.1	54,605	38,292	70.1	62,773	43,525	69.3
JUMLAH (KAB/KOTA)		157,750	124,649	79.0	517,302	381,132	73.7	675,052	505,781	74.9

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

TABEL 42

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA			PELAYANAN KESEHATAN BALITA					
		L	P	L + P	L		P		L + P	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	16,086	15,124	31,210	7,147	44.4	6,337	41.9	13,484	43.2
2	INDRAGIRI HULU	23,383	22,484	45,867	5,436	23.2	4,447	19.8	9,883	21.5
3	INDRAGIRI HILIR	34,350	33,108	67,458	16,806	48.9	13,750	41.5	30,556	45.3
4	PELALAWAN	30,084	30,213	60,297	7,257	24.1	5,938	19.7	13,195	21.9
5	SIAK	28,966	28,727	57,693	14,541	50.2	11,897	41.4	26,438	45.8
6	KAMPAR	49,083	46,663	95,746	24,725	50.4	20,230	43.4	44,955	47.0
7	ROKAN HULU	42,925	41,839	84,764	6,029	14.0	4,932	11.8	10,961	12.9
8	BENGKALIS	30,651	29,866	60,517	7,911	25.8	6,473	21.7	14,384	23.8
9	ROKAN HILIR	42,090	40,461	82,551	14,123	33.6	11,556	28.6	25,679	31.1
10	MERANTI	8,117	7,703	15,820	3,713	45.7	3,038	39.4	6,750	42.7
11	PEKANBARU	58,623	53,540	112,163	20,543	35.0	16,808	31.4	37,351	33.3
12	DUMAI	17,330	16,738	34,068	12,813	73.9	10,484	62.6	23,297	68.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		381,688	366,466	748,154	141,043	37.0	115,890	31.6	256,933	34.3

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	BALITA								
		JUMLAH SASARAN BALITA (S)			DITIMBANG					
					JUMLAH (D)			% (D/S)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	16,086	15,124	31,210	3,203	3,111	6,313	19.9	20.6	20.2
2	INDRAGIRI HULU	23,383	22,484	45,867	7,311	7,143	14,453	31.3	31.8	31.5
3	INDRAGIRI HILIR	34,350	33,108	67,458	10,853	10,616	21,469	31.6	32.1	31.8
4	PELALAWAN	30,084	30,213	60,297	17,590	16,936	34,525	58.5	56.1	57.3
5	SIAK	28,966	28,727	57,693	8,937	8,515	17,452	30.9	29.6	30.2
6	KAMPAR	49,083	46,663	95,746	23,334	23,604	46,938	47.5	50.6	49.0
7	ROKAN HULU	42,925	41,839	84,764	22,943	22,525	45,468	53.4	53.8	53.6
8	BENGKALIS	30,651	29,866	60,517	10,885	10,430	21,314	35.5	34.9	35.2
9	ROKAN HILIR	42,090	40,461	82,551	13,239	12,379	25,619	31.5	30.6	31.0
10	MERANTI	8,117	7,703	15,820	5,699	5,419	11,117	70.2	70.3	70.3
11	PEKANBARU	58,623	53,540	112,163	15,656	14,644	30,300	26.7	27.4	27.0
12	DUMAI	17,330	16,738	34,068	7,995	7,753	15,749	46.1	46.3	46.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		381,688	366,466	748,154	147,644	143,073	290,717	38.7	39.0	38.9

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 44

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)		JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR	BALITA KURUS (BB/TB)	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%		JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	20,310	1,531	7.5	20,206	2,529	12.5	20,242	1,005	5.0
2	INDRAGIRI HULU	30,302	1,862	6.1	30,182	2,914	9.7	30,263	1,541	5.1
3	INDRAGIRI HILIR	33,922	1,195	3.5	33,824	1,353	4.0	33,876	1,106	3.3
4	PELALAWAN	11,442	166	1.5	11,385	339	3.0	11,396	193	1.7
5	SIAK	25,700	2,597	10.1	25,566	3,053	11.9	25,640	1,779	6.9
6	KAMPAR	50,844	3,086	6.1	50,301	4,275	8.5	50,550	2,968	5.9
7	ROKAN HULU	37,521	1,857	4.9	37,319	2,610	7.0	37,466	1,116	3.0
8	BENGKALIS	40,306	3,083	7.6	39,874	4,096	10.3	40,120	2,917	7.3
9	ROKAN HILIR	35,627	1,520	4.3	35,575	1,864	5.2	35,591	1,573	4.4
10	KEP. MERANTI	14,872	1,487	10.0	14,780	1,936	13.1	14,821	1,212	8.2
11	PEKANBARU	23,002	480	2.1	22,937	538	2.3	22,941	520	2.3
12	DUMAI	25,343	117	0.5	25,323	110	0.4	25,334	89	0.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		349,191	18,981	5.4	347,272	25,617	7.4	348,240	16,019	4.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR BB/U
BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riel	Jumlah Balita Ditimbang	%	Jumlah Balita Underweight	%	INDIKATOR BB/U							
							Gizi Buruk	%	Gizi Kurang	%	Gizi Baik	%	Gizi Lebih	%
1	KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	464	8.56	78	1.44	386	7.12	4822	88.97	134	2.47
2	INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	505	9.43	121	2.26	384	7.17	4719	88.11	132	2.46
3	INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	1219	11.06	213	1.93	1006	9.13	9423	85.53	375	3.40
4	PELALAWAN	40897	16258	39.75	1056	6.50	217	1.33	839	5.16	14683	90.31	519	3.19
5	S I A K	41728	3202	7.67	332	10.37	69	2.15	263	8.21	2795	87.29	75	2.34
6	KAMPAR	78619	25849	32.88	2217	8.58	379	1.47	1838	7.11	23013	89.03	619	2.39
7	ROKAN HULU	59618	8022	13.46	825	10.28	121	1.51	704	8.78	7023	87.55	174	2.17
8	BENGKALIS	57817	16235	28.08	1510	9.30	207	1.28	1303	8.03	14099	86.84	626	3.86
9	ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1116	4.45	206	0.82	910	3.63	23031	91.82	937	3.74
10	MERANTI	16489	14301	86.73	1421	9.94	209	1.46	1212	8.47	12378	86.55	502	3.51
11	PEKANBARU	70335	13863	19.71	900	6.49	192	1.38	708	5.11	12593	90.84	370	2.67
12	D U M A I	40641	4673	11.50	343	7.34	33	0.71	310	6.63	4229	90.50	101	2.16
JUMLAH		601000	149280	24.84	11908	7.98	2045	1.37	9863	6.61	132808	88.97	4564	3.06

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR TB/U
BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riil	Jumlah Balita Diukur	%	Jumlah Balita Stunting	%	TB/U					
							Sangat Pendek	%	Pendek	%	Normal	%
1	KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	650	11.99	184	3.39	466	8.60	4770	88.01
2	INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	831	15.52	250	4.67	581	10.85	4525	84.48
3	INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	2021	18.34	799	7.25	1222	11.09	8996	81.66
4	PELALAWAN	40897	16258	39.75	1742	10.71	654	4.02	1088	6.69	14516	89.29
5	S I A K	41728	3202	7.67	455	14.21	163	5.09	292	9.12	2747	85.79
6	KAMPAR	78619	25849	32.88	3128	12.10	1126	4.36	2002	7.74	22721	87.90
7	ROKAN HULU	59618	8022	13.46	878	10.94	245	3.05	633	7.89	7144	89.06
8	BENGKALIS	57817	16235	28.08	1813	11.17	585	3.60	1228	7.56	14422	88.83
9	ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1474	5.88	522	2.08	952	3.80	23610	94.12
10	MERANTI	16489	14301	86.73	1745	12.20	501	3.50	1244	8.70	12556	87.80
11	PEKANBARU	70335	13863	19.71	1248	9.00	465	3.35	783	5.65	12615	91.00
12	D U M A I	40641	4673	11.50	290	6.21	77	1.65	213	4.56	4383	93.79
JUMLAH		601000	149280	24.84	16275	10.90	5571	3.73	10704	7.17	133005	89.10

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

REKAP STATUS GIZI BALITA MENURUT INDIKATOR BB/TB
BERDASARKAN EPPGBM

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita Sasaran Riil	Jumlah Balita Ditimbang dan Diukur	%	Jumlah Balita Wasting	%	INDIKATOR BB/TB							
							Sangat Kurus	%	Kurus	%	Normal	%	Gemuk	%
1	KUANTAN SINGINGI	29947	5420	18.10	330	6.09	89	1.64	241	4.45	4904	90.48	186	3.43
2	INDRAGIRI HULU	37838	5356	14.16	352	6.57	118	2.20	234	4.37	4736	88.42	268	5.00
3	INDRAGIRI HILIR	68316	11017	16.13	635	5.76	238	2.16	397	3.60	9681	87.87	701	6.36
4	PELALAWAN	40897	16258	39.75	1073	6.60	367	2.26	706	4.34	14515	89.28	670	4.12
5	S I A K	41728	3202	7.67	184	5.75	39	1.22	145	4.53	2891	90.29	127	3.97
6	KAMPAR	78619	25849	32.88	2131	8.24	662	2.56	1469	5.68	22702	87.83	1016	3.93
7	ROKAN HULU	59618	8022	13.46	513	6.39	160	1.99	353	4.40	7249	90.36	260	3.24
8	BENGKALIS	57817	16235	28.08	1413	8.70	479	2.95	934	5.75	13879	85.49	943	5.81
9	ROKAN HILIR	58755	25084	42.69	1160	4.62	324	1.29	836	3.33	23001	91.70	923	3.68
10	MERANTI	16489	14301	86.73	1172	8.20	302	2.11	870	6.08	12588	88.02	541	3.78
11	PEKANBARU	70335	13863	19.71	765	5.52	287	2.07	478	3.45	12556	90.57	542	3.91
12	D U M A I	40641	4673	11.50	107	2.29	17	0.36	90	1.93	4439	94.99	127	2.72
JUMLAH (KAB/KOTA)		601000	149280	24.84	9835	6.59	3082	2.06	6753	4.52	133141	89.19	6304	4.22

Sumber data : ePPGBM tanggal 13 Januari 2020

TABEL 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK SEKOLAH									SEKOLAH								
		KELAS 1 SD/MI			KELAS 7 SMP/MTS			KELAS 10 SMA/MA			SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KUANTAN SINGINGI	7,767	4,478	57.7	4,760	2,839	59.6	4,159	2,224	53.5	245	194	79.2	97	56	57.7	32	23	71.9
2	INDRAGIRI HULU	10,281	9,750	94.8	8,030	7,401	92.2	6,772	6,142	90.7	337	332	98.5	99	98	99.0	65	62	95.4
3	INDRAGIRI HILIR	13,475	13,089	97.1	11,701	11,344	96.9	9,867	9,462	95.9	654	654	100.0	271	271	100.0	113	113	100.0
4	PELALAWAN	39,373	7,421	18.8	6,046	164	2.7	4,223	3,458	81.9	243	98	40.3	96	87	90.6	60	60	100.0
5	SIAK	10,312	10,504	101.9	7,316	7,579	103.6	3,531	6,365	180.3	250	247	98.8	142	129	90.8	75	45	60.0
6	KAMPAR	17,881	11,355	63.5	11,953	7,710	64.5	8,083	8,836	109.3	519	433	83.4	211	166	78.7	127	89	70.1
7	ROKAN HULU	25,839	15,620	60.5	17,682	4,504	25.5	8,564	6,099	71.2	387	387	100.0	147	143	97.3	82	85	103.7
8	BENGKALIS	14,272	7,585	53.1	13,343	6,776	50.8	11,002	6,542	59.5	381	362	95.0	159	147	92.5	101	95	94.1
9	ROKAN HILIR	18,862	15,093	80.0	11,882	8,323	70.0	8,559	6,316	73.8	441	308	69.8	195	144	73.8	118	71	60.2
10	MERANTI	3,616	2,241	62.0	3,334	1,070	32.1	2,977	484	16.3	193	193	100.0	84	84	100.0	48	43	89.6
11	PEKANBARU	25,641	1,969	7.7	29,576	1,021	3.5	20,773	1,878	9.0	336	99	29.5	170	27	15.9	114	20	17.5
12	DUMAI	6,900	0	0.0	5,347	4,902	91.7	4,467	4,342	97.2	114	113	99.1	52	35	67.3	51	51	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		194,219	99,105	51.0	130,970	63,633	48.6	92,977	62,148	66.8	4,100	3,420	83.4	1,723	1,387	80.5	986	757	76.8

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 46

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT					
		TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	12	169	0.1	-	-	-
3	INDRAGIRI HILIR	8	2,028	0.0	-	63	-
4	PELALAWAN	5	397	0.0	3,617	210	0.1
5	SIAK	70	704	0.1	6,077	125	0.0
6	KAMPAR	327	3,340	0.1	12,521	2,319	0.2
7	ROKAN HULU	590	1,395	0.4	9,444	0	0.0
8	BENGKALIS	16	192	0.1	4,957	17	0.0
9	ROKAN HILIR	377	3,687	0.1	17,060	123	0.01
10	MERANTI	-	-	-	-	-	-
11	PEKANBARU	1,651	1,784	0.9	17,801	2,199	0.1
12	DUMAI	398	1,368	0.3	7,829	0	0.0
JUMLAH (KAB/ KOTA)		3,454	15,064	0.2	79,306	5,056	0.1

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

TABEL 47

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH																							
		JUMLAH SD/MI	JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL	%	JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI	%	JUMLAH MURID SD/MI			MURID SD/MI DIPERIKSA					PERLU PERAWATAN			MENDAPAT PERAWATAN							
							L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	L	P	L + P	L	%	P	%	L + P	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	KUANTAN SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	329	0	0.0	0	0.0	30,271	27,185	57,456	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	668	455	68.1	511	76.5	37,849	37,107	74,956	15,037	39.7	14,662	39.5	29,699	39.6	5,607	5,367	10,974	2,086	37.2	2,050	38.2	4,136	37.7	
4	PELALAWAN	243	45	93.6	52	86.4	18,619	17,205	35,824	2,158	51.9	2,204	44.5	4,362	12.2	1,878	1,875	3,753	111	57.3	136	61.7	247	59.5	
5	SIAK	254	39	15.4	81	31.9	33,458	30,803	64,261	1,528	9.1	1,453	9.5	2,981	4.6	1,242	1,240	2,482	262	35.2	351	35.4	613	35.3	
6	KAMPAR	508	413	81.3	390	76.8	42,862	43,190	86,052	14,239	33.2	22,318	51.7	36,557	42.5	11,088	11,748	22,836	5,654	51.0	7,005	59.6	12,659	55.4	
7	ROKAN HULU	395	312	79.0	315	79.7	17,558	17,012	34,570	12,067	68.7	11,746	69.0	23,813	68.9	6,322	6,111	12,433	2,001	31.7	2,092	34.2	4,093	32.9	
8	BENGKALIS	386	0	0.0	181	46.9	24,987	24,137	49,124	5,246	21.0	5,562	23.0	10,808	22.0	3,129	3,542	6,671	794	0.0	841	0.0	1,635	0.0	
9	ROKAN HILIR	442	236	53.4	323	73.1	21,968	20,613	42,581	9,933	0.0	8,886	0.0	18,819	44.2	7,252	4,615	11,867	3,563	0.0	2,848	0.0	6,411	0.0	
10	MERANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	
11	PEKANBARU	331	133	87.0	105	99.7	39,625	38,342	77,967	6,722	36.0	7,266	35.9	13,988	17.9	2,331	2,311	4,642	608	35.0	722	36.2	1,330	35.6	
12	DUMAI	117	31	26.5	31	26.5	5,706	5,371	11,077	2,637	46.2	2,488	46.3	5,125	46.3	1,548	1,232	2,780	1,071	69.2	818	66.4	1,889	67.9	
JUMLAH (KAB/ KOTA)		3,673	1,664	45.3	1,989	54.2	272,903	260,965	533,868	69,567	25.5	76,585	29.3	146,152	27.4	40,397	38,041	78,438	16,150	40.0	16,863	44.3	33,013	42.1	

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

TABEL 48

PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN														
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR						BERISIKO					
					LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KUANTAN SINGINGI	96,493	98,556	195,049	16,943	17.6	34,883	35.4	51,826	26.6	3,553	21.0	9,237	26.5	12,790	24.7
2	INDRAGIRI HULU	142,768	134,300	277,068	15,052	10.5	25,675	19.1	40,727	14.7	5,411	35.9	11,770	45.8	17,181	42.2
3	INDRAGIRI HILIR	191,289	176,575	367,864	11,215	5.9	9,945	5.6	21,160	5.8	-	-	-	-	-	-
4	PELALAWAN	179,013	158,748	337,761	27,046	15.1	23,984	15.1	51,030	15.1	5,096	18.8	6286.0	26.2	11,382	22.3
5	SIAK	145,224	135,837	281,061	30,771	21.2	38,342	28.2	69,113	24.6	-	-	-	-	-	-
6	KAMPAR	266,404	262,947	529,351	15,019	5.6	33,204	12.6	48,223	9.1	11,704	77.9	27,668	83.3	39,372	81.6
7	ROKAN HULU	238,475	225,159	463,634	27,367	11.5	40,286	17.9	67,653	14.6	10,533	38.5	14,727	36.6	25,260	37.3
8	BENGGALIS	189,827	175,225	365,052	6,874	3.6	15,185	8.7	22,059	6.0	5,615	81.7	7,665	50.5	13,280	60.2
9	ROKAN HILIR	234,654	216,604	451,258	114,811	54.9	105,980	53.3	220,791	48.9	13,286	8.1	11,856	11.2	25,142	5.7
12	MERANTI	61,318	56,602	117,920	13,961	22.8	23,376	41.3	37,337	31.7	5,348	38.3	8,879	38.0	14,227	38.1
10	PEKANBARU	406,767	388,330	795,097	48,127	11.8	58,709	15.1	106,836	13.4	20,219	42.0	19,789	33.7	40,008	37.4
11	DUMAI	100,505	95,536	196,041	21,959	21.8	37,941	39.7	59,900	30.6	5,766	26.3	9,202	24.3	14,968	25.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		2,252,738	2,124,418	4,377,156	349,145	15.50	447,510	21.07	796,655	18.20	86,531	24.78	127,079	28.40	213,610	26.81

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	13,256	15,418	28,674	3,555	26.8	5,057	32.8	8,612	30.0
2	INDRAGIRI HULU	14,515	14,192	28,707	1,659	11.4	2,136	15.1	3,795	13.2
3	INDRAGIRI HILIR	31,670	27,381	59,051	5,397	17.0	5,756	21.0	11,153	18.9
4	PELALAWAN	10,657	10,046	20,703	1,054	9.9	2,145	21.4	3,199	15.5
5	SIAK	11,339	10,506	21,845	8,843	78.0	10,506	100	19,349	88.6
6	KAMPAR	24,827	27,018	51,845	2,516	10.1	3,626	13.4	6,142	11.8
7	ROKAN HULU	21,162	19,577	40,739	1,101	5.2	1,466	7.5	2,567	6.3
8	BENGKALIS	19,199	18,344	37,543	5,800	30.2	8,493	46.3	14,293	38.1
9	ROKAN HILIR	20,854	19,650	40,504	3,488	16.7	4,654	23.7	8,142	20.1
10	MERANTI	8,893	8,639	17,532	2,208	24.8	2,927	33.9	5,135	29.3
11	PEKANBARU	32,354	32,770	65,124	11,262	34.8	13,288	40.5	24,550	37.7
12	DUMAI	10,246	8,710	18,956	5,726	55.9	6,312	72.5	12,038	63.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		218,972	212,251	431,223	52,609	24.0	66,366	31.3	118,975	27.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 50

PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	PUSKESMAS					
			MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL	MELAKSANAKAN ORIENTASI P4K	MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 7 DAN 10	MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1, 7, 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KUANTAN SINGINGI	23	10	25	20	18	14	12
2	INDRAGIRI HULU	20	17	18	18	18	18	15
3	INDRAGIRI HILIR	26	28	27	27	26	26	13
4	PELALAWAN	14	9	14	12	10	10	10
5	SIAK	15	0	15	15	15	13	8
6	KAMPAR	31	31	31	17	31	31	29
7	ROKAN HULU	21	21	21	10	21	20	18
8	BENGKALIS	18	18	11	11	18	18	18
9	ROKAN HILIR	19	4	20	7	19	19	17
10	MERANTI	10	10	10	10	10	10	10
11	PEKANBARU	21	20	20	21	21	19	18
12	DUMAI	10	10	10	10	10	10	9
JUMLAH (KAB/KOTA)		228	178	222	178	217	208	177
PERSENTASE			78.1	97.4	78.1	95.2	91.2	77.6

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 51

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS ,KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
DAN CASE DETECTION RATE (CDR) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN			JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS					KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN
		SESUAI STANDAR	TIDAK SESUAI STANDAR	SESUAI STANDAR + TIDAK SESUAI STANDAR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	792	228	1,020	161	64.9	87	35.1	248	2
2	INDRAGIRI HULU	3,868	63	3,931	246	64.9	133	35.1	379	16
3	INDRAGIRI HILIR	1,265	532	1,797	334	62.2	203	37.8	537	20
4	PELALAWAN	2,728	107	2,835	330	62.0	202	38.0	532	77
5	SIAK	3,919	105	4,024	213	57.3	159	42.7	372	29
6	KAMPAR	3,315	228	3,543	606	65.3	322	34.7	928	56
7	ROKAN HULU	3,436	62	3,498	509	61.6	317	38.4	826	38
8	BENGGALIS	2,026	242	2,268	449	63.1	263	36.9	712	59
9	ROKAN HILIR	3,477	1,063	4,540	525	61.3	331	38.7	856	21
10	MERANTI	390	353	743	87	67.4	42	32.6	129	1
11	PEKANBARU	4,100	3,628	7,728	1,273	59.2	877	40.8	2,150	205
12	DUMAI	2,483	177	2,660	374	66.0	193	34.0	567	67
JUMLAH (KAB/KOTA)		31,799	6,788	38,587	5,107	62.0	3,129	38.0	8,236	591
JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS		38,587								
% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR						82.4				
CNR SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK									134	
PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) BERDASARKAN MODELING TAHUN									27,602	
CASE DETECTION RATE (%)									29.8	
CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)										17.8

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4 Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 52

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG TERDAFTAR DAN DIOBATI ^{*)}			JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOBATI ^{*)}			ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS						ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS						ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS						JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS	
		L	P	L + P	L	P	L + P	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		JUMLAH	%
								JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	KUANTAN SINGINGI	151	61	212	237	112	349	137	90.7	52	85.2	189	89.2	86	36.3	53	47.3	139	39.8	223	94.1	105	93.8	328	94.0	17	4.9
2	INDRAGIRI HULU	161	111	272	208	154	362	102	63.4	65	58.6	167	61.4	90	43.3	74	48.1	164	45.3	192	92.3	139	90.3	331	91.4	3	0.8
3	INDRAGIRI HILIR	252	141	393	360	194	554	118	46.8	77	54.6	195	49.6	212	58.9	106	54.6	318	57.4	330	91.7	183	94.3	513	92.6	12	2.2
4	PELALAWAN	173	105	278	375	234	609	170	98.3	104	99.0	274	98.6	202	53.9	129	55.1	331	54.4	372	99.2	233	99.6	605	99.3	2	0.3
5	SIAK	172	96	268	306	169	475	144	83.7	84	87.5	228	85.1	138	45.1	81	47.9	219	46.1	282	92.2	165	97.6	447	94.1	12	2.5
6	KAMPAR	263	136	399	628	384	1,012	234	89.0	123	90.4	357	89.5	359	57.2	240	62.5	599	59.2	593	94.4	363	94.5	956	94.5	9	0.9
7	ROKAN HULU	686	332	1,018	761	384	1,145	613	89.4	271	81.6	884	86.8	128	16.8	97	25.3	225	19.7	741	97.4	368	95.8	1109	96.9	20	1.7
8	BENGGALIS	341	139	480	535	280	815	210	61.6	88	63.3	298	62.1	271	50.7	173	61.8	444	54.5	481	89.9	261	93.2	742	91.0	11	1.3
9	ROKAN HILIR	419	215	634	821	481	1,302	195	46.5	98	45.6	293	46.2	559	68.1	355	73.8	914	70.2	754	91.8	453	94.2	1207	92.7	56	4.3
10	MERANTI	50	28	78	135	79	214	11	22.0	4	14.3	15	19.2	69	51.1	46	58.2	115	53.7	80	59.3	50	63.3	130	60.7	24	11.2
11	PEKANBARU	906	466	1,372	1,980	1,315	3,295	464	51.2	243	52.1	707	51.5	1,162	58.7	903	68.7	2,065	62.7	1,626	82.1	1,146	87.1	2,772	84.1	99	3.0
12	DUMAI	253	115	368	468	230	698	150	59.3	75	65.2	225	61.1	285	60.9	138	60.0	423	60.6	435	92.9	213	92.6	648	92.8	26	3.7
JUMLAH (KAB/KOTA)		3,827	1,945	5,772	6,814	4,016	10,830	2,548	66.6	1,284	66.0	3,832	66.4	3,561	52.3	2,395	59.6	5,956	55.0	6,109	89.7	3,679	91.6	9,788	90.4	291	2.7

Sumber: SITT 10.04

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

TABEL 53

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA	BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS			PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA	REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA								BATUK BUKAN PNEUMONIA		
			JUMLAH KUNJUNGAN	DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*)	PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR		PNEUMONIA		PNEUMONIA BERAT		JUMLAH			%			
							L	P	L	P	L	P	L + P		L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	KUANTAN SINGINGI	31,210	6,857	4,281	62.4	878	19	8	0	0	19	8	27	3.1	3,257	1,169	4,426
2	INDRAGIRI HULU	45,867	6,198	5,953	96.0	1,033	9	8	0	0	9	8	17	1.6	3,093	1,169	4,262
3	INDRAGIRI HILIR	67,458	5,137	4,302	83.7	1,777	28	33	0	0	28	33	61	3.4	4,212	4,390	8,602
4	PELALAWAN	60,297	11,132	10,673	95.9	1,354	132	74	0	0	132	74	206	15.2	4,242	4,142	8,384
5	SIAK	57,693	26,368	25,539	96.9	1,142	282	262	4	2	286	264	550	48.2	13,726	12,088	25,814
6	KAMPAR	95,746	12,167	10,642	87.5	2,166	117	90	9	2	126	92	218	10.1	8,751	8,850	17,601
7	ROKAN HULU	84,764	4,261	3,693	86.7	1,906	37	14	4	0	41	14	55	2.9	2,541	2,416	4,957
8	BENGKALIS	60,517	22,525	8,080	35.9	1,573	44	29	11	4	55	33	88	5.6	4,824	4,735	9,559
9	ROKAN HILIR	82,551	23,581	14,017	59.4	1,954	72	32	4	3	76	35	111	5.7	8,782	8,494	17,276
10	MERANTI	15,820	3,916	3,682	94.0	498	41	33	3	0	44	33	77	15.5	2,126	2,070	4,196
11	PEKANBARU	112,163	8,949	7,544	84.3	3,121	272	245	8	3	280	248	528	16.9	3,809	3,555	7,364
12	DUMAI	34,068	6,300	4,686	74.4	839	129	89	0	0	129	89	218	26.0	3,400	3,151	6,551
JUMLAH (KAB/KOTA)		748,154	137,391	103,092	75.0	18,241	1,182	917	43	14	1,225	931	2,156	11.8	62,763	56,229	118,992
Prevalensi pneumonia pada balita		2.67%															
Jml Puskesmas yg melakukan tatalaksana Standar minimal 60%					10												
% Puskesmas yg melakukan tatalaksana standar minimal 60%					83.3%												

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil risikodas

TABEL 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KELOMPOK UMUR	HIV			PROPORSI KELOMPOK UMUR
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	≤ 4 TAHUN	9	2	11	1.4
2	5 - 14 TAHUN	9	2	11	1.4
3	15 - 19 TAHUN	14	2	16	2.1
4	20 - 24 TAHUN	95	16	111	14.5
5	25 - 49 TAHUN	400	151	551	71.9
6	≥ 50 TAHUN	50	16	66	8.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		577	189	766	
PROPORSI JENIS KELAMIN		75.3	24.7		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					278,974
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					59,128
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					21.2

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 55

JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS BARU AIDS				KASUS KUMULATIF AIDS				JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	≤ 1 TAHUN	0	0	0	0.0	1	3	4	0.1	0	1	1	0.2
2	1 - 4 TAHUN	2	1	3	1.0	34	35	69	2.1	1	5	6	1.2
3	5 - 14 TAHUN	4	1	5	1.7	28	20	48	1.5	6	4	10	2.0
4	15 - 19 TAHUN	2	0	2	0.7	19	7	26	0.8	1	1	2	0.4
5	20 - 29 TAHUN	64	12	76	25.3	765	298	1063	32.5	104	50	154	30.4
6	30 - 39 TAHUN	82	32	114	38.0	921	339	1260	38.6	160	53	213	42.0
7	40 - 49 TAHUN	51	15	66	22.0	423	127	550	16.8	71	18	89	17.6
8	50 - 59 TAHUN	22	2	24	8.0	153	44	197	6.0	18	6	24	4.7
9	≥ 60 TAHUN	8	2	10	3.3	43	6	49	1.5	6	2	8	1.6
10	TIDAK DIKETAHUI	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		235	65	300		2,387	879	3,266		367	140	507	
PROPORSI JENIS KELAMIN		78.33	21.67	100.00		73.09	26.91			72.39	27.61	100.00	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru ditemukan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 56

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TARGET PENEMUAN		DIARE									
					DILAYANI				MENDAPAT ORALIT				MENDAPAT ZINC	
			BALITA		SEMUA UMUR		BALITA		SEMUA UMUR		BALITA			
			BALITA	SEMUA UMUR	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KUANTAN SINGINGI	330,078	66,016	33,008	807	1.2	2,797	8.5	680	84.3	2,364	84.5	755	93.6
2	INDRAGIRI HULU	449,531	89,906	44,953	1,157	1.3	3,758	8.4	1,101	95.2	3,464	92.2	1,137	98.3
3	INDRAGIRI HILIR	749,813	149,963	74,981	977	0.7	4,245	5.7	812	83.1	3,512	82.7	823	84.2
4	PELALAWAN	507,074	101,415	50,707	1,699	1.7	5,453	10.8	1,571	92.5	4,799	88.0	1,669	98.2
5	SIAK	502,199	100,440	50,220	1,807	1.8	6,318	12.6	1,802	99.7	6,316	100.0	1,503	83.2
6	KAMPAR	890,211	178,042	89,021	3,595	2.0	9,433	10.6	3,579	99.6	9,361	99.2	3,579	99.6
7	ROKAN HULU	718,321	143,664	71,832	931	0.6	2,494	3.5	848	91.1	2,411	96.7	865	92.9
8	BENGKALIS	579,430	115,886	57,943	2,400	2.1	8,010	13.8	1,677	69.9	5,513	68.8	576	24.0
9	ROKAN HILIR	731,783	146,357	73,178	4,253	2.9	11,359	15.5	4,353	102.4	11,318	99.6	4,253	100.0
10	MERANTI	186,629	37,326	18,663	756	2.0	2,336	12.5	749	99.1	2,324	99.5	755	99.9
11	PEKANBARU	1,169,070	233,814	116,907	1,380	0.6	5,450	4.7	1,354	98.1	5,138	94.3	1,379	99.9
12	DUMAI	314,166	62,833	31,417	896	1.4	3,100	9.9	733	81.8	2,851	92.0	690	77.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		7,128,305	1,425,661	712,831	20,658	1.4	64,753	9.1	19,259	93.2	59,371	91.7	17,984	87.1
ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK				270	2.9		9.1		2.7		8.3		0.3	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

TABEL 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS BARU								
		Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	2	0	2	2	0	2
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	7	0	7	7	0	7
3	INDRAGIRI HILIR	1	5	6	4	32	36	5	37	42
4	PELALAWAN	0	0	0	4	5	9	4	5	9
5	SIAK	0	0	0	3	1	4	3	1	4
6	KAMPAR	1	0	1	9	0	9	10	0	10
7	ROKAN HULU	0	0	0	4	0	4	4	0	4
8	BENGKALIS	0	0	0	2	1	3	2	1	3
9	ROKAN HILIR	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10	MERANTI	0	0	0	3	0	3	3	0	3
11	PEKANBARU	2	0	2	7	0	7	9	0	9
12	DUMAI	0	0	0	3	1	4	3	1	4
JUMLAH (KAB/KOTA)		4	5	9	49	40	89	53	45	98
PROPORSI JENIS KELAMIN		44.4	55.6		55.1	44.9		54.1	45.9	
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK								0.7	0.6	1.4

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN,
PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS BARU							
		PENDERITA KUSTA	CACAT TINGKAT 0		CACAT TINGKAT 2		PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN		PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KUANTAN SINGINGI	2	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0
2	INDRAGIRI HULU	4	4	100.0	0	0.0	1	25.0	0
3	INDRAGIRI HILIR	30	25	83.3	2	6.7	1	3.3	0
4	PELALAWAN	9	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0
5	SIAK	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0
6	KAMPAR	8	8	100.0	0	0.0	1	0.0	0
7	ROKAN HULU	3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0
8	BENGKALIS	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0
9	ROKAN HILIR	11	6	54.5	2	18.2	1	9.1	0
10	MERANTI	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0
11	PEKANBARU	3	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0
12	DUMAI	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		84	71	84.5	5	6.0	4	4.8	0
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK					0.07				

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS TERDAFTAR								
		Pausi Basiler/Kusta kering			Multi Basiler/Kusta Basah			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	2	0	2	2	0	2
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	7	0	7	7	0	7
3	INDRAGIRI HILIR	1	5	6	4	32	36	5	37	42
4	PELALAWAN	0	0	0	4	5	9	4	5	9
5	SIAK	0	0	0	3	1	4	3	1	4
6	KAMPAR	1	0	1	9	0	9	10	0	10
7	ROKAN HULU	0	0	0	4	0	4	4	0	4
8	BENGKALIS	0	0	0	2	1	3	2	1	3
9	ROKAN HILIR	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10	MERANTI	0	0	0	3	0	3	3	0	3
11	PEKANBARU	2	0	2	7	0	7	9	0	9
12	DUMAI	0	0	0	3	1	4	3	1	4
JUMLAH (KAB/KOTA)		4	5	9	49	40	89	53	45	98
ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK										0.14

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 60

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KUSTA (PB)									KUSTA (MB)								
		TAHUN -1									TAHUN -2								
		PENDERITA PB ^a			RFT PB						PENDERITA MB ^b			RFT MB					
		L	P	L+P	L		P		L + P		L	P	L+P	L		P		L + P	
JUMLAH	%				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100.0	0	0	2	100
2	Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100.0	0	0	1	100
3	Indragiri Hilir	1	5	6	1	100	5	0	6	100	29	0	29	27	93.1	0	0	27	93
4	Pelalawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	16	14	100.0	2	0	16	100
5	Siak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0.0	0	0	1	0
6	Kampar	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	10	7	77.8	1	0	8	80
7	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0.0	0	0	3	0
8	Bengkalis	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	0	5	5	100.0	0	0	5	100
9	Rokan Hilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	18	8	80.0	5	63	13	72
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	100.0	0	0	3	100
11	Kota Pekanbaru	2	0	2	0	0	0	0	0	0	18	3	21	15	83.3	3	100	18	0
12	Kota Dumai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	100.0	0	0	4	100
JUMLAH (KAB/KOTA)		4	5	9	3	75.0	5	100	8	88.9	99	14	113	90	90.9	11	79	101	89

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan :

- a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu
- b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

TABEL 61

JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN	JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)
1	2	3	4
1	KUANTAN SINGINGI	109,852	1
2	INDRAGIRI HULU	149,777	1
3	INDRAGIRI HILIR	245,914	0
4	PELALAWAN	169,316	5
5	SIAK	167,466	2
6	KAMPAR	296,704	0
7	ROKAN HULU	239,721	1
8	BENGKALIS	192,864	0
9	ROKAN HILIR	243,924	0
10	MERANTI	64,235	1
11	PEKANBARU	389,725	1
12	DUMAI	104,621	1
JUMLAH (KAB/KOTA)		2,374,119	13
AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN			0.5

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 62

JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KASUS PD3I																	
		DIFTERI				PERTUSIS			TETANUS NEONATORUM				HEPATITIS B			SUSPEK CAMPAK			
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL	L	P	L+P	JUMLAH KASUS			MENINGGAL	JUMLAH KASUS						
		L	P	L+P					L	P	L+P		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	KUANTAN SINGINGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
2	INDRAGIRI HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PELALAWAN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5	SIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	KAMPAR	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	ROKAN HULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
8	BENGKALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ROKAN HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MERANTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14
11	DUMAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	24
CASE FATALITY RATE (%)					0							0							
INSIDENS RATE SUSPEK CAMPAK																58.3	41.7	40.0	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 63

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KLB DI DESA/KELURAHAN		
		JUMLAH	DITANGANI <24 JAM	%
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	5	4	100
2	INDRAGIRI HULU	1	1	0
3	INDRAGIRI HILIR	1	1	0
4	PELALAWAN	2	1	0
5	SIAK	0	0	100
6	KAMPAR	4	3	100
7	ROKAN HULU	0	0	0
8	BENGKALIS	0	0	100
9	ROKAN HILIR	31	31	0
12	MERANTI	0	0	0
10	PEKANBARU	2	1	50
11	DUMAI	0	0	100
JUMLAH (KAB/KOTA)		46	42	91.3

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Laporan STP KLB Pkm Se Prov Riau

NO	JENIS KEJADIAN LUAR BIASA	YANG TERSERANG		WAKTU KEJADIAN (TANGGAL)			JUMLAH PENDERITA			KELOMPOK UMUR PENDERITA														JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK TERANCAM			ATTACK RATE (%)			CFR (%)		
		JUMLAH KEK	JUMLAH DESA/KE L	DIKETAHUI	DITANGGULANGI	AKHIR	L	P	L+P	0-7 HARI	8-28 HARI	1-11 BLN	1-4 THN	5-9 THN	10-14 THN	15-19 THN	20-44 THN	45-54 THN	55-59 THN	60-69 THN	70+ THN	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
38	Rabies	1	1	2020-04-22	2020-04-22	2020-04-29	2	3	5	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	20,837	20,837	41,674	0.01	0.01	0.01	0	0	0		
39	Rabies	1	1	2020-11-09	2020-11-09	2020-11-16	3	1	4	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	20,837	20,837	41,674	0.01	0.00	0.01	0	0	0			
40	Rabies	1	1	2021-12-12	2021-12-12	2021-12-19	2	3	5	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	20,837	20,837	41,674	0.01	0.01	0.01	0	0	0			
41	Rabies	1	1	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-13	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8,502	8,501	17,003	0.01	0.00	0.01	0	0	0			
42	Rabies	1	1	2021-01-10	2021-01-10	2021-01-17	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8,502	8,501	17,003	0.01	0.00	0.01	0	0	0			
43	Rabies	1	1	2021-01-11	2021-01-11	2021-01-18	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26,520	26,520	53,040	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
44	Rabies	1	1	2021-01-24	2021-01-24	2021-02-01	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26,520	26,520	53,040	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
45	Rabies	1	1	2021-08-25	2021-08-25	2020-09-02	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	26,520	26,520	53,040	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
46	Rabies	1	1	2021-12-05	2021-12-05	2021-12-12	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26,520	26,520	53,040	0.01	0.00	0.00	0	0	0			
TOTAL		46	46				1113	875	1988	0	0	2	23	38	196	225	1195	292	13	0	5	8	891,998	894,330	1,786,328	0.12	0.10	0.11	0.09	0.34	0.40		

KASUS COVID-19 MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	2	3	4	5	7	8
1	Kuantan Singingi	628	615	13	98	2.07
2	Indragiri Hulu	972	951	21	98	2.16
3	Indragiri Hilir	682	649	33	95	4.84
4	Pelalawan	1,042	1,030	12	99	1.15
5	Siak	1,870	1,828	42	98	2.25
6	Kampar	1,990	1,920	70	96	3.52
7	Rokan Hulu	578	545	33	94	5.71
8	Bengkalis	1,752	1,707	45	97	2.57
9	Rokan Hilir	912	887	25	97	2.74
10	Kep. Meranti	221	219	2	99	0.90
11	Kota Pekanbaru	11,680	11,407	273	98	2.34
12	Kota Dumai	2,321	2,282	39	98	1.68
13	Luar daerah	272	267	5	98	1.84
JUMLAH (KAB/KOTA)		24,920	24,307	613	1,266	2.46

KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	0-2 TAHUN		3-6 TAHUN		7-12 TAHUN		13-15 TAHUN		16-18 TAHUN		19-30 TAHUN		31-45 TAHUN		46-59 TAHUN		60+ TAHUN		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kuantan Singingi	2	1	4	6	9	7	6	12	9	9	90	95	143	90	63	49	19	14	345	283
2	Indragiri Hulu	3	3	5	3	32	23	122	37	46	27	99	119	131	118	84	71	24	25	546	426
3	Indragiri Hilir	9	8	10	9	22	15	15	14	12	18	77	79	103	116	61	58	34	22	343	339
4	Pelalawan	11	9	16	9	34	30	24	18	31	22	149	100	195	162	134	72	12	14	606	436
5	Siak	23	30	24	33	61	71	37	23	41	43	206	178	294	296	246	170	49	45	981	889
6	Kampar	30	29	19	23	47	48	29	24	30	30	206	297	264	319	225	218	79	73	929	1061
7	Rokan Hulu	4	3	3	1	7	12	5	8	6	6	46	76	80	120	76	84	30	11	257	321
8	Bengkalis	11	17	19	21	44	29	28	32	30	32	185	236	248	276	225	190	69	60	859	893
9	Rokan Hilir	9	6	9	13	25	30	14	9	7	19	85	133	137	168	91	95	32	30	409	503
10	Kep. Meranti	3	2	2	0	2	4	1	4	4	5	47	19	47	28	16	17	15	5	137	84
11	Kota Pekanbaru	117	111	137	109	254	195	144	135	149	182	1378	1638	2051	1692	1266	1150	512	460	6008	5672
12	Kota Dumai	28	18	19	34	73	48	33	27	40	45	362	276	417	335	244	179	83	60	1299	1022
13	Luar daerah	2	0	1	1	2	0	1	2	1	5	66	28	82	14	37	18	4	8	196	76
JUMLAH (KAB/KOTA)		252	237	268	262	612	512	459	345	406	443	2996	3274	4192	3734	2768	2371	962	827	12915	12005

TABEL 65

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)								
		JUMLAH KASUS			MENINGGAL			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KUANTAN SINGINGI	153	149	302	1	2	3	0.7	1.3	1.0
2	INDRAGIRI HULU	92	75	167	1	0	1	1.1	0.0	0.6
3	INDRAGIRI HILIR	24	21	45	1	2	3	4.2	9.5	6.7
4	PELALAWAN	68	82	150	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5	SIAK	153	162	315	1	2	3	0.7	1.2	1.0
6	KAMPAR	145	121	266	6	2	8	4.1	1.7	3.0
7	ROKAN HULU	58	90	148	0	3	3	0.0	3.3	2.0
8	BENGGALIS	290	219	509	6	4	10	2.1	1.8	2.0
9	ROKAN HILIR	15	23	38	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10	MERANTI	50	72	122	0	1	1	0.0	1.4	0.8
11	PEKANBARU	278	223	501	3	1	4	1.1	0.4	0.8
12	DUMAI	174	186	360	0	2	2	0.0	1.1	0.6
JUMLAH (KAB/KOTA)		1,500	1,423	2,923	19	19	38	1.3	1.3	1.3
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK		21.0	20.0	41.0						

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 66

KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	MALARIA																
		SUSPEK	KONFIRMASI LABORATORIUM			% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF			PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL			CFR			
			MIKROSKOPIS	RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)	TOTAL		L	P	L+P			L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	KUANTAN SINGINGI	450	172	278	450	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
2	INDRAGIRI HULU	65	2	57	59	90.8	1	0	1	1	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
3	INDRAGIRI HILIR	34	11	24	35	102.9	1	0	1	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
4	PELALAWAN	356	346	90	436	122.5	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
5	SIAK	223	1	219	220	98.7	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
6	KAMPAR	4	4	0	4	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
7	ROKAN HULU	40	0	40	40	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
8	BENGGALIS	382	77	265	342	89.5	8	3	11	11	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
9	ROKAN HILIR	9,590	5,005	1,124	6,129	63.9	1,036	674	1,710	1,710	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
10	MERANTI	58	47	0	47	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
11	PEKANBARU	27	1	26	27	100.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
12	DUMAI	202	177	25	202	100.0	1	1	2	2	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
JUMLAH (KAB/KOTA)		11,431	5,843	2,148	7,991	69.9	1,047	678	1,725	1,725	100.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK							0.147	0.095	0.242									

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 67

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDERITA KRONIS FILARIASIS															
		KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA			KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN			KASUS KRONIS PINDAH			KASUS KRONIS MENINGGAL			JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	KUANTAN SINGINGI	4	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
2	INDRAGIRI HULU	20	14	34	1	1	2	0	0	0	0	0	0	21	15	36	
3	INDRAGIRI HILIR	27	10	37	0	0	0	9	2	11	4	2	6	14	6	20	
4	PELALAWAN	10	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	12	
5	SIAK	3	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	
6	KAMPAR	3	2	5	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	1	2	
7	ROKAN HULU	4	2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	
8	BENGKALIS	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	
9	ROKAN HILIR	15	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	22	
10	MERANTI	9	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	
11	PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	DUMAI	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
JUMLAH (KAB/KOTA)		99	57	156	1	1	2	11	3	14	6	2	8	83	53	136	

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

TABEL 68

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	29,525	29,756	59,281	1,485	5.0	2,540	8.5	4,025	6.8
2	INDRAGIRI HULU	42,579	43,993	86,572	4,688	11.0	7,049	16.0	11,737	13.6
3	INDRAGIRI HILIR	88,664	72,544	161,208	12,187	13.7	10,808	14.9	22,995	14.3
4	PELALAWAN	13,622	20,150	33,772	13,622	100.0	20,150	100.0	33,772	100.0
5	SIAK	34,569	32,335	66,904	7,282	21.1	10,533	32.6	17,815	26.6
6	KAMPAR	89,261	87,407	176,668	3,140	3.5	5,414	6.2	8,554	4.8
7	ROKAN HULU	67,877	64,551	132,428	5,337	7.9	7,789	12.1	13,126	9.9
8	BENGKALIS	201,589	187,769	389,358	13,367	6.6	19,274	10.3	32,641	8.4
9	ROKAN HILIR	69,250	49,756	119,006	28,360	41.0	26,899	54.1	55,259	46.4
10	MERANTI	5,546	8,135	13,681	1,393	25.1	1,344	16.5	2,737	20.0
11	PEKANBARU	123,531	118,749	242,280	8,678	7.0	10,990	9.3	19,668	8.1
12	DUMAI	34,847	33,122	67,969	5,036	14.5	8,562	25.8	13,598	20.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		800,860	748,267	1,549,127	104,575	13.1	131,352	17.6	235,927	15.2

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 69

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	2,637	1,449	54.9
2	INDRAGIRI HULU	2,717	2,524	92.9
3	INDRAGIRI HILIR	3,396	1,398	41.2
4	PELALAWAN	14,072	17,072	121.3
5	SIAK	17,170	6,396	37.3
6	KAMPAR	5,621	3,084	54.9
7	ROKAN HULU	5,871	5,149	87.7
8	BENGKALIS	9,263	9,263	100.0
9	ROKAN HILIR	5,901	5,714	96.8
12	MERANTI	2,527	1,911	75.6
10	PEKANBARU	18,044	6,860	38.0
11	DUMAI	3,577	2,916	81.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		90,796	63,736	70.2

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 70

CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)
 PROVINSI RIAU
 TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS*	PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN	PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA		IVA POSITIF		CURIGA KANKER		TUMOR/BENJOLAN	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KUANTAN SINGINGI	11	835	663	79.4	5	0.8	4	0.6	19	2.9
2	INDRAGIRI HULU	6	34,727	186	0.5	5	2.7	12	6.5	4	2.2
3	INDRAGIRI HILIR	30	104,682	94	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	PELALAWAN	14	32,433	1,198	3.7	6	0.5	0	0.0	0	0.0
5	SIAK	15	74,847	52	0.1	0	0.0	0	0.0	4	7.7
6	KAMPAR	31	111,875	11,332	10.1	193	1.7	20	0.2	73	0.6
7	ROKAN HULU	22	103,714	1,323	1.3	6	0.5	2	0.2	43	3.3
8	BENGGALIS	18	82,030	2,032	2.5	9	0.4	1	0.0	2	0.1
9	ROKAN HILIR	20	103,456	330	0.3	44	13.3	0	0.0	12	3.6
12	MERANTI	10	27,415	58	0.2	0	0.0	0	0.0	2	3.4
10	PEKANBARU	21	177,745	224	0.1	12	5.4	2	0.9	5	2.2
11	DUMAI	10	49,512	197	0.4	35	17.8	0	0.0	0	0.0
JUMLAH (KAB/KOTA)		208	903,271	17,689	2.0	315	1.8	41	0.2	164	0.9

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

Ket: IVA: Inspeksi Visual dengan Asam asetat

* diisi dengan checklist (V)

TABEL 71

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KAB/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT		
		SASARAN ODGJ BERAT	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	KUANTAN SINGINGI	495	386	78.0
2	INDRAGIRI HULU	641	393	61.3
3	INDRAGIRI HILIR	1,073	977	91.1
4	PELALAWAN	761	245	32.2
5	SIAK	642	461	71.8
6	KAMPAR	1,218	781	64.1
7	ROKAN HULU	1,077	573	53.2
8	BENGKALIS	884	467	52.8
9	ROKAN HILIR	822	519	63.1
12	MERANTI	281	281	100.0
10	PEKANBARU	1,754	643	36.7
11	DUMAI	471	407	86.4
JUMLAH (KAB/KOTA)		10,119	6,133	60.6

Sumber: Bidang P2P - Dinkes Prov. Riau

TABEL 72

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SARANA AIR MINUM	INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL)				PEMERIKSAAN			
			JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH+ SEDANG	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL	%	JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	279	265	94.98	259	97.7	203	72.8	118	58.1
2	INDRAGIRI HULU	510	324	63.53	190	58.6	39	7.6	21	53.8
3	INDRAGIRI HILIR	181	80	44.20	30	37.5	30	16.6	30	100.0
4	PELALAWAN	227	145	63.88	141	97.2	120	52.9	65	54.2
5	SIAK	284	238	83.80	206	86.6	106	37.3	82	77.4
6	KAMPAR	962	608	63.20	415	68.3	172	17.9	168	97.7
7	ROKAN HULU	589	288	48.90	86	29.9	60	10.2	55	91.7
8	BENGGALIS	350	251	71.71	215	85.7	239	68.3	69	28.9
9	ROKAN HILIR	277	274	98.92	231	84.3	101	36.5	66	65.3
10	MERANTI	97	85	87.63	84	98.8	67	69.1	45	67.2
11	PEKANBARU	689	419	60.81	413	98.6	250	36.3	207	82.8
12	DUMAI	317	295	93.06	275	93.2	264	83.3	217	82.2
JUMLAH (KAB/KOTA)		4,762	3,272	68.71	2,545	77.8	1,651	34.7	1,143	69.2

Sumber: Profil Kesehatan Kab/kota

TABEL 73

JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUANTAN SINGINGI	82,520	5,116	3,836	8,600	6,450	66,234	49,676	59,962	72.7
2	INDRAGIRI HULU	112,383	1,420	439	17,436	4,698	87,105	22,732	27,868	24.8
3	INDRAGIRI HILIR	187,453	16,237	7,770	62,517	10,425	47,503	47,503	65,698	35.0
4	PELALAWAN	126,769	3,767	944	26,020	6,505	60,344	15,086	22,535	17.8
5	SIAK	125,550	1,940	485	18,632	4,658	88,625	22,156	27,299	21.7
6	KAMPAR	222,553	41,427	6,548	13,099	12,001	147,598	152,393	170,942	76.8
7	ROKAN HULU	179,580	3,633	3,633	16,577	4,144	101,327	25,332	33,109	18.4
8	BENGKALIS	144,858	3,206	3,494	39,154	33,602	98,464	86,666	123,761	85.4
9	ROKAN HILIR	182,946	11,875	3,059	32,898	10,581	67,040	18,790	32,430	17.7
10	MERANTI	46,657	1,462	1,149	25,847	23,167	17,602	19,047	43,362	92.9
11	PEKANBARU	292,268	7,611	7,263	14,387	16,666	185,572	180,125	204,055	69.8
12	DUMAI	78,542	1,392	956	5,123	1,514	50,529	17,343	19,813	25.2
JUMLAH KAB/KOTA		1,782,076	99,086	39,576	280,290	134,410	1,017,943	656,847	830,833	46.62

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

TABEL 74

DESA YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)					
			DESA MELAKSANAKAN STBM		DESA STOP BABS(SBS)		DESA STBM	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KUANTAN SINGINGI	229	121	52.8	85	37.1	5	2.2
2	INDRAGIRI HULU	194	87	44.8	78	40.2	13	6.7
3	INDRAGIRI HILIR	236	194	82.2	35	14.8	195	82.6
4	PELALAWAN	118	100	84.7	66	55.9	54	45.8
5	SIAK	131	131	100.0	54	41.2	0	0.0
6	KAMPAR	250	249	99.6	130	52.0	130	52.0
7	ROKAN HULU	148	142	95.9	72	48.6	142	95.9
8	BENGKALIS	155	138	89.0	86	55.5	84	54.2
9	ROKAN HILIR	198	105	53.0	35	17.7	116	58.6
10	MERANTI	103	93	90.3	36	35.0	93	90.3
11	PEKANBARU	83	70	84.3	34	41.0	32	38.6
12	DUMAI	33	33	100.0	15	45.5	15	45.5
JUMLAH (KAB/KOTA)		1878	1463	77.90	726	38.66	879	46.81

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

TABEL 75

PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TTU YANG ADA								TTU MEMENUHI SYARAT KESEHATAN															
		SARANA PENDIDIKAN			SARANA KESEHATAN		TEMPAT IBADAH	PASAR	JUMLAH TTU YANG ADA	SARANA PENDIDIKAN				SARANA KESEHATAN				TEMPAT IBADAH		PASAR		JUMLAH TOTAL			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PUSKES MAS	RUMAH SAKIT UMUM				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%							Σ	%
							Σ	%	Σ									%	Σ	%	Σ	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	KUANTAN SINGINGI	265	103	42	23	2	920	68	1,439	187	70.6	63	61.2	32	76.2	23	100	2	100	650	70.7	14	20.6	971	67.5
2	INDRAGIRI HULU	335	105	61	20	3	1,015	62	1,289	81	24.2	23	21.9	18	29.5	20	100	3	100	294	29.0	3	4.8	442	34.3
3	INDRAGIRI HILIR	367	128	83	26	4	1,381	171	1,278	54	14.7	37	28.9	0	0.0	26	100	4	100	150	10.9	20	11.7	291	22.8
4	PELALAWAN	240	95	52	14	4	684	88	805	162	67.5	63	66.3	32	61.5	14	100	4	100	454	66.4	40	45.5	769	95.5
5	SIAK	250	142	75	15	2	562	8	1,162	150	60.0	49	34.5	28	37.3	15	100	2	100	332	59.1	8	100.0	584	50.3
6	KAMPAR	524	217	123	31	6	1,707	116	2,661	352	67.2	152	70.0	89	72.4	31	100	6	100	1,309	76.7	66	56.9	2,005	75.3
7	ROKAN HULU	404	149	88	21	5	1,213	164	2,023	125	30.9	45	30.2	30	34.1	21	100	5	100	585	48.2	57	34.8	868	42.9
8	BENGKALIS	381	159	101	18	7	1,088	61	1,815	167	43.8	77	48.4	44	43.6	18	100	7	100	573	52.7	16	26.2	902	49.7
9	ROKAN HILIR	398	179	97	19	6	1,278	80	1,981	265	66.6	124	69.3	69	71.1	19	100	6	100	763	59.7	36	45.0	1,282	64.7
10	MERANTI	192	84	47	10	1	488	10	823	76	39.6	26	31.0	6	12.8	10	100	1	100	139	28.5	10	100.0	268	32.6
11	PEKANBARU	341	165	124	21	31	720	47	1,406	255	74.8	131	79.4	96	77.4	21	100	31	100	502	69.7	27	57.4	1,063	75.6
12	DUMAI	118	49	37	10	3	326	10	550	110	93.2	46	93.9	31	83.8	10	100	3	100	287	88.0	3	30.0	490	89.1
JUMLAH (KAB/KOTA)		3815	1575	930	228	74	11382	885	17232	1984	52.005	836	53.079	475	51.075	228	100	74	100	6038	53.049	300	33.898	9935	57.654

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes P

TABEL 76

TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	TPM YANG ADA					TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN									
		JASA BOGA	RUMAH MAKAN/RESTORAN	DEPOT AIR MINUM (DAM)	MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN	JUMLAH TPM YANG ADA	JASA BOGA		RUMAH MAKAN/RESTORAN		DEPOT AIR MINUM (DAM)		MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN		JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN	
							JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KUANTAN SINGINGI	385	247	279	981	1,892	155	40.3	95	38.5	118	42.3	264	26.9	561	29.7
2	INDRAGIRI HULU	99	412	383	799	1,693	31	31.3	198	48.1	123	32.1	105	13.1	679	40.1
3	INDRAGIRI HILIR	136	307	176	669	1,286	137	100.7	303	98.7	171	97.2	231	34.5	457	35.5
4	PELALAWAN	43	292	216	923	1,474	9	20.9	61	20.9	100	46.3	31	3.4	150	10.2
5	SIAK	15	205	248	240	708	6	40.0	106	51.7	171	69.0	58	24.2	314	44.4
6	KAMPAR	205	517	416	1,937	3,075	153	74.6	319	61.7	312	75.0	960	49.6	2,117	68.8
7	ROKAN HULU	86	1,067	209	1,065	2,427	17	19.8	134	12.6	129	61.7	303	28.5	314	12.9
8	BENGGALIS	67	334	311	952	1,664	49	73.1	113	33.8	106	34.1	355	37.3	211	12.7
9	ROKAN HILIR	105	339	292	1,598	2,128	70	66.7	194	57.2	195	66.8	294	18.4	544	25.6
10	MERANTI	51	37	43	273	404	15	29.4	5	13.5	38	88.4	32	11.7	90	22.3
11	PEKANBARU	127	629	666	296	1,718	82	64.6	434	69.0	548	82.3	158	53.4	1,288	75.0
12	DUMAI	16	166	312	441	935	10	62.5	123	74.1	266	85.3	228	51.7	682	72.9
JUMLAH (KAB/KOTA)		1335	4552	3551	10174	19404	734	54.9813	2085	45.804	2277	64.1228	3019	29.6737	7407	38.17

Sumber: Bidang Kesmas - Dinkes Prov. Riau

RUMAH SAKIT MENURUT KABUPATEN/ KOTA
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit								Rumah Sakit					Kepemilikan						Status Akreditasi					Rating							
		Swasta				Pemerintah				Jumlah	Swasta		Pemerintah			Jumlah	Keme nkes	Pemp rov	Pm kab/ko ta	TNI/Pol ri	BUMN	Swast a	Jumla h	Paripu ma	Utama	Madya	Dasar	Perda na	Bintan g 5	Bintan g 4	Bintan g 3	Bintan g 2	Bintan g 1
		A	B	C	D	A	B	C	D		Umum	Khusus	Umum	Khusus																			
1	Kuantan Singingi	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	
2	Indragiri Hulu	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	1	1	0	3	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	
3	Indragiri Hilir	0	0	0	1	0	0	1	2	4	1	0	3	0	4	0	0	3	0	0	1	4	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	
4	Pelalawan	0	0	1	2	0	0	1	0	4	3	0	1	0	4	0	0	1	0	0	3	4	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	
5	Siak	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
6	Kampar	0	0	3	1	0	0	1	1	6	1	3	2	0	6	0	0	1	0	1	4	6	0	0	0	1	5	0	0	0	1	5	
7	Rokan Hulu	0	0	2	2	0	0	1	0	5	4	0	1	0	5	0	0	1	0	0	4	5	0	0	1	0	3	0	0	1	0	3	
8	Bengkalis	0	0	1	4	0	1	1	0	7	5	0	2	0	7	0	0	2	0	0	5	7	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	
9	Rokan Hilir	0	0	1	4	0	0	1	0	6	5	0	1	0	6	0	0	1	0	0	5	6	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	
10	Kep. Meranti	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
11	Kota Pekanbaru	0	4	18	1	1	1	4	2	31	16	7	7	1	31	1	3	1	3	0	23	31	8	2	2	1	12	8	2	2	1	12	
12	Kota Dumai	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	3	0	3	0	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
JUMLAH (KAB/KOTA)		0	4	28	16	1	3	13	9	74	36	12	25	1	74	1	3	16	4	2	48	74	13	4	7	4	32	13	4	7	4	32	

REKAP LAPORAN AKREDITASI PUSKESMAS PROVINSI RIAU
(Update 22 Januari 2021)

NO	KABUPATEN/KOTA	Kecamatan			Puskesmas								Rencana Survei Akreditasi 2020		
		Jlh	Jlh yang memiliki Pkm terakreditasi	%	Jlh	Rawat Inap	Non rawat Inap	Jlh Pkm. Registrasi		Akreditasi		BLUD	Kec	Puskesmas	
								Sudah	Belum	Jlh yang terakreditasi	%			Pra	Pasca
1	KUANTAN SINGINGI	15	15	100	25	14	11	25	-	16	64.00	-	0	9	4
2	INDRAGIRI HULU	14	14	100	20	9	11	20	-	18	90.00	-	0	2	8
3	INDRAGIRI HILIR	20	20	100	30	23	3	26	4	26	100.00	25	0	0	6
4	PELALAWAN	12	12	100	14	8	6	14	-	14	100.00	14	0	0	4
5	SIAK	14	14	100	15	7	8	15	-	15	100.00	15	0	0	6
6	KAMPAR	21	21	100	31	8	23	31	-	31	100.00	31	0	0	10
7	ROKAN HULU	16	16	100	22	8	13	22	-	21	95.45	21	0	0	8
8	BENGKALIS	11	10	91	19	7	11	18	1	16	88.89	-	1	2	4
9	ROKAN HILIR	18	15	83	20	10	10	20	-	17	85.00	20	2	2	5
10	KEPULAUAN MERANTI	9	8	89	10	5	5	10	-	9	90.00	-	1	1	4
11	PEKANBARU	12	12	100	21	6	15	21	-	21	100.00	21	0	0	8
12	DUMAI	7	7	100	10	3	7	10	-	10	100.00	10	0	0	2
JUMLAH (KAB/KOTA)		169	164	97.04	237	108	123	232	5	214	92.24	157	4	16	69

**SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	PEDAGANG BESAR FARMASI	APOTEK	APOTEK PRB	TOKO OBAT	TOKO ALKES	PIRT	KOSMETIK	PENYALUR ALAT KESEHATAN
1	KUANTAN SINGINGI	0	28	-	-	-	-	-	-
2	INDRAGIRI HULU	0	41	0	17	0	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	0	25	-	-	-	-	-	-
4	PELALAWAN	0	34	0	49	0	0	0	0
5	SIAK	0	34	-	-	-	-	-	-
6	KAMPAR	1	67	0	52	0	0	0	0
7	ROKAN HULU	0	51	-	-	-	-	-	-
8	BENGKALIS	0	50	0	42	0	0	0	0
9	ROKAN HILIR	0	38	-	-	-	-	-	-
10	MERANTI	0	17	-	-	-	-	-	-
11	PEKANBARU	43	270	0	36	11	-	-	-
12	DUMAI	1	42	2	104	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		45	697	2	300	11	0	0	0